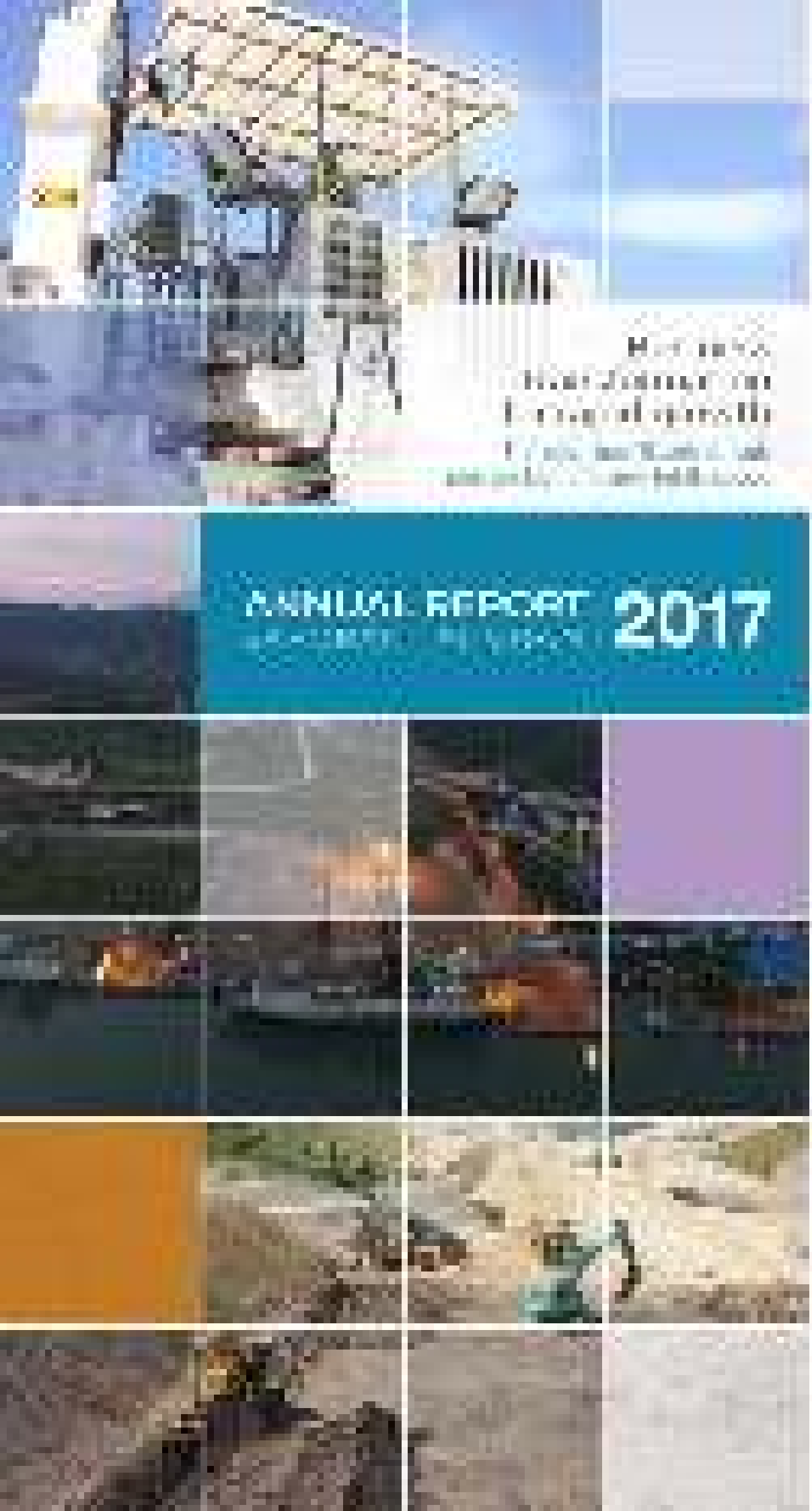

ANNUAL REPORT 2017

Cover Story

Latar Belakang Design Cover

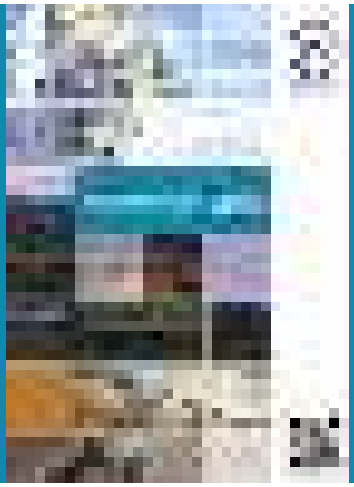

Business transformation for rapid growth

Pada umumnya transformasi bisnis dilakukan oleh perusahaan – perusahaan ketika industri yang digeluti perusahaan-perusahan tersebut, dan atau perusahaan yang bersangkutan sedang berada di dalam masa penuh tantangan. Tetapi PT PP Presisi Tbk ("Perseroan", "PP Presisi") justru melakukan transformasi bisnis pada saat industri yang ditekuni sedang booming dan Perseroan juga sedang tumbuh pesat untuk mencapai pertumbuhan yang signifikan. Hal ini dilakukan Perseroan untuk memperoleh percepatan di dalam pertumbuhan Perseroan.

Perseroan dari tahun 2014 hingga tahun 2017 telah melakukan transformasi bisnis dari bisnis *formwork* dan penyewaan alat berat yang merupakan *core business* Perseroan menjadi Perusahan konstruksi terintegrasi berbasis alat berat yang terkemuka di Indonesia yang mampu memberikan *value added* kepada para konsumennya melalui 5 lini bisnis yang dimilikinya, yaitu *civil work, ready mix, foundation, formwork* dan penyewaan alat berat.

Transformasi bisnis yang telah dilakukan Perseroan dalam kurun waktu 2014 hingga 2017 telah mengantarkan Perseroan pada Tingkat Pertumbuhan Tahunan Majemuk/*Compound Annual Growth Rate* (CAGR) Pendapatan sebesar 115%. Sebuah pertumbuhan yang sangat pesat.

Transformasi bisnis yang dilakukan Perseroan mencapai puncaknya pada tahun 2017 dengan diakuisisinya PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("LMA") yang menandakan tonggak sejarah Perseroan melakukan pertumbuhan secara inorganik untuk melengkapi pertumbuhan secara organik yang selama ini dilakukan. Pertumbuhan secara inorganik tersebut mendorong Perseroan untuk bertumbuh lebih cepat karena adanya peningkatan *engineering capacity* dan terciptanya *value*.

In general business transformation is pursued by companies when its industry and or those company are in the challenging period. However, PT PP Presisi Tbk ("the Company", "PP Presisi") is transforming its business when the industry is booming and the Company is also growing rapidly to achieve significant growth. The Company has pursued its transformation to accelerate growth.

From 2014 to 2017, the Company has transformed the business from the formwork business and heavy equipment rental which is core business of the Company into a leading integrated heavy equipment based construction company in Indonesia that is able to provide value added to its customers through its 5 business lines, civil work, ready mix, foundation, formwork and heavy equipment rental.

The business transformation that has been carried out by the Company in the period 2014 to 2017 has led the Company to a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 115%. It is a very rapid growth.

The Company's business transformation reached its peak in 2017 with the acquisition of PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("LMA") which marks the milestone of the Company's inorganic growth to complement the organic growth that has been pursued. Such inorganic growth encourages the Company to grow rapidly in order to increase engineering capacity and value creation.

CONTENT

DAFTAR ISI

BAB-1

Chapter-1

IKHTISAR PERUSAHAAN	CORPORATE HIGHLIGHT	HALAMAN Page
Sekilas Transformasi Bisnis	Overview of Business Transformation	10
Penawaran Perdana Saham (IPO)	Initial Public Offering (IPO)	12
Grafik Keuangan	Financial Graphics	15
Ikhtisar Keuangan	Financial Highlights	18
Ikhtisar Saham	Stock Overview	20

BAB-2

Chapter-2

LAPORAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	BOARD OF COMMISIONERS AND DIRECTORS REPORTS	HALAMAN Page
Laporan Dewan Komisaris	Board of Commisioners Report	24
Penilaian Terhadap Kinerja	Performance Assessment	24
Fungsi Pengawasan	Oversight Function	26
Pandangan Terhadap Prospek Usaha	Business Prospect Overview	28
Pandangan Terhadap Penerapan Tata Kelola	Governance Implementation Overview	28
Penutup	Closing	29
Laporan Direksi	Directors Report	30
Prakata	Introduction	30
Kinerja Perseroan	Company Performance	32
Proses Transformasi Bisnis Phase I	The Process of Business Transformation Phase I	36
Prospek Usaha	Business Prospects	40
Peningkatan Tata Kelola Sebagai Bagian Dari Pertumbuhan Berkelanjutan	Governance Improvement As part of the Sustainable Growth	42
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Corporate Social Responsibility	43
Penutup	Closing	45

BAB-3

Chapter-3

PROFIL PERUSAHAAN	COMPANY PROFILE	HALAMAN Page
Identitas Perusahaan	Corporate Identity	48
Informasi Umum	General Information	
Visi dan Misi	Vision and Mission	49
Struktur Organisasi	Organizational structure	50
Profil Dewan Komisaris	Board of Commissioners' Profile	52
Profil Direksi	Board of Directors' Profile	55
Informasi Pemegang Saham	Shareholders Information	60
Pemegang Saham Utama	Major Shareholder	61
Entitas Anak	Subsidiary	64
Jejak Langkah	Milestone	66
Lini Bisnis	Core Business	
Civil Work	Civil Work	68
Ready Mix	Ready Mix	69
Formwork	Formwork	70
Foundation	Foundation	71
Equipment Rental	Equipment Rental	72
Wilayah Operasi	Operation Coverage Areas	73
Kepemilikan Alat Berat	Heavy Equipment Ownership	74
Rincian Transformasi Bisnis	Business Transformation in Detail	78
Sertifikasi	Certifications	81
Pengelolaan SDM	Human Resources Management	82

BAB-4

Chapter-4

PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN	MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS	HALAMAN Page
Tinjauan Operasi Per Segmen	Operation Review by Segment	88
Civil Work & Foundation	Civil Work & Foundation	88
Ready Mix	Ready Mix	88
Formwork	Formwork	89
Equipment Rent	Equipment Rent	89
Kinerja Keuangan Komprehensif	Comprehesive Financial Performance	90

Investasi Barang Modal Yang Direalisasikan	Capital Expenditure Realization	105
Informasi dan Fakta Material Yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan	Subsequent Event	106
Prospek Usaha	Business Prospects	106
Perbandingan Antara Target dan Realisasi	Target and Realization Comparison	108
Target dan Proyeksi Yang Ingin Dicapai Pada Tahun 2018	2018's Projections	109
Aspek dan Strategi Pemasaran	Marketing Aspect And Strategy	110
Kebijakan dan Pembayaran Deviden	Deviden Policy	112
Realisasi Penggunaan Dana Hasil	Realization of IPO Proceed	112
Informasi Material Terkait Investasi, Divestasi, Akuisisi, Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	Material Information Related to Investment, Divestment, Acquisition, Affiliated Transactions, and Conflict of Interest Transactions	113
Perubahan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Berpengaruh Signifikan	Law And Regulation Changes May Impact To The Company Significantly	117
Perubahan Kebijakan Akuntansi	Accounting Policies Changes	117
Informasi Kelangsungan Usaha Perseroan	Sustainability Information	118

BAB-5

Chapter-5

TATA KELOLA PERUSAHAAN	CORPORATE GOVERNANCE	HALAMAN Page
Pernyataan Tata Kelola	Corporate Governance Statement	122
Infrastruktur Tata Kelola	Governance Infrastructure	124
Penerapan Tata Kelola	Governance Implementation	128
Penilaian Terhadap Penerapan Tata Kelola	Assessment Of Governance Implementation	129
Rapat Umum Pemegang Saham	General Meeting of Shareholders	130
Dewan Komisaris	Board of Commissioners	131
Direksi	Board of Directors	143
Komite Audit	Audit Committee	148
Komite Nominasi & Remunerasi	Nomination & Remuneration Committee	152
Sekretaris Perusahaan	Corporate Secretary	156
Hubungan Investor	Investor Relations	159
Audit Internal	Internal Audit	160
Akuntan Publik	Public Accountant	162
Sistem Pengendalian Internal	Internal Control System	163

Kode Etik Perusahaan	Code Of Conduct	170
Budaya Dan Nilai Perusahaan	Corporate Culture & Value	174
Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan Dan/atau Manajemen	Stock Ownership Program By Employee And / Or Management	175
Sistem Pelaporan Pelanggaran	Violation Reporting System/ Whistleblowing System (WBS)	176
Akses Informasi Dan Data Perusahaan	Data And Information Access	178
Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	Assessment of Governance Implementation	179

BAB-6 Chapter-6

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN	CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	HALAMAN Page
Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Corporate Social Responsibility Policy	182
Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Corporate Social Responsibility Programs	183

BAB-7 Chapter-7

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN	CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS	HALAMAN Page
(Lampiran)	(Attachment)	190

BAB-8 Chapter-8

REFERENSI SILANG PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN	CROSS REFERENCES TO THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION	HALAMAN Page
(Lampiran)	(Attachment)	286

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LAPORAN TAHUNAN	RESPONSIBILITY STATEMENT ON ANNUAL REPORT	HALAMAN Page
Dewan Komisaris	Board of Commissioners	302
Direksi	Board of Directors	303
Lembaga Dan Profesi Penunjang Pasar Modal	Institutions And Capital Market Supporting Professionals	304

Chapter-1

BAB-1

Sekilas Transformasi Bisnis

Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)

Grafik Keuangan

Ikhtisar Keuangan

Ikhtisar Saham

Overview of Business Transformation

Initial Public Offering (IPO)

Financial Graphics

Financial Highlights

Stock Overview

Chapter-1

IKHTISAR PERUSAHAAN

Corporate Highlight

SEKILAS TRANSFORMASI BISNIS
BUSINESS TRANSFORMATION AT GLANCE

ROADMAP FOR NEAR-TERM FUTURE

ORGANIC GROWTH

2004-2012

CONSTRUCTION EQUIPMENT RENTAL

SMALL SIZE CONTRACTOR

- Fokus pada penyewaan alat berat dan pekerjaan *formwork* untuk mengerjakan proyek-proyek bangunan yang berasal dari PT PP Persero Tbk ("PT PP") sebagai entitas induk, BUMN serta perusahan-perusahaan swasta.
- Pada tahun 2012 Perseroan merintis lingkup pekerjaan *formwork* ke *full system structures*.

- Focus on heavy equipment rental and formwork of building projects from PT PP Persero Tbk ("PT PP") as holding company, SOEs, and private enterprises.
- Since 2012 the company has increased scope of work of formwork to full system structures.

ORGANIC GROWTH

2013-2015

CONSTRUCTION EQUIPMENT RENTAL

MEDIUM SIZE CONTRACTOR

- Mengembangkan *full system structures based formwork* yang telah diakui oleh perusahaan-perusahaan baik swasta maupun BUMN.
- Sejak tahun 2015 Perseroan merambah lini bisnis *foundation* dan *ready mix*.

- Developing business of full system structures based formwork that already recognized by private enterprises as well as SEOs.
- Since 2015 has entered foundation and ready mix businesses.

ORGANIC GROWTH

INORGANIC GROWTH

2016-2017

CONSTRUCTION EQUIPMENT RENTAL

LARGE SIZE CONTRACTOR

- Sejak tahun 2016 Perseroan merambah lini bisnis *civil work* melalui pengembangan bisnis secara organik.
- Pada tahun 2017 Perseroan mengembangkan lini bisnis *civil work* secara inorganik dengan mengakuisisi LMA.
- Pada tahun yang sama Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO).

- Since 2016 the company has entered civil work business by organic.
- In 2017 the company developed civil work business by inorganic through acquisition on LMA.
- The company delivered Intial Public Offering (IPO).

2018-2021

INTEGRATED CONSTRUCTION & MINING SERVICES

- Memperkuat integrasi dari lini bisnis yang telah ada sebagai dasar pengembangan dalam transformasi bisnis tahap berikutnya.
- Mengembangkan bisnis *foundation* untuk pekerjaan yang berhubungan dengan air, *power plant erector, mechanical eletrical, dredging*, jasa pertambangan serta logistik dan transportasi.
- Memperkuat sinergi antar BUMN.
- Mengembangkan aliansi strategis dengan perusahan-perusahaan di tingkat regional dan global.
- Pengembangan bisnis kepada pasar Asia Tenggara.

- Strengthening our business integration as foundation to develope next business transformation.
- Expanding to water related borepile, power plant erector, mechanical electrical, dredging, mining services and logistic and transportation.
- Improving SEOs sinergy.
- Developing regional as well as global strategic alliances.
- Developing business to South East Asia market.

TRANSFORMASI BISNIS
BUSINESS TRANSFORMATION

Phase I

OUR 5 (FIVE) BUSINESS LINES

Heavy Equipment Rental

- Dimulai dari penyewaan peralatan ringan untuk pembangunan gedung yaitu perancah
- Penyewaan alat berat untuk bangunan yaitu *Tower Crane & Passenger Hoist* (TC & PH)
- Penyewaan alat berat untuk pekerjaan konstruksi dan *civil work*

- Starting from equipment rental for building development i.e. scaffolding.
- Heavy equipment rental for building development i.e. Tower Crane & Passenger Hoist (TC & PH).
- Heavy equipment rental for construction and civil work.

Form Work

- Dimulai dari bekisting vertikal untuk pembangunan gedung
- Memasuki bekisting sistem lengkap (vertikal & horizontal) untuk pengembangan gedung
- Menjajaki kemungkinan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas

- Starting from vertical formwork for building development
- Developing the full system formwork (vertical & horizontal) for building development
- Exploring new technology to improve quality

Civil Work

- Dimulai pada tahun 2016 di proyek Pembangunan Jalan Toll Bakauheni - Sidomulyo dengan memanfaatkan armada alat berat kami
- Meningkatkan *engineering capacity* dengan mengakuisisi LMA.

- Starting in 2016 at Bakauheni - Sidomulyo Toll Road project by utilizing our heavy equipment fleet
- Increasing engineering capacity by acquisition of LMA.

Ready Mix

- Dimulai pada tahun 2015 untuk melayani PT PP (proyek Grand Kamala Lagoon)
- Melayani bandara Ahmad Yani dan pembangunan jalan toll Bakauheni - Sidomulyo dan jalan toll Medan - Kuala Namu - Tebing Tinggi (MKTT)
- Model Bisnis: *Business to Business* (B2B)

- Starting in 2015 to serve PT PP (Grand Kamala Lagoon project)
- Serving the Ahmad Yani airport and Bakauheni - Sidomulyo toll road project and Medan - Kuala Namu - Tebing Tinggi (MKTT) toll road project.
- B2B business model

Foundation

- Dimulai pada proyek pembangunan jalan tol Bakauheni - Sidomulyo & jalan tol Pandaan - Malang
- Mengembangkan bisnis *borepile* untuk bangunan gedung serta bangunan yang berhubungan dengan air.

- Starting at Bakauheni - Sidomulyo & Pandaan - Malang toll road projects.
- Entering borepile business to building and water related construction.

Phase II

CONSTRUCTION BUSINESS

ERECTOR

- Mencari peluang kerja *erektor* untuk proyek IPP di PT PP dan anak perusahaannya serta pelaku usaha BUMN dan swasta lainnya sebagai bagian dari mendukung rencana pemerintah di bidang ketenagalistrikan.

- Seeking erector opportunity for IPP projects in PT PP and it's subsidiaries as well as other SOEs and private business players as part of supporting the Goverment plans in electricity sector

MECHANICAL ELECTRICAL

- Mencari peluang pekerjaan *mechanical electrical* pada pembangunan gedung bertingkat dan proyek-proyek EPC pada PT PP beserta anak perusahaannya serta BUMN dan perusahan swasta.

- Looking for opportunity for high-rise building and EPC projects in PT PP and it's subsidiaries as well as other SOEs and private business players and Goverment

NON-CONSTRUCTION BUSINESS

MINING CONTRACTOR

- Mengembangkan peluang bisnis jasa pertambangan di Indonesia.
- Meningkatkan sinergi dengan BUMN pertambangan.

- Developing mining services in Indonesia.
- Pursuing synergy with mining SOE companies.

TRANSPORTATION & LOGISTIC

- Mengembangkan peluang bisnis transportasi dan logistik di Indonesia
- Berencana untuk mengintegrasikan *platform* saat ini dengan bisnis logistik dalam rangka meningkatkan nilai tambah kepada pelanggan

- Developing transportation and logistic business in Indonesia.
- Planning to integrate current platform with logistic business in order to improve value added to customers

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)

Di hampir penghujung waktu 2017 tepatnya tanggal 24 November 2017, PP Presisi melakukan Pencatatan Perdana Saham pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") sebanyak 2.351.221.000 lembar saham atau setara dengan 23% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("IPO"). PT PP dicatatkan dengan kode perdagangan (ticker) : PPRE pada Papan Utama, Sektor: *Infrastructure, Utilities & Transportation* ke dalam Sub-Sektor : *Non Building Construction*. Pada kesempatan yang sama, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui Surat Keputusan No : KEP 54/D.04/2017, menetapkan saham PPRE sebagai Efek Syariah.

At the end of 2017, precisely on November 24, 2017, PP Presisi undertakes Listing on the Indonesia Stock Exchange ("IDX") of 2,351,221,000 shares or equivalent to 23% of the issued and paid up capital of the Company after the Initial Public Offering ("IPO"). PP Presisi is listed with trade code (ticker): PPRE on Main Board, Sector: Infrastructure, Utilities & Transportation into Sub-Sector: Non Building Construction. On the same occasion, the Board of Commissioners of the Financial Services Authority ("OJK") through Letter No: KEP 54 / D.04 / 2017, assigned shares of PPRE as Sharia Securities.

Harga Perdana yang ditetapkan adalah sebesar Rp430 per lembar saham, sehingga total perolehan IPO adalah sebesar Rp1,01 triliun. Dengan *listing*-nya PP Presisi, yang menggunakan *ticker* perdagangan saham PPRE, menambah jumlah entitas perusahaan di lingkungan PP (Persero) menjadi 3, melengkapi 2 entitas yang telah terlebih dulu *listing* yaitu : PT PP (Persero) Tbk (PTPP), dan PT PP Properti Tbk (PPRO).

The initial price is set at Rp430 per share, bringing the total IPO proceeds to Rp1.01 trillion. With the listing of PP Presisi, which uses the stock trading ticker of PPRE, increases the number of corporate entities within the PP (Persero) to 3, completes the two entities that have been listed first: PT PP (Persero) Tbk (PTPP), and PT PP Properti Tbk (PPRO).

Perseroan akan secara berkesinambungan melakukan investasi di armada peralatan berat beserta pengembangan kompetensi sumberdaya manusia untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di seluruh Indonesia.

The Company will continuously invest in heavy equipment fleets and the development of human resource competencies to support infrastructures projects development throughout Indonesia.

Iswanto Amperawan
Direktur Utama

"Langkah IPO ini merupakan bagian dari strategi Perseroan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan demi meningkatkan nilai pemegang saham"

"This IPO step is part of the Company's strategy for sustainable growth to enhance shareholder value,"

Listing tersebut merupakan puncak dari perjalanan panjang rencana IPO yang menjadi bagian dari proses transformasi bisnis yang telah dilakukan oleh PP Presisi sejak 2013. Melalui rangkaian proses transformasi bisnis yang masih berlangsung hingga kini, PP Presisi telah menjelma dari sebuah perusahaan penyewaan alat-alat konstruksi skala kecil dengan ekuitas hanya sebesar Rp500 juta pada saat pendiriannya di tahun 2004 menjadi perusahaan konstruksi terintegrasi berbasis alat berat terkemuka di Indonesia dengan kapitalisasi pasar saat IPO sebesar Rp4,4 triliun.

The listing is the culmination of a long journey of an IPO plan that is part of the business transformation process that has been done by PP Presisi since 2013. Through a series of business transformation processes that are still ongoing, PP Presisi has been transformed from a small scale construction equipment rental company with equity of only Rp500 million at its founding in 2004 to become Indonesia's leading heavy equipment-based construction company with market capitalization at an IPO of Rp 4.4 trillion.

Peningkatan yang sangat signifikan membutuhkan *balance sheet capacity* yang dapat mengakomodasikan pertumbuhan tersebut.

Melalui IPO yang dilakukan, Perseroan mengejar *double impacts* yaitu Efek Ekspansif dan Efek *Leveraging* sekaligus. Untuk membantu proses IPO, mengacu kepada hasil proses tender yang telah dilakukan, PPRE menetapkan PT Bahana Sekuritas, PT CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai *Joint Lead Underwriters* (JLU) – Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dibantu oleh 15 Penjamin Emisi Efek antara lain : PT BNI Sekuritas, PT Panin Sekuritas Tbk, PT Reliance Sekuritas Tbk, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan lain-lain.

Significant increases require a balance sheet capacity that can accommodate that growth.

Through its IPO, the Company pursues double impacts of Expansive Effect and Leveraging Effect as well. To assist the IPO process, referring to the outcome of the tender process, PPRE established PT Bahana Sekuritas, PT CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas and PT Mandiri Sekuritas as Joint Lead Underwriters (JLU) - Underwriters Assisted by 15 Underwriters Securities include: PT BNI Sekuritas, PT Panin Sekuritas Tbk, PT Reliance Sekuritas Tbk, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk and others.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal meliputi :
Institutions and Capital Market Supporting Professionals include:

Akuntan Publik	:	KAP Hertanto, Grace, Karunawan	:	Public Accountant
Konsultan Hukum	:	Tumbuan and Partners	:	Legal Consultant
Notaris	:	Fathiah Helmi, SH	:	Notary
Biro Administrasi Efek	:	PT Datindo Entrycom	:	Securities Administration Bureau

Dimulai dari *kickoff meeting* dengan JLU serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal pada tanggal 28 Juli 2017, proses IPO bergulir melalui proses antara lain : pendaftaran dan penelaahan BEI dan OJK, paparan publik, *roadshow* hingga Penawaran Umum.

Segenap asa yang telah tercurah selama proses IPO, akhirnya bermuara pada pencatatan Saham atau Perdagangan Perdana Saham PPRE pada BEI pada 24 November 2017 dengan sukses. Keberhasilan IPO ini akan tercatat sebagai rekam jejak pada PPRE, dan juga pada PT PP (Persero) Tbk sebagai Entitas Induk, sebagai bentuk keberhasilan proses *Corporate Parenting* yang telah dilakukannya.

"Langkah IPO ini merupakan bagian dari strategi Perseroan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan demi meningkatkan nilai pemegang saham", ujar Iswanto Amperawan, Direktur Utama PP Presisi.

Starting from the kickoff meeting with JLU and the Capital Market Supporting Institution and Professional on July 28, 2017, the IPO process rolled through the process including: registration and review of BEI and OJK, public exposure, roadshow to Public Offering.

All the desires that have been devoted during the IPO process, ultimately leads to the listing of Stocks or Initial Trading of Stocks of PPRE on BEI on 24 November 2017 with success. The success of this IPO will be recorded as a track record on the PPRE, and also on PT PP (Persero) Tbk as a Parent Company, as a successful form of Corporate Parenting process that has been done.

"This IPO step is part of the Company's strategy for sustainable growth to enhance shareholder value," said Iswanto Amperawan, President Director of PP Presisi.

GRAFIK KEUANGAN
FINANCIAL GRAPHICS

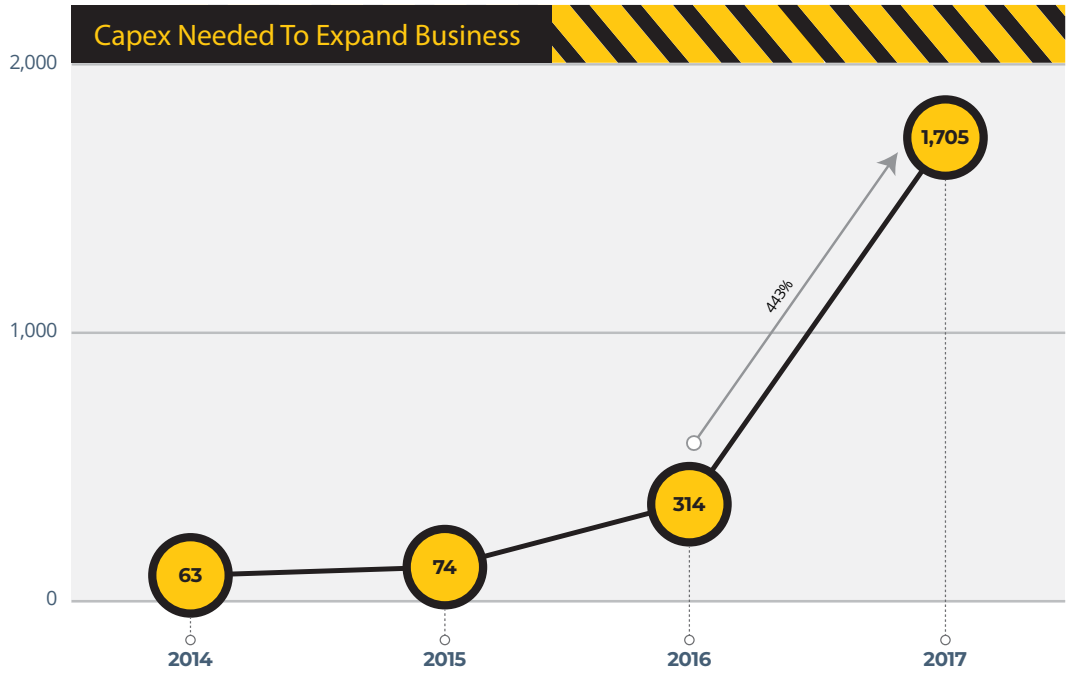

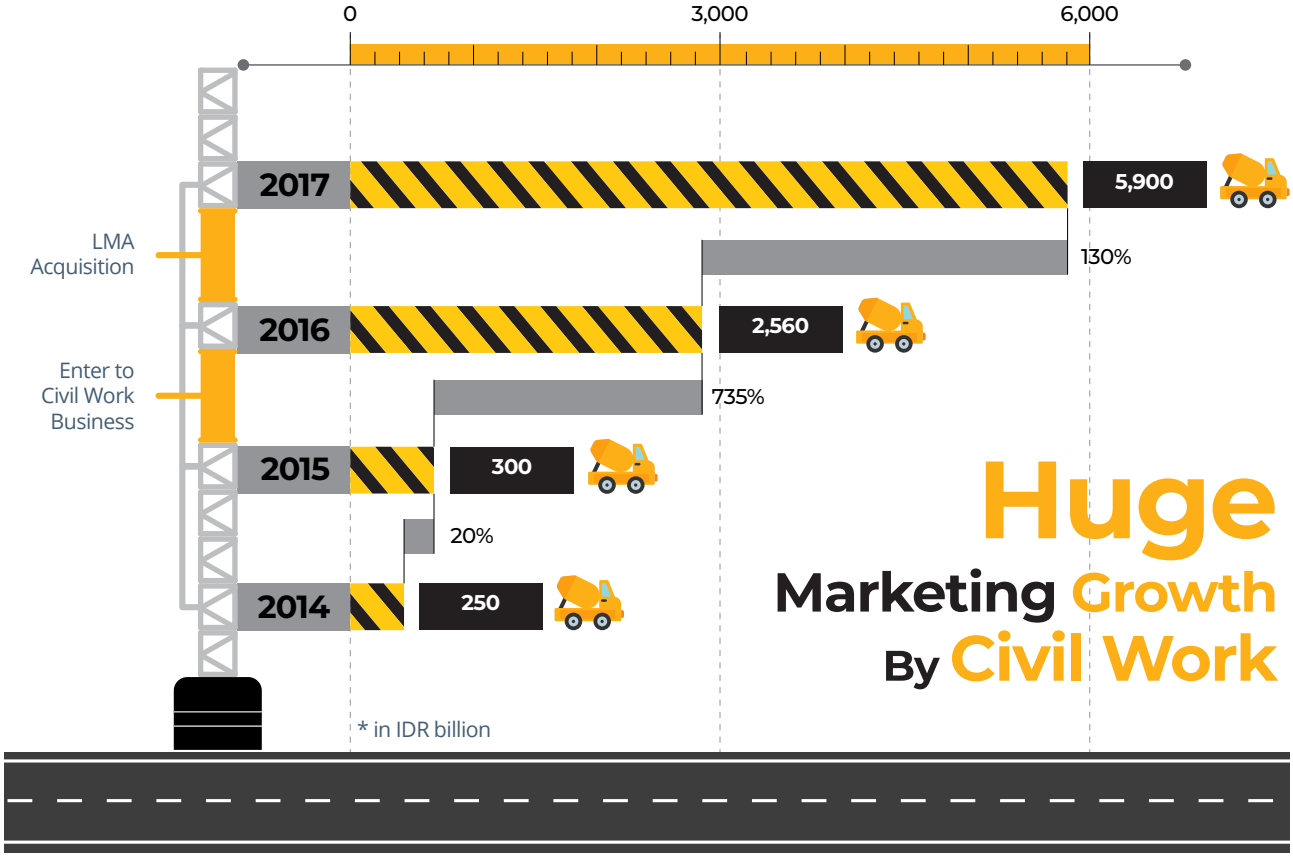

GRAFIK KEUANGAN
FINANCIAL GRAPHICS

PROFIT & LOSS SUMMARY

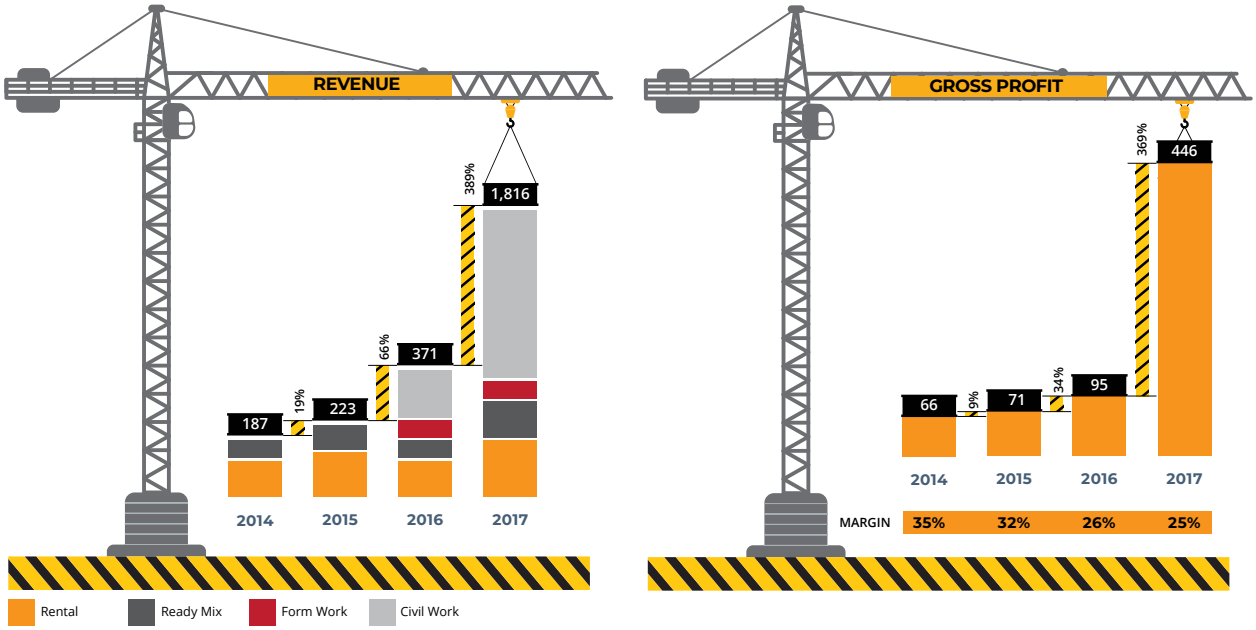

* before minority interest

(dalam Rp milliar)

(in IDR billion)

GRAFIK KEUANGAN
FINANCIAL GRAPHICS

FINANCIAL POSITIONS

(dalam Rp milliar)

(in IDR billion)

IKHTISAR KEUANGAN
FINANCIAL HIGHLIGHT

LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASI	2014	2015	2016	2017	CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
Pendapatan	186.9	223.1	371.2	1,816.3	Revenue
Laba Bruto	65.7	71.3	95.2	445.9	Gross Profit
Laba Bersih	25.3	28.0	41.4	244.6	Net Income
Laba (Rugi) Bersih yang dapat diatribusikan kepada :					Net Income attributable to :
Pemilik Entitas Induk	25.3	28.0	41.4	188.3	the Owners of the parent entity
Kepentingan non Pengendali	-	-	-	56.3	Non-controlling interest
Laba Komprehensif	25.3	28.0	41.4	247.2	Comprehensive Income
Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :					Comprehensive Income attributable to :
Pemilik Entitas Induk	25.3	28.0	41.4	190.6	the Owners of the parent entity
Kepentingan non Pengendali	-	-	-	56.6	Non-controlling interest
EBITDA	100.7	104.9	138.1	583.9	EBITDA
Laba per saham (Rp penuh)	819,034.0	874,222.0	116.0	41.2	Earning per Share (Rp full amount)

IKHTISAR KEUANGAN
FINANCIAL HIGHLIGHT

POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI	2014	2015	2016	2017	CONSOLIDATED FINANCIAL POSITION
Aset Lancar	125.5	117.3	467.0	2,661.1	Current Assets
Total Aset	366.6	378.5	1,066.4	5,125.6	Total Assets
Liabilitas Jangka Pendek	100.1	115.0	558.9	1,412.6	Current Liabilities
Debt	249.5	231.2	621.9	1,574.9	Debt
Total Liabilitas	297.3	283.9	854.4	2,685.4	Total Liabilities
Total Ekuitas	69.3	94.7	211.9	2,440.1	Total Equity
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada:					Equity attributable to :
Pemilik Entitas Induk	69.3	94.7	211.9	1,993.0	the Owners of the parent entity
Kepentingan non Pengendali	-		- -	447.1	Non-controlling interest

RASIO	2014	2015	2016	2017	RATIO
Pertumbuhan Pendapatan	63.0%	19.4%	66.4%	389.3%	Revenue Growth
Marjin Laba Bruto	35.2%	32.0%	25.6%	24.5%	Gross Profit Margin
Marjin Laba Bersih	13.5%	12.5%	11.1%	13.5%	Net Profit Margin
Rasio Laba Bersih terhadap Total Aset	6.9%	7.4%	3.9%	4.8%	Return on Total Assets
Rasio Laba Bersih Terhadap Total Ekuitas	36.5%	29.6%	19.5%	10.0%	Return on Total Equity
Rasio Lancar (X)	1.3	1.0	0.8	1.9	Current Ratio (X)
Rasio Kewajiban Berbunga terhadap Total Ekuitas (X)	3.6	2.4	2.9	0.6	Debt to Total Equity Ratio (X)
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Total Aset (X)	0.8	0.7	0.8	0.5	Total Liabilities to Total Assets Ratio (X)
Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Total Ekuitas (X)	4.3	3.0	4.0	1.1	Total Liabilities to Total Equity Ratio (X)

IKHTISAR SAHAM
STOCK SHARE OVERVIEW

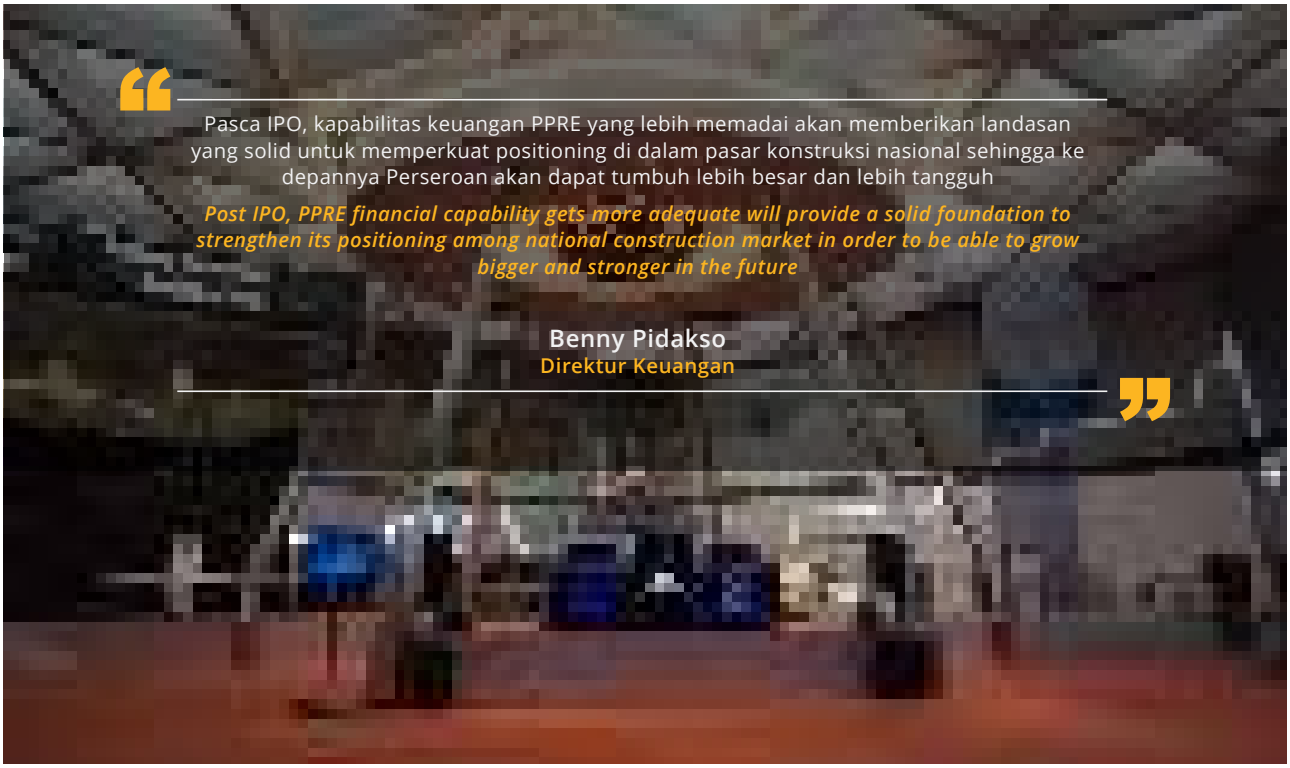

"Pasca IPO, kapabilitas keuangan PPRE yang lebih memadai akan memberikan landasan yang solid untuk memperkuat positioning di dalam pasar konstruksi nasional sehingga ke depannya Perseroan akan dapat tumbuh lebih besar dan lebih tangguh"

"Post IPO, PPRE financial capability gets more adequate will provide a solid foundation to strengthen its positioning among national construction market in order to be able to grow bigger and stronger in the future"

Benny Pidakso
Direktur Keuangan

PRESISI

Kode saham *Ticker of* PT PP Presisi Tbk	**PPRE**
Jumlah saham tercatat di Bursa Efek Indonesia *Total shares listed in Indonesia Stock Exchange*	**10.224.271.000**
Jumlah Penawaran Umum Perdana *Initial Public Offering Size*	**2.351.221.000**
	23 %
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia *Listed Date in Indonesia Stock Exchange*	**24 November 2017**
Harga Penawaran Perdana Saham *IPO Price*	**Rp 430/share**

IKHTISAR SAHAM
STOCK SHARE OVERVIEW

HARGA SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN DAN KAPITALISASI PASAR 2017 | SHARE PRICE, TRADING VOLUME AND MARKET CAPITALIZATION 2017

PENJELASAN	2017 TRIWULAN | *QUARTER*				DESCRIPTION
	I	II	III	IV	
Harga Tertinggi (Rp)	N/A	N/A	N/A	440	Highest Price (Rp)
Harga Terendah (Rp)	N/A	N/A	N/A	318	Lowest Price (Rp)
Harga Penutupan (Rp)	N/A	N/A	N/A	416	Closing Price (Rp)
Kapitalisasi Pasar (Rp Triliun)	N/A	N/A	N/A	4.3	Market Capitalization (IDR Trillion)

Pencatatan Perdana Saham tanggal 24 November 2017
Listed on November 24, 2017

Chapter-2

BAB-2

Laporan Dewan Komisaris

Laporan Direksi

Board of Commisioners Report

Board of Directors Report

Chapter-2

LAPORAN DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKTUR

Board of Commisioners
and Board of Directors Reports

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS REPORT

Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Dear Distinguished Shareholders and Stakeholders,

PENILIAIAN TERHADAP KINERJA

Periode 2014 hingga 2017 merupakan periode emas industri konstruksi yang didorong oleh pesatnya pembangunan infrastuktur yang dilakukan Pemerintah, tercermin dari pengeluaran Pemerintah untuk infrastuktur meningkat tajam dari sebesar Rp155 triliun (2014) diperkirakan menjadi Rp401 triliun (2017) atau mengalami Tingkat Pertumbuhan Tahunan Majemuk/*Compound Annual Growth Rate* (CAGR) 4 tahun sebesar 37,3%.

Pertanyaannya adalah bagaimanakah Perseroan dapat memanfaatkan pesatnya pembangunan infrastuktur tersebut sebagai momentum bagi Perseroan untuk tumbuh & berkembang. Apresiasi kami berikan kepada Direksi yang telah mampu melihat peluang tersebut dan menjadikannya momentum bagi Perseroan untuk tumbuh dan berkembang dengan pesat melalui transformasi bisnis yang dijalankannya.

PERFORMANCE ASSESSMENT

The period of 2014 to 2017 is a golden period of the construction industry driven by the rapid development of infrastructure by the Government, reflected by increasing of the Government's expenditure on infrastructure sharply from Rp155 trillion (2014) to Rp401 trillion (2017) or 4 years Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 37.3%.

The question is how can the Company take advantage of the rapid development of infrastructure as a momentum for the Company to grow. Our appreciation is given to the Directors who have been able to see the opportunity and make it a momentum for the Company to grow rapidly through the transformation of its business.

Melalui transformasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, Direksi telah mampu membawa Perseroan menjadi perusahaan konstruksi terintegrasi berbasis alat berat terkemuka di Indonesia dan mencatatkan saham pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada 24 November 2017 lalu. *Engineering capacity* dan *balance sheet capacity* Perseroan telah berhasil ditingkatkan sehingga memungkinkan Perseroan untuk mengerjakan proyek-proyek infrastruktur berskala nasional bahkan tingkat regional.

Engineering capacity Perseroan berhasil ditingkatkan melalui pertumbuhan baik secara organik maupun secara inorganik. Pertumbuhan inorganik dilakukan Perseroan dengan melakukan akuisisi terhadap MA, perusahaan penyedia jasa pekerjaan sipil pada bulan Juni 2017. Keberhasilan membawa Perseroan menjadi perusahaan konstruksi terintegrasi berbasis alat berat terkemuka di Indonesia yang *listed* di BEI, tidak membuat Direksi merasa puas. Direksi telah menyiapkan rencana transformasi bisnis *phase* 2 hingga tahun 2022 untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.

Through its gradual business

transformation, the Board of

Directors has been able to bring the Company into Indonesia's leading integrated heavy equipment-based construction company and listed at the Indonesia Stock Exchange (IDX) on November 24, 2017. The Company's engineering capacity and balance sheet capacity has been improved to enable the Company to undertake national and even regional infrastructure projects.

The Company's engineering capacity has been improved through growth both organically and inorganically. Inorganic growth by the Company by acquiring LMA, a civil works contractor in June 2017. Bringing the Company into Indonesia's leading integrated heavy equipment-based construction company listed on IDX succesfully, does not make the Board satisfied. The Board of Directors has prepared business transformation plan phase 2 through 2022 for sustainable growth.

Bakauheni - Sidomulyo Toll Road Project

"Kami terus menerapkan masukan serta pandangan secara komprehensif dari kegiatan dan rekomendasi komite-komite tersebut, yang kami peroleh melalui rapat-rapat gabungan."

"We continue to apply our input and see comprehensively from these activities and recommendations, which we convey through joint meetings."

FUNGSI PENGAWASAN OVERSIGHT FUNCTION

Kami sebagai Dewan Komisaris, dalam menjalankan fungsi pengawasan, merasa bangga bahwa Direksi telah dapat menyusun dan melaksanakan transformasi bisnis untuk menjadikan pesatnya pembangunan infrastuktur sebagai momentum bagi Perseroan untuk tumbuh & berkembang secara signifikan, tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian.

Kami mendorong Perseroan untuk mengembangkan, memformulasikan dan mendokumentasikan praktik-praktik yang telah menjadi budaya perusahaan menjadi Kode Etik dan Pedoman Kebijakan Perseroan secara baku merujuk kepada azas-azas Tata Kelola yaitu Keterbukaan, Akuntabilitas, Bertanggung jawab, Independensi dan Berkeadilan atau yang lebih dikenal sebagai TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency* dan *Fairness*).

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, kami dibantu oleh Komite-komite yang kami bentuk, di antaranya Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi yang memberikan masukan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Komite Audit melaksanakan program-program pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan masukan kepada Dewan Komisaris perihal hal-hal yang membutuhkan perhatian Manajemen.

We are as the Board of Commissioners, carrying out the oversight function, proud the Board of Directors has been able to develop and implement business transformation to make the rapid develoment of infrastrucctures as a momentum for the Company to grow & expand significantly, without leaving prudential principles.

We encourage the Company to develop, formulate and document the common practices that have crystallized into the corporate culture become a Code of Conduct and the Company Policy Guidelines according to the Governance Principles of Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness known as TARIF.

In carrying out the oversight function, we are assisted by the Committees we form such as Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee which provide recommendation in accordance with their respective expertise. The Audit Committee carries out the supervisory programs of the Board of Commissioners and provides its recommendation to the Board of Commissioners on matters that require Management's attention.

> Kami berkeyakinan dengan melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik akan berdampak positif pada peningkatan Nilai Pemangku Kepentingan di masa mendatang.
>
> *We believe that Good Corporate Governance implemention will have a positive impact on Stakeholders Value increasing in the future.*

Sedangkan Komite Nominasi dan Remunerasi membantu Dewan Komisaris di dalam proses nominasi dan memformulasikan paket remunerasi yang akan diterima oleh Manajemen. Kami terus menerapkan masukan serta pandangan secara komprehensif dari kegiatan dan rekomendasi komite-komite tersebut, yang kami peroleh melalui rapat-rapat gabungan.

Rekomendasi mereka sangat membantu kami dalam melaksanakan tugas pengawasan kami yang pada akhirnya akan memastikan bahwa Perseroan dikelola dan dipertanggung-jawabkan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Kami melihat bahwa Manajemen telah menjalankan komitmennya untuk selalu meningkatkan Nilai Pemangku Kepentingan melalui transformasi bisnis yang dilakukannya dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

The Nomination and Remuneration Committee assists the Board of Commissioners in the nomination process and formulates the remuneration package to be received by the Management. We continue to apply comprehensive recommendation and insights from their activities meetings.

Their recommendations assist us helpfully in carrying out our oversight tasks to ensure that the Company is managed and accounted for in accordance with Good Corporate Governance.

We knows that Management has committed to increase the Stakeholders Value through its business transformation by still upholding the principles of Good Corporate Governance.

PANDANGAN TERHADAP PROSPEK USAHA

Melalui transformasi bisnis *phase* 1, Manajemen telah membawa Perseroan menjadi perusahaan konstruksi terintegrasi berbasis alat berat terkemuka di Indonesia. Dan tidak sampai di situ saja, Manajemen telah mempersiapkan transformasi bisnis *phase* 2 yang diharapkan dapat semakin mengukuhkan *positioning* Perseroan di tingkat nasional maupun kemampuan untuk merambah ke pasar regional berkat *engineering capacity* yang dimiliki. Seiring dengan tema pembangunan di Indonesia yang menekankan pembangunan infrastruktur dari 4 tahun lalu dan masih akan berlanjut pada tahun-tahun mendatang untuk mengejar ketertinggalannya, kami menilai bahwa periode-periode tersebut merupakan periode emas yang harus dapat dimanfaatkan Perseroan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Perseroan diharapkan dapat melanjutkan transformasi bisnis tahap 1 yang telah berhasil mendorong pertumbuhan Perseroan dengan cepat.

BUSINESS PROSPECT OVERVIEW

Through business transformation phase 1, Management has brought the Company into a leading integrated heavy equipment-based construction company in Indonesia. Hereinafter the Management has prepared the business transformation phase 2 which is expected to further strengthen the Company's positioning at the national level as well as the ability to penetrate the regional market backed engineering capacity. Along with the development theme in Indonesia which emphasizes infrastructure development from 4 years ago and will continue in the coming years to catch up, we consider that those periods are golden periods that should be utilized by the Company for sustainable growth. The Company is expected to continue its business transformation phase 1 successfully boosted the Company's growth rapidly.

PANDANGAN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA

Sebagai *Emiten* baru di BEI, kami mendorong Perseroan untuk selalu berupaya secara kontinyu meningkatkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Kami berkeyakinan bahwa implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik akan berdampak positif pada peningkatan nilai seluruh Pemangku Kepentingan di masa mendatang.

Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Direksi yang telah merumuskan inisiatif-inisiatif untuk mengimplementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik tersebut ke dalam langkah-langkap operasional, termasuk membangun infrastruktur Tata Kelola yang dibutuhkan. Kami juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Manajemen, walaupun masih baru menyandang status sebagai *emiten*, tetapi telah berkomitmen untuk selalu melakukan *assessment* bagi pengimplementasian Tata Kelola, yang pada tahap permulaan ini dilakukan secara *self assessment*.

THE GOVERNANCE IMPLEMENTATION OVERVIEW

As a newcomer to IDX, we encourage the Company to continually strive to improve Good Corporate Governance practices. We believe that the implementation of Good Corporate Governance will have a positive impact on stakeholders value increasing in the future.

We expresses highly appreciation to the Board of Directors who has formulated the initiatives to implement the Good Corporate Governance into operational measures, including establishing the required Governance infrastructure. We also extend our gratitude to the Management, although its status as new public listed company, but has committed to employ assessment for the Governance implementation, that was completed by self assessment at the beginning of this stage.

PENUTUP

Sebagai penutup, kami menghaturkan terima kasih kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan atas dukungan, kerja sama dan kepercayaan yang diamanahkan kepada Dewan Komisaris. Tentunya penghargaan tertinggi ditujukan kepada Direksi dan karyawan atas kerja keras, dedikasi dan semangat untuk terus bertransformasi dengan Perseroan. Kami yakin, transformasi bisnis yang telah mendorong Perseroan bertumbuh signifikan, akan berkesinambungan dengan transformasi bisnis selanjutnya di masa mendatang untuk menjamin terciptanya pertumbuhan berkelanjutan di masa mendatang.

CLOSING

As closing remarks, we would like to thank all shareholders and stakeholders for the support, cooperation and trust mandated to the Board of Commissioners. Of course, the highest tribute awarded to the Directors and employees for their hard work, dedication and passion continuing to transform their selves with the Company. We believe that the business transformation that led the Company to grow rapidly and significantly will be sustainable to ensure sustainable growth in the future.

Atas nama Dewan Komisaris,
On behalf of the Board of Commissioners,

Muhammad Toha Fauzi
Komisaris Utama | President Commissioner

LAPORAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS REPORT

Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Dear Distinguished Shareholders and Stakeholders,

Tahun 2017 merupakan puncak dari transformasi bisnis tahap pertama yang telah dilakukan oleh Perseroan sejak tahun 2014 yaitu dengan melakukan peningkatan *engineering capacity* dan berpuncak pada IPO. Perseroan melakukan pencatatan perdana saham pada BEI sebanyak 2.351.221.000 lembar saham atau setara dengan 23% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah IPO, pada tanggal 24 November 2017 lalu.

2017 is the top of the first phase of business transformation that has been pursued by the Company since 2014 by improving engineering capacity and reaching out IPO. The Company listed at the IDX of 2,351,221,000 shares or 23% of the issued and paid up capital of the Company after the IPO on November 24, 2017

Pada umumnya transformasi bisnis dilakukan oleh perusahaan – perusahaan ketika industri yang digeluti perusahaan-perusahan tersebut, dan atau perusahaan yang bersangkutan sedang berada di dalam masa penuh tantangan. Tetapi Perseroan justru melakukan transformasi bisnis pada saat industri yang ditekuni sedang booming dan Perseroan juga sedang tumbuh pesat untuk mencapai pertumbuhan yang signifikan. Hal ini dilakukan Perseroan untuk memperoleh percepatan di dalam pertumbuhan Perseroan serta kinerja yang dihasilkannya.

In general business transformation is pursued by companies when its industry and or those company are in the challenging period. However, the Company is transforming its business when the industry is booming that Company is also growing rapidly to achieve significant growth. The Company has pursued its transformation to accelerate growth.

Industri konstruksi berkembang sangat pesat dalam 4 tahun terakhir, seiring dengan pesatnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah. Pengeluaran Pemerintah untuk infrastuktur meningkat tajam dari sebesar Rp155 triliun (2014) diperkirakan menjadi Rp401 triliun (2017) atau mengalami Tingkat Pertumbuhan Tahunan Majemuk/ *Compound Annual Growth Rate* (*CAGR*) 4 tahun sebesar 37,3%. Perkembangan industri konstruksi yang sangat pesat tersebut menempatkan Perseroan pada posisi yang lebih diuntungkan karena peran Perseroan sebagai garda terdepan di dalam pembangunan infrastruktur. Di dalam proses transformasi bisnis tersebut, Perseroan senantiasa berusaha melengkapi kapabilitasnya di bidang konstruksi. Melalui proses transformasi bisnis yang dilakukan Perseroan dalam kurun waktu tersebut, Perseroan telah menjelma dari sebuah perusahaan penyewaan alat-alat konstruksi skala kecil dengan ekuitas hanya sebesar Rp500 juta pada saat pendiriannya di tahun 2004 menjadi perusahaan konstruksi terintegrasi berbasis alat berat terkemuka di Indonesia dengan kapitalisasi pasar saat IPO sebesar Rp4,4 triliun.

The construction industry has grown very rapidly in the last 4 years, in line with the rapid development of infrastructure carried out by the Government. Government expenditures for infrastructure increased sharply from Rp155 trillion (2014) to Rp401 trillion (2017) or 4 years Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 37.3%. The rapid development of the construction industry led the Company in a more favorable position as the Company's role as the vanguard of infrastructure development.In the process of business transformation, the Company continuously strives to complete its construction capabilities. Through the business transformation process during those period, the Company has been transformed from a small-scale construction equipment rental company with equity only of Rp500 million at its establishment in 2004 to Indonesia's leading integrated heavy equipment-based construction company with market capitalization of Rp4.4 trillion when the IPO happened.

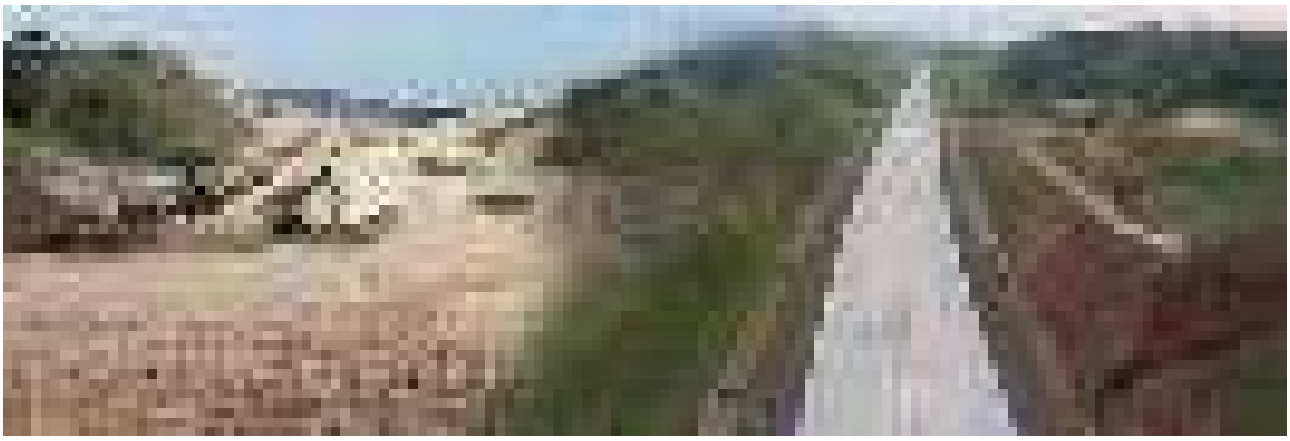

Bakauheni - Sidomulyo Toll Road Project

Selain melakukan IPO, tahun 2017 juga merupakan tonggak penting pertumbuhan Perseroan, yang menandakan dimulainya pertumbuhan *inorganik* Perseroan, yaitu dengan diakuisisinya LMA, perusahaan penyedia jasa pekerjaan sipil pada bulan Juni, sebanyak 51%. Akuisisi tersebut bersifat strategis bagi Perseroan yaitu di samping meningkatkan *engineering capacity*, juga menambah akses kepada pasar non PP Group. Melalui akuisisi tersebut diharapkan tercipta sinergi kuat antara ketiga pihak : LMA, Presisi dan PP Group yang akan memperkuat *positioning* Perseroan.

In addition to the IPO, 2017 is also an important milestone for the Company's growth, which marks the Company's inorganic growth start, by acquiring LMA, a civil work contractor, for 51% stake in June. The acquisition is strategic to the Company in order to improve engineering capacity as well as to improve access to non PP Group markets. The acquisition is expected to create strong synergy between the three parties: LMA, PP Presisi and PP Group that will strengthen the Company's positioning.

KINERJA PERSEROAN | COMPANY PERFORMANCE

Pertumbuhan Industri dan Kinerja Perseroan
Industrial Growth and Performance of the Company

Pertumbuhan signifikan industri konstruksi yang dimulai tahun 2014, masih mencatatkan pertumbuhan besar sepanjang tahun 2017 seiring dengan pertumbuhan pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur yang diperkirakan sebesar 26,5% dari Rp317 triliun (2016) menjadi Rp401 triliun (2017). Pertumbuhan tersebut berpengaruh langsung pada peningkatan kinerja Perseroan. Perseroan mencatatkan kontrak baru sebesar Rp5,9 trilun meningkat 130% dari sebesar Rp2,5 triliun (2016). Perolehan kontrak baru tersebut mencapai 102% dari target yang ditentukan sebesar Rp5,8 triliun. Kontrak baru yang diperoleh tersebut mendorong *order book* 2017 meningkat 300% menjadi sebesar Rp10,8 triliun dari sebesar Rp2,7 triliun (2016).

The significant growth of the construction industry since 2014, still recorded substantial growth throughout 2017 as the government's expansion in infrastructure spending was estimated at 26.5% from Rp317 trillion (2016) to Rp401 trillion (2017). Those growth directly affects the Company's performance. The Company recorded a new contract of Rp5.9 trillion, up 130% from Rp2.5 trillion (2016). The acquisition of the new contract reached 102% of the target set at Rp5.8 trillion. The new contracts drove the 2017 book order to rise by 300% to Rp10.8 trillion from Rp2.7 trillion (2016).

Peningkatan *order book* tersebut membutuhkan peningkatan jumlah armada yang dibutuhkan untuk mengeksekusi pekerjaan yang tertera dalam *order book*, yang tentunya berimplikasi pada peningkatan *capex*. *Capex* meningkat 443% dari Rp314 miliar (2016) menjadi Rp1,7 triliun (2017). Dibandingkan dengan budget 2017, tingkat serapan *capex* mencapai 100% yang di antaranya disebabkan oleh adanya akuisisi LMA.

The order book improving requires increasing of number of fleets in order to execute the order book, which certainly affecting on capital expenditure (capex). Capex increased 443% from Rp314 billion (2016) to Rp1.7 trillion (2017). Comparing with the 2017 budget, its budget absorption reached 100% because of LMA acquisition.

Perseroan berhasil membukukan pendapatan konsolidasian meningkat 389% dari Rp371 miliar (2016) menjadi Rp1,8 triliun (2017). Laba bersih yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk meningkat 356% dari Rp41,4 miliar (2016) menjadi Rp188,3miliar (2017). Jika dibandingkan dengan *budget* 2017, kinerja yang dicapai Perseroan sangat memuaskan. Raihan pendapatan sebesar 107% dibandingkan dengan target pendapatan sebesar Rp1,7 triliun. Laba bersih yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk mencapai 125%, melebihi target sebesar Rp150 miliar.

The Company successfully recorded consolidated revenues up 389% from Rp371 billion (2016) to Rp1.8 trillion (2017). The net income attributable to the owners of the Parent Company increased by 356% from 41,4 billion (2016) to Rp188.3 billion (2017). When compared with budget 2017, the performance achieved by the Company is very satisfactory. Revenue of 107% compared to revenue target of Rp1.7 trillion. Net income attributable to the owners of the Parent Company reached 125%, exceeding the target of Rp150 billion.

Melalui IPO yang dilakukan, Perseroan mengejar double impacts yaitu Efek Ekspansi dan Efek *Leveraging* sekaligus.

Through its IPO, the Company pursues double impacts of Expansion Effect and Leveraging Effect as well.

Peningkatan laba bersih yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk tersebut mendorong peningkatan saldo laba 116% dari Rp101,2 miliar (2016) menjadi Rp218,4 miliar (2017) yang berdampak pada peningkatan ekuitas 1.050% dari Rp211,9 miliar (2016) menjadi Rp2,4 triliun (2017). Peningkatan ekuitas juga disebabkan oleh peningkatan Modal ditempatkan dan disetor penuh 823% dari Rp110,8 miliar (2016) menjadi Rp1,02 triliun (2017) serta adanya tambahan modal disetor (agio) sebesar Rp749,6 miliar, sebagai selisih nilai nominal saham dengan penerimaan hasil IPO yang dilakukan 24 November 2017.

Dana perolehan IPO bersih (setelah dikurangi biaya-biaya IPO) sebesar Rp984,7 miliar mendorong jumlah Kas dan setara kas menjadi Rp 1,1 triliun, meningkat 437% dari Rp210,9 miliar (2016). Peningkatan kas dan setara kas tersebut meningkatkan likuiditas : aset lancar meningkat 470% dari Rp467,0 miliar (2016) menjadi Rp2,7 triliun (2017); sementara liabilitas lancar meningkat 153% dari Rp558,9 miliar (2016) menjadi Rp1,4 triliun (2017). Total aset meningkat 380% dari Rp1,1 triliun (2016) menjadi Rp5,1 triliun (2017) yang sebagian besar sebagai akibat peningkatan aset tetap sebesar 267% dari Rp599,4 miliar (2016) menjadi Rp2,2 triliun (2017).

Increasing of net income attributable to the owners of the Parent Company resulted in improving of retained earnings about 116% from Rp101.2 billion (2016) to Rp218.4 billion (2017) which affecting equity's increasing of 1,050% from Rp211.9 billion (2016) to Rp2.4 trillion (2017). Equity's increasing was also due to increasing of issued and fully paid capital of 823% from Rp110.8 billion (2016) to Rp1.02 trillion (2017) and the additional paid-in capital amounting to Rp749.6 billion, as IPO on November 24, 2017.

Net IPO proceeds (net of its expenses) amounting to Rp984.7 billion pushed the Cash and cash equivalents to Rp 1.1 trillion, up 437% from Rp210.9 billion (2016). Its increasing improved liquidity: current assets increased of 470% from Rp467.0 billion (2016) to Rp2.7 trillion (2017); while current liabilities increased by 153% from Rp558.9 billion (2016) to Rp1.4 trillion (2017). Total assets increased about 380% from Rp1.1 trillion (2016) to Rp5.1 trillion (2017) mostly as a result of fixed assets increasing.

EFEK ESKPANSI

EXPANSION EFFECTS

Karena penggunaan dana hasil IPO 100% untuk ekspansi Perseroan (tidak untuk pelunasan hutang) dengan pengalokasian sebagai berikut : sekitar 70% akan digunakan untuk kebutuhan belanja modal Perseroan; dan sekitar 30% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan. Dengan pengalokasian tersebut, diharapkan terjadi efek *snowball* yang dapat membantu percepatan pertumbuhan Perseroan di periode mendatang.

Because of IPO proceeds for the Company expansion (not for debt repayment) with the following appropriations: approximately 70% will be used for the Company's capital expenditures; and approximately 30% will be used for the Company's working capital need. With those allocation, it is expected that the snowball effect will accelerate the Company's growth in the coming periods.

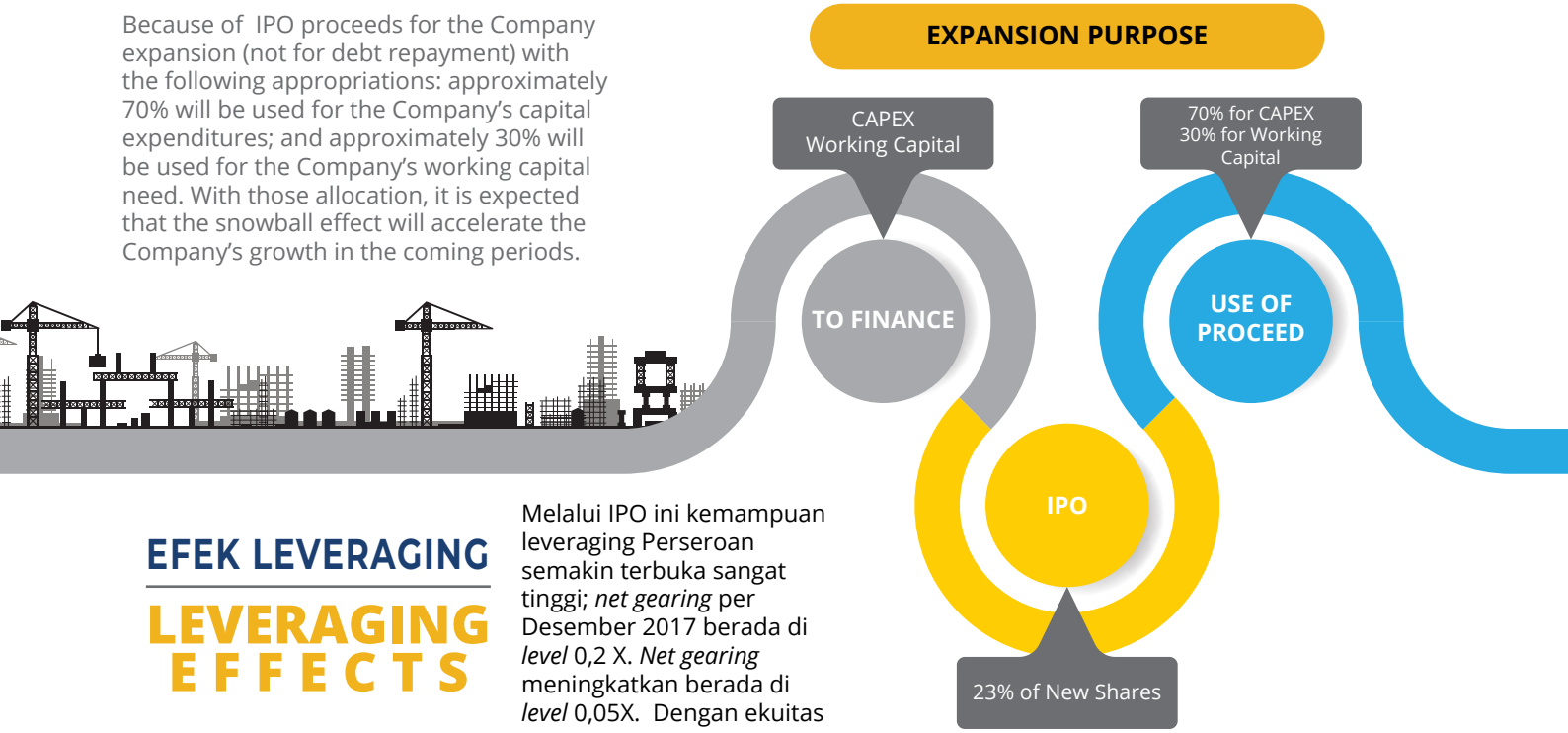

EFEK LEVERAGING

LEVERAGING EFFECTS

Melalui IPO ini kemampuan leveraging Perseroan semakin terbuka sangat tinggi; *net gearing* per Desember 2017 berada di *level* 0,2 X. *Net gearing* meningkatkan berada di *level* 0,05X. Dengan ekuitas per Desember 2017 sebesar Rp2,4 triliun, maka Perseroan memiliki ruang untuk melakukan pembiayaan bersifat hutang sebesar Rp6,0 triliun hingga Rp9,0 triliun.

Through this IPO, the Company's leveraging capability is increasingly very high; net gearing as of December 2017 is at the level of 0.2 X. Net gearing increased to 0.05X. With equity per December 2017 amounting to Rp2.4 trillion, the Company has room to engage in debt financing of Rp6.0 trillion to Rp9.0 trillion.

FINANCIAL CAPABILITY

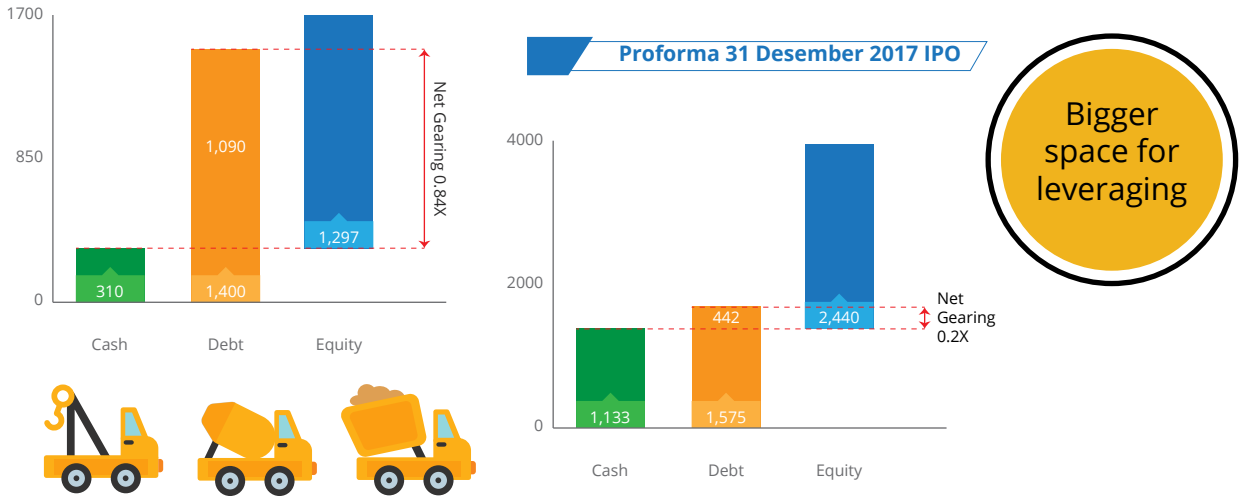

KINERJA PERSEROAN | COMPANY PERFORMANCE

Strategi dan Kebijakan Strategis

Strategy and Strategic Policy

Dengan visi untuk menjadi perusahaan konstruksi terintegrasi yang terkemuka di Indonesia dan regional, Perseroan memiliki strategi jangka panjang untuk selalu bertumbuh secara berkelanjutan melalui transformasi bisnis terus-menerus yang dijabarkan menjadi strategi panjang pendek sebagai berikut :

With the vision to become a leading integrated construction company in Indonesia and region, the Company has a long-term strategy to grow sustainably through the continuous business transformation that is outlined into a short-term strategy as follows :

A

Memperluas kapasitas alat berat perusahaan untuk memenuhi dan mengantisipasi permintaan yang cepat.

Expand the Company's heavy equipment capacity in order to meet and anticipate rapid demand for project's contracts.

B

Mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang memiliki posisi strategis dan mempunyai fasilitas infrastruktur dengan kapasitas cukup besar.

Acquire strategically positioned companies that own infrastructure facilities with sizable capacity.

C

Meningkatkan jumlah proyek internal dan eksternal secara berkesinambungan.

Continue to increase the number of internally and externally sourced projects.

D

Meningkatkan inovasi untuk menghasilkan layanan bernilai tambah yang lebih tinggi kepada pelanggan.

Improve innovation to generate higher value added services to the customers.

E

Memperluas pasar mancanegara melalui kerja sama (*JO*) serta mencari mitra strategis dengan perusahaan multinasional.

Expanding overseas via joint operation (JO) as well as seeking strategic partners with multinational companies.

F

Mengoptimalkan sinergi *intra-group* sebagai dasar pengembangan basis pelanggan dan mengembangkan bisnis kepada pihak ketiga.

Optimize intra-group synergy and allow synergy as the basis for expanding customer base and increasing exposure to third parties.

G

Memelihara konsistensi dalam hal ketepatan waktu dan kualitas layanan dengan menerapkan sistem manajemen ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 serta menerapkan sistem ERP-SAP.

Maintain consistency of excellent service delivery in term of time and quality by implementing ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 management systems and applying integrated system with ERP-SAP.

H

Pengimplementasian strategi-strategi tersebut merupakan salah satu dari usaha-usaha perseroan untuk *memitigasi* kendala-kendala yang muncul di dalam operasi perseroan sehari-hari

Maintain consistency of excellent service delivery in term of time and quality by implementing ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 management systems and applying integrated system with ERP-SAP.

Pengimplementasian strategi-strategi tersebut merupakan salah satu dari usaha-usaha Perseroan untuk memimitigate kendala-kendala yang muncul di dalam operasi Perseroan sehari-hari.

Implementation of those strategies is one of the Company's efforts to mitigate the constraints that arise in the Company's daily operations.

Untuk jangka panjang, Perseroan telah merumuskan transformasi bisnis hingga tahun 2022 yang dimulai dari tahun 2014. Perseroan membagi transformasi bisnis ke dalam 2 *phase* yaitu : *phase* 1 yang dimulai dari tahun 2014 hingga tahun 2017 dan *phase* 2 dari tahun 2018 hingga tahun 2022.

For the long term, the Company has formulated business transformation up to 2022 starting from 2014. The Company divides business transformation into 2 phases: phase 1 starting from 2014 to 2017 and phase 2 from 2018 to 2022.

Phase 1 telah berhasil mengantarkan Perseroan dari perusahaan penyewaan alat berat menjadi perusahaan konstruksi terintegrasi berbasis alat berat terkemuka di Indonesia. Perseroan mampu memberikan jasa konstruksi terintegrasi dari 5 lini bisnis yang dimilikinya yaitu *civil work, ready mix, foundation, formwork* dan penyewaan alat berat. Kemampuan Perseroan mengintegrasikan 5 lini bisnis tersebut tidak dapat ditemukan pada perusahaan-perusahaan konstruksi lainnya. Kemampuan tersebut merupakan salah satu keunggulan kompetitif Perseroan yang dicari oleh banyak konsumen karena *value added* yang ditawarkannya.

Phase 1 has successfully delivered the Company from a heavy equipment leasing company to a leading integrated heavy equipment-based construction company in Indonesia. The Company is able to provide integrated construction services from its five business lines: civil work, ready mix, foundation, formwork and heavy equipment rental. The Company's ability to integrate these 5 business lines can not be found in other construction companies. This capability is one of the Company's competitive advantages sought by many consumers because of its offered added value.

Proses transformasi bisnis phase 1

The process of business transformation phase 1

2014

Perseroan memulai transformasi bisnis dengan meningkatkan skala usahanya menjadi penyedia jasa penyewaan alat berat ber-skala menengah serta meningkatkan kapasitas *formwork*. Pendapatan sewa alat berat memegang peranan besar dengan memberikan kontribusi sebesar 75% terhadap total pendapatan, sedangkan pendapatan *formwork* berkontribusi sebesar 25%..

The Company commenced business transformation by increasing its business scale into a medium scale heavy equipment rental provider as well as increasing its formwork capacity. Heavy equipment rental revenue played a big part by contributing of 75% to total revenue, while formwork income contributed 25%.

2015

Perseroan mengembangkan *formwork* menjadi *full system formwork* serta merambah bisnis *ready mix* & *bisnis foundation*. Peningkatan *formwork* menjadi *full system formwork* berhasil meningkatkan kontribusi pendapatan *formwork* terhadap total pendapatan, dari 25% (2014) menjadi 42% (2015). Sebaliknya kontribusi pendapatan sewa alat berat mengalami penurunan dari 75% (2014) menjadi 52% (2015).

Bisnis *ready mix* yang dikembangkan Perseroan memiliki ke-khas-an dibandingkan dengan bisnis *ready mix* pada umumnya yang menggunakan konsep bisnis penjualan secara retail (*Business to Consumer* : B2C). Bisnis *ready mix* Perseroan menerapkan konsep bisnis secara *bulk*, yang ditujukan langsung kepada proyek tertentu dalam jumlah besar (*Business to Business* : B2B). Fasilitas *ready mix* pun didedikasikan secara khusus kepada proyek tersebut. Proyek pembuatan jalan toll Kuala Namu – Tebing Tinggi merupakan *pilot project* bisnis *ready mix* Perseroan. Tahun pertama pengoperasiannya, bisnis *ready mix* telah berhasil memberikan kontribusi pendapatan sebesar 6%.

the Company developed formwork into full system formwork and penetrated ready mix & foundation businesses. Formwork improvement to full system formwork succeeded to increase its revenue contribution to total revenue, from 25% (2014) to 42% (2015). Conversely, heavy equipment rental contribution decreased from 75% (2014) to 52% (2015).

The ready mix business developed by the Company has a distinctness compared to a ready mix business in general that adapting retail business concept (Business to Consumer: B2C). The Company's ready-mix business implements the business concept in bulk, addressed directly to a particular project (Business to Business: B2B). Ready mix facility is dedicated specifically to the project. The Kuala Namu - Tebing Tinggi toll road project is the pilot project. In its first year of operation, ready mix business has successfully contributed 6%.

Bakauheni - Sidomulyo Toll Road Project

2016 Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan infrastruktur, Perseroan merambah bisnis *civil work* pada kuartal ke empat 2016, dan langsung menjadi kontributor terbesar bagi pendapatan Perseroan yaitu sebesar 33%. Kontribusi *ready mix* meningkat pesat dari 6% (2015) menjadi 19% (2016). Sebaliknya kontribusi pendapatan sewa alat berat semakin menyusut dari 52% (2015) menjadi 28% (2016).

Along with the rapid development of infrastructure, the Company expanded to civil works business in the fourth quarter of 2016, and directly became the largest contributor to the Company's revenues of 33%. The ready mix contribution increased rapidly from 6% (2015) to 19% (2016). Otherwise heavy equipment rental contribution shrank from 52% (2015) to 28% (2016)

2017 Perseroan meningkatkan kapasitas *civil work* dengan melakukan pembelian alat-alat berat yang dibutuhkan di dalam pengerjaan proyek *civil work*. Tidak cukup sampai di situ, Perseroan terus meningkatkan *engineering capacity* secara inorganik melalui akuisisi terhadap LMA pada Juni. Selain melakukan peningkatan *engineering capacity*, Perseroan juga melakukan peningkatan *balance sheet capacity* melalui IPO pada November. Kontribusi pendapatan *civil work* terus meningkat dari dari 33% (2016) menjadi 78% (2017).

The Company increased civil work capacity by purchasing heavy equipment required in civil works projects. In addition, the Company continued to improve engineering capacity inorganicly through acquisition of LMA in June. Besides engineering capacity improvement, the Company also increased its balance sheet capacity through its IPO in November. The civil work contribution continued to increase from 33% (2016) to 78% (2017).

Hingga akhir 2017, melalui proses transformasi bisnis :

1. Perseroan memiliki 5 lini bisnis yaitu : *civil work, ready mix, foundation, formwork* dan penyewaan alat berat.
2. Jumlah alat berat bergerak berjumlah 1.685 unit dan jumlah alat berat tidak bergerak berjumlah 147 unit.
3. Perubahan struktur sumber pendapatan dari pendapatan sewa alat berat menjadi pendapatan *civil work* sebagai kontribusi utama, yang juga berpengaruh pada peningkatan volume pendapatan yang lebih besar, walaupun di lain sisi terjadi penurunan margin laba mengingat *margin* laba *civil work* lebih kecil dibandingkan margin penyewaan alat berat.
4. Adanya pendapatan dari jasa *coal hauling* yang bersifat *recurring income* (pendapatan berulang) dan berjangka waktu yang relatif lebih panjang dibandingkan dengan rata-rata jangka waktu proyek insfrastruktur yang berkisar 2 tahun ini akan membantu untuk diversifikasi sumber pendapatan dan memperkuat pertumbuhan laba Perseroan ke depan.

Kebijakan transformasi bisnis *phase* 2 yang akan diimplementasikan pada tahun 2018 mendatang meliputi :

1. Meningkatkan kapasitas produksi dari 5 lini bisnis yang telah ada.
2. Melengkapi kapabilitas yang dimiliki Perseroan di dalam mata rantai industry konstruksi berbasis alat berat.

Kedua kebijakan tersebut diimplementasikan baik melalui pertumbuhan organik maupun pertumbuhan inorganik.

Until the end of 2017, through business transformation process:

1. The Company has 5 business lines: civil work, ready mix, foundation, formwork and heavy equipment rental.
2. The number of mobile heavy equipment about 1.685 units and the number of non-mobile ones amounted to 147 units.
3. The change in the structure of revenue sources from heavy equipment rental into civil work income as the main contribution, which also affects the increase in the volume of income is greater, although on the other side there is a decrease in profit margin considering the civil work profit margin is smaller than the heavy equipment rental margin.
4. The revenue from coal hauling services as recurring income and relatively longer period of time compared to the average duration of the 2-years infrastructure projects will encourage to diversify revenues souces and strengthen the Company's profit growth in the future.

The business transformation policy phase 2 to be implemented in 2018 will include:

1. Increasing production capacity from 5 existing business lines.
2. Completing the Company's capabilities within the heavy equipment industry chain.

Both policies are implemented both through organic growth and inorganic growth.

PROSPEK USAHA | BUSINESS PROSPECTS

Ketersediaan infrastruktur merupakan syarat utama bagi perkembangan bangsa baik dari sisi sosial ekonomi maupun perkembangan sosial budaya. Karenanya pembangunan infrastuktur digalakan dari masa ke masa terlebih dalam hampir 4 tahun terakhir, dimana pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur secara lebih pesat untuk mengejar ketertinggalan ketersedian infrastuktur. Hal ini tercermin dari pengeluaran Pemerintah untuk infrastuktur meningkat tajam dari sebesar Rp155 triliun (2014) diperkirakan menjadi Rp401 triliun (2017) atau mengalami cagr 4 tahun sebesar 37,3%.

Pembangunan infrastruktur yang pesat mendorong perkembangan industri konstruksi. Menciptakan pertumbuhan permintaan yang semakin besar dan beragam terhadap jasa konstruksi. Pembangunan infrastruktur akan selalu menjadi tema pembangunan Indonesia di masa mendatang untuk mengejar ketersediaan infrastruktur.

Availability of infrastructure is main requirement for development of the nation in terms of socio-economic and socio-cultural development. Hence, infrastructure development has been intensified over the past four years, which the government developed infrastructure more rapidly to catch up with the availability of infrastructure. This is reflected in the Government's expenditure on infrastructure increased sharply from Rp155 trillion (2014) to Rp401 trillion (2017) or a 4-years CAGR of 37.3%.

Rapid infrastructure development is driving the development of the construction industry. Creating demand for construction services more increase and diversify. Infrastructure development will always be the theme of Indonesia's development in the future to pursue the availability of infrastructure.

"Pembangunan infrastruktur akan selalu menjadi tema pembangunan Indonesia di masa mendatang untuk mengejar ketersediaan infrastruktur."

"Infrastructure development will always be the theme of Indonesia's development in the future to pursue the availability of infrastructure."

Mengacu kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara ("APBN") 2018 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari 5,2% (2017) menjadi 5,4% (2018) dengan tingkat inflasi yang turun dari 4,3% (2017) menjadi 3,5% (2018); dan pijakan pijakan kebijakan belanja negara yang mengedepankan : mengalihkan belanja yang konsumtif menjadi belanja produktif dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi serta percepatan realisasi belanja negara, efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas dan melanjutkan penguatan kualitas belanja negara dan tetap konsisten melakukan efisiensi belanja non-prioritas tanpa mengurangi pencapaian sasaran *output* yang telah direncanakan.

Referring to the 2018 state budget revenues (APBN) targeting economic growth increased from 5.2% (2017) to 5.4% (2018) with inflation rate down from 4.3% (2017) to 3, 5% (2018); and adopting an expenditure policy that promotes productive spending in the context of accelerating economic growth as well as accelerating the realization of state expenditure, spending efficiency and increasing productive expenditures to support priority programs and continuing to strengthen the quality of state expenditure without reducing the achievement of the planned objectives.

Di tambah dengan kebijakan di sektor infrastruktur sebagai berikut :

Pengembangan konektifitas untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, jalur utama logistik, dan integrasi antarmoda dalam rangka mendorong pengembangan wilayah strategis. Koordinasi lintas sektoral termasuk dengan Pemda agar pelaksanaanya berjalan lancar dan sesuai kebutuhan daerah namun selaras dengan target nasional.

Perbaikan perencanaan, pola koordinasi yang efektif dan penguatan regulasi untuk mengatasi hambatan teknis Memberdayakan peran swasta, BUMN,BUMD, Pemda melalui pengembangan pembiayaan kreatif atau skema KPBU atau non KPBU untuk menutup *financing gap* pendanaan infrastruktur; dan total anggaran infrastruktur itu sendiri sebesar Rp410,4 triliun, mendorong sektor infrastruktur tetap *bullish* di tahun mendatang.

Perseroan sangat positif terhadap potensi pertumbuhan infrastruktur di tahun 2018 mendatang sehingga Perseroan menargetkan perolehan kontrak baru senilai Rp7,0 triliun hingga Rp8,0 triliun di tahun 2018 mendatang, meningkat 27% dari Rp5,9 triliun (2017), sehingga total *order book* 2018 yang dimiliki Perseroan sebesar Rp16,5 triliun. Untuk mendukung pengerjaan *order book* tersebut, Perseroan merencanakan belanja modal (*capital expenditure* : "*capex*") pada tahun 2018 sebesar Rp1,6 triliun meningkat 80,9% dari *capex* 2017 sebesar Rp905 miliar di luar akuisisi LMA. Demikian juga rencana *capex* hingga tahun 2022, yang rata-rata di atas *capex* 2017 tersebut, menunjukkan optimisme Perseroan terhadap sektor infrastruktur.

Coupled with the policy in the infrastructure sector as follows:

Development of connectivity to support economic growth centers, major logistics channels, and interfaod integration in order to foster strategic area development. Cross-sectoral coordination is included with the local government to ensure that its implementation runs smoothly and fits regional needs but is in line with national targets.

Improved planning, effective coordination pattern and regulatory strengthening to overcome technical barriers Empowering private, state-owned, local-owned enterprises, local governments through the development of creative financing or KPBU or non-KPBU schemes to cover the funding gap for infrastructure financing; and the total infrastructure budget itself amounted to Rp410.4 trillion, pushing the infrastructure sector to remain bullish in the coming year.

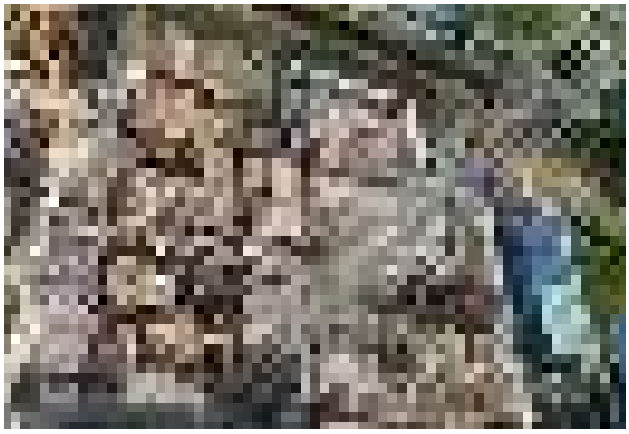

The Company is very positive about the growth potential of infrastructure in 2018 so that the Company targets new contracts valued at Rp7.0 trillion to Rp8.0 trillion in 2018, up 27% from Rp5.9 trillion (2017), bringing the total order book of 2018 owned by the Company amounting to Rp16.5 trillion. To support the order book, the Company plans capital expenditure (capital expenditure: "capex") in 2018 amounting to Rp1, 6 trillion increased 80.9% of 2017 capex of Rp905 billion beyond the acquisition. Similarly, the capex plan until 2022, which averaged above the 2017 capex, shows the Company's optimism towards the infrastructure sector.

PENINGKATAN TATA KELOLA SEBAGAI BAGIAN DARI PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN | GOVERNANCE IMPROVEMENT AS PART OF THE SUSTAINABLE GROWTH

Komitmen Perseroan terhadap penerapan Tata Kelola didasari pada keyakinan bahwa penerapan Tata Kelola secara konsisten dan berkesinambungan akan memberikan nilai premium terhadap seluruh pemangku kepentingan. Penerapan tersebut dilakukan melalui praktik bisnis yang baik, yang menjunjung tinggi etika bisnis serta penerapan sistem peringatan dini di dalam kerangka Tata Kelola.

The Company's commitment to Governance implementation is based on the belief that its implementation consistent and continuously will provide premium value to all stakeholders. Its implementation is conducted through good business practices, which uphold business ethics and the early warning systems implementation within the framework of Good Corporate Governance.

"Melalui IPO, Perseroan meningkatkan Tata Kelola yang telah terbentuk dengan melengkapi infrastruktur Tata Kelola yang telah ada seperti pembentukan Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi yang beranggotakan pihak-pihak independen serta mengangkat Komisaris Independen dan Direktur Independen, di samping pembuatan *charter-charter* yang dibutuhkan oleh Lembaga-lembaga tersebut."

"Through the IPO, the Company enhances the existing Governance by complementing its current Governance infrastructure such as the establishing of the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee which consists of independent parties and appointing Independent Commissioners and Independent Directors, in addition to prepare the charters required."

Dan untuk menjamin implementasi Tata Kelola dalam kehidupan sehari-hari, Perseroan melakukan sosialisasi Tata Kelola dan menjadikan Tata Kelola sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga Perseroan, di samping itu juga dibutuhkan agen-agen perubahan yang dapat mengawal dengan baik.

Adanya agen-agen perubahan tersebut diikuti dengan kesadaran dari seluruh pemangku kepentingan. Karenanya Perseroan akan mengembangkan, memformulasikan dan mendokumentasikan praktik-praktik yang telah menjadi budaya perusahaan menjadi Kode Etik dan Pedoman Kebijakan Perseroan secara baku merujuk kepada azas-azas Tata Kelola yaitu Keterbukaan, Akuntabilitas, Bertanggung jawab, Independensi dan Berkeadilan atau yang lebih dikenal sebagai TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency* dan *Fairness*). Sebagai salah satu cara untuk menunjang pelaksanaan Tata Kelola, Perseroan mengimplementasikan ERP-SAP yang telah live.

In order to ensure Governance implementation in everyday life, the Company socializes the Governance and makes it an integral part of the Company's citizens, as well as the need for change agents who can assist properly.

The existence of these change agents is followed by awareness of all stakeholders. Therefore, the Company will develop, formulate and document corporate culture practices to be Code of Conduct and the Corporate Policy Guidelines referring to the Governance Principles of Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness known as TARIF. As one to support Governance implementation, the Company implements ERP-SAP.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN | CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Perseroan menyadari bahwa dirinya lahir dan berkembang bersama lingkungan tempat Perseroan menjalankan roda bisnisnya dan menjadi satu bagian integral. Karenanya Perseroan menilai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ("CSR") sebagai satu kesatuan ekosistem bagi kelangsungan hidup Perseroan. Sehingga CSR bukan lagi menjadi kewajiban bagi Perseroan, tetapi telah menjadi bagian yang hakiki bagi kehidupan sehari-hari Perseroan. Di dalam pengembangan program-program CSR nya, Perseroan mengacu kepada pembangunan yang berkelanjutan yang tidak saja berorientasi kepada aspek ekonomi (profit) tetapi harus bermanfaat kepada masyarakat, terlebih komunitas sekitar dan pelestarian lingkungan tempat Perseroan menjalankan operasinya. Pelaksanaan program-program CSR tersebut terintegrasi dengan kerangka Tata Kelola yang telah dimiliki Perseroan. Kerangka tersebut dikenal di dalam lingkungan Perseroan sebagai kerangka *Environmental, Social and Governance* ("ESG framework")

The Company recognizes that it was established and grows within the environment where the Company operates, and becomes an integral part. Therefore the Company sees Corporate Social Responsibility ("CSR") as an integral ecosystem for the Company's survival. So that CSR is no longer an obligation for the Company, but has become an essential part of the daily life of the Company. In the development of its CSR programs, the Company refers to sustainable development that is not only oriented to the economic aspect (profit) but have to be beneficial to the community, especially local communities and environment preservation where the Company operates. Those CSR programs implementation is integrated with the Governance framework. The framework is known within the Company as an Environmental, Social and Governance framework ("ESG framework")

"Pelaksanaan program-program CSR tersebut terintegrasi dengan kerangka Tata Kelola yang telah dimiliki Perseroan. Kerangka tersebut dikenal di dalam lingkungan Perseroan sebagai kerangka *Environmental, Social and Governance* ("*ESG framework*")."

"The implementation of these CSR programs is integrated with the Corporate Governance framework. The framework is known within the Company as an Environmental, Social and Governance framework ("ESG framework")."

Perseroan memiliki program CSR jangka panjang, yaitu menjadikan CSR sebagai bagian dari *Value Creation Strategy* yang akan meningkatkan Stakeholders Value. Hal didasarkan pada pemikiran bahwa program CSR harus dilaksanakan secara berkesinambungan serta harus memberikan manfaat jangka panjang tidak saja kepada pihak yang mendapatkan manfaat secara langsung, tetapi juga kepada seluruh Pemangku Kepentingan.

The Company has a long-term CSR program, which makes CSR as part of the Value Creation Strategy that will increase Stakeholders Value. It is based on the idea that CSR programs should be implemented ongoing basis and have to provide long-term benefits not only to those who benefit directly, but also to all Stakeholders.

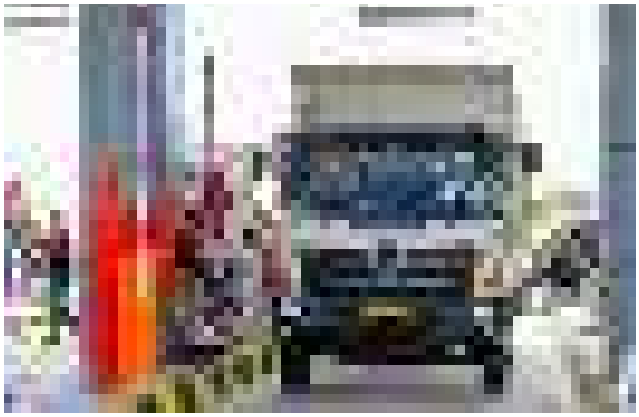

Paket 1 Bakauheni-Sidomulyo bagian dari Proyek Tol Trans Sumatera yang telah diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Januari 2018, merupakan salah satu proyek infrastruktur berskala nasional yang telah berhasil diselesaikan oleh PP Presisi.
Peran dan posisi PP Presisi sejalan dengan program pengembangan infrastruktur Indonesia.

Package 1 Bakauheni-Sidomulyo as a part of the Trans Sumatra Toll Project, which was inaugurated by Mr. President Jokowi on January 21, 2018, is one of the national-scale infrastructure project that has been successfully completed by PP Presisi.

The role and position of PP Presisi are in line with Indonesia's infrastructure development program.

PENUTUP | CLOSING

Pencapaian kinerja tahun 2017 sangat membanggakan kita semua, melalui transformasi bisnis, Perseroan telah menjadi perusahaan konstruksi terintegrasi berbasis alat berat terkemuka di Indonesia. Bisnis transformasi yang telah dilaksanakan menempatkan Perseroan pada tingkat pertumbuhan yang sangat pesat, khususnya selama tahun 2017. Keberhasilan tersebut tidak luput dari dukungan segenap Pemangku Kepentingan. Pada kesempatan ini, kami mewakili Perseroan menghaturkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Pemangku Kepentingan, khususnya kepada para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Karyawan yang secara bahu membahu dengan penuh semangat mewujudkan target pertumbuhan tahun 2017. Semoga asa yang telah kita tunjukkan dalam melakukan transformasi bisnis dapat terus dilanjutkan di masa-masa mendatang dalam mewujudkan pertumbuhan Perseroan yang berkesinambungan.

2017 performance accomplishments is very proud all of us, through business transformation, the Company has become a leading integrated heavy equipment-based construction company in Indonesia. The implemented business transformation assigned the Company at a very rapid rate of growth, especially during 2017. The success is not spared from the support of all Stakeholders. On this occasion, we are representing the Company would like to convey our deepest gratitude and appreciation to all Stakeholders, especially to our Shareholders, Board of Commissioners and Employees who work together to energetically realize the growth target of 2017. Hopefully, our eagerness and willingness showed in last business transformation will continue in order to realize the Company sustainable growth in the future.

Atas nama Direksi,
On behalf of the Board of Directors,

Iswanto Amperawan
Direktur Utama | President Director

Chapter-3
BAB-3

Identitas Perusahaan
Informasi Umum
Budaya & Nilai Perusahaan
Profil Dewan Komisaris
Profil Direksi
Informasi Pemegang Saham
Pemegang Saham Utama
Entitas Anak
Jejak Langkah
Lini Bisnis
Kepemilikan Alat Berat
Wilayah Operasi
Rincian Transformasi Bisnis
Daftar Sertifikasi
Pengelolaan SDM

Corporate Identity
General Information
Corporate Culture & Value
Board of Commissioners' Profile
Board of Directors' Profile
Shareholders Information
Major Shareholder
Subsidiary
Milestone
Core Business
Heavy Equipment Ownership
Operation Coverage Areas
Business Transformation in Detail
Certifications List
Human Resource Management

Chapter-3

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

IDENTITAS PERUSAHAAN
CORPORATE IDENTITY

PRESISI

Workshop

Jl. Raya Narogong Km.16,
Pangkalan 6 Bekasi 17153

Kantor Pusat

Plaza PP
Wisma Robinson Lt. 3
Jl. TB. Simatupang No. 57
Pasar rebo – Jakarta Timur 13760

Tanggal Pendirian:

6 Mei 2004

Dasar hukum pendirian:

Akta pendirian No. 2 tanggal 6 Mei 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Chotib, SH dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. C-16498HT.o1.01.TH.2004 tanggal 1 Juli 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 24 April 2012, Tambahan No. 20149

Telepon :

+62 21 824 83 255/240
Faksimili :
+62 21 823 0353

Bidang

Jasa konstruksi, Engineering Procurement & Contruction (EPC), pekerjaan mekanikal – electrikal, jasa transportasi/angkutan, jasa persewaaan, perdagangan, pertambangan.

Email :

corsec@pp-presisi.co.id
Website :
www.pp-presisi.co.id

VISI DAN MISI PERUSAHAAN
CORPORATE VISION AND MISSION

VISI | VISION

Menjadi perusahaan jasa konstruksi terintegrasi terkemuka di Indonesia dan regional.

To be a leading integrated construction company in Indonesia as well as regional

MISI | MISSION

Menyediakan jasa pengerjaan konstruksi terintegrasi bernilai tambah kepada semua konsumen.

To deliver business lines owned services on an integrated basis to provide value added services to all customers.

STRUKTUR ORGANISASI
ORGANIZATION STRUCTURE

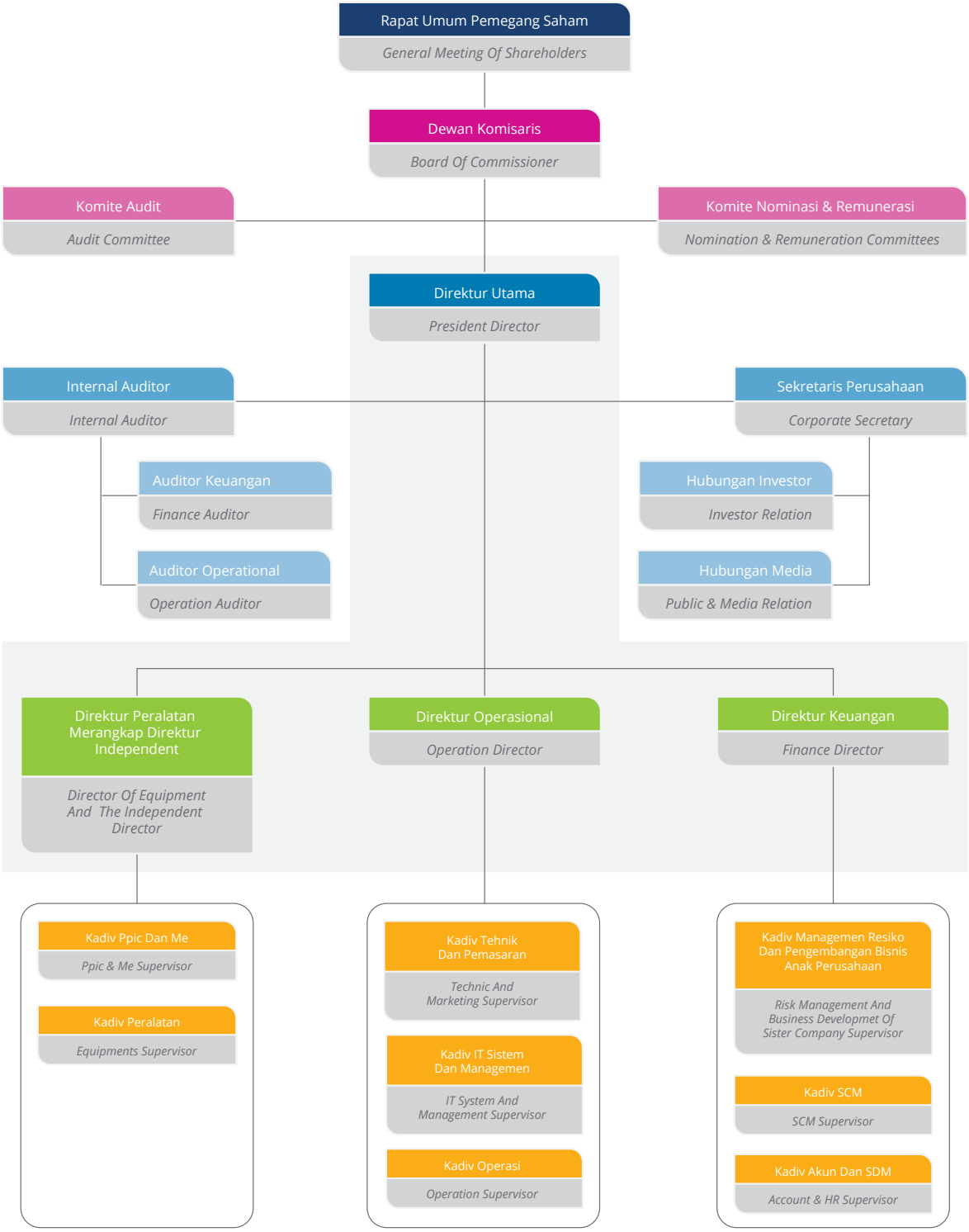

PROFIL DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS' PROFILE

Ir. Muhammad Toha Fauzi, MT

Komisaris Utama
President Commissioner

Warga Negara Indonesia, 51 tahun

Lahir di Bangkalan, 28 Januari 1966

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Magister Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung. Beliau bergabung dengan PT PP (Persero) Tbk sejak 1992 dan saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT PP Presisi. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Divisi II Operasi di Jakarta (2011-2016), Kepala Divisi I Operasi di Medan (2008-2011), dan Kepala Cabang I di Medan (2007-2008).

Indonesian citizen, 51 years old

Born in Bangkalan, January 28, 1966

Mr. Fauzi earned his Bachelor's Degree in Civil Engineering from Gadjah Mada University, Yogyakarta, and Master's Degree in Civil Engineering from Bandung Institute of Technology. He has joined PT PP (Persero) Tbk since 1992, and presently serves as PT PP Presisi's President Commissioner. Previously, Mr. Fauzi served as the Head of Operation Division II in Jakarta (2011-2016), Head of Operation Division I in Medan (2008-2011) and Branch Head I in Medan (2007-2008).

PROFIL KOMISARIS
BOARD OF COMMISIONERS' PROFILE

Ir. Nawang Sri Retno Kartiko, M. EngM

Komisaris
Commissioner

Warga Negara Indonesia, 53 tahun

Lahir di Ngawi, 17 November 1964

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Arsitektur Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1988 dan Master of Engineering Management Melbourne University pada tahun 2008. Beliau bergabung bersama PT PP (Persero) sejak tahun 1989 dan meniti karir sebagai Site Engineer Cabang III – Proyek Jakarta International Airport Cengkareng. Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris PT PP Presisi. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Supply Chain Management PT PP Peralatan Konstruksi (2016), Kepala Divisi Pengendalian Operasi dan Bisnis PT PP (Persero) Tbk (2015-2016) dan Manager Analis Operasi-1 PT PP (Persero) Tbk (2009-2015)

Indonesian citizen, 53 years old

Born in Bangkalan, January 28, 1966

Ms. Kartiko earned her Bachelor's Degree in Architectural Engineering from Gadjah Mada University, Yogyakarta, in 1988 and her Master of Engineering Management from Melbourne University in 2008. She has joined PT PP (Persero) since 1989, and started her career as a Site Engineer of Branch III - Jakarta International Airport Cengkareng Project. She presently serves as a Commissioner of PT PP Presisi. Previously, She served as the Head of Supply Chain Management Division of PT PP Peralatan Konstruksi (2016), Head of Operation and Business Control Division of PT PP (Persero) Tbk (2015-2016) and Manager of Operation Analyst 1 of PT PP (Persero) Tbk (2009-2015).

PROFIL DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS' PROFILE

Ir. Ketut Darmawan

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Komisaris Independen,

Warga Negara Indonesia, 58 tahun

Lahir di Singaraja, 11 Juli 1959,

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari ITB Bandung pada tahun 1983. Pada awalnya, beliau merupakan anggota PT PP sejak tahun 1983 diawali sebagai Staff Cabang III Jakarta, Project Manager PT PP pada Cabang III Jakarta (1990—1993), Koordinator Project PT PP pada Cabang III Jakarta (1990-1993), Manajer Pemasaran PT PP pada Divisi Pemasaran (1995-1999), Wakil Kepala Cabang PT PP pada Cabang III Jakarta (1993-1995), Kepala Divisi Pemasaran PT PP pada Divisi Pemasaran (1999 – Agustus 2006), dan terakhir sebagai Direktur Pemasaran pada tahun 2006-2011 dan Direktur Operasi pada tahun 2011- 29 April 2016. Setelah itu beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 14 Agustus 2017

Independent Commissioner,

Indonesian citizen, 58 years old

Born in Singaraja, July 11, 1959,

Mr. Darmawan earned his Bachelor's Degree in Civil Engineering from Bandung Institute of Technology in 1983. He initially joined PT PP in 1983 as a Staff of Branch III Jakarta, Project Manager of PT PP's Branch III Jakarta (1990 – 1993), Project Coordinator of PT PP's Branch III Jakarta (1990-1993), Marketing Manager of PT PP's Marketing Division (1995-1999), Deputy Branch Head of PT PP's Branch III Jakarta (1993-1995), Head of Marketing Division of PT PP's Marketing Division (1999-August 2006), and lastly served as Marketing Director from 2006-2011 and Operation Director from 2011-April 29, 2016. Subsequently, He has served as the Company's Independent Commissioner since August 14, 2017.

PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS' PROFILE

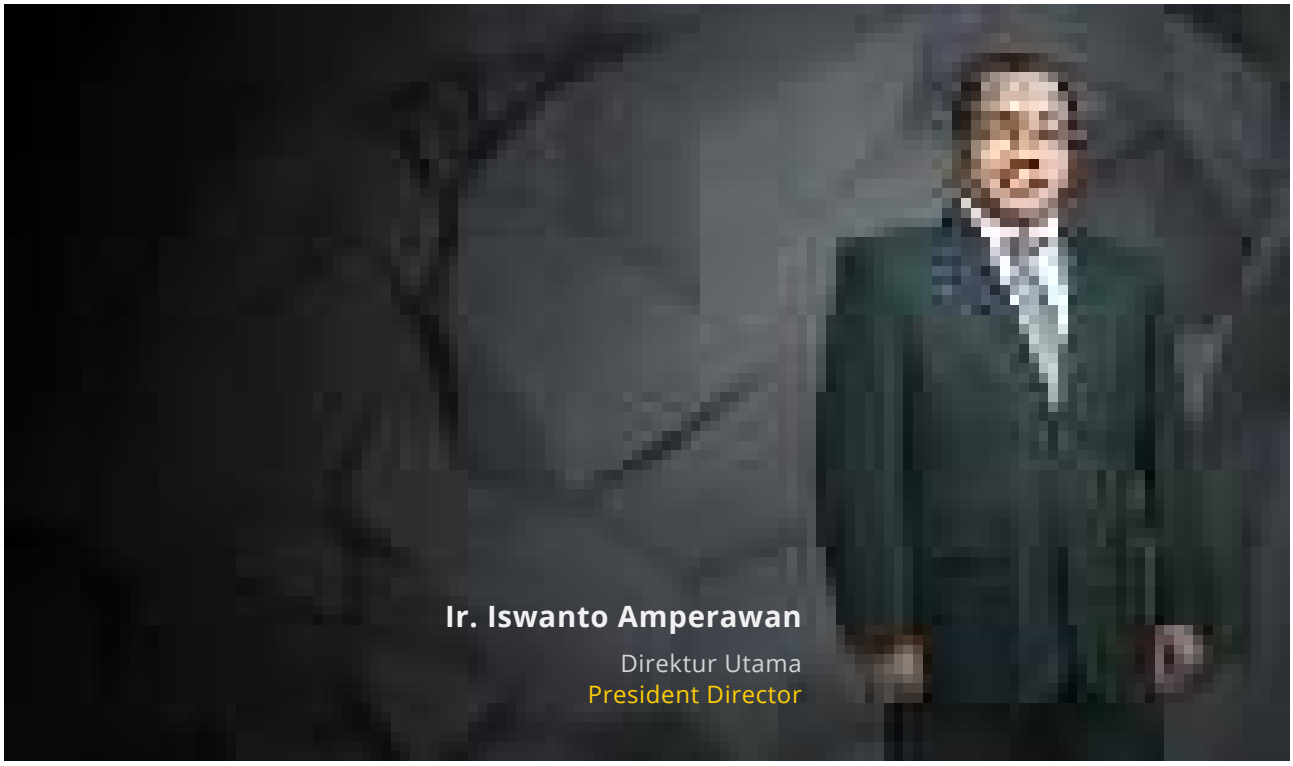

Ir. Iswanto Amperawan

Direktur Utama
President Director

Warga Negara Indonesia, 51 tahun,

Lahir di Bengkulu, 30 Mei 1966

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1991. Beliau bergabung dengan PT PP (Persero) Tbk sejak tahun 1991 dan memulai karirnya sebagai Site Engineering Manager Divisi Operasi 1. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT PP Presisi. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Cabang 3 Jakarta PT PP (Persero) Tbk (2015 – 2017), Kepala Cabang 5 Semarang PT PP (Persero) Tbk (2013 – 2015), Project Manager Divisi Operasi 3 PT PP (Persero) Tbk (2004 – 2015), and Project Manager Divisi Operasi 1 PT PP (Persero) Tbk (1999 – 2004).

Indonesian citizen, 51 years old,

Born in Bengkulu on May 30, 1966

Mr. Amperawan earned his Bachelor's Degree in Civil Engineering from Bandung Institute of Technology in 1991. He has joined PT PP (Persero) Tbk since 1991 and started his career as the Site Engineering Manager of Operation Division 1. He presently serves as the President Director of PT PP Presisi. He previously served as Head of Branch 3 Jakarta PT PP (Persero) Tbk (2015-2017), Head of Branch 5 Semarang PT PP (Persero) Tbk (2013-2015), Project Manager of Operation Division 3 PT PP (Persero) Tbk (2004-2015), and Project Manager of Operation Division 1 PT PP (Persero) Tbk (1999-2004).

PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS' PROFILE

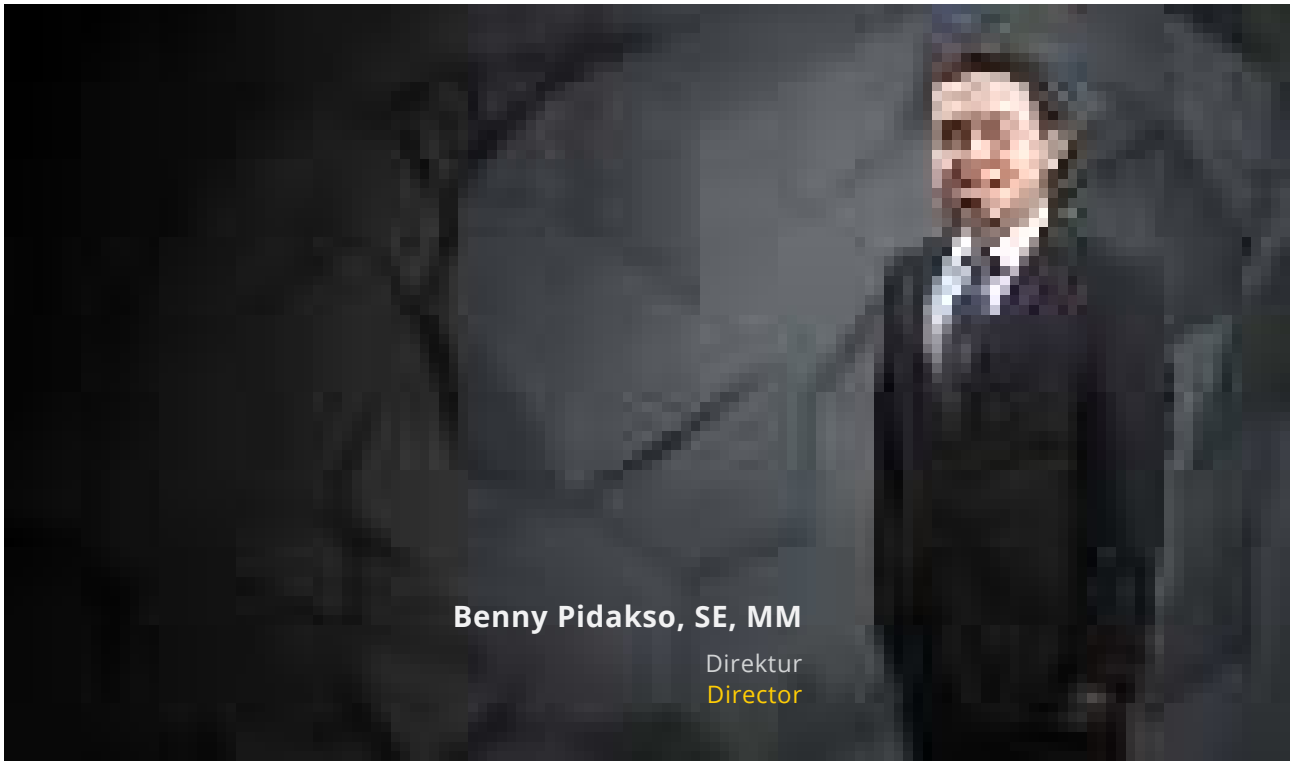

Warga Negara Indonesia, 34 tahun

Lahir di Madiun, 17 Februari 1983

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2005 dan Magister Manajemen di Universitas Prasetiya Mulya tahun 2017. Beliau bergabung bersama PT PP (Persero) Tbk sejak 1 Juni 2005. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan PT PP Presisi sejak 2013. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai ASKU Cabang VII PT PP (Persero) Tbk. (2011-2013)

Indonesian citizen, 34 years old,

Born in Madiun on February 17, 1983

Mr. Pidakso earned his Bachelor's Degree in Economy, majoring in Accounting from Airlangga University, Surabaya , in 2005 and Master of Business Administration from Prasetiya Mulya University in 2017. He has joined PT PP (Persero) Tbk since June 1, 2005. He presently serves as the Finance Director of PT PP Presisi since 2013. Mr. Pidakso previously served as ASKU Branch VII of PT PP (Persero) Tbk (2011-2013).

PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS' PROFILE

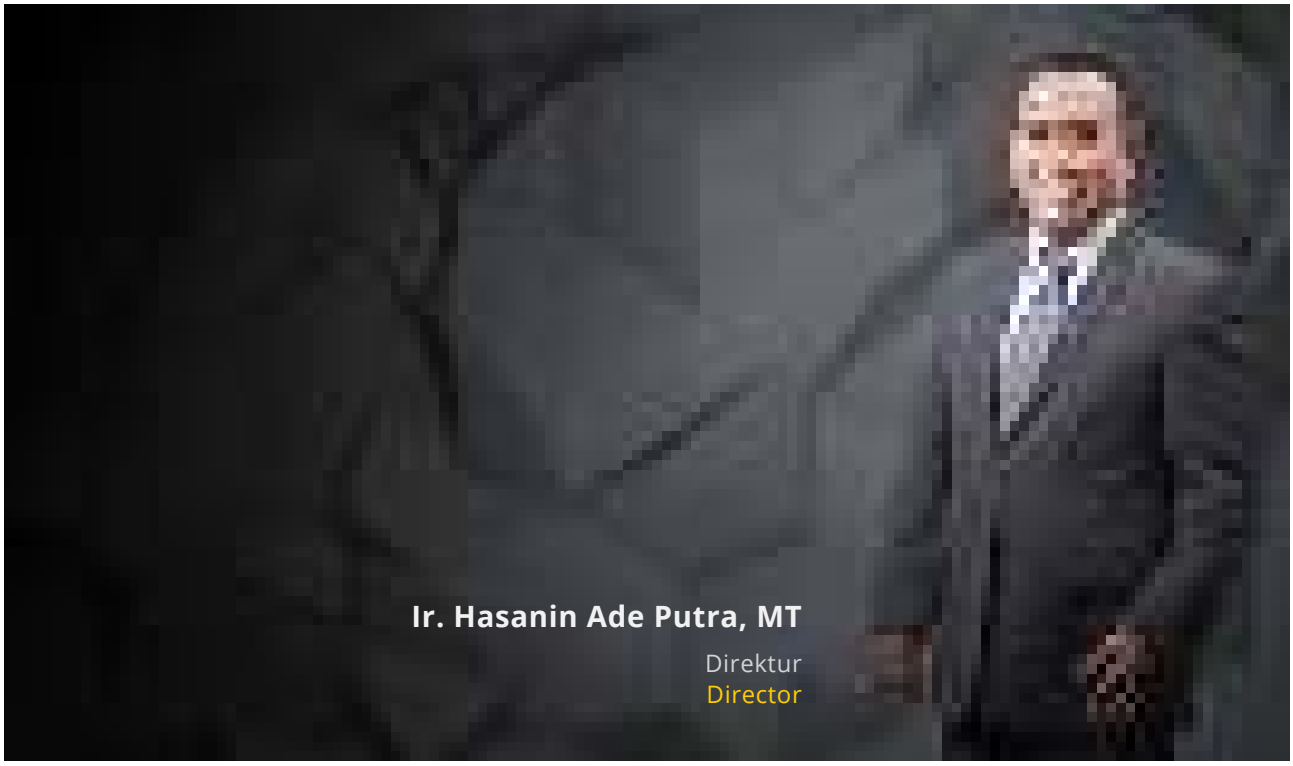

Warga Negara Indonesia, 52 tahun

Lahir di Oku Timur, 4 November 1965

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1991 dan Magister Teknik Sipil di Universitas Lambung Mangkurat. Beliau bergabung bersama PT PP (Persero) sejak Februari 1992 dengan spesialisasi bidang Sipil (Infrastruktur). Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Operasi PT PP Presisi. Awalnya beliau adalah Site Manager untuk proyek Marine Works Suralaya. Pengalaman proyek pelabuhan sebagai Project Manager Dermaga Petikemas Pelabuhan Panjang, Dermaga dan Breakwater Pelabuhanratu, Breakwater Pelabuhan Cilacap, Dermaga Petikemas Pelabuhan Tanjung Emas dan Proyek jalan di Kalimantan Selatan. Sebelumnya, beliau juga pernah menjabat sebagai Project Manager K1 untuk Proyek PLTG Talangduku, PLTMG Bangkanai dan Marketing Manager EPC

Indonesian citizen, 52 years old

Born in East Oku, November 4, 1965

Mr. Putra earned his Bachelor's Degree in Civil Engineering from Bandung Institute of Technology in 1991 and Master of Civil Engineering from Lambung Mangkurat University. He has joined PT PP (Persero) Tbk since February 19922, specializing in the Civil (Infrastructure) sector. He presently serves as the Operation Director of PT PP Presisi. He initially served as the Site Manager of Suralaya Marine Works project. His experience in port projects include Project Manager of Panjang Port Container Terminal, Pelabuhan Ratu Port and Breakwater, Cilacap Port Breakwater, Tanjung Emas Port Container Terminal, and road project in South Kalimantan. Previously, He also served as Project Manager K1 for Talangduku Gas Fired Power Plant, Bangkanai Gas Turbine Power Plant, and EPC Marketing Manager.

PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS' PROFILE

Warga Negara Indonesia, 55 tahun

Lahir di Blitar, 2 Januari 1962

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari ITS Surabaya pada tahun 1985. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Independen PT PP Presisi. Pada awalnya, beliau merupakan anggota PT PP sejak tahun 1986 diawali sebagai Site Engineering Manager Divisi Operasi 1 dan terakhir sebagai Project Manager Divisi EPC pada tahun 2011-2015. Menjabat sebagai Direktur di PT Muba Daya Pratama sejak 26 Juni 2015 hingga 4 Agustus 2016. Kemudian menjabat sebagai Direktur Operasi di PT PP Energi dari 4 Agustus 2016 sampai dengan 4 Februari 2017. Setelah itu beliau menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan sejak 14 Agustus 2017

Indonesian citizen, 55 years old

Born in Blitar, January 2, 1962

Mr. Subyandono earned his Bachelor's Degree in Civil Engineering from ITS Surabaya in 1985. He presently serves as an Independent Director of PT PP Presisi. He initially joined PT PP in 1986 as the Site Engineering Manager of Operation Division 1, and lastly served as the Project Manager of EPC Division from 2011-2015. He subsequently served as a Director of PT Muba Daya Pratama from June 26, 2015 to August 4, 2016. Subsequently served as Operation Director of PT PP Energy from August 4, 2016 to February 4, 2017. Subsequently, He has served as the Company's Independent Director since August 4, 2017.

INFORMASI PEMEGANG SAHAM
SHAREHOLDERS INFORMATION

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NOMINAL	PERSENTASE	STATUS KEPEMILIKAN
Modal Dasar	24.000.000.000	2.400.000.000.000		
Modal Ditempatkan	10.224.271.000	1.022.427.100.000		
Disetor Penuh PT PP (Persero) Tbk	7.871.480.000	787.148.000.000	76,99	BUMN
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan	1.570.000	157.000.000	0,01	
Masyarakat	2.351.221.000	235.122.100.00	23,00	Individu dan institusi lokal dan asing

HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM
ASSOCIATION BY WAY OF MANAGEMENT AND SUPERVISION BETWEEN THE COMPANY AND THE LEGAL ENTITY SHAREHOLDERS

No.	Nama	PT PP	Perseroan	LMA
1.	Tumiyana	DU	-	-
2.	Lukman Hidayat	D	-	-
3.	M. Aprindy	D	-	-
4.	Abdul Haris Tatang	D	-	-
5.	Muhammad Toha Fauzi	D	KU	-
6.	Agus Purbianto	D	-	-
7.	Andi Gani Nena Wea	KU/KI	-	-
8.	Aryanto Sutadi	KI	-	-
9.	Muhammad Khoerur Roziqin	K	-	-
10.	Sumardi	K	-	-
11.	Arie Setiadi Moerwanto	K	-	-
12.	Wismana Adi Suryabrata	K	-	-
13.	Ketut Darmawan	-	KI	-
14.	Nawang Sri Retno Kartiko	-	K	-
15.	Iswanto Amperawan	-	DU	KU
16.	Arief Subyandono	-	DI	-
17.	Benny Pidakso	-	D	-
18.	Hasanin Ade Putra	-	D	-
19.	Supriyandi	-	-	K
20.	Afandi Tjandra	-	-	DU
21.	Zainal Abidin	-	-	D
22.	Hadi Susanto	-	-	D

Catatan:

KU : Komisaris Utama
KI : Komisaris Independen
K : Komisaris
DU : Direktur Utama
DI : Direktur Independen
D : Direktur

PEMEGANG SAHAM UTAMA
MAJOR SHAREHOLDERS

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM
SHAREHOLDERS DESCRIPTION

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk ("PT PP")

SEJARAH SINGKAT

PT PP yang semula berbentuk Perusahaan Negara, didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1961 tanggal 29 Maret 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan, yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 84/1961, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2218. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Pembangunan Perumahan Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 50 tahun 1971, bentuk Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas PT Pembangunan Perumahan No. 78 tanggal 15 Maret 1973 juncto akta Perubahan No. 247 tanggal 21 Maret 1974, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusannya di bawah No. Y.A.5/105/2 tanggal 30 Maret 1974 serta telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 3 April 1974, di bawah No.1186 dan 1187 dan diumumkan dalam Tambahan No. 249, BNRI No. 48 tanggal 14 Juni 1974 ("Akta Pendirian PP (Persero)").

Anggaran Dasar PT PP telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah mengalami perubahan seluruh anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan perubahan nama perseroan dari semula "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan" menjadi "PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk" yaitu sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk. disingkat PT PP (Persero) No. 02 tanggal 5 Januari 2010, yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-00127.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0000185.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 82, BNRI No. 29752 tanggal 12 Oktober 2010 ("Akta No. 02/2010"). Perubahan Anggaran Dasar terakhir PT PP Persero Tbk. sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk. disingkat PT PP (Persero) Tbk. No. 67 tanggal 28 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham

BRIEF HISTORY

PT PP, which was initially established as a State Company pursuant to the Government Regulation No. No. 63 of 1961 dated March 29, 1961, concerning the Establishment of Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan, which was announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 84 of 1961, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 2218. Subsequently, pursuant to the Government Regulation No. 39 of 1971 concerning the Transformation of Perusahaan Negara (PN) Pembangunan Perumahan into a Limited Liability Company (Persero), which was announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 50 of 1971, the form of Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan was changed into a Limited Liability Company (Persero), and PT PP was established by virtue of Deed of Limited Liability Company PT Pembangunan Perumahan No. 78 dated March 15, 1973, juncto the Deed of Amendment No. 247 dated March 21, 1974, both of which were drawn up before Kartini Muljadi, S.H., a Notary in Jakarta, and was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia by virtue of Decree No. Y.A.5/105/2 dated March 30, 1974, registered in the District Court of Jakarta on April 3, 1974, under No. 1186 and 1187, and announced in the Supplement No. 249 to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 48 dated June 14, 1974 ("Deed of Establishment of PP (Persero)").

PT PP's Articles of Association have been amended several times, and have been amended in its entirety to conform to the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board Regulation, and the Company's name has been changed from "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan" to "PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk." as stipulated in the Deed of Shareholder Circular Resolutions and Amendment to the Articles of Association of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk, abbreviated as PT PP No. 02 dated January 5, 2010, drawn up before Imas Fatimah, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, which was approved by the Minister of Law and Human Rights ("MoLHR") of the Republic of Indonesia by virtue of Decree No. AHU-00127.AH.01.02. Tahun 2010 dated January 5, 2010, and was registered in the Company Register under No. AHU-0000185.AH.01.09.Tahun 2010 dated January 5, 2010, and was announced in Supplement No. 82 to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 29752 dated October 12, 2010 ("Deed No. 02/2010"). The most recent amendment to PT PP Persero Tbk's Articles of Association is stipulated in the Deed of Resolutions of Extraordinary General Meeting of Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk or abbreviated as PT PP (Persero) Tbk No. 67 dated December 28, 2016, drawn up before Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta, which was approved by the Minister of Law and Human Rights

PEMEGANG SAHAM UTAMA
MAJOR SHAREHOLDERS

sesuai dengan surat keputusannya di bawah No. AHU-0025609.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 serta telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("SABH") di bawah No. AHU-AH.01.03-0113524 tanggal 28 Desember 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0157078.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 ("Akta No. 67/2016") yakni mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 2 anggaran dasar PT PP.

PT PP berdomisili di Plaza PP, Wisma Subiyanto, Jalan Letjen TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta 13760

pursuant to Decree no. AHU-0025609.AH.01.02.Tahun 2016 dated December 28, 2016; and was received and and recorded in the database of Legal Entity Administration System ("LEAS") of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0113524 dated December 28, 2016, and was registered in the Company Register under No. AHU-0157078.AH.01.11. Tahun 2016 dated December 28, 2016, ("Deed No. 67/2016"), which amended the provisions of Article 4 paragraph 1 and 2 of PT PP's Articles of Association;

PT PP berdomisili di Plaza PP, Wisma Subiyanto, Jalan Letjen TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta 13760

MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk. atau disingkat PT PP (Persero) Tbk. No. 25 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH No. AHU-AH.01.03-0936938 tanggal 4 Juni 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3512783.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 4 Juni 2015, maksud dan tujuan PT PP ialah turut serta melakukan usaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa, penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, Engineering Procurement & Construction (EPC) perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi, kepariwisataan, perhotelan, jasa engineering dan perencanaan, pengembang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

AIMS AND OBJECTIVES

Pursuant to the Deed of Amendment to Articles of Association of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk or abbreviated as PT PP (Persero) Tbk No. 25 dated May 21, 2015, drawn up before Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, which was received and recorded in the database of the Legal Entity Administration System under No. AHU-AH.01.03-0936938 dated June 4, 2015, and was registered in the Company Register under No. AHU-3512783.AH.01.11. Tahun 2015 dated, June 4, 2015, the aims and objectives of PT PP are to carry out business in construction industry, fabrication industry, leasing services, agency services, investment, agri-industry, Engineering, Procurement and Construction ("EPC"), trade, estate management, construction, engineering, information technology, tourism, hospitality, engineering and planning skill upgrade service to produce highly competitive quality products and/or services, and to generate profit in order to increase the company's value through the implementation of principles of Limited Liability Companies.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk. Disingkat PT PP (Persero) Tbk. No. 54 tanggal 18 April 2017, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris dan PPAT di Jakarta, telah memperoleh (i) persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0008957.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 19 April 2017; dan (ii) telah diterima dan dicatat di dalam database SABH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah No. AHU-AH.01.03-0128393 tanggal 19 April 2017 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0050763.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 19 April 2017 ("Akta No. 54/2017") juncto Daftar Pemegang Saham per 31 Januari 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT PP Persero Tbk. adalah sebagai berikut:

CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDER STRUCTURE

As stipulated in the deed of Meeting Resolutions of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk, abbreviated as PT PP (Persero) Tbk, No. 54 dated April 18, 2017, drawn up before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., a Notary and Land Conveyancer in Jakarta, which was (i) approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia ("MoLHR") by virtue of Decree No. AHU-0008957.AH.01.02.Tahun 2017 dated April 19, 2017; and (b) received and and recorded in the database of Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0128393 dated April 19, 2017, and was registered in the Company Register under No. AHU-0050763.AH.01.11.Tahun 2017 dated April 19, 2017, ("Deed No. 54/2017") juncto the Shareholder Register as of January 31, 2017, PT PP Persero Tbk's capital structure and shareholder composition are as follows:

PEMEGANG SAHAM UTAMA
MAJOR SHAREHOLDERS

Description	*Nominal Value of Rp100.- per Dwiwarna A Series and B Series*		
	Total Shares	*Total Nominal Value (Rupiah)*	*Percentage (%)*
Authorized Capital	1 Dwiwarna A Series 24.499.999.999 B Series	100.- 2,449,999,999,900.-	-
Issued and Paid-Up Capital			
1. The State the Republic of Indonesia	1 Dwiwarna A Series 3,161,947,835 B Series Shares	316,194,783,600	51
2. Public	3,037,949,518 B Series Shares	303,794,951,800	49
Total Issued and Fully Paid-up Capital	1 Dwiwarna A Series 6,199,897,353 B Series Shares	619,992,735,400	100
Shares in Portfolio	- 18,300,102,646 B Series Shares	1,830,007,264,600	-

SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk Disingkat PT PP (Persero) Tbk. No. 51 tanggal 29 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris dan PPAT di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam database SABH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah No. AHU-AH.01.03-0122723 tanggal 30 Maret 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0042238.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 30 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama/Independen : Andi Gani Nena Wea, SH
Komisaris : Letnan Jenderal (Purn) Sumardi
Komisaris : Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA
Komisaris : Muhammad Khoerur Roziqin, SE, M.Sc
Komisaris : DR. Ir. Arie Setiadi Moerwanto, M.Sc
Komisaris Independen : Irjen Pol (Purn) Drs. Aryanto Sutadi, M.Hum., M.Sc.

Direksi

Direktur Utama : Ir. Tumiyana, MBA
Direktur Perencanaan dan Pengembangan : Ir. Lukman Hidayat
Direktur Infrastruktur : Ir. M. Toha Fauzi, MT
Direktur EPC dan Kerjasama Luar Negeri : Ir. Abdul Haris Tatang, M.Sc
Direktur Gedung : Ir. M. Aprindy, MT
Direktur Keuangan dan Pengelolaan Kapital Manusia : Agus Purbianto, SE. Ak. MM

BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

As stipulated in the deed of Meeting Resolutions of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk, No. 51 dated March 29, 2017, drawn up before Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., a Notary and Land Conveyancer in Jakarta, which was received and recorded in the database of Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights under No. AHU-AH.01.03-0122723 dated March 30, 2017, and was registered in the Company Register under No. AHU-0042238.AH.01.11.Tahun 2017 dated March 30, 2017, the composition of PT PP Persero Tbk's Board of Commissioners and Board of Directors are as follows:

Board of Commissioners:

President / Independent Commissioner: Andi Gani Nena Wea
Commissioner: Sumardi
Commissioner: Wismana Adi Suryabrata
Commissioner: Muhammad Khoerur Roziqin
Commissioner: Arie Setiadi Moerwanto
Independent Commissioner: Aryanto Sutadi

Board of Directors

President Director: Tumiyana
Director of Planning and Development: Lukman Hidayat
Infrastructure Director: M. Toha Fauzi
Director of EPC and Foreign Cooperation: Abdul Haris Tatang
Director of Building: M. Aprindy
Director of Finance and Human Capital Management: Agus Purbianto

ENTITAS ANAK
SUBSIDIARY

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK | BRIEF INFORMATION OF SUBSIDIARY

PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("LMA")

RIWAYAT SINGKAT

PT LMA suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Timur. PT LMA didirikan dengan nama "PT Lancarjaya Mandiri Abadi" sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Lancarjaya Mandiri Abadi No. 63 tanggal 13 Mei 1994, yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kementerian Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-13300.HT.01.01.TH.94 tanggal 2 September 1994 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah No. 07/Leg/1997 tanggal 22 Januari 1997 ("Akta Pendirian").

Anggaran dasar PT LMA telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar PT LMA yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Lancarjaya Mandiri Abadi berkedudukan di Jakarta Timur No. 20 tanggal 7 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Ni Luh Sudiarsih, S.H., Notaris di Bekasi dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-60049.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 8 September 2008 serta telah didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0081247.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 8 September 2008 ("Akta No. 20/2008") dan perubahan anggaran dasar PT LMA yaitu persetujuan untuk meningkatkan modal dasar PT LMA dan modal disetor dalam kas PT LMA sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat PT Lancarjaya Mandiri Abadi Berkedudukan di Jakarta Timur No. 24 tanggal 27 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan Ni Luh Sudiarsih, S.H., Notaris di Bekasi dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-59707.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010; dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan, di bawah No. AHU-0092599.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 ("Akta No. 22/2010").

Perubahan anggaran dasar PT LMA yang terakhir dalam rangka penyesuaian dengan (i) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris *Emiten* atau Perusahaan Publik adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat

BRIEF HISTORY

PT LMA is a limited liability company established based on the laws of the Republic of Indonesia, domiciling in East Jakarta. PT LMA was established under the name "PT Lancarjaya Mandiri Abadi" as set forth in the Deed of Establishment of the Limited Liability Company PT Lancarjaya Mandiri Abadi No. 63 dated May 13, 1994, drawn up before James Herman Rahardjo, S.H., a Notary in Jakarta, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of Decree No. C2-13300.HT.01.01.TH.94 dated September 2, 1994, and was registered in the East Jakarta District Court Administrative Office under No. 07/Leg/1997 dated January 22, 1997 ("Deed of Establishment").

PT LMA's Articles of Association have been amended several times, and the provisions of PT LMA's Articles of Association have been amended in its entirety to conform to the Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company, as stipulated in the Deed of Meeting Resolutions of PT Lancarjaya Mandiri Abadi domiciling in East Jakarta No. 20 dated August 7, 2008, drawn up before Ni Luh Suidarsih, S.H., a Notary in Bekasi, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of Decree No. AHU-60049.AH.01.02.Tahun 2008 dated September 8, 2008, and was registered in the Company Register under No. AHU-0081247.AH.01.09.Tahun 2008 dated September 8, 2008, ("Deed No. 20/2008") and PT LMA's Articles of Association has been further amended to increase PT LMA's authorized capital and capital paid in cash of PT LMA as stipulated in the Deed of Meeting Resolutions of PT Lancarjaya Mandiri Abadi, Domiciling in East Jakarta No. 24 dated October 27, 2010, drawn up before Ni Luh Suidarsih, S.H., a Notary in Bekasi, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of Decree No. AHU-59707. AH.01.02. Tahun 2010 dated December 22, 2010, and was registered in the Company Register under No. AHU-0092599.AH.01.09. Tahun 2010 dated December 22, 2010, ("Deed No. 22/2010").

The last amendment to PT LMA's Articles of Association was made in order to conform to (i) the Bapepam and LK Regulation No. IX.J.1, Annex to the Decision of the Chairman of Bapepam and LK No. Kep-179/BL/2008 dated May 14, 2008, concerning Main Provisions of Articles of Association of Companies Conducting Equity Securities Public Offerings and Public Companies, (ii) the Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 dated December 8, 2014, concerning the Plan and Organization of General Meeting of Shareholders of Public Companies and (iii) Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated December 8, 2014, concerning the Board of Director and Commissioners of Issuers or Public Companies as stipulated in the Deed of Shareholder Circular Resolutions

ENTITAS ANAK
SUBSIDIARY

PT Lancarjaya Mandiri Abadi No. 01 tanggal 13 Juli 2017, yang dibuat di hadapan Irfansah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHUAH. 01.03-0152529 tanggal 13 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0085747.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 13 Juli 2017 ("Akta No. 01/2017").

PT Lancarjaya Mandiri Abadi No. 01 dated July 13, 2017, drawn up before Irfansah, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, which was received and recorded in the database of Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0152529 dated July 13, 2017, and was registered in the Company Register under No. AHU-0085747.AH.01.11. Tahun 2017 dated July 13, 2017, ("Deed No. 01/2017").

MAKSUD DAN TUJUAN PT LMA

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar PT LMA sebagaimana termaktub dalam Akta No. 01/2017, maksud dan tujuan PT LMA ialah:

1. Berusaha dalam bidang pembangunan;
2. Berusaha dalam bidang perdagangan;
3. Berusaha dalam bidang industri;
4. Berusaha dalam bidang pertanian;
5. Berusaha dalam bidang jasa, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak;
6. Berusaha dalam bidang pengangkutan udara;
7. Berusaha dalam bidang percetakan;
8. Berusaha dalam bidang pertambangan dan Energi;
9. Berusaha dalam bidang perbengkelan.

AIMS AND OBJECTIVES OF PT LMA

Pursuant to the provisions of Article 3 of PT LMA's Articles of Association as stipulated in the Deed No. 01/2017, the aims and objectives of PT LMA are:

1. To engage in the construction sector;
2. To engage in the trade sector;
3. To engage in the industrial sector;
4. To engage in the agricultural sector;
5. To engage in the service sector, except for legal and tax services;
6. To engage in the air transportation sector;
7. To engage in the printing sector;
8. To engage in the mining and energy sector;
9. To engage in the workshop sector.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 01/2017 juncto Daftar Pemegang Saham per tanggal 8 Agustus 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT LMA adalah sebagai berikut:

CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDER COMPOSITION

As set forth in the Deed No. 01/2017 juncto the Shareholder Register as of August 8, 2017, PT LMA's capital structure and shareholder composition are as follows:

Description	Nominal Value of Rp1,000,000.- per share		
	Total Shares (share)	Nominal Value (Rp)	%
Authorized Capital	**2,000,000**	**2,000,000,000,000.-**	
Issued and Paid-Up Capital			
1. The Company	331,500	331,500,000,000.-	51.00
2. PT Lancarjaya Investama Abadi	318,500	318,500,000,000.-	49.00
Total Issued and Fully Paid-up Capital	**650,000**	**650,000,000,000.-**	**100.00**
Total Shares in Portfolio	**1,350,000**	**1,350,000,000,000.-**	**-**

SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 01/2017, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT LMA adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Ir. Iswanto Amperawan
Komisaris : Supriyandi

Direksi

Direktur Utama : Afandi Tjandra
Direktur : Zainal Abidin
Direktur : Hadi Susanto

BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

As set out in the Deed. 01/2017, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT LMA is as follows:

Board of Commissioners:

President Commissioner: Ir. Iswanto Amperawan
Commissioner: Supriyandi

Board of Directors

President Director: Afandi Tjandra
Director: Zainal Abidin
Director: Hadi Susanto

JEJAK LANGKAH
MILESTONE

PERISTIWA PENTING 2017
EVENT HIGHLIGHT 2017

2014

Juni
Diakuisisi oleh PT PP (Persero) Tbk ("PTPP") dan diganti namanya menjadi PT PP Alat Konstruksi ("PP Alkon")
June
Acquired by PT PP (Persero) Tbk ("PTPP") and renamed as PT PP Alat Konstruksi ("PP Alkon")
Juli
Berganti nama menjadi PT PP Peralatan Konstruksi ("PP Peralatan")
July
Renamed as PT PP Peralatan Konstruksi ("PP Peralatan")

2004

Mei
Didirikan sebagai PT Prima Jasa Aldodua (PT PJA) yang menyediakan jasa penyewaan peralatan
May
Established as PT Prima Jasa Aldodua (PT PJA) which provided equipment rental service

JANUARI

Perseroan mendapatkan kontrak proyek pengendalian lahar Sinabung
The company awarded Sinabung lava control project contract

Dimulainya proyek pembangunan jalan tol Solo-Ngawi-Kertosono. Ruas : Ngawi-Kertosono Paket NKJ1 (STA.90+250 - STA. 110+250)
Started development of toll road Solo-Ngawi-Kertosono. Section : Ngawi-Kertosono. Package : NKJ1 (STA.90+250 - STA. 110+250)

FEBRUARI

Perseroan mendapatkan kontrak proyek AEON Sentul *Used Mix Complex*
The company awarded AEON Sentul project Used Mix Complex contract

Dimulainya pekerjaan *coal hauling* PT Sriwijaya Bara Logistic
Started coal hauling of PT Sriwijaya Bara Logistic

MARET

Perseroan mendapatkan kontrak proyek Bendungan Leuwi Keris
The company awarded Leuwi Keris Dam project contract

APRIL

Perseroan mendapatkan kontrak proyek Sodetan Cisangkuy
The company awarded Cisangkuy floodway project contract

MEI

Pergantian nama perseroan dari PT PP Peralatan Konstruksi menjadi PT PP Presisi
Renamed from PT PP Peralatan Konstruksi to PT PP Presisi

JUNI

Perseroan mendapatkan kontrak proyek Jalan Toll Manado-Bitung
The company awarded Toll Road manado-Bitung project contract

Mengakuisisi 51% saham PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("LMA")
Acquired 51% stake of PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("LMA")

JEJAK LANGKAH
MILESTONE

Equipment Rental Business | Expand Business Portfolio | Leap forward through organic and inorganic growth

2015

Juni
Memulai transformasi bisnis dengan memasuki lini bisnis Formwork
June
Started business transformation by entering Formwork business line

September
Memasuki bisnis Ready Mix
September
Entering Ready Mix business

2016

September
Memasuki usaha Pekerjaan Sipil dengan fokus pada Proyek Jalan Tol dan Bendungan
September
Entered Civil Works business with focus on Toll Road and Dam Projects

2017

Mei
Berganti nama menjadi PT PP Presisi ("PP Presisi")
May
Renamed as PT PP Presisi ("PP Presisi")

Juni
Mengakuisisi 51% saham PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("LMA")
June
Acquired 51% stake of PT Lancarjaya Mandiri Abadi ("LMA")

Juli
PT PP meningkatkan modal di PP Presisi
July
PT PP increased capital in PP Presisi

November
PP Presisi tercatat sebagai emiten di BEI
November
PP Presisi listed in IDX

JULI

Perseroan mendapatkan kontrak proyek Banjir Kanal Jakarta-Sunter (JEDI)
The company awarded Banjir Kanal Jakarta-Sunter (JEDI) project contract

PT PP meningkatkan modal di PP Presisi
PT PP increased capital in PP Presisi

AGUSTUS

Perseroan mendapatkan kontrak proyek Pengerukan Danau Tempe, Sulawesi Selatan
The company awarded Tempe Lake Dredging project , South Sulawesicontract project contract

Dimulainya proyek pembangunan jalan tol Sidomulyo-Kotabaru
Started development of toll road Sidomulyo-Kotabaru

SEPTEMBER

Perseroan mendapatkan kontrak *formwork* proyek Apartemen Evencio
The company awarded formwork contract of Evencio Apartement project

Sertifikasi ISO & OHSAS
ISO & OHSAS Certification

OKTOBER

Perseroan mendapatkan kontrak *Runway* Bandara Soetta Terminal 3 Section 2
The company awarded runway at Soetta Airport, Terminal 3 Section 2 project contract

Pelaksanaan ERP (SAP)
ERP (SAP) Implementation

NOVEMBER

Perseroan mendapatkan kontrak Bendungan Lolak Tahap II, Sulawesi Utara
The company awarded Lolak Dam Phase II project contract, North Sulawesi

PP Presisi terdaftar di BEI
PP Presisi listed in IDX

DESEMBER

Pembentukan Unit Reaksi Cepat (*Call Center*)
Establishment of Quick Response Unit (Call Center)

LINI BISNIS
BUSINESS LINES

CIVIL WORK

Way Sekampung Dam Project

Di Indonesia, jenis pekerjaan konstruksi disebutkan dalam undang-undang jasa konstruksi (UU no 18 tahun 1999), salah satunya adalah Pekerjaan Sipil yang mencakup antara lain pembangunan pelabuhan, bandar udara, jalan kereta api, pengamanan pantai, saluran irigasi atau kanal, bendungan, terowongan, struktural gedung, jalan, jembatan, reklamasi rawa, pekerjaan pemasangan perpipaan, pekerjaan pemboran, dan pembukaan lahan.

Perseroan merupakan entitas anak dari PT PP yang bertanggung jawab dalam menjalankan Pekerjaan Sipil yang merupakan salah satu proses penting dalam keseluruhan proses konstruksi suatu proyek. Dengan pelaksanaan akuisisi LMA menjadi salah satu Entitas Anak Perseroan, Perseroan dapat memperluas portofolio proyek-proyeknya ke sektor swasta.

Saat ini Pekerjaan Sipil yang dilakukan oleh Perseroan meliputi pekerjaan proyek infrastuktur, diantaranya pekerjaan proyek jalan, bendungan, dan dermaga yang masing-masing Perseroan melakukan tipe pekerjaan *land clearing, cut and fill*, lapisan perkerasan jalan, *concrete*, dan *rigid/flexible pavement*. Dalam pelaksanaannya, Perseroan bekerja sama dengan *vendor-vendor* seperti Kobelco, United Tractor, Lieber, Caterpillar, XCMG, Zoomlion, dan lainnya.

In Indonesia, construction work types are defined in the Construction Service Law (Law No. 18 of 1999), including Civil Works that include, among others, construction of ports, airports, railways, beach conservation, irrigation channels or canals, dams, tunnels, building structures, roads, bridges, marsh reclamation, pipe installation, drilling, and land clearing works.

The Company is a subsidiary of PT PP that is in charge of undertaking Civil Works, which comprise one of the key processes in the overall construction process of a project. By acquiring LMA as one of its Subsidiaries, the Company is able to expand its project portfolio to include projects to include the private sectors.

At present, Civil Works undertaken by the Company include works for infrastructure projects, including, among others, road, dam, and jetty projects, in which the Company carries out land clearing, cut and fill, road pavement, concrete and rigid/flexible pavement works. In practice, the Company cooperates with vendors such as Kobelco, United Tractor, Lieber, Caterpillar, XCMG, Zoomlion, and others.

LINI BISNIS
BUSINESS LINES

READY MIX

Batching Plant at Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi Toll Road Project.

Ready Mix merupakan istilah beton yang sudah siap untuk digunakan dalam proses konstruksi. Pada umumnya, beton yang digunakan dalam suatu proyek konstruksi dikirim dari pemasok utama, dimana dengan kondisi tersebut memerlukan waktu antar sesuai dengan jarak antara proyek dengan pabrik pemasok tersebut serta memerlukan armada angkut yang lebih banyak.

Perseroan melalui kegiatan usaha *ready mix*-nya, menyiapkan *batching plant* untuk masing-masing proyek, yaitu pabrik sementara yang memproduksi beton *ready mix*. Penggunaan *Ready Mix* dapat memangkas waktu antar dan tidak memerlukan armada angkut yang besar dalam transportasinya, dengan kualitas beton yang terjaga. Produsen beton dan *agregat* siap pakai ini dilaksanakan Perseroan untuk proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan gedung. Proyek-proyek *ready mix* Perseroan berbeda dengan perusahaan beton lain, dimana Perseroan fokus pada transaksi B2B dengan membangun *batching plant* di proyek-proyek pelanggan Perseroan. Pada umumnya, perusahaan beton lain menjual secara eceran produknya (B2C). Dalam pelaksanaannya, Perseroan bekerja sama dengan *vendor-vendor* seperti Holcim Cement, Semen Merah Putih, Semen Padang, Semen Andalas, dan lainnya.

Proyek-proyek *ready mix* yang telah dilaksanakan oleh Perseroan, diantaranya Bandara Ahmad Yani Semarang, Grand Sungkono Lagoon Surabaya, Grand Kamala Lagoon Bekasi, Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Jalan Tol Bakauheni Lampung, dan lainnya.

Ready Mix is a term for concrete that is ready to use for construction process. In general, concrete used in a construction project is sent by the main vendor, which requires delivery time according to the distance between the project and the factory of such vendor, which require more transportation vehicles.

The Company, through its ready mix line of business, has prepared a batching plant for each project, i.e., a temporary plant that produces ready mix concrete. The use of Ready Mix is able to cut delivery time and forgo the need for extensive transportation vehicles to transport the concrete, and maintain concrete quality. The Company carries out production of ready mix concrete and aggregate for infrastructure and building construction projects. The Company's ready mix projects differ from other concrete company, in the sense that the Company is focused on B2B transactions by building batching plants at the project sites of its customers. In general, other concrete companies sell their products in retail (B2C). In practice, the Company cooperates with vendors such as Holcim Cement, Semen Merah Putih, Semen Padang, Semen Andalas, and others.

Ready Mix projects undertaken by the Company include, among others, the Ahmad Yani Airport, Semarang; Grand Sungkono Lagoon, Surabaya; Grand Kamala Lagoon, Bekasi; Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Toll Road; Bakauheni Lampung Toll Road, and others.

LINI BISNIS
BUSINESS LINES

FORMWORK

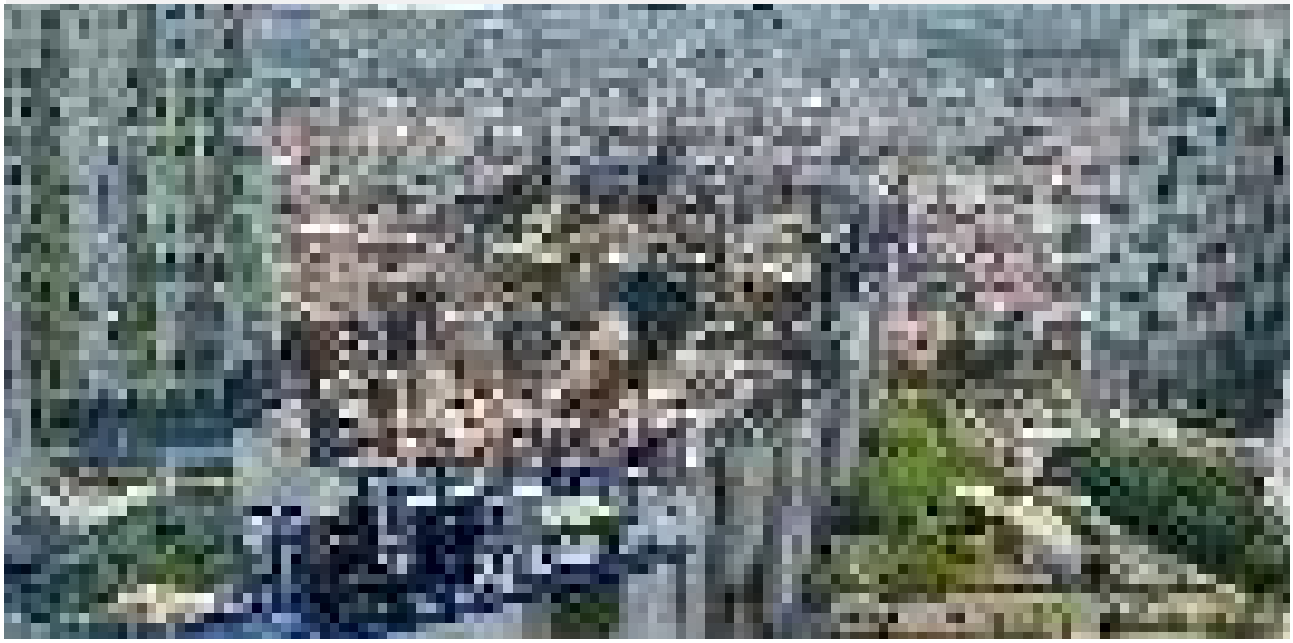

The Verde 2 Condominium Project at the heart of Central Business District - H.R. Rasuna Said

Bekisting atau *formwork* adalah suatu konstruksi pembantu sementara yang berupa sebuah cetakan yang digunakan untuk menahan beton selama beton dituang dan dibentuk sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Pada saat beton yang dituangkan telah mencapai kekuatan yang cukup, bekisting akan dilepas atau dibongkar. Pengerjaan Bekisting memerlukan kecermatan dalam perencanaan serta aplikasinya, karena bekisting harus didirikan dengan kekuatan yang terukur dan faktor keamanan yang memadai sehingga sanggup menyangga sebuah proyek bangunan tanpa mengalami keruntuhan atau berbahaya bagi pekerja dan konstruksi beton.

Kegiatan usaha *formwork* merupakan salah satu kegiatan usaha konstruksi Perseroan dalam mendukung misi Perseroan untuk menjadi *one-stop-service construction solution* bagi pelanggan. Tidak hanya *formwork*, tapi Perseroan juga dapat memberikan jasa yang lebih lengkap dengan *structure engineering*. Dalam pelaksanaannya, Perseroan bekerja sama dengan *vendor-vendor* seperti PCH Australia, Nanjing Wellmade, Papan Mandiri Cemerlang, CCI, dan lainnya.

Proyek-proyek *formwork* yang telah dilaksanakan oleh Perseroan, diantaranya Proyek Aeon Sentul,

Proyek Apartment Verde 2, Proyek Amartha View, Proyek Stasiun LRT Kelapa Gading, dan lainnya.

Formwork is a temporary support structure in the form of a mold used to hold concrete while it is being poured and molded according to the desired shape. By the time the poured concrete has reached sufficient strength, the formwork will be dismantled or demolished. Formwork works require precision in planning and application, because formwork must be built with measured strengths and sufficient safety to allow it to support a building project without risking any collapse or danger for workers and concrete structure.

Formwork business activities are one of the Company's construction business activities to support the Company's mission to become a one-stop-service construction solution for its customers. In addition to formwork, the Company is also able to provide more comprehensive services with structure engineering. In practice, the Company cooperates with vendors such as PCH Australia, Nanjing Wellmade, Papan Mandiri Cemerlang, CCI, and others.

Formwork projects undertaken by the Company include, among others, Aeon Sentul Project, Verde 2

Apartment Project, Amartha View Project, Kelapa Gading LRT Station Project, and others.

LINI BISNIS
BUSINESS LINES

FOUNDATION - BOREDPILE

Pada pelaksanaan suatu proyek konstruksi, sebuah bangunan maupun suatu proyek infrastruktur tidak dapat begitu saja didirikan langsung diatas permukaan tanah, untuk itu diperlukan adanya struktur di bawah yang disebut pondasi. Pondasi adalah bagian dari konstruksi yang berfungsi mendukung seluruh berat dari bangunan dan meneruskannya ke tanah dibawahnya. Pembuatan pondasi juga didukung dengan pekerjaan galian tanah, karena diperlukan daya tanah yang kuat untuk menjamin kestabilan pondasi.

Kegiatan usaha Pondasi ini dimulai oleh Perseroan sejak tahun 2017, terutama untuk mendukung kegiatan usaha Pekerjaan Sipil yang dilakukan Perseroan. Diharapkan seiring dengan bertambahnya jenis kegiatan usaha konstruksi yang dilakukan Perseroan, pelanggan Perseroan dapat menggunakan jasa Perseroan sebagai *one-stop-service construction solution*. Dalam pelaksanaannya, Perseroan bekerja sama dengan *vendor-vendor* seperti XCMG, Bauer, Lieber, dan lainnya.

Proyek-proyek Pondasi yang telah dilaksanakan oleh Perseroan, diantaranya Jalan Tol Bakauheni, Jalan Tol Pandaan Malang, Jalan Tol Manado Bitung, dan lainnya.

In executing a construction project, a building or an infrastructure project cannot be immediately build above the ground, therefore an underground structure referred to as foundation is required. Foundation is part of a construction, which function is to support the entire weight of the building and pass the weight along to the ground beneath. Construction of foundation is also supported by soil excavation, therefore strong soil bearing capacity is required to ensure foundation stability.

The Company started the Foundation line of business in 2017, mainly to support the Civil Work activities undertaken by the Company. As the types of construction business activities undertaken by the Company continues to expand, the Company expects its customers to be able to use the Company's services as a one-stop-service construction solution. In practice, the Company cooperates with vendors such as XCMG, Bauer, Lieber, Zoomlion, and others.

Foundation projects undertaken by the Company include, among others, Bakauheni Toll Road, Pandaan Malang Toll Road, Manado Bitung Toll Road, and others.

Boredpile at Manado - Bitung Toll Road Project

LINI BISNIS
BUSINESS LINES

EQUIPMENT RENTAL

Pada awal berdiri Perseroan, kegiatan usaha utama yang dilakukan adalah sebagai perusahaan persewaan alat-alat konstruksi termasuk alat berat seperti *tower crane, passenger hoist, earth moving equipment, genset* dan perancah bekisting. Alat-alat konstruksi tersebut mengacu pada kendaraan dan peralatan *heavy-duty*, yang dirancang khusus untuk melaksanakan tugas konstruksi, yang paling sering melibatkan operasi pekerjaan tanah. Alat-alat tersebut juga dikenal sebagai mesin berat, truk berat, peralatan konstruksi, peralatan teknik, kendaraan berat, atau hidrolika berat.

Tidak hanya peralatan yang disediakan oleh Perseroan, tetapi juga operator alat berat yang bertugas menyetir dan mengoperasikan alat berat yang digunakan dalam proyek-proyek konstruksi. Hanya pekerja terampil yang dapat mengoperasikan alat berat, dan Perseroan memberikan pelatihan khusus kepada operator untuk belajar menggunakan alat berat, terutama fokus pada peningkatan keamanan bagi pekerjaan konstruksi.

Dalam menjalankan kegiatan usaha persewaan alat berat, Perseroan memberikan jasa yang lengkap dengan memastikan ketersediaan alat-alat yang dapat diandalkan, perawatan berjangka untuk memastikan peralatan dalam kondisi prima, serta *Quick Response Unit* yang selalu siap dihubungi selama 24 jam. Perseroan bekerja sama dengan *vendor-vendor* seperti Potaindo Machinery Indonesia (*Tower Crane*), Tass Engineering (*Concrete Pump*), Putra Bangun (*Tower Crane dan Passenger Hoist*), Sumitomo (*Excavator*), dan lainnya.

At the beginning of its establishment, the Company's main business activities consisted of construction equipment rental, including heavy equipment such as tower crane, passenger hoist, earth moving equipment, genset and formwork scaffolding. The construction equipment refer to heavy duty equipment and vehicles that are specially designed to carry out construction duties, which mainly involve earthwork operations. The equipment is also known as heavy machineries, heavy trucks, construction equipment, technical equipment, heavy vehicles or heavy hydraulics.

The Company does not only provide equipment, but also heavy equipment operators who are responsible for driving and operating the heavy equipment used in construction projects. Only skilled workers are able to operate heavy equipment, and the Company provides special trainings for operators to learn how to operate heavy equipment, with a main focus to improve safety in construction works.

In carrying out heavy equipment rental business activities, the Company provides comprehensive services by ensuring the availability of reliable equipment, performs periodical maintenance to ensure the equipment is in prime conditions, and provides a Quick Response Unit that is available 24 hours. The Company cooperates with vendors such as Potaindo Machinery Indonesia (Tower Crane), Tass Engineering (Concrete Pump), Putra Bangun (Tower Crane and Passenger Hoist), Sumitomo (Excavator), and others.

WILAYAH OPERASI
OPERATIONAL COVERAGE AREA

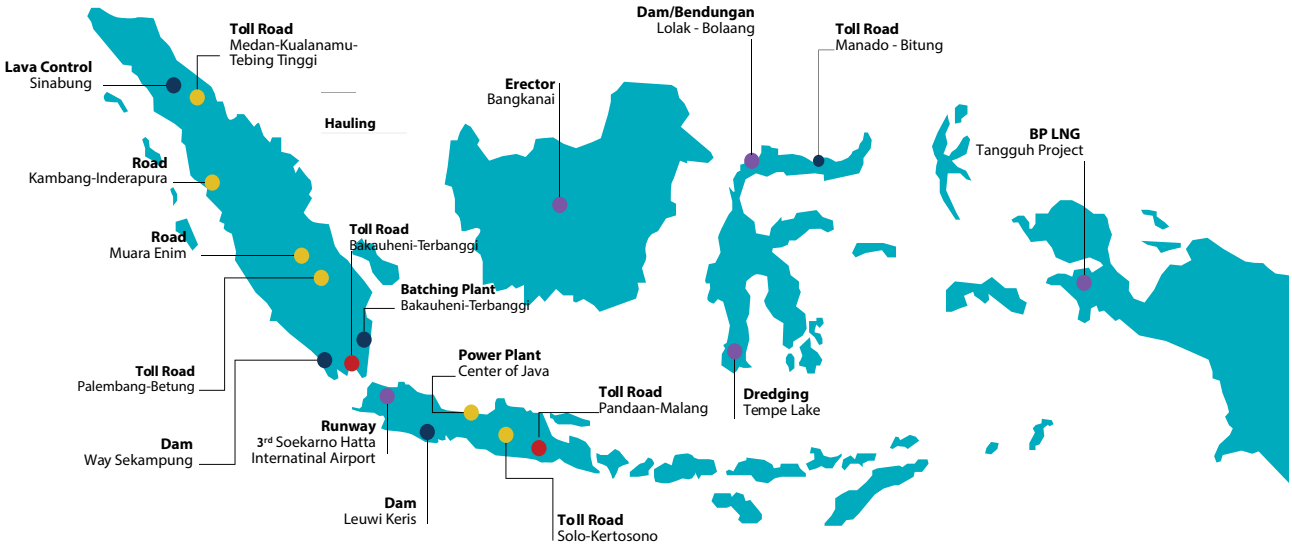

- On going Project by PP Presisi
- On going project by LMA
- On going project by PP Presisi & LMA
- Upcoming Project

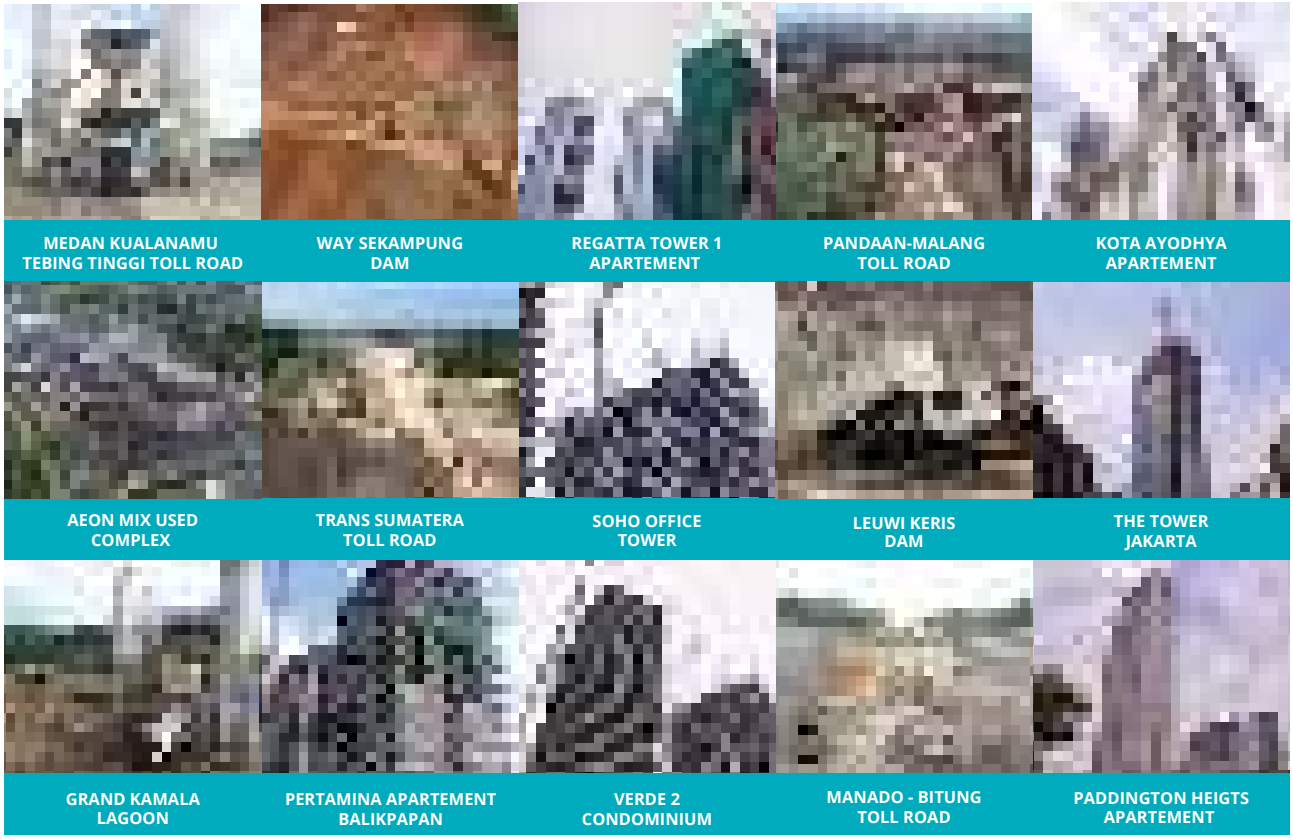

KEPEMILIKAN ALAT BERAT
HEAVY EQUIPMENT OWNERSHIP

LARGE SCALE FLEET (MOBILE)
WITH REPUTABLE BRANDS

December 2017

Total mobile fleet: 1,689 units
Average age: 2.49 years

EXCAVATOR

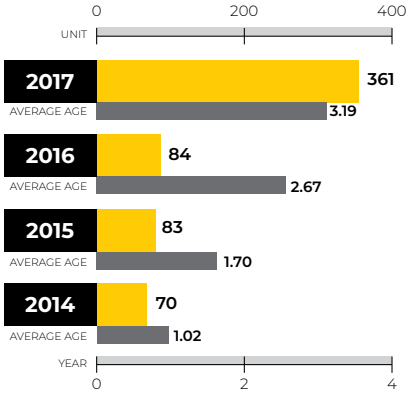

DUMP TRUCK

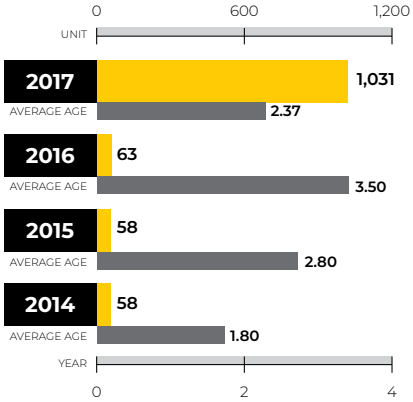

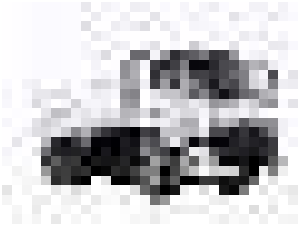

BULLDOZER

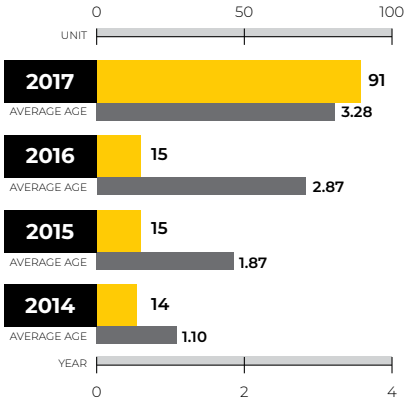

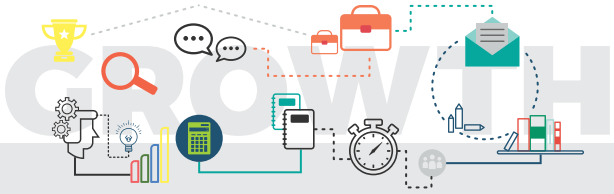

MIXER TRUCK

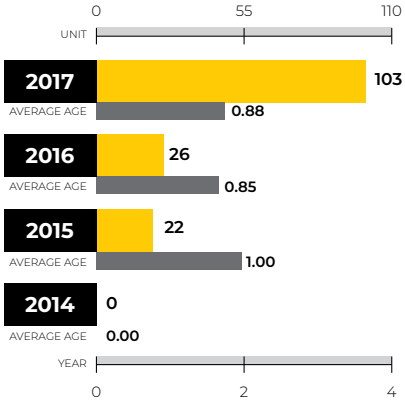

VIBRO ROLLER

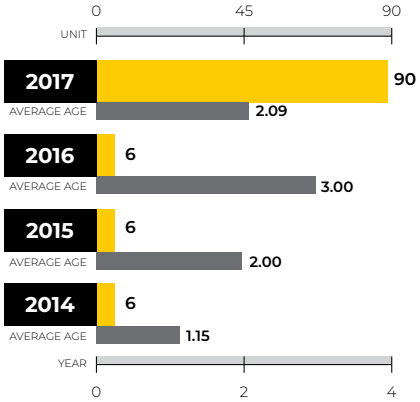

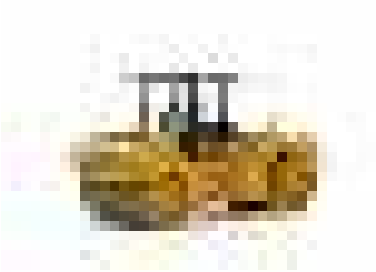

CONCRETE PAVER

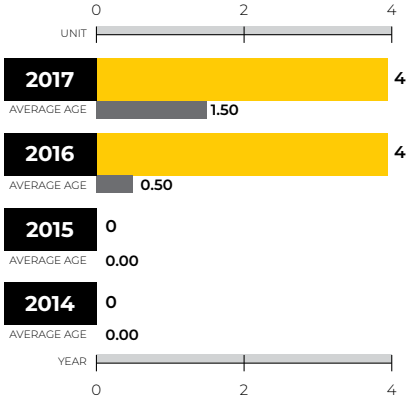

KEPEMILIKAN ALAT BERAT
HEAVY EQUIPMENT OWNERSHIP

LARGE SCALE FLEET (NON-MOBILE)
WITH REPUTABLE BRANDS

December 2017

Total mobile fleet: 147 units
Average age: 4.33 years

TOWER CRANE

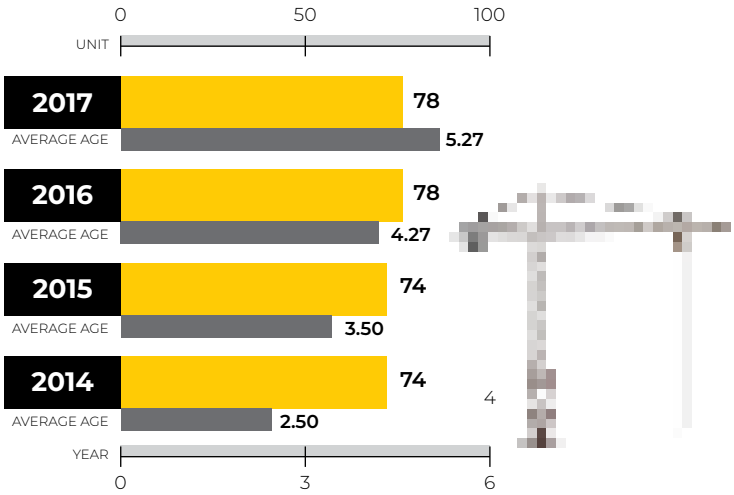

CRAWLER CRANE

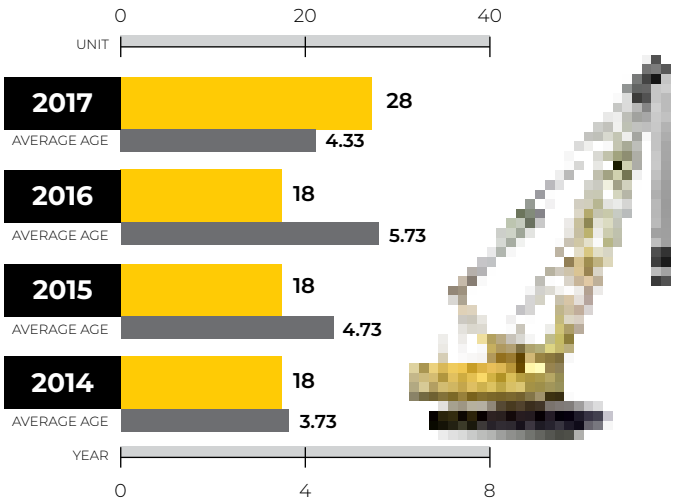

PASSENGER HOIST

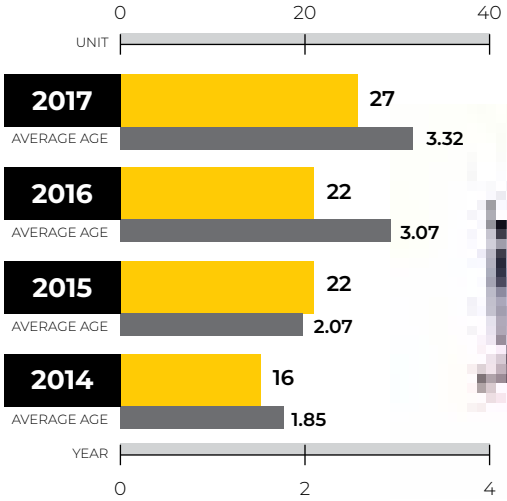

BATCHING PLANT

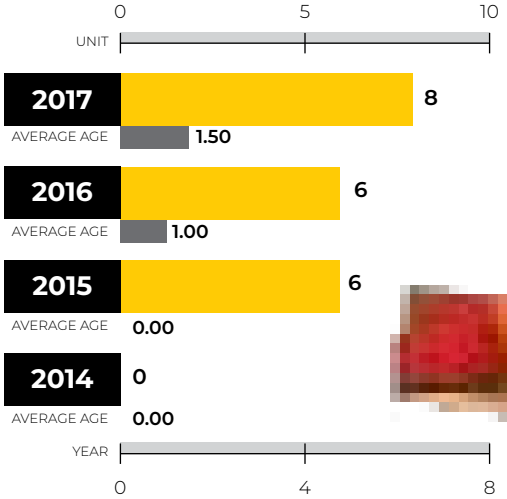

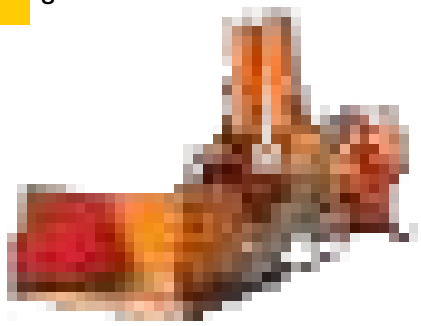

BOREDPILE

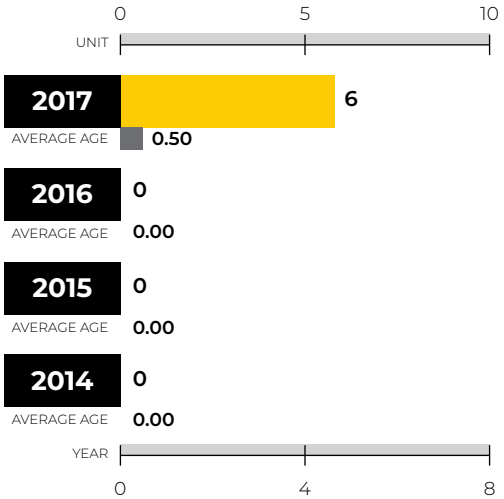

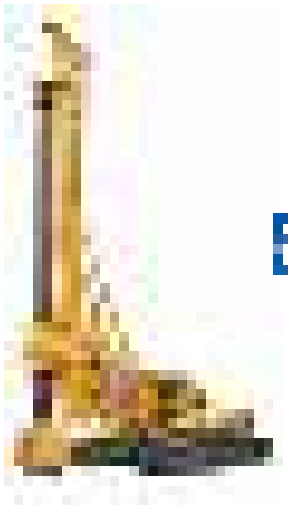

RINCIAN TRANSFORMASI BISNIS
BUSINESS TRANSFORMATION IN DETAIL

Di dalam proses transformasi bisnis, PP Presisi senantiasa berusaha melengkapi kapabilitasnya di bidang konstruksi dengan meningkatkan skala usahanya menjadi penyedia jasa penyewaan alat berat ber-skala menengah pada tahun 2014.

In the business transformation process, PP Presisi continuously strives to complete its capability in the field of construction by increasing its business scale into a mid-scale heavy equipment rental provider by 2014.

Transformasi bisnis kian bergulir, pada tahun 2015 PP Presisi meningkatkan kapabilitas bisnis *formwork* nya menjadi full system. Pada tahun yang sama, PP Presisi merambah lini bisnis baru yang masih berhubungan dengan konstruksi dan alat berat, dengan memasuki bisnis *ready mix*. Konsep bisnis *ready mix* yang diusung PP Presisi berbeda dengan konsep bisnis *ready mix* pada umumnya yang menganut konsep B to C. PP Presisi mengedepankan konsep bisnis B to B untuk bisnis *ready mix*-nya, yang mana *batching plant* ditempatkan dan didedikasikan secara penuh untuk proyek yang bersangkutan.

Transformation of business increasingly rolling, in 2015 PP Presisi improve its business capabilities formwork into a full system. In the same year, PP Presisi penetrated new business lines that are still in touch with construction and heavy equipment, by entering the ready mix business. The business concept of ready mix which is carried by PPRE is different from the concept of ready mix business in general which adheres to the concept of B to C. PPRE put forward the business concept B to B for its ready mix business, in which the batching plant is placed and fully dedicated to the project concerned.

Pada tahun 2016, kapabilitas PP Presisi di jasa konstruksi bertambah dengan memasuki bisnis *civil work*. Hingga tahun 2016, pertumbuhan Perseroan dilakukan secara organik pada setiap mengembangkan lini bisnis yang ada atau memasuki lini bisnis baru. Juni 2017 merupakan tonggak penting pertumbuhan Perseroan, yang menandakan dimulainya pertumbuhan inorganik Perseroan, yaitu dengan diakuisisinya LMA, perusahaan penyedia jasa pekerjaan sipil (*civil work*). Akuisisi tersebut bersifat strategis bagi Perseroan yaitu di samping meningkatkan *engineering capacity*, juga menambah akses kepada pasar non PP Group. Melalui akuisisi tersebut diharapkan tercipta sinergi kuat antara ketiga pihak : LMA, Presisi dan PP Group yang akan memperkuat *positioning* PP Presisi.

In 2016, PP Presisi capability in construction services is increasing by entering the civil work business. Until 2016, the Company's growth is done in an organic manner by developing existing business lines or entering new business lines. June 2017 is an important milestone of the Company's growth, which marks the start of the Company's inorganic growth, with the acquisition of PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA), a civil work services company. The acquisitions are strategic to the Company in addition to improving engineering capacity, as well as increasing access to non PP Group markets. Through the acquisition is expected to create a strong synergy between the three parties: LMA, Presisi and PP Group that will strengthen the positioning of PP Presisi.

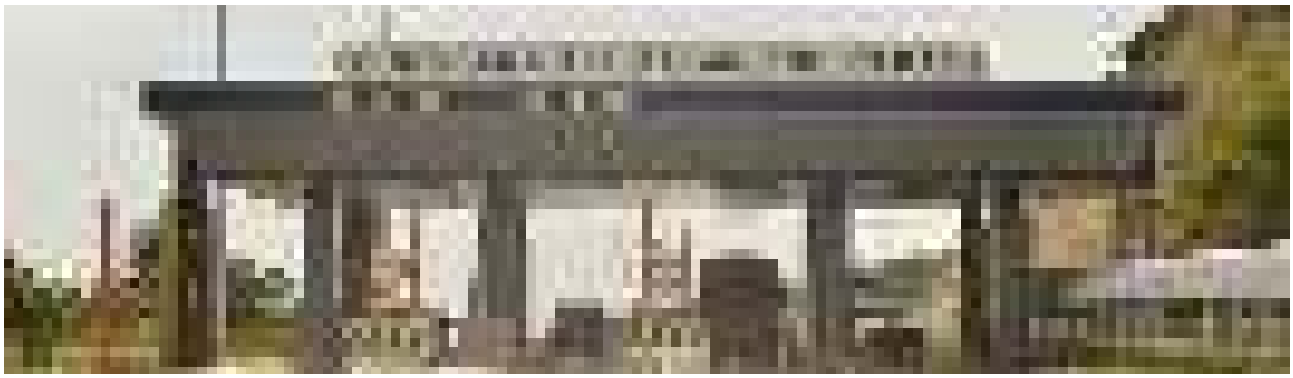

Phase pertama transformasi bisnis telah diselesaikan dengan baik oleh PP Presisi dengan mengintegrasikan lima (5) lini bisnis yaitu *civil work*, *ready mix*, *foundation*, form work dan penyewaan alat berat. PPRE juga menerapkan ERP-SAP dan didukung oleh ISO Management System 9001:2015, Management Quality, ISO 14001:2007 Environmental Management System, serta OHSAS 18001:2015 Occupational Health and Safety sebagai bagian dari operational excellence improvement Perseroan.

Perusahaan Konstruksi Terintegrasi bukan sekedar slogan tetapi positioning PP Presisi yang ditawarkan kepada konsumen. Dengan bisnis model tersebut tidak saja konsumen yang diuntungkan melalui *value added*, Pemegang Saham juga diuntungkan melalui peningkatan *shareholder value*.

The first phase of business transformation has been completed well by PPRE by integrating five (5) business lines: civil work, ready mix, foundation, form work and heavy equipment rental. PPRE also implements ERP-SAP and is supported by ISO Management System 9001: 2015, Management Quality, ISO 14001: 2007 Environmental Management System, and OHSAS 18001: 2015 Occupational Health and Safety as part of the operational excellence improvement of the Company.

Integrated Construction Company is not just a slogan but a positioning of PP Presisi offered to consumers. With the business model not only consumers who benefit through value added, Shareholders also benefit through increasing shareholder value.

Phase Pertama Telah Berhasil Membawa Perseroan Menjadi Perusahaan Konstruksi Berbasis Alat Berat Terintegrasi Terkemuka Di Indonesia.

The First Phase Has Succeeded In Bringing The Company to Become The Leading Integrated Heavy Equipment Based Construction Company In Indonesia.

Hingga saat ini, belum dapat ditemukan perusahaan konstruksi sejenis yg memiliki model bisnis seperti model bisnis PP Presisi. Dengan dukungan jumlah alat berat lebih dari 1.900 unit (Januari 2018), menjadikan PP Presisi sebagai perusahaan konstruksi terintegrasi terkemuka di Indonesia.

Selain dukungan alat berat, sebagai perusahaan konstruksi terintegrasi terkemuka di Indonesia, PP Presisi juga didukung oleh *excellent operation* yang terdiri atas :

Until now, can't be found a similar construction companies who have business models such as PP Presisi business model. With the support of the number of heavy equipment more than 1,900 units (January 2018), making PP Presisi as the leading integrated construction company in Indonesia.

In addition to heavy equipment support, as a leading integrated construction company in Indonesia, PP Presisi is also supported by excellent operations consisting of:

1. Manajemen Peralatan & Armada
2. Manajemen proyek
3. Sertifikasi ISO & OHSAS (ISO 9001: 2015 - Quality Management, ISO 14001: 2007 - Sistem Manajemen Lingkungan, OHSAS 18001: 2015 - Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
4. Implementasi ERP (SAP)
5. Unit Respon Cepat (*Call Center*)

1. *Equipment & Fleet Management*
2. *Project Management*
3. *ISO & OHSAS Certification (ISO 9001:2015- Management Quality, ISO 14001:2007 – Environmental Management System, OHSAS 18001:2015 - Health and Safety Management Systems)*
4. *Implementation ERP (SAP)*
5. *Quick Response Unit (Call Center)*

Sebagai perusahaan konstruksi terintegrasi terkemuka di Indonesia, PP Presisi juga memiliki sumber pendapatan berulang (*recurring income*) yang berjangka waktu lebih panjang dibandingkan dengan rata-rata jangka waktu proyek insfrastruktur. *Recurring income* tersebut berasal dari kontrak pekerjaan *coal hauling* dengan *off taker* jangka panjang.

Adanya *recurring income* semakin memperkuat *positioning* PP Presisi sebagai perusahaan konstruksi terintegrasi terkemuka di Indonesia yang pada akhirnya juga akan meningkatkan *shareholder value*.

As the leading integrated construction company in Indonesia, PP Presisi also has a longer term recurring income source than the average timeframe for infrastructure projects. The recurring income comes from the coal hauling contract with long-term off taker.

The existence of recurring income further strengthens the positioning of PP Presisi as a leading integrated construction company in Indonesia which in turn will also increase shareholder value.

Peningkatan *shareholder value*, tidak berhenti hingga di sini. Peningkatan *shareholder value* merupakan proses yang berkelanjutan. PP Presisi meningkatkan *shareholder value* secara berkelanjutan melalui transformasi bisnis yang dilakukan secara berkelanjutan juga. PP Presisi telah menyusun blueprint transformasi bisnis dari tahun 2014 hingga tahun 2022. Transformasi bisnis *phase* 1 dari tahun 2014 hingga 2017 telah menghasilkan CAGR pendapatan sebesar 115%. Dan transformasi bisnis *phase* 2 dari tahun 2017 hingga 2022 akan menghasilkan CAGR pendapatan sebesar 50%.

Dan puncak dari *Phase* pertama adalah menjadi perusahaan terbuka dan *listed* di BEI.

Dengan selesainya *Phase* pertama tersebut diharapkan menjadi landasan kuat untuk *phase* kedua transformasi bisnis, yang mana PP Presisi merencanakan untuk merambah bisnis *erector, mechanical electrical, mining services* serta transportasi dan logistic; yang semuanya masih berhubungan dengan alat berat.

Increased shareholder value, does not stop here. Increased shareholder value is an ongoing process. PP Presisi enhances shareholder value in a sustainable way through business transformation that is carried out continuously as well. PP Presisi has developed a business transformation blueprint from 2014 to 2022. Business transformation phase 1 from 2014 to 2017 has resulted in a CAGR of 115%. And business transformation of phase 2 from 2017 to 2022 will generate a CAGR of 50%.

And top of the first Phase is to be a public listed company in IDX.

With the completion of the first Phase is expected to be a strong foundation for the second phase of business transformation, which PP Presisi plans to explore the business of erector, mechanical electrical, mining services and transportation and logistics; all of which are still in contact with the machine.

SERTIFIKASI
CERTIFICATION

Penyerahan Sertifikat Iso dari pihak NQA kepada PP Presisi

ISO 9001:2015

Sertifikat ini menjamin akan kualitas produk dan jasa yang PP Presisi lakukan selama ini , mulai dari rencana kerja hingga eksekusi proyek dilapangan.

This certificate is assured of quality products and services that PP Presisi do so far, ranging from work plan to project execution in the field.

ISO 14001:2015

Dengan Standar sistem manajemen lingkungan, PP Presisi menjamin setiap proyeknya ramah terhadap lingkungan dan masyarakat.

With the Environmental Management System Standard, PP Presisi ensures that every project is environmentally and socially friendly.

OHSAS 18001: 2007

Merupakan standar internasional untuk penerapan Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja.

It is an international standard for implementation Health & Safety Management System.

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

SUMBER DAYA MANUSIA | HUMAN RESOURCES

Per tanggal 31 Desember 2017, Perseroan memiliki 126 karyawan yang terdiri dari 45 karyawan tetap dan 81 karyawan tidak tetap.

Berikut jumlah dan komposisi karyawan yang berada dalam Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017, 2016, 2015, 2014, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

As of December 31, 2017, the Company's total work force consisted of 126 employees, consisting of 45 permanent employees and 81 contract employees.

The Company's total employees and the respective composition as of December 31, 2017, 2016, 2015, and 2014, are presented in the following tables:

Table of the Company's Employee Composition by Level of Education

Formal Education Level	2014	2015	2016	2017
Master's Degree	**4**	3	2	5
Bachelor's Degree	**17**	26	30	74
D3	**11**	10	3	21
High School and Equivalent/Non-Academic	**48**	47	36	26
Total	**80**	86	81	126

Table of the Company's Employee Composition by Position

Position	2014	2015	2016	2017
Director	**3**	3	4	4
Manager	**3**	5	5	5
Staff	**72**	76	70	115
Operators	**2**	2	2	2
Total	**80**	86	81	126

Table of the Company's Employee Composition by Age Level

Age	2014	2015	2016	2017
>50	**18**	18	18	12
41 – 50 Years	**26**	29	27	36
31 – 40 Years	**16**	22	22	24
21 – 30 Years	**20**	17	14	54
Total	**80**	86	81	126

Table of the Company's Employee Composition by Status

Status	2014	2015	2016	2017
The Company				
Permanent	**67**	73	68	45
Contract Employees	**13**	13	13	81
Total	**80**	86	81	126

Table of Employee Composition by Location

Status	2014	2015	2016	2017
The Company				
UKP	65	70	59	86
Project	15	16	22	40
Total	80	86	81	126

SUMBER DAYA MANUSIA | HUMAN RESOURCE

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Untuk mendukung perluasan kegiatan operasional serta mengantisipasi persaingan, Perseroan senantiasa memperhatikan peningkatan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia serta pendayagunaan secara optimal dengan cara menempatkan karyawan secara tetap dan efisien, membangun budaya kerja dan budaya perusahaan sesuai tuntutan dinamika industri.

Selain itu, Perseroan secara aktif terus-menerus mengembangkan sumber daya manusia yang ada, dengan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan dan pemahaman nilai inovasi yang terus menerus dijalankan melalui program pelatihan karyawan, baik diselenggarakan di Indonesia.

Perseroan telah memenuhi kewajiban upah minimum Propinsi/ upah minimum Regional bagi karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan ("WLTK")No. 2609/39012/2016yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaanan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, diketahui bahwa Perseroan telah memenuhi ketentuan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1191-Bangsos/2016 tertanggal 21 November 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Jawa Barat Tahun 2017.

Sampai dengan tanggal Laporan Tahunan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan karyawan/serikat pekerja.

"Perseroan memiliki program pengembangan dan peningkatan *soft skill* dan *hard skill* melalui pendidikan berkelanjutan baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal"

"The Company has soft skill and hard skill development program by the continue education program both internally and externally"

The Company is fully aware that human capital is a key factor that determines the success of its business and activities. To support the expansion of its operational activities and in anticipation of competition, the Company continuously observes the improvement of capabilities and professionalism of human resources and optimal utilization of human resources by placing its employees in a permanent and efficient manner, building work culture and corporate culture in accordance with the demand of the industry's dynamics.

In addition, the Company also actively and continuously develop its existing human resources by improving the capabilities, knowledge, skills and awareness on the values of innovations through employee training programs held in Indonesia.

The Company has satisfied the Provincial/Regional minimum wage requirements for employees in accordance with the prevailing regulations. The above is based on the Manpower Mandatory Report (Wajib Lapor Ketenagakerjaan, "WLTK") No. 2609/39012/2016 issued by the Head of Manpower Supervision Department on behalf of Head of the Manpower Agency of Bandung Regency, in which the Company has complied with the requirements of West Java Governor No. 561/Kep.1191-Bangsos/2016 dated November 21, 2016, concerning the 2017 Minimum Wage for Regencies/Cities in West Java.

Up to the issuance of this Prospectus, the Company has no labor union that is established by the Company's employees. The Company does not have any Mutual Labor Agreement between the Company and its employees/labor union.

TENAGA KERJA ASING | FOREIGN EMPLOYEE

Hingga saat Laporan Tahunan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

As of issuance of this Annual Report, the Company does not employ any foreign employees.

KESEJAHTERAAN KARYAWAN | EMPLOYEE WELFARE

Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi pegawai dan keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi seluruh karyawan.

Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan)
2. Jaminan Kesehatan (Asuransi BNI Life dan BPJS Kesehatan)
3. Tunjangan Jabatan
4. Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR)
5. Tunjangan Lembur
6. Tunjangan Konsumsi (Natura)
7. Bantuan Duka Kematian
8. Bantuan Biaya Melahirkan
9. Bantuan Biaya Pernikahan
10. *Gathering* dan *Outing* kantor
11. Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan
12. Bonus (Kinerja)
13. Penghargaan Umroh (Karyawan Beragama Islam)
14. Cuti Tahunan

Kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai Perseroan mengacu kepada Ketentuan dan Peraturan Departemen Tenaga Kerja, termasuk sudah memenuhi Upah Minimum yang berlaku.

The Company provides various welfare benefit programs and facilities for its employees and their families. The welfare facilities and programs are provided to all employees.

The facilities and programs are as follows:

1. Manpower Social Security Agency (BPJS Ketenagakerjaan)
2. Health Benefits (BNI Life Insurance and BPJS Kesehatan)
3. Structural Position Allowance
4. Religious Holiday Allowance (THR)
5. Overtime Allowance
6. Meal Allowance (benefit in-kind)
7. Condolences Allowance
8. Maternity Allowance
9. Wedding Allowance
10. Office Gathering & Outing
11. Training and Development Facilities
12. Bonus (Performance Based)
13. Umroh (Pilgrimage for Moslem Employees) Award
14. Annual Leaves

The Company's employee compensation, welfare facilities and programs refer to the Requirements and Regulations of the Manpower Department, including satisfaction of the prevailing Minimum Wage.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT POLICIES

Salah satu aset Perseroan yang sangat berharga adalah sumber daya manusia (SDM), oleh karena itu Perseroan menyadari akan posisi strategis SDM yang dimiliki dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin meningkat di masa mendatang. Program pengembangan SDM di lingkungan Perseroan dimulai dengan proses perekrutan karyawan yang dilaksanakan dengan mempehatikan asas kesetaraan dan kualifikasi dari setiap kandidat yang mengirimkan aplikasi untuk posisi pekerjaan yang ditawarkan Perseroan. Program pengembangan SDM juga ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM tersebut secara berkelanjutan, Perseroan telah melakukan berbagai upaya melalui pendidikan, dan pelatihan dengan materi-materi yang diberikan yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas organisasi, meningkatkan keterampilan juga kepemimpinan dan profesionalisme kerja.

1. **PERENCANAAN KETENAGAKERJAAN:** disusun setiap akhir tahun oleh unit-unit kerja yang diajukan kepada divisi dan direktur melalui HRD. Evaluasi terhadap perencanaan perekrutan ini dilakukan pada akhir tahun anggaran berikutnya.

One of the Company's most valuable assets is its Human Resources (HR). Consequently, the Company is aware of the strategic positions that HR plays in the face of increasingly fierce competition in the future. The Company's HR development program starts with employee recruitment process that observes the principles of equality and qualifications of each candidate sending an application for a job opening offered by the Company. HR development program is also implemented through educations and trainings with the objective of sustainably improving HR competencies. The Company has taken various measures through education and trainings, which materials are provided for the purpose of improving the organization's productivity and quality, developing skills, leadership and work professionalism.

1. **MANPOWER PLANNING:** Manpower planning is prepared at the end of each year by the work units, and proposed to the division and director through the HRD. Evaluation on recruitment plan is conducted at the end of the next fiscal year.

2. **PEREKRUTAN:** dilakukan berdasarkan perencanaan ketenagakerjaan setiap divisi melalui proses seleksi berjenjang atau referensi disertai dengan pengujian keahlian dan psikologi yang dilaksanakan bersama antara HRD dan pejabat 2 (dua) tingkat diatas posisi calon pekerja.
3. **JENJANG KARIR KARYAWAN:** enjang karir karyawan disesuaikan dengan kebutuhan dan terbagi menjadidua klasifikasi manajemen yaitulini produksi dan lini manajemen pendukung. Jenjang karir karyawan diatur berdasarkan kebutuhan, kompetensi, potensi, lama bekerja, prestasi dan masukan dari rekan-rekan kerja 1 (satu) level jabatan di atas dan di bawah karyawan yg dinominasikan.

2. **RECRUITMENT:** Recruitment is conducted based on each division's manpower planning through a tiered selection profess or references, complemented by competency and psychological test conducted jointly by the HRD dan officer that is 2 (two) level more senior than the candidate.
3. **CAREER PATH:** Career path for employees is aligned with the needs, and is categorized into two management classifications, i.e., production line and supporting management line. Career path for employees is planned based on the needs, competencies, potentials, years of service, achievements and inputs from the colleagues 1 (one) level more senior and junior of the employee being nominated.

JENJANG KARIR DI LINI PRODUKSI | CAREER PATH IN PRODUCTION LINE

OPERATOR → SUPERVISOR → MANAGER → PLANT GENERAL MANAGER → OPERATION DIRECTOR

JENJANG KARIR DI MANAJEMEN PENDUKUNG | CAREER PATH IN SUPPORTING MANAGEMENT

STAFF → SUPERVISOR → MANAGER → GENERAL MANAGER → DIRECTOR

4. **ORIENTASI KARYAWAN:** Setiap karyawan baru wajib menerima orientasi selama 1 minggu. Program orientasi diawali dengan perkenalan rekan kerja dalam unit kerja, departemen, divisi dan antar divisi. Selanjutnya, karyawan baru dikenalkan pada peralatan kerja, alat komunikasi dan standar prosedur kerja (SOP) sesuai jabatannya.
5. **PENILAIAN KINERJA:** Sistem penilaian kinerja pegawai menggunakan kunci indikator kinerja berbeda yang disesuaikan dengan unit kerja masing-masing. Penilaian kinerja dilakukan oleh pejabat1 (satu) tingkat di atas karyawan bersangkutan, masukan dari rekan kerja bersangkutan dan pegawai 1 (satu) tingkat dibawah karyawan tersebut (Jika ada). Penilaian kinerja dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember.
6. **PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN:** Pelatihan kepada karyawandisesuaikan dengan keahlian yang dibutuhkan dandilakukan secara teratur minimal 20 jam per tahun. Pengaturan pegawai yang mengikuti pelatihan dilakukan oleh masing-masing unit. Supervisor bertanggung jawab untuk memastikan seluruh staf diunitnya mengikuti program pelatihan sesuai jadwal yang ditentukan dan bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi pelatihan di unitnya.
7. **PEMELIHARAAN KESEHATAN, JAMINAN KETENAGAKERJAAN DAN MANFAAT LAIN:** Perseroan memberikan jaminan kesehatan, ketenagakerjaan dan tunjangan lainnya untuk seluruh karyawan. Setiap karyawan difasilitasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Tunjangan Hari Raya, tunjangan susu untuk unit-unit tertentu dan pemberian bonus berupa perjalanan umroh atau haji bagi karyawan loyal dan berprestasi.

4. **EMPLOYEE ORIENTATION:** Every new employee is required to attend a 1-week orientation program. The orientation program begins with introduction to colleagues in the work unit, department, division and inter-division. Subsequently, a new employee is introduced to the work tools, communication devices and Standard Operating Procedures (SOP) according to their position.
5. **PERFORMANCE EVALUATION:** Employee performance evaluation system uses different key performance indicators that are tailored according to each work units. Performance evaluation is conducted by an officer who is 1 (one) level more senior than the concerned employee, based on inputs from the concerned employee's colleagues and employee 1 (one) level more junior than the said employee (if any). Performance evaluation is conducted 2 (two) times a year in June and December.
6. **TRAINING AND DEVELOPMENT:** Trainings for employees are tailored to the required skills and are held regularly, with a minim of 20 hours per year. Employee training participation is determined by each unit. Supervisors are responsible to ensure all staffs under their units attend training programs as scheduled and are responsible to evaluate trainings for their respective units.
7. **HEALTHCARE, MANPOWER SOCIAL SECURITY AND OTHER BENEFITS:** The Company provides health benefits, manpower social security and other benefits for all employees. All employees are provided with BPJS Kesehatan and BPJS Ketenagakerjaan, Religious Holiday Allowance, Baby Formula Allowance for certain units, and bonuses in the form of umroh or hajj (religious pilgrimage) for loyal and accomplished employees.

Chapter-4

BAB-4

Tinjauan Operasi Per Segmen
Kinerja Keuangan Komprehensif
Kemampuan Membayar Hutang
Tingkat Kolektibilitas Piutang
Ikatan Material Untuk Inevstasi Barang Modal
Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal
Investasi Barang Modal Yang Direalisasikan
Informasi dan Fakta Material Yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Prospek Usaha
Perbandingan Antara Target dan Realisasi
Target dan Proyeksi Yang Ingin Dicapai Pada Tahun 2018
Aspek dan Strategi Pemasaran
Kebijakan dan Pembayaran Deviden
Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Perdana Saham
Informasi Material Terkait Investasi, Divestasi, Akuisisi, Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan
Perubahan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Berpengaruh Signifikan
Perubahan Kebijakan Akuntansi
Informasi Kelangsungan Usaha Perseroan

Operation Review by Segment
Comprehesive Financial Performance
Solvability
Level of Receivables Collectibility
Material Commitment for Capital Expenditure
Capital Structure and Policy
Capital Expenditure Realization
Subsequent Event
Business Prospects
Target and Realization Comparison
2018's Targets and Projections
Marketing Aspect And Strategy
Deviden Policy
Realization of IPO Proceed
Material Information Related to Investment, Divestment, Acquisition, Affiliated Transactions, and Conflict of Interest Transactions
Law and Regulation Changes May Affect to The Company Significantly
Accounting Policies Changes
Sustainability Information

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN OPERASI
OPERATION REVIEW BY SEGMENT

Perseroan memiliki lima lini bisnis yaitu *civil work, foundation, ready mix, formwork* dan equipment *rental*. Karena sebagian besar kontrak foundation telah termasuk di dalam kontrak civil work, maka pelaporan segmen Perseroan sebagai berikut :

The Company has five business lines: civil work, foundation, ready mix, formwork and heavy equipment rental. Since most of the foundation contracts have been included in the civil work contract, the Company's segment report is as follows :

1. ***CIVIL WORK & FOUNDATION***: Pendapatan *civil work* memberikan kontribusi sebesar 78% terhadap total pendapatan konsolidasian tahun 2017. Pendapatan *civil work* meningkat 617% year on year dari Rp197,0 miliar (2016) menjadi Rp1,4 triliun (2017). Peningkatan signifikan tersebut terjadi karena lini bisnis *civil work* baru dimulai pada kuartal ke-empat 2016 di satu sisi, di lain sisi pada tahun 2017 selain pendapatan *civil work* yang berasal dari kontrak-kontrak yang dimiliki PP Presisi, pendapatan *civil work* juga berasal dari kontrak-kontrak yang dimiliki oleh LMA, entitas anak yang diakuisisi pada Juli 2017. Pendapatan *civil work* tersebut sebagian besar berasal dari pekerjaan jalan tol Bakauheni-Sidomulyo, pekerjaan jalan tol Pandaan-Malang, pekerjaan jalan tol Manado-Bitung, pekerjaan jalan tol Solo-Kertosono, bendungan Way Sekampung, dan Bendungan Leuwi Keris.
2. ***READY MIX***: Pendapatan *ready mix* atau batching plant memberikan kontribusi sebesar 9% terhadap total pendapatan konsolidasian tahun 2017. Pendapatan *ready mix* atau batching plant meningkat 138% year on year dari Rp68,6 miliar (2016) meningkat menjadi Rp163,4 miliar (2017). Peningkatan pendapatan *ready mix* atau batching plant secara signifikan tersebut seiring dengan peningkatan pendapatan *civil work* karena model bisnis *ready mix* atau batching plant merupakan business-to-business (B2B) yang biasanya terkait langsung dengan *civil work*.

1. **CIVIL WORK & FOUNDATION**: Civil work contributed 78% to total consolidated revenue in 2017. Civil work revenue increased 617% year on year from Rp197.0 billion (2016) to Rp1.4 trillion (2017). Its significant increase due to one hand Civil Works business line just started in the fourth quarter of 2016 (not full year basis), on the other hand, in 2017 civil work revenue consolidated between revenue from PP Presisi owned contracts and LMA owned contracts, an acquired subsidiary in July 2017.

   The civil work revenue mostly came from Bakauheni-Sidomulyo toll road project, Pandaan-Malang toll road project, Manado-Bitung toll road project, Solo-Kertosono toll roads project, the Way Sekampung dam and Leuwi Keris dam.
2. **READY MIX**: Ready mix or batching plant contributed 9% to total consolidated revenue in 2017. Ready mix or batching plant revenue increased 138% year on year from Rp68.6 billion (2016) to Rp163.4 billion (2017). Ready mix or batching plant revenue increasing significantly was in line with civil work income increasing because the business model of ready mix or batching plant is a business-to-business (B2B) that is usually related to civil work directly.

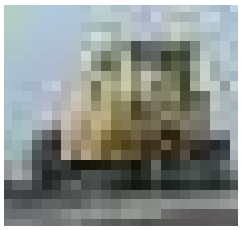

3. ***FORMWORK*:** Pendapatan *formwork* memberikan kontribusi sebesar 4% terhadap total pendapatan konsolidasian tahun 2017. Pendapatan *formwork* meningkat 56% year on year dari Rp74,2 miliar (2016) menjadi Rp116,0 miliar (2017). Walaupun *formwork* hanya berkontribusi sebesar 4%, tetapi lini bisnis *formwork* ini masih menunjukan peningkatan yang cukup menggembirakan berkat usaha Perseroan memberikan jasa *formwork* full system.

4. ***EQUIPMENT RENTAL*:** Pendapatan penyewaan alat berat memberikan kontribusi sebesar 9% terhadap total pendapatan konsolidasian tahun 2017. Pendapatan penyewaan alat berat meningkat 128% year on year dari Rp105,6 miliar (2016) menjadi Rp240,7 miliar (2017). Pendapatan penyewaan alat berat masih memberikan kontribusi kepada total pendapatan konsolidasian, walaupun semakin kecil kontribusinya, terlebih sejak Perseroan merambah lini bisnis *civil work* pada kuartal ke-empat 2016. Lini bisnis penyewaan alat berat saat ini merupakan salah satu bentuk peningkatan utilisasi alat berat yang memang dikhususkan dikhususkan untuk pekerjaan *civil work*.

3. **FORMWORK:** Formwork contributed 4% to total consolidated revenue in 2017. Formwork revenue increased 56% year on year from Rp74.2 billion (2016) to Rp116.0 billion (2017). Although the formwork contribution only 4%, but its business line still showed a quite encouraging improvement owing to the Company's efforts to provide full-formwork system services.

4. **EQUIPMENT RENTAL:** Heavy equipment rental contributed 9% to total consolidated revenue in 2017. Its revenue increased 128% year on year from Rp105.6 billion (2016) to Rp240.7 billion (2017). Equipment rental revenue still contributed to total consolidated revenues, despite its smaller contribution since the Company expanded civil works in the fourth quarter of 2016. The heavy equipment rental business line currently tends to increase utilization of heavy equipment devoted to civil works.

KINERJA KEUANGAN KOMPREHENSIF
COMPREHENSIVE FINANCIAL PERFORMANCE

Perseroan merupakan perusahaan konstruksi terintegrasi terkemuka di Indonesia berbasis peralatan berat yang menawarkan one stop services melalui 5 lini bisnis yang telah dikembangkan oleh Perseroan hingga kini yaitu meliputi: *civil work*, *ready mix*, *foundation*, *formwork* & equipment rental. Perseroan memulai usahanya sebagai penyedia jasa penyewaan alat kontruksi pada tahun 2004 pada skala kecil. Pada tahun 2013-2015, Perseroan meningkatkan skala usahanya menjadi penyedia jasa penyewaan alat kontruksi berskala menengah. Pada periode ini pula, Perseroan memulai transformasi bisnis nya yang pertama dengan merambah bisnis *formwork* (bekisting), *foundation* dan *ready mix* (pembangunan fasilitas *batching plant* pertama di 2015). Dan transformasi pertama ini berlanjut pada tahun 2016, dengan dimasukinya bisnis *civil work*.

Perkembangan usaha perseroan hingga tahun 2016 merupakan pertumbuhan organik, tetapi mulai pertengahan 2017 Perseroan mengembangkan usahanya tidak saja melalui pertumbuhan organik tetapi juga melalui pertumbuhan un-organik yang ditandai dengan diakuisisinya LMA yang merupakan perusahaan penyedia jasa *civil works*, konstruksi, mining & rental. Dengan diakuisisinya LMA, maka kapasitas bisnis *civil work* Perseroan meningkat. Dengan learning curve dan kapabilitas yang dimiliki Perseroan, Perseroan semakin yakin dapat berkontribusi secara aktif di dalam pembangunan infrastruktur yang sedang marak. Perseroan memiliki keunggulan kompetitif untuk memasuki pasar nasional maupun regional.

The Company is a leading integrated construction company based in Indonesia with heavy equipment offering one stop services through five business lines that have been developed by the Company to date, which include: civil work, ready mix, foundation, formwork & equipment rental. The Company started its business as a construction equipment rental provider in 2004 on a small scale. In 2013-2015, the Company increased its business scale into a medium-scale construction equipment rental provider. In this period, the Company started its first business transformation by expanding its business formwork (foundation), foundation and ready mix (construction of the first batching plant facility in 2015). And this first transformation continues in 2016, with the entry of civil works business.

The development of the company's business until 2016 is an organic growth, but from mid-2017 the Company expanded its business not only through organic growth but also through un-organic growth marked by the acquisition of LMA, a civil works, construction, mining & rental company. With the acquisition of LMA, the Company's civil work business capacity increases. With our learning curve and capabilities, we are increasingly confident that we can actively contribute to the development of a vibrant infrastructure. The Company has a competitive advantage to enter national and regional markets.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN PENDAPATAN

A. PENDAPATAN:

Pendapatan konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 meningkat 389% menjadi Rp1,8 triliun dari Rp371,2 miliar pada periode yang sama tahun 2016. Peningkatan signifikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada pendapatan *civil work* yang meningkat pesat sebesar 617% menjadi Rp1,4 triliun yang diantaranya merupakan pendapatan yang berasal dari proyek tol Bakauheni - Sidomulyo, proyek tol Pandaan – Malang, proyek bendungan Way Sekampung, proyek tol Manado – Bitung, proyek bendungan Leuwi Keris, proyek pengendalian lahar Sinabung, dan beberapa proyek *carry over* dari tahun sebelumnya. Sebagian peningkatan pendapatan tersebut juga merupakan kontribusi dari entitas anak, PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA) yang sejak 1 Juli 2017 dikonsolidasi ke dalam Perseroan.

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND COMPREHENSIVE INCOME

A. REVENUE:

The Company's consolidated revenue for period ended December 31, 2017 increased 389% to Rp1.8 trillion from Rp371.2 billion in the same period of 2016. Those significant improvement mainly due to increasing of civil work revenue by 617% to Rp1.4 trillion from the Bakauheni - Sidomulyo toll project, the Pandaan - Malang toll project, the Way Sekampung dam project, the Manado - Bitung toll project, the Leuwi Keris dam project, the Sinabung lava control project and several carry over projects from the previous year. A portion of those increasing was also contributed by LMA, subsidiary has been consolidated into the Company since July 1, 2017.

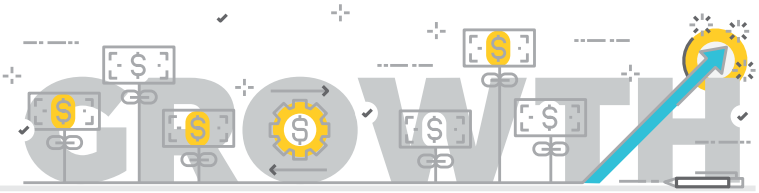

Selain pendapatan *civil work* yang berkontribusi sebesar 78%, peningkatan pendapatan konsolidasian Perseroan juga disebabkan oleh peningkatan signifikan pendapatan *ready mix* atau *batching plant* sebesar 138% dari Rp68,6 miliar (2016) meningkat menjadi Rp163,4 miliar (2017). Peningkatan pendapatan *ready mix* atau *batching plant* secara signifikan tersebut seiring dengan peningkatan pendapatan *civil work* karena model bisnis *ready mix* atau *batching plant* merupakan *business-to-business* (B2B) yang biasanya terkait langsung dengan *civil work*. Pendapatan *ready mix* atau *batching plant* ini berkontribusi sebesar 9% terhadap total pendapatan konsolidasian. Kontributor lainnya terhadap pendapatan konsolidasian adalah *formwork* dan penyewaan alat berat sebesar 13%.

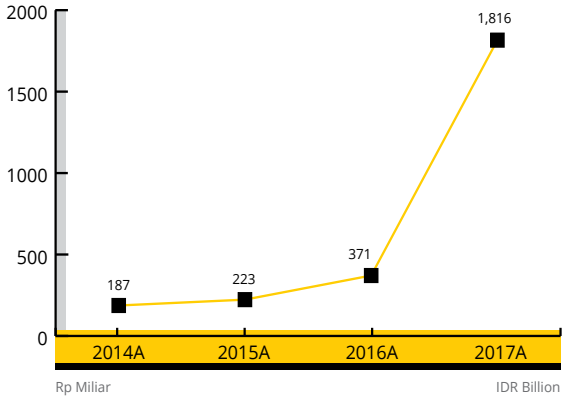

Addition to its civil works contribution, the increasing of Company's consolidated revenue was also attributed by ready-mix or batching plant revenue increasing by 138% from Rp68.6 billion (2016) to Rp163.4 billion (2017). Its significant increasing of ready mix or batching plant revenue is in line with civil work revenue increasing because the business model of ready mix or batching plant is business-to-business (B2B) which related to civil works directly. The ready mix or batching plant revenue contributed 9% to the total consolidated revenue. Other contributors to consolidated revenue are formwork and heavy equipment rental at 13%.

B. BEBAN POKOK PENJUALAN

Beban Pokok Penjualan konsolidasian Perseroan selama tahun 2017 meningkat 397% menjadi Rp1,4 triliun dari Rp276,0 miliar pada tahun 2016.

Peningkatan ini seiring dengan kenaikan pendapatan pada periode yang sama karena sebagian besar beban pokok penjualan berasal dari biaya material, biaya operasional, biaya gaji dan upah serta biaya bahan bakar minyak & oli pelumas yang merupakan biaya variable. Kontribusi biaya-biaya tersebut terhadap total beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

- biaya material : 34%
- biaya operasional : 23%
- biaya gaji dan upah : 16%
- biaya bahan bakar minyak & oli pelumas : 5%

Di samping itu terdapat biaya depresiasi alat-alat berat sebesar : 12%.

B. COST OF GOOD SOLD

Consolidated cost of goods sold for period ended December 31, 2017 increased 397% to Rp1.4 trillion from Rp276.0 billion in 2016.

Those increasing was in line with its revenue increasing in the same period because most of the cost of goods sold represented variable cost such as material cost, operating cost, salary and wage expenses and fuel, oil & lubricant expenses, etc. Its contribution of those cost of goods sold were as follows:

- material cost : 34%
- operating cost : 23%
- salary and wage expenses : 16%
- fuel, oil & lubricant expenses : 5%

There is heavy equipment depreciation expenses of 12% to add those cost of goods sold.

KINERJA KEUANGAN KOMPREHENSIF
COMPREHENSIVE FINANCIAL PERFORMANCE

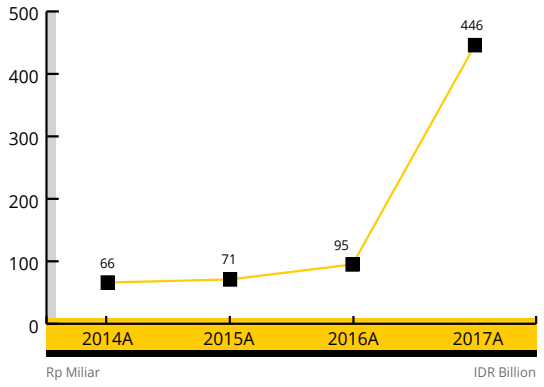

C. LABA KOTOR

Laba kotor meningkat 368% dari Rp95,2 miliar (2016) menjadi Rp445,9 miliar (2017). Peningkatan laba kotor ini, seiring keberhasilan Perseroan meningkatkan pendapatan konsolidasian melalui pekerjaan-pekerjaan *civil work*, serta keberhasilan Perseroan untuk mengelola harga pokok penjualan. Keberhasilan tersebut berdampak pada margin kotor yang dapat dikelola berkisar 25%.

C. GROSS PROFIT

Gross profit increased 368% from Rp95.2 billion (2016) to Rp445.9 billion (2017). Its gross profit increasing was in line with the Company's efforts to increase consolidated revenues through civil works successfully , and the Company's succeed to manage its cost of goods sold simultaneously. Therefore the gross margin could be managed around 25%.

D. BEBAN USAHA

- Beban Usaha meningkat signifikan sebesar 310% dari Rp13,9 miliar (2016) menjadi Rp57,0 miliar (2017) yang sebagian besar disebabkan oleh :
  - peningkatan biaya gaji & upah sebesar 241% dari Rp9,2 miliar (2016) menjadi Rp31,4 miliar (2017) sebagai implikasi dari penyesuaian inflasi serta dikonsolidasikannya LMA sejak Juli 2017.
  - peningkatan biaya umum sebesar 1.322% dari Rp0,9 miliar (2016) menjadi Rp12,8 miliar (2017) sebagai implikasi dari dikonsolidasikannya LMA sejak Juli 2017.

D. OPERATING EXPENSES

- Operating Expenses increased significantly 310% from Rp13.9 billion (2016) to Rp57.0 billion (2017), mostly due to:
  - salary and wage expenses increased 241% from Rp9.2 billion (2016) to Rp31.4 billion (2017) as inflation adjustment and consolidation of LMA since July 2017.
  - general expenses increased 1,322% from Rp0.9 billion (2016) to Rp12.8 billion (2017) resulted as LMA consolidation since July 2017.

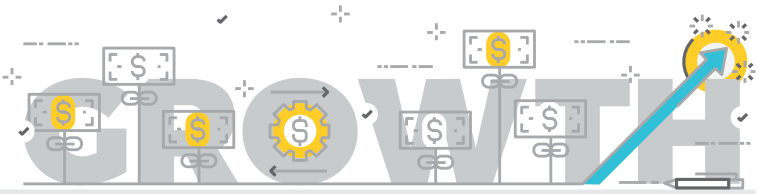

E. LABA USAHA

Laba usaha meningkat 379% dari Rp81,3 miliar (2016) menjadi Rp388,9 miliar (2017). Peningkatan laba usaha ini berkat kemampuan Perseroan mengelola peningkatan beban usaha. Demikian pula margin usaha dapat ditingkatkan dari sebesar 21,9% meningkat sebesar 22,4%.

E. OPERATING PROFIT

Operating profit increased 379% from Rp81.3 billion (2016) to Rp388.9 billion (2017) due to the Company's ability to manage operating expenses increasing. At the same time, its margin increased from 21.9% to 22.4%.

F. LABA BERSIH TAHUN BERJALAN

Laba bersih tahun berjalan dibukukan sebesar Rp244,6 miliar meningkat 491% dibandingkan dengan laba bersih tahun berjalan 2016 sebesar Rp41,4 miliar. Peningkatan ini seiring dengan pertumbuhan pendapatan dan laba usaha Perseroan.

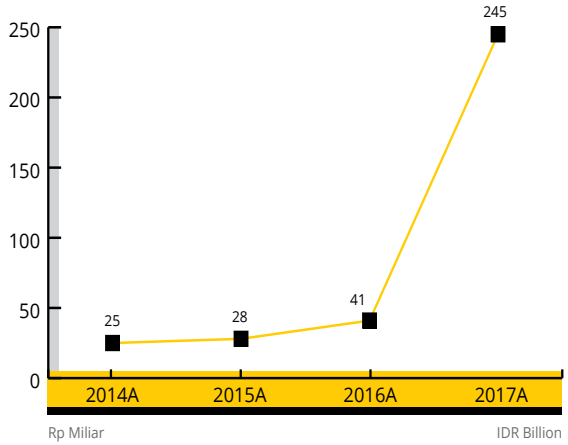

Perseroan membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp244,6 miliar tersebut, setelah Perseroan membebankan beban bunga sebesar Rp89,7 miliar meningkat dari Rp26,7 miliar (2016) dan beban pajak penghasilan sebesar Rp56,8 miliar meningkat dari Rp11,6 miliar (2016).

Setelah kepentingan non pengendali, laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun 2017 adalah sebesar Rp188,3 miliar, sebagai implikasi dari dikonsolidasikannya LMA sejak Juli 2017, meningkat 356% dari Rp41,4 miliar (2016).

F. NET PROFIT FOR THE YEAR

Net profit for the year was Rp244.6 billion, increased 491% comparing to IDR41.4 billion in 2016. This increasing is in line with the Company's revenue and profit growth.

The Company posted a net profit of Rp244.6 billion for the year, after the Company charged interest expense of Rp89.7 billion, increased from Rp26.7 billion (2016) and income tax expenses amounting to Rp56.8 billion increased from Rp11.6 billion (2016) .

Following non-controlling interests, net profit attributable to the owners of the parent entity of 2017 amounted to Rp188.3 billion up 356% from Rp41.4 billion (2016) as resulted of LMA consolidation since July 2017.

KINERJA KEUANGAN KOMPREHENSIF
COMPREHENSIVE FINANCIAL PERFORMANCE

G. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Penghasilan komprehensif lain yang dibukukan Perseroan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2,6 miliar, yang merupakan pengukuran kembali atas program imbalan pasti sebagai beban dan selisih lebih nilai revaluasi aset tetap.

G. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Other comprehensive income recorded for the period ended December 31, 2017 amounted to Rp2.6 billion represented a remeasurement of the defined benefit plan as cost and surplus of fixed asset revaluation.

H. LABA KOMPREHENSIF

Dengan dibukukannya penghasilan komprehensif sebesar Rp2,6 miliar, maka Laba Komprehensif yang dapat dicatat Perseroan untuk tahun adalah sebesar Rp247,2 miliar.

Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (setelah kepentingan non pengendali) tahun 2017 adalah sebesar Rp190,6 miliar meningkat 360% dari Rp41,4 miliar (2016).

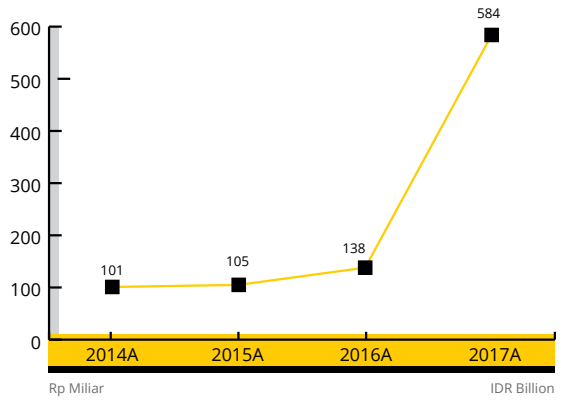

H. COMPREHENSIVE INCOME

With other comprehensive income of Rp2.6 billion, the Company recorded comprehensive income amounted to Rp247.2 billion.

The comprehensive income attributable to the owners of the parent entity (after non controlling interests) for the period ended December 31, 2017 amounted to Rp190.6 billion, increased 360% from Rp41.4 billion (2016).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

A. ASET LANCAR

Aset Lancar meningkat 470% dari Rp467,0 miliar (2016) menjadi Rp2.661,1 miliar (2017). Peningkatan tersebut disebabkan oleh :

- Kas dan setara kas naik 437% dari Rp210,9 miliar (2016) menjadi Rp1,1 triliun (2017) yang disebabkan oleh adanya tambahan kas yang berasal dari dana hasil penawaran umum perdana saham yang dilakukan 24 November 2017, yang belum digunakan yaitu sebesar Rp783,4 milar.
- Piutang usaha naik 497% dari Rp100,8 miliar (2016) menjadi Rp602,2 miliar (2017), yang terdiri atas :
  - √ piutang usaha pihak ketiga naik 2.432% dari Rp18,7 miliar (2016) menjadi Rp473,6 miliar (2017).

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

A. CURRENT ASSETS

Current Assets increased 470% from Rp467.0 billion (2016) to Rp2,661.1 billion (2017) due to:

- Cash and cash equivalents increased by 437% from Rp210.9 billion (2016) to Rp1.1 trillion (2017) resulted as additional remaining cash proceeds from the initial public offering of shares held on November 24, 2017 amounting to Rp783 , 4 millar
- Accounts receivable rose 497% from Rp100.8 billion (2016) to Rp602.2 billion (2017), which consisted of:
  - √ third party trade receivables increased by 2,432% from Rp18.7 billion (2016) to Rp473.6 billion (2017).

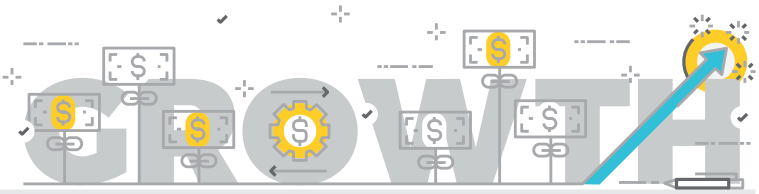

√ piutang usaha pihak berelasi naik 57% dari Rp82,1 miliar (2016) menjadi Rp128,6 miliar (2017).

Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan pendapatan konsolidasian, terutama pendapatan yang berasal dari pekerjaan *civil work*.

- Tagihan bruto pemberi kerja meningkat 438% dari Rp94,9 miliar (2016) menjadi Rp510,4 miliar (2017), yang terdiri atas :
  - √ Tagihan bruto pemberi kerja pihak ketiga naik 891% dari Rp4,6 miliar (2016) menjadi Rp45,4 miliar (2017).
  - √ Tagihan bruto pemberi kerja pihak berelasi naik 415% dari Rp90,4 miliar (2016) menjadi Rp465,0 miliar (2017).

  Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan pendapatan konsolidasian, terutama pendapatan yang berasal dari pekerjaan *civil work* yang berasal dari PT PP (Persero) Tbk, sebagai Entitas Induk.
- Persediaan meningkat 1.989% dari Rp2,8 miliar (2016) menjadi Rp58,5 miliar (2017) yang disebabkan oleh peningkatan bahan baku konstruksi sebesar 7.071% dari RpRp0,7 miliar (2016) menjadi Rp50,2 miliar (2017) seiring dengan peningkatan pekerjaan *civil work*.
- Uang muka meningkat 2.691% dari Rp3,4 miliar (2016) menjadi Rp94,9 miliar (2017) yang sebagian besar terdiri atas uang muka proyek *coal hauling* Sriwijaya, Palembang sebesar Rp40,7 miliar, proyek tol Manado-Bitung sebesar Rp8,8 miliar, proyek tol Solo Ngawi-Kertosono sebesar Rp16,6 miliar, proyek tol Sumedang sebesar Rp4,5 miliar, dan proyek tol Pandaan-Malang sebesar Rp3,3 miliar.
- Pajak dibayar di muka meningkat 292% dari Rp40,1 miliar (2016) menjadi Rp157,1 miliar (2017) yang sebagian besar terdiri atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp138,0 miliar dan PPh Pasal 4 (2) sebesar Rp19,1 miliar.
- Biaya dibayar di muka meningkat 726% dari Rp3,1 miliar (2016) menjadi Rp25,6 miliar (2017) yang sebagian besar terdiri atas beban asuransi dibayar dimuka alat berat sebesar Rp17,6 miliar.

√ related party trade receivables increased by 57% from Rp82.1 billion (2016) to Rp128.6 billion (2017).

Its receivables increasing were in line with consolidated revenue increasing, especially revenue from civil works.

- Gross receivables from project owners increased 438% from Rp94.9 billion (2016) to Rp510.4 billion (2017), which consisted of :
  - √ Gross receivables from third party project owners rose 891% from Rp4.6 billion (2016) to Rp45.4 billion (2017).
  - √ Gross receivables from related party project owners rose 415% from Rp90.4 miliar (2016) to Rp465.0 miliar (2017).

  Its gross receivables from project owners increased was in line with consolidated revenue increasing especially revenue from civil works from PT PP as the Parent Company.
- Inventories increased by 1,989% from Rp2.8 billion (2016) to Rp58.5 billion (2017) due to construction materials increasing about 7.071% from RpRp0.7 billion (2016) to Rp50.2 billion (2017) civil work.
- Advances increased by 2,691% from Rp3,4 billion (2016) to Rp94,9 billion (2017) mostly consisted of advances of Sriwijaya's coal hauling project amounted to Rp40,7 billion, Manado-Bitung toll road project amounted to Rp8,8 billion, Solo Ngawi-Kertosono toll road project amounted to Rp16.6 billion, Sumedang toll road project amounted to Rp4.5 billion, and Pandaan-Malang toll project amounted to Rp3.3 billion.
- Prepaid taxes increased by 292% from Rp40.1 billion (2016) to Rp157.1 billion (2017) consisting mostly of Value Added Tax (VAT) amounting to Rp138.0 billion and Income Tax Article 4 (2) amounting to Rp19, 1 billion.
- Prepaid expenses increased 726% from Rp3.1 billion (2016) to Rp25.6 billion (2017) consisting mostly of prepaid insurance of heavy equipment amounting to Rp17.6 billion.

KINERJA KEUANGAN KOMPREHENSIF
COMPREHENSIVE FINANCIAL PERFORMANCE

B. ASET TIDAK LANCAR

Aset Tidak Lancar meningkat 311% dari Rp599,4 miliar (2016) menjadi Rp2,5 triliun (2017). Peningkatan tersebut disebabkan oleh :

- Aset Tetap naik 267% dari Rp599,4 miliar (2016) menjadi Rp2,2 triliun (2017) yang disebabkan oleh adanya pertambahan jumlah peralatan berat yang dibeli oleh Perseroan untuk menunjang pekerjaan sipil (*civil work*). Di samping itu, terdapat tambahan aset tetap hasil konsolidasian dengan entitas anak yaitu LMA yang diakuisisi pada bulan Juni 2017.
- Adanya *Goodwill* sebesar Rp 246,9 miliar yang berasal dari akusisi LMA.

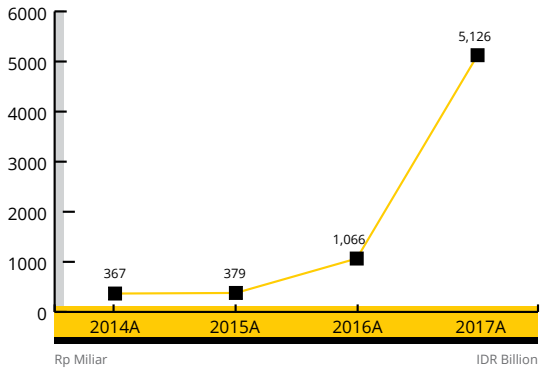

B. NON CURRENT ASSETS

Non-Current Assets increased 311% from Rp599.4 billion (2016) to Rp2.5 trillion (2017) due to :

- Fixed Assets increased by 267% from Rp599.4 billion (2016) to Rp2.2 trillion (2017) resulted of the number of heavy equipment purchasing to support civil works. In addition, there were additional fixed assets which has been consolidated from its subsidiary, LMA acquired in June 2017.
- Goodwill of Rp 246.9 billion derived from LMA acquisition.

C. TOTAL ASET

Total Aset meningkat 380% dari Rp1,1 triliun (2016) menjadi Rp5,1 triliun (2017) sebagai imbas dari peningkatan Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar lancar. Peningkatan tersebut secara signifikan juga dipengaruhi oleh hasil aksi koporasi yang dilakukan Perseroan di sepanjang tahun 2017 yaitu akuisisi LMA pada bulan Juni 2017 sebesar 51% sehingga dilakukan konsolidasian laporan keuangan dan penawaran umum perdana saham yang dilakukan 24 November 2017.

C. TOTAL ASSETS

Total Assets increased 380% from Rp1.1 trillion (2016) to Rp5.1 trillion (2017) as the impact of Current Assets and Non Current Assets increasing. Those improvement was also significantly resulted of corporate actions throughout 2017 namely LMA acquisition of 51% in June 2017 and initial public offering on November 24, 2017.

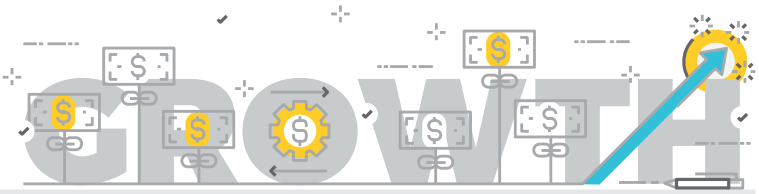

D. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Liabilitas Jangka Pendek meningkat 153% dari Rp558.9 miliar (2016) menjadi Rp1,4 triliun (2017). Peningkatan tersebut disebabkan oleh :

- Utang usaha pihak ketiga naik 466% dari Rp168,0 miliar (2016) menjadi Rp 950.3 miliar (2017) yang sebagian besar kepada PT Citra Tunggal Jaya sebesar Rp195,4 miliar, PT Tass Engineering sebesar Rp147,9 miliar, Dayaguna Motor sebesar Rp76,1 miliar, PT Motive Mulia sebesar Rp33,9 miliar, PT Gaya Makmur Tractors sebesar Rp33,7 miliar, PT Trakindo Utama sebesar Rp31,6 miliar, dan PT Holcim sebesar Rp30,6 miliar.
- Uang muka pemberi kerja meningkat 149% dari Rp47,2 miliar (2016) menjadi Rp117,6 miliar (2017).
- Utang bank jangka pendek meningkat 2% dari Rp200,0 miliar (2016) menjadi Rp204,4 miliar (2017) yang berasal dari PT Bank UOB sebesar Rp150,0 miliar dan PT Bank Syariah Mandiri sebesar Rp54,4 miliar.
- Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp105,0 miliar (2017) yang terdiri atas utang bank sebesar Rp55,0 miliar dan utang sewa pembiayaan sebesar Rp50,0 miliar.
- Utang pajak meningkat dari Rp0,6 miliar (2016) menjadi Rp19,2 miliar (2017) yang sebagian besar merupakan utang cadangan PPh final sebesar Rp14,7 miliar dan PPh 29 sebesar Rp3,5 miliar.

D. CURRENT LIABILITIES

Current Liabilities increased 153% from Rp558.9 billion (2016) to Rp1.4 trillion (2017). The increase is due to:

- Third party debt increased 466% from Rp168.0 billion (2016) to Rp 950.3 billion (2017), mostly to PT Citra Tunggal Jaya amounting to Rp195.4 billion, PT Tass Engineering amounting to Rp147.9 billion, Motor Power of Rp76, 1 billion, PT Motive Mulia Rp33.9 billion, PT Gaya Makmur Tractors Rp33.7 billion, PT Trakindo Utama Rp31.6 billion and PT Holcim Rp30.6 billion.
- Advances for employers increased 149% from Rp47.2 billion (2016) to Rp117.6 billion (2017).
- Current bank loans increased 2% from Rp200.0 billion (2016) to Rp204.4 billion (2017) from PT Bank UOB of Rp150.0 billion and PT Bank Syariah Mandiri of Rp54.4 billion.
- Current maturity of long-term liabilities due in one year amounted to Rp105.0 billion (2017) consisting of bank loans of Rp55.0 billion and finance lease obligations of Rp50.0 billion.
- Tax liabilities increased from Rp0.6 billion (2016) to Rp19.2 billion (2017), most of which were the final debt of the final income tax of Rp14.7 billion and PPh 29 amounting to Rp3.5 billion.

KINERJA KEUANGAN KOMPREHENSIF
COMPREHENSIVE FINANCIAL PERFORMANCE

E. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas Jangka Panjang terdiri dari utang bank dan sewa pembiayaan.

- Liabilitas Jangka Panjang-setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun – utang bank meningkat 297% dari Rp249,8 miliar (2016) menjadi Rp991,6 miliar (2017). Utang bank ini berasal dari PT Bank Syariah Mandiri sebesar Rp787,7 miliar, PT Bank UOB sebesar Rp65,2 miliar, PT Bank Exim sebesar Rp51,6 miliar, PT Bank DBS Indonesia sebesar Rp87,1 miliar, dan PT Bank Danamon sebesar Rp58,7 miliar.
- Liabilitas Jangka Panjang-setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun – sewa pembiayaan meningkat 676% dari Rp35,3 miliar (2016) menjadi Rp273,9 miliar (2017) yang sebagian besar berasal dari PT Takari sebesar Rp56,4 miliar, PT Mandiri Tunas Finance sebesar Rp47,6 miliar, PT Mitsubishi Motor sebesar Rp44,6 miliar, PT Astra Credit Company sebesar Rp36,3 miliar, PT IBJ Verena Finance sebesar Rp19,7 miliar, PT SMF Leasing Indonesia sebesar Rp18,4 miliar, dan PT Bumiputera BOT Finance sebesar Rp18,2 miliar.

E. NON-CURRENT LIABILITY

Non Current Liabilities mostly consisted of bank loan and finance lease.

- Long term bank loan - net of current maturities increased 297% from Rp249.8 billion (2016) to Rp991.6 billion (2017). Its bank loan represented PT Bank Syariah Mandiri amounting to Rp787.7 billion, PT Bank UOB amounting to Rp65.2 billion, PT Bank Exim amounting to Rp51.6 billion, PT Bank DBS Indonesia amounting to Rp87.1 billion and PT Bank Danamon amounting to Rp58.7 billion.
- Long term finance lease - net of current maturities increased 676% from Rp35.3 billion (2016) to Rp273.9 billion (2017) mostly from PT Takari amounting to Rp56.4 billion, PT Mandiri Tunas Finance amounting to Rp47.6 billion, PT Mitsubishi Motor amounting to Rp44.6 billion, PT Astra Credit Company amounting to Rp36.3 billion, PT IBJ Verena Finance amounting to Rp19.7 billion, PT SMF Leasing Indonesia amounting to Rp18.4 billion, and PT Bumiputera BOT Finance amounting to Rp18.2 billion.

F. TOTAL LIABILITAS

Total Liabilitas meningkat 214% dari Rp854,4 miliar (2016) menjadi Rp2,7 triliun (2017) sebagai imbas dari peningkatan Liabilitas Jangka Pendek dan Liabilitas Jangka Panjang. Peningkatan tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh peningkatan utang usaha seiring dengan peningkatan usaha Perseroan serta peningkatan debt sebagai salah satu sumber pembiayaannya.

F. TOTAL LIABILITIES

Total Liabilities increased by 214% from Rp854.4 billion (2016) to Rp2.7 trillion (2017) resulted of increasing of Short Term Liabilities as well as Long-Term Liabilities. Those increasing was significantly influenced by trade payables increasing in line with the Company's business increasing and debt increasing as one of its financing sources.

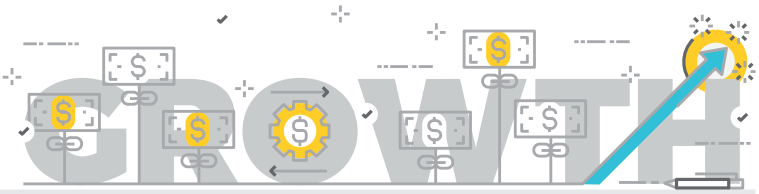

G. EKUITAS

Ekuitas meningkat 1.050% dari Rp212 miliar (2016) menjadi Rp2,4 triliun (2017). Peningkatan tersebut disebabkan oleh :

- Modal Ditempatkan dan Disetor meningkat 823% dari Rp110,8 miliar (2016) menjadi Rp1,02 triliun (2017) yang disebabkan oleh :

  √ Setoran tunai sebesar Rp599,9 miliar dari PT PP dan Rp0,1 miliar dari YKKPP serta kapitalisasi saldo laba dan utang dividen sebesar Rp76,5 miliar dan Rp0,2 miliar masing-masing oleh PT PP dan YKKPP.

  √ Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp235,1 miliar sebagai hasil dari penawaran saham sebanyak 2.351.221.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak 23% (dua puluh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

- Adanya tambahan Modal Disetor sebesar Rp749,6 miliar sebagai selisih nilai nominal saham dengan penerimaan hasil penawaran umum perdana saham.
- Peningkatan Saldo Laba sebesar 116% dari Rp101,2 miliar (2016) menjadi Rp218,4 Miliar (2017).

G. EQUITY

Equity increased 1,050% from Rp211.9 billion (2016) to Rp2.4 trillion (2017). The increase is due to:

- The Issued and Paid-in Capital increased 823% from Rp110.8 billion (2016) to Rp1.02 trillion (2017) due to:

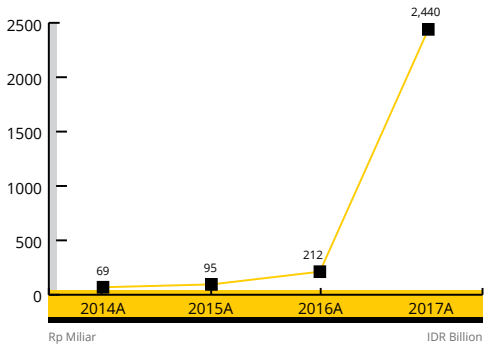

  √ Cash deposits amounting to Rp599.9 billion from PT PP and Rp0.1 billion from YKKPP and capitalization of retained earnings and dividend payable of Rp76.5 billion and Rp0.2 billion, respectively by PT PP and YKKPP.

  √ Initial Public Offering of Rp235.1 billion as a result of the offering of 2,351,221,000 (two billion three hundred fifty one million two hundred twenty one thousand) common shares on behalf of the Company's new shares with a nominal value of Rp100 (one hundred Rupiah) representing 23% (twenty-three percent) of the issued and fully paid share capital of the Company after the Initial Public Offering.

- The additional Paid-in Capital amounted to Rp749.6 billion as the difference between the par value of shares and the proceeds from the initial public offering
- Increase in Retained Earnings by 116% from Rp101.2 billion (2016) to Rp218.4 billion (2017).

KINERJA KEUANGAN KOMPREHENSIF
COMPREHENSIVE FINANCIAL PERFORMANCE

ARUS KAS

A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi meningkat 219% dari Rp110,2 miliar (2016) menjadi Rp351,1 miliar (2017). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan seiring dengan peningkatan pendapatan dari civil work yang mana Perseroan menerima pembayaran melalui mekanisme Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau sering disebut local LC. Hal ini yang menyebabkan Perseroan selalu memperoleh surplus dari Arus Kas Dari Aktivitas Operasi, di samping Perseroan tidak menerima pekerjaan turnkey project.

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
Cash Flows From Operating Activities

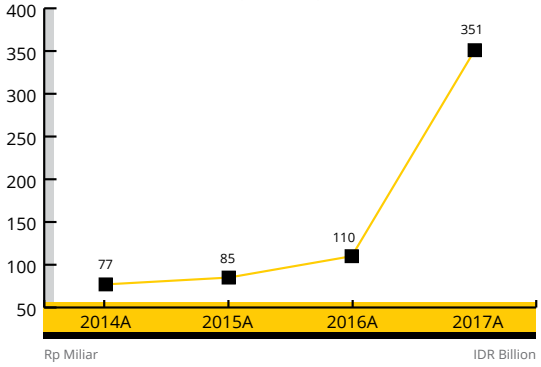

CASH FLOW

A. CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Net cash flows generated from operating activities increased 219% from Rp110.2 billion (2016) to Rp351.1 billion (2017). Its increasing due to cash receipts from customers in line with the civil works' income increasing which the Company received payments through the mechanism of Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) or often called as local LC. Receiving its mechanism tended the Company to receive a surplus from Cash Flows from Operating Activities, in addition to the Company's non-acceptance of the turnkey project.

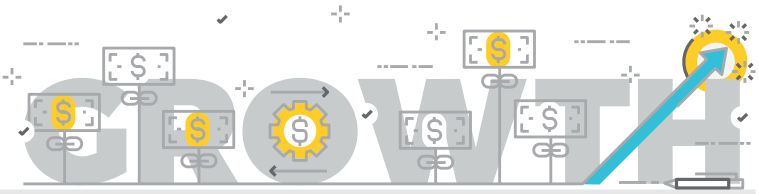

B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus kas bersih Perseroan yang yang digunakan untuk aktivitas investrasi meningkat 509% dari Rp272,0 miliar (2016) menjadi Rp1,7 triliun (2017). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pengeluaran belanja modal untuk akuisisi LMA sebesar Rp798 miliar dan pembelian alat-alat berat sebesar Rp716,8 miliar.

C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas pendanaan meningkat 510% dari Rp362,8 miliar (2016) menjadi Rp2,2 triliun (2017). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh hasil penawaran umum perdana saham sebesar Rp984,7 miliar setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek sebesar Rp26,3 miliar, utang bank sebesar Rp800,4 miliar.

Dari ketiga aktivitas tersebut, maka kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp905,4 miliar, sehingga saldo kas dan setara kas akhir per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp1,1 triliun.

B. CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

The Company's net cash flows used in investing activities increased 509% from Rp272.0 billion (2016) to Rp1.7 trillion (2017). The increase was mainly due to capital expenditures for the acquisition of Rp798 billion of LMA and heavy equipment purchases amounting to Rp716.8 billion.

C. CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

The Company's net cash flows generated from financing activities increased 510% from Rp362.8 billion (2016) to Rp2.2 trillion (2017). The increase was mainly due to the proceeds of the initial public offering of Rp984.7 billion, net of securities cost of Rp26.3 billion, bank debt of Rp800.4 billion.

From these three activities, the increase (decrease) in net cash and cash equivalents as of December 31, 2017 amounted to Rp905.4 billion, so that the cash balance and cash equivalent as of December 31, 2017 amounted to Rp1.1 trillion.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG
SOLVABILITY

A. RASIO LANCAR

Rasio Lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Rasio Lancar Perseroan per tanggal 31 Desember 2017 adalah 1,9 X meningkat dari 0,8 X per tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini sebagai implikasi dari jumlah kas dan setara kas yang dimiliki Perseroan meningkat menjadi Rp1,1 triliun yang sebagian besar merupakan dana hasil penawaran umum Perdana saham yang belum digunakan yang pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp783,4 miliar.

A. CURRENT RATIO

The Current ratio is the ratio to measure a company's ability to pay its short-term liabilities using its current assets. The Current Ratio of the Company as of December 31, 2017 is 1.9 X increases from 0.8 X as of December 31, 2016. This increase is an implication of the Company's cash and cash equivalents increased to Rp1.1 trillion which is mostly from outstanding IPO proceeds on 31 December 2017 amounting to Rp783,4 billion.

B. EBITDA COVERAGE RATIO

EBITDA Coverage Ratio adalah rasio untuk mengukur kemampuan EBITDA untuk memenuhi seluruh biaya bunga.

EBITDA Coverage Ratio Perseroan per tanggal 31 Desember 2017 adalah 6,5 X meningkat dari 5,2 X per tanggal tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan EBITDA yang dapat dicapai oleh Perseroan sebesar 323% dari Rp138,1 miliar (2016) menjadi Rp583,9 miliar.

B. EBITDA COVERAGE RATIO

EBITDA Coverage Ratio is a ratio to measure the ability of EBITDA to meet all its interest obligations and related interest costs.

The EBITDA Coverage Ratio of the Company as of December 31, 2017 is 6.5 X increased from 5.2 X as of December 31, 2016. This increase is in line with the Company's EBITDA increase of 323% from Rp138.1 billion (2016) to Rp583.9 billion (2017)

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG
COLLECTIBILITY

Tingkat Kolektibilitas Piutang Perseroan per tanggal 31 Desember 2017 adalah 70,6 hari meningkat dari 79,0 hari per tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan ini sebagai implikasi dari Perseroan untuk menerapkan kebijakan penggunaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri atau sering disebut Lokal LC sebagai media pembayaran penagihan piutang.

The Collectibility Rate of the Company's Receivables as of December 31, 2017 is 70.6 day increases from 79.0 days as of December 31, 2016. This increase is an implication of the Company to implement the Domestic Letters of Credit (*SKBDN*) or often called LC local as payment method.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL
MATERIAL COMMITMENT FOR CAPITAL EXPENDITURE

Perseroan melakukan pembelian belanja modal dalam bentuk peralatan berat secara langsung kepada *vendor* yang tidak memiliki afiliasi dengan Perseroan tanpa ikatan komitmen apapun sebelum terjadinya transaksi. Pendanaan yang digunakan dalam pembelian belanja modal tersebut berasal dari utang pihak ketiga yang tidak memiliki afiliasi dengan Perseroan meliputi perbankan dan perusahaan pembiayaan serta dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham.

The Company purchases capital expenditures in heavy equipment directly to vendors who have no affiliation with the Company without any commitments prior to the transaction. Funding used in the purchase of such capital expenditures comes from third party debts that have no affiliation with the Company including banks and finance companies as well as funds obtained from the proceeds of the initial public offering of shares.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL
CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY

Kebijakan manajemen atas struktur modal didasarkan untuk melindungi kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usaha sehingga dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan mempertahankan struktur permodalan yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

The management policy on capital structure is based on protecting the Company's ability to maintain its business continuity so as to keep returns for shareholders and other stakeholder benefits and to maintain optimal capital structure to reduce capital costs.

Perseroan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola struktur permodalan untuk memastikan struktur modal dan hasil pengembalian ke pemegang saham secara optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan efisiensi modal Perseroan, profitabilitas, proyeksi arus kas operasi, proyeksi pengeluaran barang modal dan proyeksi peluang investasi yang strategis serta memperhitungkan risiko *mismatch* pendanaan. Salah satu acuan telaah adalah *Weighted Average Cost of Capital* (WACC) dengan menjadikan *rasio gearing* dan *rasio net gearing* sebagai *early warning* kecukupan modal.

The Company actively and regularly reviews and manages the capital structure to ensure optimal capital structure and returns to shareholders, taking into account the Company's capital requirements and efficiency, profitability, projected operating cash flows, projected capital expenditures and strategic investment opportunity projection and taking into account risk funding mismatch. One of the reference studies is Weighted Average Cost of Capital (WACC) by making the gearing ratio and net gearing ratio as an early warning of capital adequacy.

Perseroan memiliki *rasio gearing* per tanggal 31 Desember 2017 sebesar 0,8 X membaik dari *rasio gearing* per tanggal 31 Desember 2016 sebesar 2,9 X. Dan rasio net gearing per tanggal 31 Desember 2017 sebesar 0,2 X membaik dari rasio gearing per tanggal 31 Desember 2016 sebesar 1,9 X. Sebelum melakukan penawaran umum perdana saham, kedua rasio tersebut telah berada pada tingkat yang sehat, dan semakin menjadi sehat serta memberikan ruang yang lebih luas bagi Perseroan untuk melakukan *leveraging* untuk membiayai pertumbuhannya, setelah Perseroan melakukan penawaran umum perdana saham pada tanggal 24 November 2017.

The Company has a gearing ratio as of December 31, 2017 of 0.8 X improved from gearing ratio per December 31, 2016 of 2.9 X. And net gearing ratio as of December 31, 2017 amounted to 0.2 X improved from gearing ratio as of December 31, 2016 of 1.9 X. Prior to the initial public offering of shares, the two ratios have been at a healthy level, and become healthier and provide a wider space for the Company to finance its growth by leveraging, after the Company conducted its initial public offering November 24, 2017.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL
CAPITAL EXPENDITURE COMMITMENT

Perseroan melakukan pembelian belanja modal dalam bentuk peralatan berat secara langsung kepada vendor yang tidak memiliki afiliasi dengan Perseroan tanpa ikatan komitmen apapun sebelum terjadinya transaksi. Pendanaan yang digunakan dalam pembelian belanja modal tersebut berasal dari utang pihak ketiga yang tidak memiliki afiliasi dengan Perseroan meliputi perbankan dan perusahaan pembiayaan serta dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham

The Company purchases capital expenditures in heavy equipment directly to vendors who have no affiliation with the Company without any commitments prior to the transaction. Funding used in the purchase of such capital expenditures comes from third party debts that have no affiliation with the Company including banks and finance companies as well as funds obtained from the proceeds of the initial public offering of shares.

INVESTASI BARANG MODAL YANG DIREALISASIKAN
CAPITAL EXPENDITURES REALIZATION

Selama tahun 2017, Perseroan telah melakukan belanja modal sebesar Rp1,7 triliun meningkat 443% dibandingkan dengan belanja modal 2016 sebesar Rp314 miliar. Peningkatan tersebut didominasi oleh pembelian alat-alat berat penunjang pekerjaan *civil work*, di samping biaya akuisisi LMA. Perseroan tidak memiliki risiko fluktuasi mata uang asing karena pembelian barang modal tersebut dilakukan dalam bentuk mata uang Rupiah. Peralatan berat yang dibeli oleh Perseroan merupakan peralatan yang siap pakai dan tidak membutuhkan penyesuaian spesifikasi dengan kebutuhan Perseroan.

During 2017, the Company has spent capital expenditure of Rp1.7 trillion, up 443% compared to 2013 capital expenditure of Rp314 billion. The increase is dominated by the purchase of heavy equipment supporting the work of civil works, in addition to the cost of acquisition of LMA. The Company has no foreign currency fluctuation risk as the purchase of capital goods is made in Rupiah currency. Heavy equipment purchased by the Company is a ready-made equipment and requires no adjustment of specifications to the needs Company.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN
SUBSEQUENT EVENT

Setelah tanggal laporan akuntan, Perseroan mencatat bahwa tidak terdapat informasi dan fakta material bagi seluruh Pemangku Kepentingan.

After the date of the accountant's report, the Company notes that there is no material information and facts for all Stakeholders.

PROSPEK USAHA
BUSINESS PROSPECTS

Ketersediaan infrastruktur merupakan syarat utama bagi perkembangan bangsa baik dari sisi sosial ekonomi maupun perkembangan sosial budaya. Karenanya pembangunan infrastuktur digalakan dari masa ke masa terlebih dalam hampir 4 tahun terakhir, dimana pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur secara lebih pesat untuk mengejar ketertinggalan ketersedian infrastuktur. Hal ini tercermin dari pengeluaran Pemerintah untuk infrastuktur meningkat tajam dari sebesar Rp155 triliun (2014) diperkirakan menjadi Rp401 triliun (2017) atau mengalami cagr 4 tahun sebesar 37,3%.

Pembangunan infrastruktur yang pesat mendorong perkembangan industri konstruksi. Menciptakan pertumbuhan permintaan yang semakin besar dan beragam terhadap jasa konstruksi. Pembangunan infrastruktur akan selalu menjadi tema pembangunan Indonesia di masa mendatang untuk mengejar ketersediaan infrastruktur.

Availability of infrastructure is the main requirement for the development of the nation both in terms of socio-economic and socio-cultural development. Hence, infrastructure development has been intensified over the past four years, with the government building infrastructure more rapidly to catch up with the availability of infrastructure. This is reflected in the Government's expenditure on infrastructure increased sharply from Rp155 trillion (2014) to Rp401 trillion (2017) or a 4-year cagr of 37.3%.

Rapid infrastructure development is driving the development of the construction industry. Create an ever-increasing and diverse growth in demand for construction services. Infrastructure development will always be the theme of Indonesia's development in the future to pursue the availability of infrastructure.

Mengacu kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara ("APBN") 2018 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari 5,2% (2017) menjadi 5,4% (2018) dengan tingkat inflasi yang turun dari 4,3% (2017) menjadi 3,5% (2018); dan pijakan pijakan kebijakan belanja negara yang mengedepankan mengalihkan belanja yang konsumtif menjadi belanja produktif dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi serta percepatan realisasi belanja negara, efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas dan melanjutkan penguatan kualitas belanja negara dan tetap konsisten melakukan efisiensi belanja non-prioritas tanpa mengurangi pencapaian sasaran *output* yang telah direncanakan.

Di tambah dengan kebijakan di sektor infrastruktur sebagai berikut :

Pengembangan konektivitas untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, jalur utama logistik, dan integrasi antarmoda dalam rangka mendorong pengembangan wilayah strategis. Koordinasi lintas sektoral termasuk dengan Pemda agar pelaksanaanya berjalan lancar dan sesuai kebutuhan daerah namun selaras dengan target nasional. Perbaikan perencanaan, pola koordinasi yang efektif dan penguatan regulasi untuk mengatasi hambatan teknis Memberdayakan peran swasta, BUMN,BUMD, Pemda melalui pengembangan pembiayaan kreatif atau skema KPBU atau non KPBU untuk menutup *financing gap* pendanaan infrastruktur; dan total anggaran infrastruktur itu sendiri sebesar Rp410,4 triliun, mendorong sektor infrastruktur tetap *bullish* di tahun mendatang. Perseroan sangat positif terhadap potensi pertumbuhan infrastruktur di tahun 2018 mendatang sehingga Perseroan menargetkan perolehan kontrak baru senilai Rp7,0 triliun hingga Rp8,0 trilun di tahun 2018 mendatang, meningkat 27% dari Rp5,9 triliun (2017), sehingga total *order book* 2018 yang dimiliki Perseroan sebesar Rp16,5 triliun. Untuk mendukung pengerjaan *order book* tersebut, Perseroan merencanakan belanja modal (capital expenditure : "*capex*") pada tahun 2018 sebesar Rp1,6 triliun meningkat 80,9% dari *capex* 2017 sebesar Rp905 miliar di luar akuisisi. Demikian juga rencana *capex* hingga tahun 2022, yang rata-rata di atas *capex* 2017 tersebut, menunjukkan optimisme Perseroan terhadap sektor infrastruktur.

Referring to the 2018 state budget revenues (APBN) targeting economic growth that increased from 5.2% (2017) to 5.4% (2018) with inflation rate down from 4.3% (2017) to 3, 5% (2018) and the adoption of an expenditure policy that promotes productive spending in the context of accelerating economic growth as well as accelerating the realization of state expenditure, spending efficiency and increasing productive spending to support priority programs and continuing to strengthen the quality of state expenditure and consistently performing non-expenditure efficiency -the priority without reducing the achievement of the planned output objectives.

Added to the policy in the infrastructure sector as follows:

Development of connectivity to support economic growth centers, major logistics channels, and interfaod integration in order to foster strategic area development. Cross-sectoral coordination is included with the local government to ensure that its implementation runs smoothly and fits regional needs but is in line with national targets. Improved planning, effective coordination pattern and regulatory strengthening to overcome technical barriers Empowering private, state-owned, local-owned enterprises, local governments through creative financing or KPBU or non-KPBU schemes to cover the financing gap for infrastructure financing; and the total infrastructure budget itself amounted to Rp410.4 trillion, pushing the infrastructure sector to remain bullish in the coming year. The Company is very positive about the growth potential of infrastructure in 2018 so that the Company targets new contracts valued at Rp7.0 trillion to Rp8.0 trillion in 2018, up 27% from Rp5.9 trillion (2017), bringing the total order book of 2018 owned by the Company amounting to Rp16.5 trillion. To support the order book, the Company plans capital expenditure (capital expenditure: "capex") in 2018 amounting to Rp1, 6 trillion increased 80.9% of 2017 capex of Rp905 billion beyond the acquisition. Similarly, the capex plan until 2022, which averaged above the 2017 capex, shows the Company's optimism towards the infrastructure sector.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI
TARGET AND REALIZATION COMPARASION

Tahun 2017 merupakan puncak dari transformasi bisnis *phase* 1 yang mana Perseroan juga berhasil melampaui target 2017 yang ditetapkan.

Pencapaian target 2017 adalah sebagai berikut :

1. Kontrak baru sebesar Rp5,9 triliun mencapai 102% dari target sebesar Rp5,8 triliun
2. Pendapatan sebesar Rp1,8 triliun mencapai 106% dari target sebesar Rp1,7 triliun
3. Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp188 miliar mencapai 125% dari target sebesar Rp150 miliar.
4. EBITDA sebesar Rp557 miliar mencapai 110% dari target sebesar Rp508 miliar.
5. Rencana penawaran umum perdana saham yang terealisasi pada tanggal 24 November 2017.

2017 is the culmination of business transformation phase 1 which the Company has also exceeded the set 2017 target.

Achieving the 2017 target is as follows:

1. The new contract of Rp5.9 trillion reached 102% of the target of Rp5.8 trillion
2. Revenue of Rp1.8 trillion was 106% of the target of Rp1.7 trillion
3. Net Income attributable to owners of the parent entity amounting to Rp188 billion reaches 125% of the target of Rp150 billion.
4. EBITDA of Rp557 billion reached 110% of the target of Rp508 billion.
5. The initial public offering plan of the shares is realized on November 24, 2017.

Manado - Bitung Toll Road Project

TARGET DAN PROYEKSI YANG INGIN DICAPAI PADA TAHUN 2018
2018 PROJECTIONS

Tingkat capaian kinerja 2017 yang memuaskan tersebut di atas, mendorong Perseroan menargetkan pendapatan 2018 hingga sebesar Rp4,9 triliun, meningkat 172% dari sebesar Rp1,8 triliun (2017).

Dan laba bersih tahun berjalan 2018 ditargetkan hingga sebesar Rp605 miliar, meningkat 152% dari sebesar Rp240 miliar (2017). Laba bersih setelah minority interest ditargetkan hingga sebesar Rp434 miliar. Penetapan target 2018 yang meningkat signifikan dari kinerja 2017, bukan tanpa alasan, karena PP Presisi memiliki *Order Book carry over* dari tahun 2017 sebesar Rp9 triliun, sehingga dengan tambahan kontrak baru 2018 yang ditargetkan hingga sebesar Rp8 triliun, maka *Order Book* 2018 menjadi sebesar Rp17 triliun. Selain itu, PP Presisi juga memiliki recurring income dari 3 kontrak pekerjaan coal hauling yang dapat memberikan kontribusi pendapatan berkisar 10% hingga 15%.

Untuk mendukung pencapaian target 2018, PP Presisi telah memiliki budget *capex* 2018 hingga mencapai Rp1,6 triliun yang masih didominasi oleh pembelian alat-alat berat penunjang pekerjaan *civil work*. *Capex* 2018 sebenarnya mengalami peningkatan dibandingkan dengan *capex* 2017 yang sebesar Rp1,7 triliun, karena *capex* 2017 termasuk di dalamnya akuisisi LMA.

The satisfactory performance of the 2017 performance level above, prompted the Company to target 2018 revenues of Rp4.9 trillion, up 172% from Rp1.8 trillion (2017).

And net profit for the year 2018 is targeted to reach Rp605 billion, up 152% from Rp240 billion (2017). Net profit after minority interest is targeted to reach Rp434 billion. The 2018 targets increased significantly from 2017's performance, not without reason, because PP Presisi has an Order Book carry over from 2017 of Rp9 trillion, so with the addition of new 2018 contract targeted at Rp 8 trillion, the Order Book 2018 becomes Rp17 trillion . In addition, PP Presisi also has recurring income from 3 contracts of coal hauling work that can contribute revenues ranging from 10% to 15%.

To support the achievement of the 2018 target, PP Presisi has a budget capex of 2018 to reach Rp1, 6 trillion which is still dominated by the purchase of heavy equipment supporting the work of civil work. Capex 2018 actually increased compared to 2017 capex which amounted to Rp1, 7 trillion, because 2017 capex includes the acquisition of LMA.

Leuwi Keris Dam Project

ASPEK DAN STRATEGI PEMASARAN
MARKETING ASPECTS AND STRATEGY

Perusahaan Konstruksi Terintegrasi bukan sekedar slogan tetapi positioning Perseroan yang ditawarkan kepada konsumen. Positioning tersebut menjadi salah satu strategi pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan. Perseroan mengintegrasikan 5 lini bisnis yang kini dimilikinya yaitu *civil work*, *ready mix*, *foundation*, form work dan penyewaan alat berat untuk dapat melayani proyek-proyek infrastruktur, pembangunan gedung dan pembangkit listrik. Dengan bisnis model tersebut tidak saja konsumen yang diuntungkan melalui value added, Pemegang Saham juga diuntungkan melalui peningkatan *shareholder value*. Positioning Perseroan sangat kuat karena hingga saat ini, belum dapat ditemukan perusahaan konstruksi sejenis yang memiliki model bisnis seperti model bisnis Perseroan.

Walaupun Perseroan memiliki positioning yang kuat, Perseroan tetap menghadapi risiko pemasaran berupa repeat order yang dipengaruhi oleh kepercayaan pelanggan dan risiko persaingan usaha di sektor jasa konstruksi yang semakin ketat baik dengan sesama BUMN maupun dengan swasta.

Integrated Construction Company is not just a slogan but the Company's positioning offered to consumers. The positioning becomes one of the marketing strategies undertaken by the Company. The Company integrates 5 business lines which currently have civil works, ready mix, foundation, form work and heavy equipment rental to serve infrastructure projects, building construction and power plant. With the business model not only consumers who benefit through value added, Shareholders also benefit through increasing shareholder value. Positioning of the Company is very strong because until now, there has not been found a similar construction company that has a business model such as the business model of the Company.

Although the Company has a strong positioning, the Company continues to face marketing risks in the form of repeat orders that are influenced by customer confidence and business competition risk in the increasingly tight construction services sector with fellow BUMNs and with the private sector.

Pandaan - Malang Toll Road Project

Untuk menghadapi risiko-risiko tersebut, Perseroan telah melakukan mitigasi sebagai berikut :

1. Selalu memperkuat positioning Perseroan dengan meningkatkan value added yang dapat diberikan kepada konsumen.
2. Tindak lanjut terhadap tingkat kepuasan konsumen.
3. Melakukan inisiative improvement yang berkelanjutan antara lain melalui project management, fleet management, dan cost management.

To face such risks, the Company has conducted the following mitigation:

1. Always strengthen the Company's positioning by increasing the value added that can be provided to consumers.
2. Follow-up to the level of customer satisfaction.
3. Conduct continuous improvement initiatives, among others through project management, fleet management, and cost management.

Order Book

Order Book

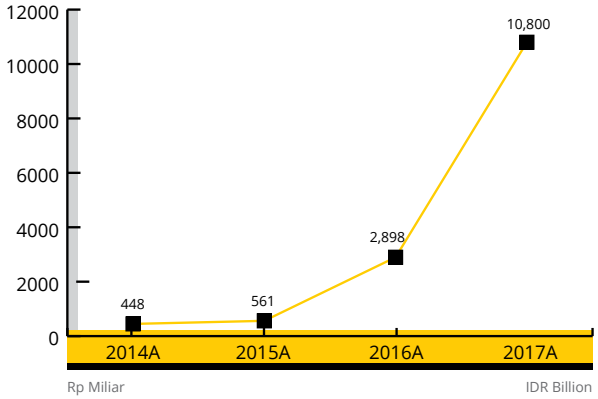

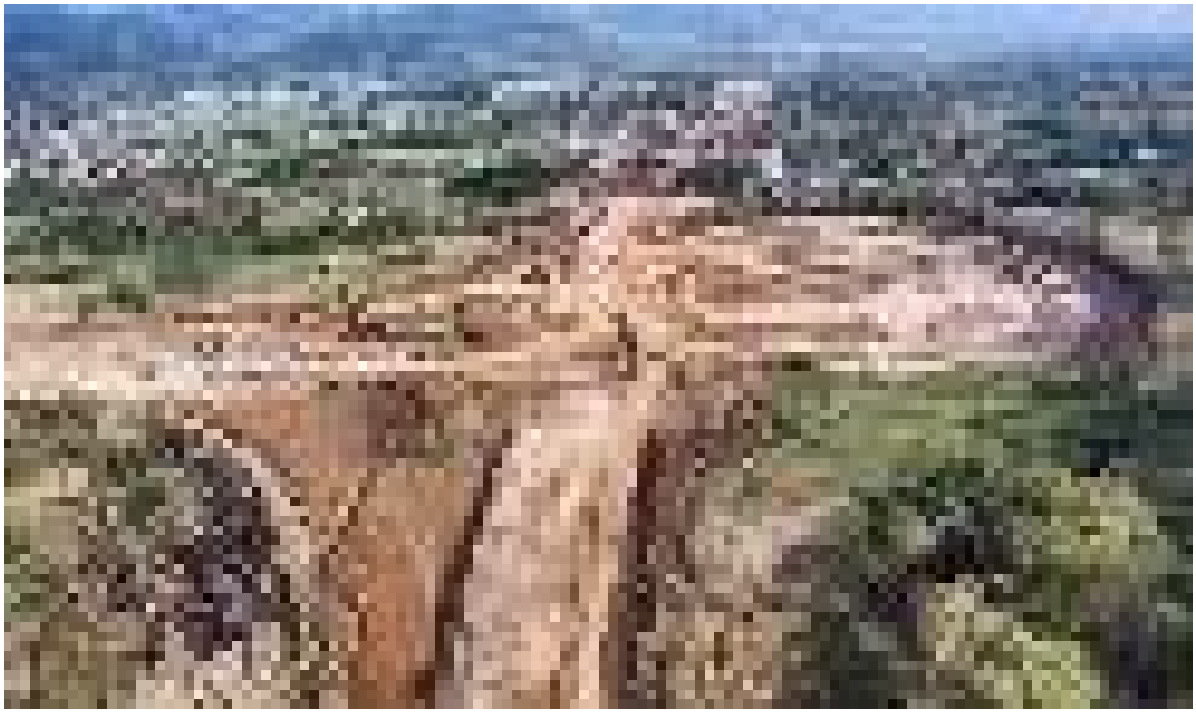

Pandaan - Malang Toll Road Project

KEBIJAKAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN
DEVIDEND POLICY AND PAYMENT

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, laba bersih Perseroan dapat dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen setelah penyisihan dana cadangan wajib yang dipersyaratkan undang-undang. Pembagian dividen harus disetujui oleh Pemegang Saham melalui keputusan RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Perseroan.

Manajemen Perseroan, merencanakan kebijakan pembagian dividen kas maksimum 50% (lima puluh persen) dari laba bersih Perseroan untuk setiap tahunnya yang dimulai dari tahun buku 2017 dengan dasar perhitungan bahwa Perseroan akan memberikan keuntungan yang proporsional antara Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan adanya pertumbuhan Perseroan di masa yang akan datang. Perseroan berencana untuk membagikan dividen, setidaknya sekali setahun kecuali diputuskan lain dalam RUPS. Direksi Perseroan akan membayarkan dividen, dengan persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS.

In accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia and the Company's Articles of Association, the Company's net income may be distributed to the Shareholders as dividends after allowance for mandatory reserve funds required by law. The dividend payment must be approved by the Shareholders through the resolution of the AGMS based on the recommendation of the Company.

Management of the Company, plans to issue a maximum cash dividend of 50% (fifty percent) of the Company's net profit for each year starting from fiscal year 2017 based on the calculation that the Company will provide proportional profit among Shareholders with due regard to the Company's growth in the future which will come. The Company plans to distribute dividends, at least once a year unless otherwise decided in the GMS. The Board of Directors of the Company shall pay dividends, subject to the approval of the shareholders in the GMS.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN PERDANA SAHAM
IPO PROCEEDS REALIZATION

Perseroan memperoleh dana hasil penawaran umum perdana saham yang diselenggarakan pada 24 November 2017 sebesar Rp984,7 miliar setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek sebesar Rp26,3 miliar. Per tanggal 31 Desember 2017, Perseroan telah menggunakan dana hasil penawaran umum perdana saham tersebut sebesar Rp201,3 miliar untuk membiayai modal kerja. Perseroan masih menyisakan dana sebesar Rp783,4 miliar yang disimpan dalam bentuk deposito dan rekening dana IPO.

The Company obtained IPO proceeds held on November 24, 2017 amounting to Rp984.7 billion net of issuing expenses about Rp26.3 billion. As of December 31, 2017, the Company already used those proceeds amounting to Rp201.3 billion for working capital. The Company placed the remaining IPO proceeds amounting to Rp783.4 billion in time deposits and IPO funds account.

INFORMASI MATERIAL TERKAIT INVESTASI, DIVESTASI, AKUISISI, TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

INFORMATIONS ON INVESTMENT, DIVESTMENT, ACQUISITION, AFFILIATED TRANSACTIONS AND CONFLICT OF INTEREST TRANSACTIONS

INFORMASI MATERIAL TERKAIT INVESTASI DAN DIVESTASI

Sepanjang tahun 2017, Perseroan melanjutkan peningkatan engineering capacity *civil work* dengan melakukan belanja modal berupa pembelian alat-alat berat untuk menunjang pekerjaan *civil work* sebesar Rp907 miliar.

INVESTMENT AND DIVESTMENT INFORMATION

Throughout the year 2017, the Company continued to improve its engineering capacity by heavy equipment purchasing amounting to Rp907 billion to support civil work.

INFORMASI MATERIAL TERKAIT AKUISISI

Pada tanggal 22 Juni 2017, Perseroan telah mengakuisisi saham LMA sejumlah 331.500 lembar saham atau sebesar 51% kepemilikan saham, dari pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, dengan harga Rp798 miliar. Transaksi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan.

ACQUISITION INFORMATION

On June 22, 2017, the Company acquired 331,500 shares of LMA shares or 51% ownership interest, amounting to Rp798 billion, from third party who is not affiliated with company. There was not any conflict of interest in this transaction.

INFORMASI MATERIAL TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI DAN/ATAU TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Terkait dengan transaksi belanja modal, Perseroan melakukan pembelian belanja modal dalam bentuk peralatan berat secara langsung kepada vendor yang tidak memiliki afiliasi dan mengandung benturan kepentingan dengan Perseroan, tanpa ikatan komitmen apapun sebelum terjadinya transaksi. Demikian juga halnya dengan transaksi akuisisi LMA, pembelian atas saham LMA berasal dari pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi dan mengandung benturan kepentingan dengan Perseroan.

AFFILIATED TRANSACTIONS AND CONFLICT OF INTEREST TRANSACTIONS INFORMATIONS

In relation to capital expenditure transactions, the Company purchases capital expenditures in heavy equipment directly to vendors that have no affiliation and conflicts of interest with the Company, without any commitment commitments prior to the transaction. Likewise with LMA acquisition transactions, purchases of LMA shares come from third parties that have no affiliation relationship and conflict of interest with the Company.

TRANSAKSI AFILIASI ANTARA PERSEROAN DENGAN PT PP (PERSERO) TBK SEBAGAI ENTITAS INDUK

1. Perjanjian Subkontraktor tentang Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Paket 1 Ruas Jalan Bakauheni-Sidomulyo No.006/ SPS/13.15/04/PP/III/2016 tanggal 8 Maret 2016. Nilai kontrak : Rp396,2 miliar. Masa kontrak : 8 Maret 2016 hingga 29 Oktober 2017.
2. Perjanjian Jual Beli Pengadaan dan Pengiriman Beton Ready Mix Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Paket I Bakauheni – Sidomulyo (STA, 00+000 S/D 39+400) di Lampung Selatan No.004/ SPJB/13.15.04/PP/III/2016 tanggal 8 Maret 2016. Nilai kontrak sebesar Rp219,2 miliar. Masa kontrak : 8 Maret 2016 hingga 18 Desember 2017.
3. Perjanjian Jual Beli Tentang Pengadaan dan Pengiriman Beton Ready Mix Untuk Proyek Tower Barclay Grand Kamala Lagoon No.001/ SPJB/22.16.03/PP/V/2016 tanggal 2 Mei 2016. Nilai kontrak sebesar Rp12,3 miliar. Masa kontrak : 2 Mei 2016 hingga 23 Maret 2017.
4. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Bekisting pada Proyek Apartemen Pertamina Balikpapan No. 002/SPB-321601/III-Cab.VI/V/2016 tanggal 23 Mei 2016. Nilai kontrak : Rp 18,5 miliar. Masa kontrak : 23 Mei 2016 hingga 19 November 2017.
5. Perjanjian Jual Beli Tentang Pengadaan dan Pengiriman Beton Ready Mix Untuk Proyek Grand Kamala Lagoon Tower Emerald Di Bekasi Barat-Jawa Barat No.001/SPJB/22.16.02/PP/ VI/2016 tanggal 23 Juni 2016. Nilai kontrak sebesar Rp5,1 miliar. Masa kontrak : 23 Juni 2016 hingga 23 Maret 2017
6. Perjanjian Pemborongan Subkontraktor tentang Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang No. 003/SPB-311610/Cab.V/ XI/2016 tanggal 16 November 2016. Nilai kontrak : Rp 676,7 miliar. Masa kontrak : 16 November 2016 hingga 31 Oktober 2018.

AFFILIATED TRANSACTIONS WITH PT PP (PERSERO) TBK AS PARENT COMPANY

1. Subcontractor Agreement on Toll Road Construction Work of Trans Sumatera Package 1 Bakauheni-Sidomulyo Road No.006 / SPS / 13.15 / 04 / PP / III / 2016 dated March 8, 2016. Contract value: Rp396.2 billion. Contract period: March 8, 2016 to October 29, 2017.
2. Procurement and Sale Agreement of Concrete Ready Mix Trans Sumatra Toll Road Construction Project, Bakauheni-Terbanggi Besar Segunda Paket I Bakauheni - Sidomulyo (STA, 00 + 000 S / D 39 + 400) in South Lampung No.004 / SPJB / 13.15. 04 / PP / III / 2016 dated March 8, 2016. The contract amounts to Rp219.2 billion. Contract period: March 8, 2016 to December 18, 2017.
3. Sale and Purchase Agreement About Procurement and Delivery of Ready Mix Concrete For Tower Barclay Project Grand Kamala Lagoon No.001 / SPJB / 22.16.03 / PP / V / 2016 dated May 2, 2016. Contract value of Rp12.3 billion. Contract period: May 2, 2016 to March 23, 2017.
4. Working Contracts Formwork on Pertamina Balikpapan Apartment Project No. 002 / SPB-321601 / III-Cab.VI / V / 2016 dated May 23, 2016. Contract value: Rp 18.5 billion. Contract period: May 23, 2016 to November 19, 2017.
5. Sale and Purchase Agreement About Procurement and Delivery of Ready Mix Concrete For Grand Kamala Lagoon Tower Emerald Project In Bekasi Barat-West Java No.001 / SPJB / 22.16.02 / PP / VI / 2016 dated June 23, 2016. Contract value of Rp5.1 billion . Contract period: June 23, 2016 to March 23, 2017
6. Subcontractor's Contract of Work on Toll Road Works Construction of Pandaan-Malang No. 003 / SPB-311610 / Cab.V / XI / 2016 dated November 16, 2016. Contract value: Rp 676.7 billion. Contract period: November 16, 2016 to October 31, 2018.

7. Perjanjian Subkontraktor Proyek Pembangunan Bendungan Way Sekampung No. 001/ SPS/131692/PP-ASHFRI/KSO/XII/2016 tanggal 1 Desember 2016. Nilai kontrak : Rp 606,9 miliar. Masa kontrak : 1 Desember 2016 hingga 6 September 2020.
8. Perjanjian Jual Beli Tentang Pengadaan dan Pengiriman Beton Ready Mix Untuk Proyek Pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Seksi 5: Perbaungan- Teluk Mengkudu STA.60+425-70+000 Di Serdang Begadai No.0012/SPJB/111507/PP/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016. Nilai kontrak sebesar Rp52,7 miliar. Masa kontrak : 5 Desember 2016 hingga 31 Mei 2017
9. Perjanjian Subkontraktor Proyek Pembangunan Bendungan Leuwikeris Paket 1 No. 004/ SPS/231771/PP-BBN/IV/2017 tanggal 12 April 2017. Nilai kontrak : Rp 501,6 miliar. Masa kontrak : 12 April 2017 hingga 01 Maret 2021.
10. Perjanjian Pemborongan Subkontraktor tentang Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung No. 2261/SPB/SCM/PP/ PL04/251603/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017. Nilai kontrak : Rp 804,0 miliar. Masa kontrak : 16 Juli 2017 hingga 25 Mei 2018.
11. Pekerjaan Dredging pada Proyek JEDI Sunter Flood Way Paket 6 Area WBC No. 002/SPB/ SCM/PP/Plant2/3.17.003/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017. Nilai kontrak : Rp80,1 miliar. Masa kontrak : 16 Juli 2017 hingga 25 Mei 2018
12. Perjanjian Pemborongan No. 003/SPK/DANAU TEMPE/INFRA2/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017. Nilai kontrak : Rp 38,2 miliar. Masa kontrak : 16 Juli 2017 hingga 25 Mei 2018
13. Perjanjian Subkontraktor Tentang Pekerjaan Persiapan, Tanah, dan Beton Pada Proyek Pembangunan Pengendalian Lahar Gunung Sinabung (Paket 1) No. 001/SPS/PP-GTP-KSO/ VII/2017 tanggal 28 Juli 2017. Nilai kontrak : Rp139,3 miliar. Masa kontrak : 28 Juli 2017 hingga 22 November 2019.

7. Sub-contract Agreement of the Jalan Sekampung Dam Road Construction Project. 001 / SPS / 131692 / PP-ASHFRI / KSO /XII / 2016 dated December 1, 2016. Contract value: Rp 606.9 billion. Contract period: December 1, 2016 to September 6, 2020.
8. Sale and Purchase Agreement About Procurement and Delivery of Ready Mix Concrete For Toll Road-Medan-Kualanamu-Tebing Toll Road Project Section 5: Perbaungan- Teluk Mengkudu STA.60 + 425-70 + 000 In Serdang Begadai No.0012 / SPJB / 111507 / PP / XII / 2016 dated December 6, 2016. The contract amounted to Rp52.7 billion. Contract period: December 5, 2016 to May 31, 2017
9. Leuwikeris Dam Construction Project Subcontractor Agreement Package 1 No. 004 / SPS / 231771 / PP-BBN / IV / 2017 dated April 12, 2017. Contract value: Rp 501.6 billion. Contract period: 12 April 2017 to 01 March 2021.
10. Subcontractor's Contract of Work on Toll Road Works Manado-Bitung No. 2261 / SPB / SCM / PP / PL04 / 251603 / VI / 2017 dated June 16, 2017. Contract value: Rp 804.0 billion. Contract period: July 16, 2017 to May 25, 2018.
11. Dredging Works at JEDI Project Sunter Flood Way Package 6 WBC Area No. 002 / SPB / SCM / PP / Plant2 / 3.17.003 / VII / 2017 dated July 18, 2017. Contract value: Rp80.1 billion. Contract period: July 16, 2017 to May 25, 2018
12. No. Chartering Agreement 003 / SPK / DANAU TEMPE / INFRA2 / VII / 2017 dated July 27, 2017. Contract value: Rp 38.2 billion. Contract period: July 16, 2017 to May 25, 2018
13. Subcontractor Agreement on Preparation, Land and Concrete Works on the Sinar Lahar Control Development Project (Package 1) No. 001 / SPS / PP-GTP-KSO / VII / 2017 dated July 28, 2017. Contract value: Rp139.3 billion. Contract period: July 28, 2017 to November 22, 2019.

14. Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Proyek Jalan Sibolga – Batas Tap Sel Winrip Paket 15 No. 082/PSMP/PPPK/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015, dengan obyek sewa Asphalt Mix Plant Merk Osaka, Kapasitas 80 ton/jam dan Paver Set (Asphalt Finisher, Tire Roller, Tandem Roller) Merk Nigata, Sakai. Nilai kontrak sebesar Rp4,2 miliar. Masa kontrak : 18 Desember 2015 hingga 18 Desember 2017.
15. Perjanjian Sewa Alat Crawler Crane Sany SCC 800C pada Proyek Reklamasi dan Pembangunan Dermaga Makassar New Port No. 007/SPSA/421503/PP/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016, dengan obyek sewa 1 unit Crawler Crane Sany SC 800. Nilai kontrak sebesar Rp2,9 miliar. Masa kontrak : 1 Juni 2016 hingga 10 Januari 2018.
16. Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Pada Proyek Jalan Sibloga-Batas Tapsel Winrip Paket 15 No. 084/PSMP/PPPK/IX/2016 tanggal 29 September 2016, dengan obyek sewa berupa 1 Unit Asphalt Mixing Plant plus Genset 250 kVA merk Golden Star Handa, 1 Unit Asphalt Paver merk Sumitumo HA 60, 1 Unit Tired Roller merk Sakai TS205 dan 1 Unit Tandem Roller merk Sakai SW 652-1K. Nilai kontrak sebesar Rp8,3 miliar. Masa kontrak : 1 November 2016 hingga 30 November 2017.

14. Lease Agreement Renting Equipment Projects Jalan Sibolga - Bid Tap Winrip Cellular Package 15 No. 082 / PSMP / PPPK / XII / 2015 dated December 4, 2015, with rental object Asphalt Mix Plant Merk Osaka, Capacity 80 ton / hour and Paver Set (Asphalt Finisher, Tire Roller, Tandem Roller) Brand Nigata, Sakai. Contract value of Rp4.2 billion. Contract period: December 18, 2015 to December 18, 2017.
15. Crane Sany SCC 800C Crane Equipment Rental Agreement on New Port Docks Reclamation and Construction Project. 007 / SPSA / 421503 / PP / VI / 2016 dated June 1, 2016, with object lease of 1 unit of Crawler Crane Sany SC 800. Contract value of Rp2,9 billion. Contract period: June 1, 2016 to January 10, 2018.
16. Lease Agreement Renting Equipment On Road Project Sibloga-Limit Tapsel Winrip Package 15 No. 084 / PSMP / PPPK / IX / 2016 dated 29 September 2016, with rental object in the form of 1 Unit Asphalt Mixing Plant plus Genset 250 kVA of Golden Star Handa, 1 Unit of Asphalt Paver Sumitumo HA 60, 1 Unit Tired Roller of Sakai TS205 and 1 Sakai SW 652-1K Tandem Roller unit. The contract amounted to Rp8.3 billion. Contract period: November 1, 2016 to November 30, 2017.

TRANSAKSI AFILIASI ANTARA PERSEROAN DENGAN PT PP PRACETAK SEBAGAI SISTER COMPANY

Perjanjian Subkontraktor tentang Pekerjaan Bekisting & Pengecoran pada Proyek Pembangunan Apartment Amartha View (Semarang) No. 001/ SPS SUB/PP.PAMARTHA/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016. Nilai kontrak sebesar Rp9,1 miliar. Masa kontrak : 24 Desember 2016 s/d 22 Juli 2017

AFFILIATED TRANSACTIONS WITH PT PP PRACETAK AS SISTER COMPANY

Subcontractor Agreement on Formwork & Foundry Work on Apartment Development Project Amartha View (Semarang) no. 001 / SPS SUB / PP.PAMARTHA / X / 2016 dated October 6, 2016. The contract amounts to Rp9.1 billion. Contract period: December 24, 2016 to 22 July 2017

Dalam pelaksanaan transaksi dengan pihak terafiliasi, perjanjian telah diperoleh dan dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang wajar (*arm length transaction*)

In the execution of transactions with affiliated parties, the agreement has been obtained and executed under the terms and conditions of a reasonable (arm length transaction)

PERUBAHAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN
SIGNIFICANT LAW AND REGULATION CHANGES MAY AFFECT THE COMPANY

Sepanjang tahun 2017, tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak material terhadap Perseroan.

Throughout 2017, there are no changes to the laws and regulations that have a material impact on the Company.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
ACCOUNTING POLICY CHANGES

Penerapan dari perubahan standar interpretasi akuntansi atas standar akuntansi berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2017 dan relevan bagi Perseroan namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian periode berjalan:

1. Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAK 3 (revisi 2016): Laporan Keuangan Interim
3. PSAK 24 (revisi 2016): Imbalan Kerja
4. PSAK 58 (revisi 2016): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan
5. PSAK 60 (revisi 2016): Instrumen Keuangan: Pengungkapan
6. ISAK 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup
7. PSAK 31 "Properti Investasi"
8. ISAK 32: Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan

The adoption of the change in accounting interpretation standards of the following accounting standards, effective January 1, 2017 and relevant to the Company but does not result in significant changes to the Company's accounting policies and does not have a material impact on the amounts reported in the current period's consolidated financial statements:

1. Amendment of SFAS 1: Presentation of Financial Statements
2. PSAK 3 (revised 2016): Interim Financial Report
3. PSAK 24 (revised 2016): Employee Benefits
4. PSAK 58 (revised 2016): Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
5. PSAK 60 (revision 2016): Financial Instruments: Disclosures
6. ISAK 31: Interpretation of Scope
7. PSAK 31 "Investment Property"
8. ISAK 32: Definition and Hierarchy of Financial Accounting Standards

Di samping itu terdapat standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan dan relevan bagi Perseroan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018 adalah sebagai berikut:

1. Amandemen PSAK 16: Aset Tetap
2. Amandemen PSAK 2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan
3. Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi

The adoption of the change in accounting interpretation standards of the following accounting standards, effective January 1, 2017 and relevant to the Company but does not result in significant changes to the Company's accounting policies and does not have a material impact on the amounts reported in the current period's consolidated financial statements:

1. PSAK Amendment 16: Fixed Assets
2. PSAK 2 Amendment: Cash Flow Statement on Disclosure Initiative
3. Amendment of PSAK 46: Income Tax on Deferred Tax Assets Recognition for Unrealized Losses

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN
SUSTAINABILITY INFORMATION

KONDISI INTERNAL

Perseroan telah menyusun transformasi bisnis secara berkelanjutan dari tahun 2014 hingga 2022. Transformasi bisnis tersebut dibagi ke dalam 2 *phase* yang dengan jelas membahas target pencapaian, strategi serta proses transformasi bisnis yang akan dilakukan. Transformasi bisnis *phase* pertama yang dilakukan dalam kurun waktu 2014-2017, telah berhasil mencapai CAGR sebesar 115%. Dan diharapkan pada transformasi bisnis *phase* kedua yang akan dilakukan dalam kurun waktu 2017-2022, akan mencapai CAGR sebesar 50%. Besarnya CAGR yang dapat dicapai dalam kurun waktu 2014-2017 karena Perseroan berhasil melakukan lompatan jauh ke depan dari perusahaan penyewaan alat berat menjadi Perusahaan Konstruksi Terintegrasi yang terkemuka di Indonesia. Positioning yang kuat tersebut dicapai oleh Perseroan setelah Perseroan melakukan peningkatan engineering capacity baik melalui pertumbuhan organik maupun pertumbuhan inorganik dengan mengakuisisi LMA. Di samping melakukan peningkatan engineering capacity, Perseroan juga melakukan peningkatan financial capacity baik melalui peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor berupa setoran tunai oleh PT PP dan YKKPP selaku pemegang saham pendiri maupun melalui penawaran umum perdana saham. Untuk menunjang pertumbuhan yang berkelanjutan, Perseroan juga telah memiliki sumber pendapatan berulang (recurring income) dari jasa pengangkutan batubara (coal hauling).

INTERNAL CONDITION

The Company has developed a sustainable business transformation from 2014 to 2022. The business transformation is divided into 2 phases which clearly discusses the targets of achievement, strategy and business transformation process that will be undertaken. The first phase of business transformation conducted in the period 2014-2017, has reached the CAGR of 115%. And it is expected that in the second phase of business transformation that will be done in the period 2017-2022, will reach a CAGR of 50%. The amount of CAGR that can be achieved in the period 2014-2017 because the Company successfully made a leap forward from a heavy equipment rental company to become the leading Integrated Construction Company in Indonesia. Such a strong positioning was achieved by the Company after the Company upgraded its engineering capacity through both organic growth and inorganic growth by acquiring LMA. In addition to improving the engineering capacity, the Company also increased its financial capacity through the increase of Issued and Paid-in Capital in the form of cash deposits by PT PP and YKKPP as the founding shareholders and through the initial public offering of shares. To support sustainable growth, the Company also has recurring income from coal hauling services.

Sentul AEON Mixed Complex Project.

KONDISI EKSTERNAL

Bisnis model Perseroan menempatkan dirinya pada garda terdepan dalam pembangunan infrastuktur di Indonesia. Dan seperti yang telah dijelaskan dalam prospek bisnis di atas, bahwa pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur secara lebih pesat untuk mengejar ketertinggalan ketersedian infrastuktur. Dan pembangunan infrastruktur yang pesat mendorong perkembangan industri konstruksi. Menciptakan pertumbuhan permintaan yang semakin besar dan beragam terhadap jasa konstruksi.

Di tambah dengan kebijakan Pemerintah di sektor infrastruktur antara lain untuk mengembangkan konektivitas pendukung pusat pertumbuhan ekonomi, jalur utama logistik, dan integrasi antarmoda dalam rangka mendorong pengembangan wilayah strategis akan mendorong sektor infrastruktur tetap bullish di tahun mendatang.

EXTERNAL CONDITION

The Company's business model places itself at the forefront of infrastructure development in Indonesia. And as has been explained in the business prospects above, that the government will do infrastructure development more rapidly to catch up with the availability of infrastructure. And rapid infrastructure development is driving the development of the construction industry. Create an ever-increasing and diverse growth in demand for construction services.

In addition to Government policies in the infrastructure sector, among others, to develop connectivity to support economic growth centers, logistics main routes, and interfaod integration in order to encourage the development of strategic areas will push the infrastructure sector remains bullish in the coming year.

Chapter-5

BAB-5

Pernyataan Tata Kelola
Infrastruktur Tata Kelola
Penerapan Tata Kelola
Penilaian Terhadap Penerapan Tata Kelola
Rapat Umum Pemegang Saham
Dewan Komisaris
Direksi
Komite Audit
Komite Nominasi & Remunerasi
Sekretaris Perusahaan
Hubungan Investor
Audit Internal
Akuntan Publik
Sistem Pengendalian Internal
Sistem Manajemen Resiko
Sanksi Administratif Yang Dikenakan Kepada Perseroan, Entitas Anak, Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris
Kode Etik Perusahaan
Budaya dan Nilai Perusahaan
Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan Dan/atau Manajemen
Sistem Pelaporan Pelanggaran
Akses Informasi Dan Data Perusahaan
Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Corporate Governance Statement
Governance Infrastructure
Governance Implementation
Assessment Of Governance Applications
General Meeting of Shareholders
Board of Commissioners
Board of Directors
Audit Committee
Nomination & Remuneration Committee
Corporate Secretary
Investor Relations
Internal Audit
Public Accountant
Internal Control System
Risk Management System
Written Administrative Sanctions To The Company, Subsidiary, Members Of The Board Of Directors And Members Board Of Commissioners
Code Of Conduct
Corporate Culture & Value
Stock Ownership Program By Employee And / Or Management
Violation Reporting System/ Whistleblowing System (WBS)
Data and Information Access
Assessment Of Governance Implementation

Chapter-5

TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE

PERNYATAAN TATA KELOLA
CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, beretika, sehingga perlu penyelarasan etika usaha dan etika kerja dengan Visi dan Misi Perseroan serta Panduan Pelaksanaan GCG.

Pada tanggal 24 Desember 2016, Perseroan diwakili Direktur Utama telah menandatangani "Pedoman Kode Etik Perusahaan (*code of conduct*)". Kode Etik PP Presisi tahun 2016 yang berisi tentang pedoman etika usaha dan etika kerja ini akan dijadikan sebagai acuan bagi Warga Perusahaan: Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Perseroan dalam menjalankan aktivitas bisnis serta berhubungan dengan para pemangku kepentingan (pemegang saham).

The Company is required to carry out its business with full responsibility and ethically. Therefore, the Company's vision and missions need to be aligned with business ethics, work ethics, and GCG Implementation Guidelines.

On December 24, 2016, the Company, represented by the President Director, signed the Company's Code of Ethics. PP Presisi's 2016 Code of Ethics, which contains guidelines on business work ethics, serves as a reference for the Company's Citizens: The Company's Board of Commissioners, Board of Directors and Employees in carrying out business activities and in their relationship with the stakeholders (shareholders).

Kode Etik Perseroan tahun 2016 merupakan wujud komitmen Perusahaan dalam menjalankan dan menjabarkan Budaya dan Nilai-Nilai Perusahaan, yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Insan Perusahaan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka segala sesuatunya akan diubah sebagaimana mestinya.

Penerapan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) menjadi suatu tuntutan sekaligus kebutuhan perusahaan dalam perkembangan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan, untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan perusahaan (pemegang saham). Kepercayaan pemangku kepentingan seperti pegawai, mitra usaha, pemasok, pelanggan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya merupakan faktor yang menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha perusahaan.

Kredibilitas dan kepercayaan berkaitan erat dengan perilaku Perseroan dalam berinteraksi dengan para pemegang saham. Pengelolaan perusahaan selain harus mengikuti peraturan dan perundang undangan yanga berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran untuk menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat citra yang baik bagi Perseroan.

The Company's 2016 Code of Ethics is an embodiment of the Company's commitment to carry out and define the Company's Culture and Values, which must be abided by and implemented by the Corporate Citizen. Necessary changes shall be made should there be any errors or changes to the prevailing laws and regulations in the future.

Good Corporate Governance implementation has become a requisite and need for the Company's long-term sustainable business development in order to increase shareholders' value and stakeholders' (shareholders') trust. Trust of the stakeholders, including employees, business partners, vendors, customers, the public, and other stakeholders is a key factor to the Company's business growth and sustainability.

Credibility and trust are closely related to the Company's conduct in its interaction with the shareholders. Management of the Company shall be carried out in accordance with the prevailing laws and regulations and by upholding ethics and norms. Awareness to exercise good ethics will improve and strengthen the Company's image.

Pada dasarnya keberhasilan implementasi GCG sangat ditentukan oleh komitmen dari seluruh jajaran Perseroan, kesiapan dan kelengkapan organ pendukung Perseroan dan juga kebijakan GCG lainnya dengan tetap memperhatikan kesesuaian karakteristik bisnis dan kebutuhan Perseroan. Untuk itulah Perseroan berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten yang salah satunya dilakukan melalui penyusunan Standar perilaku dan Etika Perusahaan (*Code of Conduct*).

Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) adalah sekumpulan komitmen yang berisikan tentang etika usaha dan etika kerja, menjabarkan prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang diharapkan dilakukan oleh setiap pegawai Perseroan dalam melakukan tugasnya. Pedoman Etika dan Perilaku merupakan standar perilaku minimum untuk semua pegawai Perseroan.

Dalam situasi kompetisi yang keras untuk memimpin pasar dan sukses dalam bisnis jasa konstruksi maka Perseroan tidak hanya memikirkan pencapaian hasilnya tetapi juga harus mencari peluang dan cara yang baik dan sehat untuk dapat mencapai sukses tersebut. Perseroan tidak bisa menerima karya ataupun aktifitas yang diperoleh dari transaksi yang tidak sesuai dengan hukum atau yang tidak etis.

In principal, successful GCG implementation highly depends on the commitment of all members of the Company, the readiness and completeness of the Company's supporting organs as well as other GCG policies, with due considerations to their alignment with the Company's business characteristics and needs. To that end, the Company is committed to consistently implement GCG by, among others, preparing the Company's Code of Conduct.

The Code of Conduct is a set of commitment that contains business ethics and work ethics, defines the basic principals of personal and professional conducts expected from each of the Company's employees in carrying out their duties. The Code of Conduct is the minimum standard of conduct for all of the Company's employees.

Among fierce competition to become a market leader and to build a successful construction service business, the Company has to seek valuable and healthy opportunities to achieve success, in addition to considering its target achievements. The Company will not tolerate any work or activity acquired from transactions that are against the law or unethical.

INFRASTRUKTUR TATA KELOLA
GOVERNANCE INFRASTRUCTURE

Sebagai emiten baru di BEI, PP Presisi berkomitmen untuk selalu berupaya secara kontinyu meningkatkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik, karena Tata Kelola Perusahaan yang Baik akan berdampak positif pada peningkatan nilai seluruh Pemangku Kepentingan di masa mendatang. PP Presisi telah merumuskan inisiatif-inisiatif untuk mengimplementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik tersebut ke dalam langkah-langkah operasional, termasuk membangun infrastruktur Tata Kelola yang dibutuhkan.

As a new issuer on IDX , PP Presisi is committed to continuously strive to improve Good Corporate Governance practices, as Good Corporate Governance will have a positive impact on increasing the value of all Stakeholders in the future. PP Presisi has formulated initiatives to implement Good Corporate Governance into operational steps, including building the required Governance infrastructure.

Dalam statusnya sebagai Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), pembangunan infrastruktur Tata Kelola Perseroan mengacu kepada:

1. Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara dengan perubahan terakhirnya yaitu Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.

In its status as a Subsidiary of a State-Owned Enterprise ("BUMN"), the Company's infrastructure development governance refers to:

1. Law of the Republic of Indonesia Number 40 Year 2007 About Limited Company
2. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-05 / MBU / 2006 concerning Audit Committee for State-Owned Enterprises.
3. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01 / MBU / 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises with the latest amendment of Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09 / MBU / 2012 on Amendment to Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. PER-01 / MBU / 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

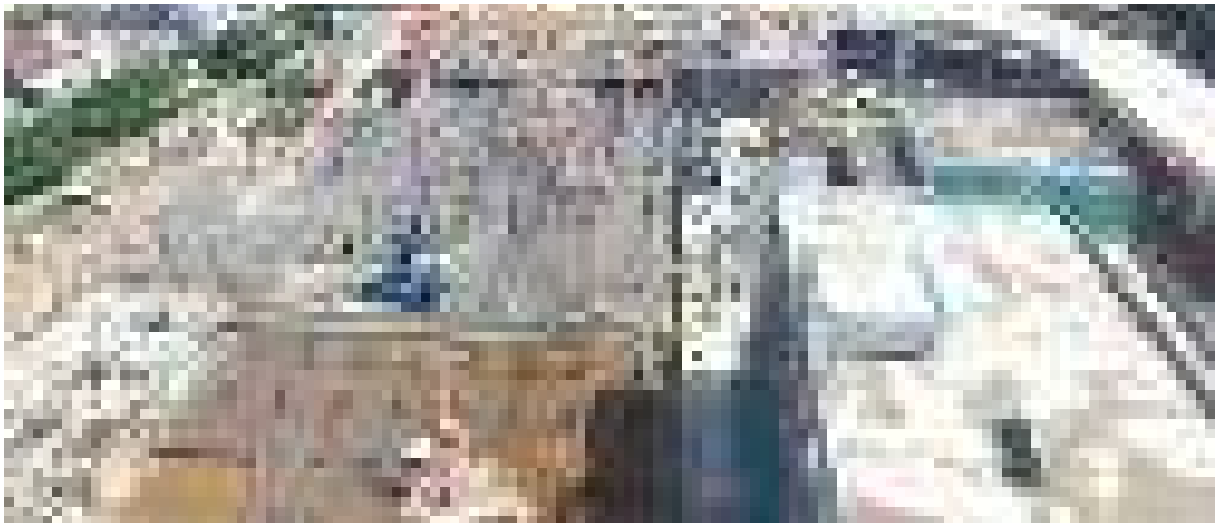

4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
5. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No.SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.
6. Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara.
7. Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

4. Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. PER-12 / MBU / 2012 concerning the Supporting Organs of the Board of Commissioners / Supervisory Board of State-Owned Enterprises.
5. Decision of the Secretary of the Ministry of State Owned Enterprises No.SK-16 / S.MBU / 2012 on Indicators / Parameters Assessment and Evaluation on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.
6. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02 / MBU / 02/2015 on Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners of State-Owned Enterprises.
7. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-03 / MBU / 02/2015 on Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises.

Di samping itu, dalam statusnya sebagai Perusahaan Publik dan *Emiten* yang tercatat di BEI, Perseroan telah membentuk organ-organ yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan Tata Kelola mengacu kepada peraturan yang berlaku di dalam pasar modal Indonesia sebagai berikut:

1. Meningkatkan *Standard Operational Procedure* ("SOP") yang telah dimiliki Perseroan tentang penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham mengacu kepada Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Membentuk Dewan Komisaris & Direksi yang dilengkapi masing-masing Komisaris Independen dan Direktur Independen mengacu kepada Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris *Emiten* atau Perusahaan Publik.
3. Membentuk Komite Audit dan Komite Komite Nominasi dan Remunerasi masing-masing mengacu kepada Peraturan OJK No. 55/ POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi *Emiten* atau Perusahaan Publik.
4. Membentuk Sekretaris Perusahaan mengacu kepada peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan *Emiten* atau Perusahaan Publik.
5. Meningkatkan Internal Audit mengacu kepada peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
6. Meningkatkan *charter* dan SOP yang ada mengacu kepada peraturan-peraturan tersebut di atas serta *Code of Conduct* dan *Corporate Policy Manual*.
7. Meningkatkan *Code of Conduct* dan *Corporate Policy Manual* mengacu kepada hukum dan peraturan yang berlaku serta praktik Tata Kelola yang menjadi acuan *benchmarking* (*best practices*) antara lain : Ketentuan umum dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Principles of Corporate Governance oleh Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD), *Principles of Corporate Governance oleh International Finance Corporation* (IFC).

In addition, in its status as a public listed Company on the IDX, the Company has established the organs required to implement Governance in accordance with the prevailing regulations in the Indonesian capital market as follows:

1. Improving the Company's Standard Operational Procedure ("SOP") on the General Meeting of Shareholders refers to OJK No.32 / POJK.04 / 2014 Regulation concerning Plan and Implementation of the Company's General Meeting of Shareholders.
2. Establishing a Board of Commissioners and Board of Directors with their respective Independent Commissioners and Independent Directors referring to OJK Regulation no. 33 / POJK.04 / 2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
3. Establishing the Audit Committee and Committee The Nomination and Remuneration Committee respectively refer to OJK Regulation no. 55 / POJK.04 / 2015 dated December 29, 2015 on the Establishment and Implementation Guidelines of the Audit Committee and OJK No. 34 / POJK.04 / 2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.
4. Forming the Corporate Secretary refers to OJK regulation no. 35 / POJK.04 / 2014 on the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies.
5. Improving Internal Audit refers to OJK regulation no. 56 / POJK.04 / 2015 on the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Charter of the Internal Audit Unit.
6. Improving existing charters and SOPs referring to the above mentioned rules and the Code of Conduct and Corporate Policy Manual.
7. Improving the Code of Conduct and Corporate Policy Manual refers to applicable laws and regulations and good governance practices as benchmarking best practices: General provisions of the National Committee on Governance Policy (KNKG), Principles of Corporate Governance by the Organization for Economic Co -Operation and Development (OECD), Principles of Corporate Governance by the International Finance Corporation (IFC).

TUJUAN TATA KELOLA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Memaksimalkan *company value*.
2. Meningkatkan tidak saja *shareholder value* melainkan juga *stakeholder value*
3. Meningkatkan kinerja dan daya saing Perseroan melalui pengelolaan perusahaan yang transparan, bersih, patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, inovatif dengan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian, serta selalu mengedepankan profesionalisme.
4. Meningkatkan lingkungan kerja yang kondusif.
5. Mendorong Perseroan menjadi perusahaan panutan di dalam industri konstruksi.
6. Mendorong terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan.
7. Meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat investor terhadap Perseroan.

GOVERNANCE GOALS ARE AS FOLLOWS:

1. To maximize company value.
2. To increase not only shareholder value but also stakeholder value
3. To improve the performance and competitiveness of the Company through transparent, clean, compliance with applicable laws, innovative regulations while upholding the principles of prudence, and always prioritizing professionalism.
4. To improve a conducive working environment.
5. To encourage the Company to become a role model in the construction industry.
6. To encourage the implementation of corporate social responsibility towards stakeholders.
7. To increase investor's trust in the Company.

APLIKASI PRINSIP-PRINSIP TARIF DI DALAM LINGKUNGAN PP PRESISI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. *Transparency*

   Keterbukaan/transparan menjadi salah satu aspek perhatian Perseroan dalam pengelolaan operasional sehari-hari, penyediaan informasi baik operasional maupun keuangan serta pengambilan keputusan. Informasi dipersiapkan dalam bentuk yang mudah dipahami, mengacu kepada standar pelaporan yang berlaku umum/ yang dipersyaratkan oleh peraturan, dapat dipercaya serta tepat waktu yang dapat berguna bagi pengambilan keputusan. Perseroan juga memberikan kemudahan akses atas informasi tersebut secara setara.

2. *Accountability*

   Pengelolaan perusahaan secara transparan mendorong peningkatan akuntabilitas Perseroan. Kinerja Perseroan dapat terukur dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh Pemangku Kepentingan.

THE APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF TARIF IN PP PRESISI IS AS FOLLOWS:

1. Transparency

Transparency is one aspect of the Company's attention in managing daily operations, providing operational and financial information as well as decision making. Information is prepared in an easy-to-understand format, referring to the generally accepted / regulatory, trustworthy and timely reporting standards that can be useful for decision making. The Company also facilitates access to such information equally.

2. Accountability

Transparent management of the company encourages increased accountability of the Company. The Company's performance can be well measured and accountable to all Stakeholders.

3. *Responsibility*

   Prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta acuan Tata Kelola lainnya menjadi tanggung jawab Perseroan serta seluruh insan PP Presisi dalam menjalankan akitivitas operasi sehari-hari.

4. *Independency*

   Independensi tanpa adanya dominasi dan intervensi dari lainnya, serta bebas dari benturan kepentingan lainnya menjadi syarat utama di dalam hubungan antar organ-organ Perseroan (Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen serta Internal Auditor) untuk memastikan bahwa operasi dan proses pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.

5. *Fairness*

   Perseroan memastikan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya harus memperhatikan kepentingan seluruh Pemangku Kepentingan mengacu kepada azas kesetaraan.

3. Responsibility

The principle of prudence and compliance with applicable laws and regulations and other GCG references are the responsibility of the Company and all PP Presisi personnel in carrying out the activities of day to day operations.

4. Independency

Independence without domination and intervention from others, and free from other conflicts of interest are the main requirements in the relationship between the organs of the Company (General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners, Committees at the Board of Commissioners, Board of Directors, Management and Internal Auditors) to ensure that operations and decision-making processes are conducted objectively.

5. Fairness

The Company ensures that in conducting its business activities it should consider the interests of all Stakeholders in reference to the principle of equality.

PENERAPAN TATA KELOLA
GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Penerapan Tata Kelola mengacu kepada Pedoman Tata Kelola untuk melengkapi *Code of Conduct* dan Corporate Policy Manual. Pedoman tersebut menjadi acuan perilaku bagi segenap insan PP Presisi dalam mengelola Perusahaan. Sosialisasi implementasi Tata Kelola menjadi sangat penting dan krusial, karena insan PP Presisi tersebar di beberapa proyek di hampir semua wilayah Indonesia. Sosialisasi implementasi Tata Kelola juga dilakukan kepada setiap karyawan baru di dalam program induksi penerimaan karyawan baru. Pengawasan dan penegakan Tata Kelola di lingkungan PP Presisi dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan.

Governance Implementation refers to the Governance Manual to complement the Code of Conduct and Corporate Policy Manual. These guidelines serve as a benchmark for all practitioners of PP Presisi in managing the Company. Socialization of the Governance Implementation becomes very important and crucial, because the PP Presisi people are spread in several projects in almost all areas of Indonesia. The socialization of the implementation of Good Corporate Governance is also done to every new employee in the new employee acceptance induction program. Supervision and enforcement of Good Corporate Governance in PP Presisi is implemented by Corporate Secretary.

PENILAIAN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA
GOVERNANCE IMPLEMENTATION ASSESSMENT

PP Presisi sedang menyusun pokok-pokok acuan/ indikator evaluasi atas penerapan Tata Kelola secara self assessment antara lain mengacu pada keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/ parameter penilaian dan evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Acuan tersebut diambil karena Perseroan merupakan Entitas Anak dari PT PP (Persero) Tbk yang adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa aspek pokok pengukuran antara lain sebagai berikut:

1. Komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan
2. Pemegang saham dan RUPS/pemilik modal
3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
4. Direksi
5. Pengungkapan informasi dan transparansi
6. Aspek lainnya

Perseroan menyadari bahwa penilaian terhadap implementasi Tata Kelola merupakan salah satu wujud komitmen Perseroan untuk menerapkan Tata Kelola dengan penuh tanggung jawab. Di samping untuk mengetahui tingkat kepatuhan (*score*) terhadap aspek pokok pengukuran, penilaian terhadap implementasi Tata Kelola dilakukan untuk mengetahui *feedback* dari proses implementasi Tata Kelola. *Feedback* tidak cukup hanya dikumpulkan, tetapi yang terpenting adalah tindak lanjut yang harus dilaksanakan untuk tujuan perbaikan di masa mendatang.

Sebagai kontrol, Sekretaris Perusahaan mempersiapkan *feedback control* dan melakukan *update status* secara berkala.

PP Presisi is preparing the points of reference / evaluation indicator of the Governance Implementation by self assessment among others referring to the decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16 / S.MBU / 2012 on the indicators / parameters of assessment and evaluation on the Implementation of Tata Manage Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises. The reference is taken because the Company is a Subsidiary of PT PP (Persero) Tbk which is a State Owned Enterprise (SOE). Some of the main aspects of measurement are as follows:

1. Commitment to the implementation of good corporate governance in a sustainable manner
2. Shareholders and GMS / owners of capital
3. Board of Commissioners / Board of Trustees
4. Board of Directors
5. Disclosure of information and transparency
6. Other aspects

The Company recognizes that an assessment of the implementation of Good Corporate Governance is one of the Company's commitments to implement Good Corporate Governance responsibly. In addition to knowing the level of compliance (score) on the main aspects of measurement, assessment of the Governance Implementation is done to determine the feedback from the implementation process of Governance. Feedback is not enough to just be collected, but the most important is the follow-up that must be implemented for future improvement purposes.

As a control, the Corporate Secretary prepares feedback control and updates regularly.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
SHAREHOLDERS GENERAL MEETING

Sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi kepada pemegang saham, PP Presisi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) setiap tahun secara tepat waktu; dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) apabila ingin melakukan tindakan korporasi yang wewenangnya tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi.

Selama tahun 2017, PP Presisi melaksanakan RUPST sebagai berikut :

1. **5 Mei 2017:** Perubahan Nama PT Pembangunan Perumahan Peralatan Konstruksi Disingkat PT PP Alat Menjadi PT Pembangunan Perumahan Presisi Disingkat PP Presisi.

2. **14 Agustus 2017:** Perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir dalam rangka penyesuaian dengan (i) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32") dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 ("POJK 10") dan (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33").

As specified in the Company's Articles of Association and Limited Liability Law, and as a form of responsibility of the Board of Commissioners and Board of Directors to the shareholders, PP Presisi holds Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) every year in a timely manner; and Extraordinary General Shareholders Meeting (RUPSLB) if it wishes to take a corporate action whose authority is not granted to the Board of Commissioners or the Board of Directors.

During 2017, PP Presisis conduct AGMS as follows:

1. **May 5, 2017:** the Change of Name of PT Pembangunan Perumahan Peralatan Konstruksi or abbreviated as PT PP Alat to PT Pembangunan Perumahan Presisi or abbreviated as PT PP Presisi.

2. **August 14, 2017:** The amendment to the Company's Articles of Association was made in order to conform to (i) the Bapepam and LK Regulation No. IX.J.1, Annex to the Decision of the Chairman of Bapepam and LK No. Kep-179/BL/2008 dated May 14, 2008, concerning Main Provisions of Articles of Association of Companies Conducting Equity Securities Public Offerings and Public Companies, (ii) the Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 dated December 8, 2014, concerning the Plan and Organization of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("FSAR 32") and its amendment thereof, namely the FSA Regulation No. 10/POJK.04/2017 concerning the Amendment to the Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 ("FSAR 10"), and (iii) the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated December 8, 2014, concerning the Board of Director and Commissioners of Issuers or Public Companies ("FSAR 33")

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari: - 1 (satu) orang Komisaris Utama; - 1 (satu) orang Komisaris atau lebih; dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.

KRITERIA ANGGOTA & PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
   ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

Referring to the Articles of Association of the Company, the Board of Commissioners consists of at least 2 (two) persons, consisting of: - 1 (one) President Commissioner; - 1 (one) Commissioner or more; with due regard to the regulations applicable in the Capital Market field. In the event that the Board of Commissioners consists of 2 (two) members of the Board of Commissioners, 1 (one) of whom are Independent Commissioners. In the event that the Board of Commissioners consists of more than 2 (two) members of the Board of Commissioners, the number of Independent Commissioners shall be at least 30% (thirty percent) of the total members of the Board of Commissioners. Each member of the Board of Commissioners shall not act individually but on the basis of a decision of the Board of Commissioners or by appointment of the Board of Commissioners.

CRITERIA AND PROCESS OF APPOINTMENT MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. Have good character, morals, and integrity;
2. Able to do legal action;
3. Within 5 (five) years before appointment and during the term of office:
   i. Never held an annual GMS;
   ii. Accountability as a member of the Board of Directors and / or a member of the Board of Commissioners has not been accepted by the GMS or has not granted responsibility as a member of the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders; and

iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

4. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
5. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
6. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut, anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan di atas, harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan Pasar Modal.
8. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
9. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
10.
11. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan di atas, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas.
13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi

iii. Never caused a company obtaining license, approval or registration from OJK does not fulfill obligation to submit annual report and / or financial report to OJK.

4. has a commitment to comply with laws and regulations; and
5. have knowledge and / or expertise in the field required by the Company.
6. In addition to meeting such requirements, members of the Board of Commissioners are required to comply with other laws and regulations.
7. For Independent Commissioners, in addition to meeting the above requirements, must also fulfill the requirements as Independent Commissioner as stipulated in the Capital Market regulations.
8. The fulfillment of the requirements as a member of the Board of Commissioners shall be published in a letter of statement and submitted to the Company.
9. The statement as referred to in paragraph 8 shall be examined and documented by the Company.
10. The legal consequences of non-fulfillment of the above-mentioned requirements shall be subject to the applicable laws and regulations.
11. The Company is obliged to convene the General Meeting of Shareholders to conduct the replacement of members of the Board of Commissioners who, in his / her term, no longer fulfill the requirements referred to above.
12. Proposals for the appointment, dismissal and / or replacement of the members of the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders shall take into account the recommendations of the Board of Commissioners or the committees performing the nomination function

14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.
15. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
16. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya

    b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.

    c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.

    d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

    e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya - RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (a) ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

13. The members of the Board of Commissioners shall be appointed for a period commencing from the date stipulated by the GMS appointing them and ending at the close of the 5th (fifth) Annual General Meeting of Shareholders at the end of 1 (one) term of term referred to by 1 (one) The Commissioner shall be 5 (five) years, subject to the laws and regulations of the Capital Market, but without prejudice to the right of the GMS to dismiss the member of the Board of Commissioners at any time before his term expires, subject to the provisions of this articles of association.

14. Members of the Board of Commissioners after their term of office expire may be reappointed in accordance with the resolutions of the GMS.
15. a. The GMS may dismiss the members of the Board of Commissioners at any time by stating the reasons

    b. The reason for the dismissal of a member of the Board of Commissioners as referred to in this Article shall be if the member of the Board of Commissioners no longer meets the requirements as a member of the Board of Commissioners, which among others undertakes actions that are detrimental to the Company or for any other reasons deemed appropriate by the GMS.

    c. The decision to dismiss the member of the Board of Commissioners shall be taken after the person is given an opportunity to defend himself in the GMS.

    d. The grant of such defendant is not required in the event that the person concerned does not object to the dismissal.

    e. The dismissal of a member of the Board of Commissioners shall be effective since the closing of the General Meeting of Shareholders as referred to in point (a) of this paragraph or any other date specified in the resolution of the GMS.

16.a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini.

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

16.a. A member of the Board of Commissioners shall be entitled to withdraw from his / her position before his / her term expires by notifying in writing of such intent to the Company.

b. The Company shall convene the General Meeting of Shareholders to decide upon the resignation of the member of the Board of Commissioners within 90 (ninety) calendar days after receipt of the letter of resignation.

c. The Company is obliged to disclose information to the public and submit to OJK no later than 2 (two) working days after the receipt of the request for resignation of the Board of Commissioners as referred to in point a of this paragraph and the results of the AGM as referred to in point b of this paragraph.

d. Before the resignation is effective, the member of the Board of Commissioners concerned shall remain obligated to complete its duties and responsibilities in accordance with this Statute and the prevailing laws and regulations.

e. Against members of the Board of Commissioners who resigned as such the Board of Commissioners shall be held responsible from the appointment until the date of approval of his resignation at the GMS.

f. The exemption from the resignation of members of the Board of Commissioners is granted after the Annual General Meeting of Shareholders releases it.

17. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
    a. Meninggal dunia;
    b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
    c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
19. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
20. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.
21. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
22. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap apabila dilarang dan/ atau ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan pasar modal.

17. The term of office of a member of the Board of Commissioners shall terminate by itself if the member of the Board of Commissioners:
    a. Die;
    b. Filled under an ability under a court ruling; or
    c. No longer comply with applicable legislative requirements, with due regard to the laws and regulations of Capital Market.
19. If the position of a member of the Board of Commissioners is vacant, resulting in a less than 2 (two) members of the Board of Commissioners referred to in paragraph 1 of this article, then the General Meeting of Shareholders shall be held no later than 90 (ninety) calendar days after such vacancy, for fill the vacancy with due regard to the prevailing laws and regulations in the Capital Market field.
20. If the position of the President Commissioner is vacant and, as long as his successor has not been appointed or has not assumed office, then one of the members of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners shall perform the duties of the President Commissioner and hold the same powers and responsibilities as the President Commissioner.
21. Every member of the Board of Commissioners is prohibited from taking personal profit directly or indirectly from the Company's activities other than legitimate income.
22. Members of the Board of Commissioners are prohibited from holding dual positions if they are prohibited and / or specified in the prevailing laws and regulations, in particular capital market regulations.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud di atas Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud di atas setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
   a. Pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. The Board of Commissioners is in charge of overseeing and responsible for oversight of the management policies, general management of the Company and the Company's business, and advises the Board of Directors.
2. In certain circumstances, the Board of Commissioners shall convene the Annual General Meeting of Shareholders and other GMS in accordance with their authority as regulated in the laws and the articles of association.
3. Members of the Board of Commissioners shall perform the duties and responsibilities referred to above in good faith, with full responsibility and prudence.
4. In order to support the effectiveness of the execution of its duties and responsibilities as referred to above, the Board of Commissioners shall establish an Audit Committee and may establish other committees.
5. The Board of Commissioners shall evaluate the performance of the committees that assist in the implementation of its duties and responsibilities referred to above at the end of each financial year.
6. The Board of Commissioners together with the Board of Directors shall prepare:
   a. Guidelines binding on each member of the Board of Commissioners and Board of Directors of Commissioners, in accordance with the provisions of prevailing laws and regulations.

b. Kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
8. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, apabila dapat membuktikan:
   a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
   b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
   c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
   d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

b. Code of Conduct applicable to all Board of Commissioners applicable to all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, employees / employees, and supporters of organs owned by the Company, in accordance with applicable laws and regulations.

7. Each member of the Board of Commissioners shall be fully and jointly responsible for any loss caused by the error or omission of members of the Board of Commissioners in performing their duties.
8. The members of the Board of Commissioners can not be held liable for the loss of the Company as mentioned above, if it can prove:
   a. The loss is not due to errors or omissions;
   b. Having conducted good faith, full responsibility and prudence for the interest and in accordance with the purposes and objectives of the Company;
   c. It has no direct or indirect impact of interest on the proceeds of the proceeds resulting in a loss; and
   d. Have taken action to prevent the occurrence or continuation of such losses.

9. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
10. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. The Board of Commissioners shall at all times within office hours of the Company entitled to enter the building and the pages or other premises used or controlled by the Company and shall be entitled to inspect all accounts, letters and other evidence, check and match the state of cash and others and shall be entitled to acknowledge all actions taken by the Board of Directors.
10. The Board of Commissioners shall have the right to request an explanation to the Board of Directors on all matters asked and each member of the Board of Directors shall be required to provide an explanation of all matters that the Board of Commissioners is asking.
11. If all members of the Board of Directors are suspended or if for any reason the Company does not have any member of the Board of Directors, the Board of Commissioners is temporarily required to administer the Company for the time being. In such case the Board of Commissioners shall be entitled to grant temporary power to one or more members of the Board of Commissioners at the disposal of the Board of Commissioners.
12. In the event that there is only one member of the Board of Commissioners, all duties and authorities given to the President Commissioner or a member of the Board of Commissioners in the Articles of Association shall also apply to him.
13. At any time of the Board of Commissioners based on a decision of the Board of Commissioners Meeting may temporarily discharge one or more members of the Board of Directors from their positions by mentioning the reasons, subject to the provisions of this articles of association and / or the prevailing laws and regulations.

PIAGAM DEWAN KOMISARIS

Perseroan menyadari bahwa Dewan Komisaris memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi pengawasannya, sehingga dibutuhkan sebuah charter yang mengatur tentang Kriteria Anggota & Pengangkatan Dewan Komisaris dan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris yang dapat menjadi pedoman kerja Dewan Komisaris. Dewan Komisaris PP Presisi telah memiliki *Charter* yang disusun mengacu kepada Peraturan OJK No. 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris *Emiten* atau Perusahaan Publik serta peraturan lainnya yang berlaku.

BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER

The Company recognizes that the Board of Commissioners has a very important role in carrying out its oversight function, so it needs a charter that regulates Criteria for Members & Appointments of Board of Commissioners and Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners that can serve as a guide for the Board of Commissioners. The Board of Commissioners of PP Presisi already has a Chartered Charter referring to OJK Regulation no. 33 / POJK.04 / 2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and other applicable regulations.

PROSEDUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS mengacu kepada prosedur yang ditentukan Komite Nominasi dan Remunerasi. Total gaji, tunjangan dan tantiem seluruh Dewan Komisaris untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1,2 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp665 juta. Pemberian *tantiem* kepada Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dan dibayarkan secara tahunan berdasarkan pencapaian target kinerja yang ditentukan.

REMUNERATION PROCEDURE FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

Salary or honorarium and other allowances of the members of the Board of Commissioners stipulated by the GMS shall refer to the procedures determined by the Nomination and Remuneration Committee. The total salaries, allowances and tantiems of the entire Board of Commissioners for the period ended December 31, 2017 amounted to Rp1.2 billion, compared to the same period in 2016 of Rp665 million. The grant of tantiem to the Board of Commissioners shall be made on the basis of the resolution of the General Meeting of Shareholders, and shall be paid annually on the basis of the achievement of the specified performance targets.

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN RAPAT GABUNGAN DENGAN DIREKSI

Pada tahun 2017, Dewan Komisaris mengadakan rapat regular Dewan Komisaris sebanyak 12 kali rapat dan rapat gabungan dengan Direksi sebanyak 4 kali rapat, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND JOINT MEETINGS WITH DIRECTORS

In 2017, The Board of Commissioners helds 12 regular meetings of the Board of Commissioners and joint meetings with the Board of Directors for 4 meetings, with the following attendance:

Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors on Joint Meeting

Name	Position	Attendance	Percentage of Attendance
Board of Commissioners			
Muhammad Toha Fauzi	President Commissioner	4 of 4	100%
Nawang Sri Retno Kartiko	Commissioner	4 of 4	100%
Ketut Darmawan*	Independent Commissioner	1 of 4	30%
Board of Directors			
Iswanto Amperawan	President Director	4 of 4	100%
Benny Pidakso	Director	4 of 4	100%
Hasanin Ade Putra	Director	4 of 4	100%
Arief Subyandono*	Independent Director	1 of 4	30%

*Mulai menjabat sejak 14 Agustus 2017
*Appointed since August 14, 2017

Attendance of The Board of Commissioners on the Board of Commissioners' Meeting

Name	Position	Attendance	Percentage of Attendance
Board of Commissioners			
Muhammad Toha Fauzi	President Commissioner	12 of 12	100%
Nawang Sri Retno Kartiko	Commissioner	12 of 12	100%
Ketut Darmawan*	Independent Commissioner	4 of 12	30%

*Mulai menjabat sejak 14 Agustus 2017
*Appointed since August 14, 2017

JABATAN RANGKAP DEWAN KOMISARIS DAN INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

Dalam Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 18 ayat (22) menyebutkan bahwa Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap apabila dilarang dan/ atau ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan pasar modal atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Untuk menjaga independensi Komisaris Independen, maka secara lebih khusus Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan *Emiten* atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen *Emiten* atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada *Emiten* atau Perusahaan Publik tersebut;
3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan *Emiten* atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama *Emiten* atau Perusahaan Publik tersebut; dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha *Emiten* atau Perusahaan Publik tersebut.

MULTIPLE MEMBERSHIP OF BOARD OF COMMISSIONERS AND INDEPENDENCY OF INDEPENDENT COMMISSIONERS

In the Company's Articles of Association Article 18 paragraph (22) states that members of the Board of Commissioners are prohibited from holding dual positions if prohibited and / or specified in applicable laws and regulations, in particular capital market regulations or other positions that may create a conflict of interest.

To maintain the independence of the Independent Commissioners, the Independent Commissioner shall in particular meet the following requirements:

1. Not a person who is employed or has the authority and responsibility to plan, direct, control or supervise the activities of the Issuer or Public Company within the last 6 (six) months, except for re-appointment as Independent Commissioner of Issuer or Public Company in the following period;
2. Not having any share directly or indirectly in the Issuer or Public Company;
3. Has no Affiliation relationship with Issuer or Public Company, member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, or major shareholder of Issuer or Public Company; and
4. Has no direct or indirect business relationship related to the Issuer or the Public Company's business activities.

PROGRAM PENGENALAN PERUSAHAAN KEPADA DEWAN KOMISARIS

PP Presisi menyadari bahwa pemahaman Dewan Komisaris terhadap Perseroan sangat penting bagi Dewan Komisaris untuk menjalankan fungsi pengawasan, karenanya Sekretaris Perusahaan melaksanakan program pengenalan bagi anggota baru Dewan Komisaris. Tujuan Program Pengenalan Perusahaan Kepada Dewan Komisaris untuk memberikan gambaran atas aktivitas bisnis, rencana perusahaan ke depan, pedoman kerja dan hal lainnya yang menjadi tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG BERKELANJUTAN

Efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris akan lebih berdaya guna jika Dewan Komisaris mengetahui seluruh seluk beluk dan perkembangan Perseroan dan kondisi industri yang dijalankan Perseroan. Pengetahuan Dewan Komisaris terhadap seluruh seluk beluk dan perkembangan Perseroan serta disiplin keilmuan para anggota Dewan Komisaris dapat ditingkatkan melalui pelatihan, workshop , seminar ataupun dalam bentuk lainnya baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal. Untuk tujuan tersebut Perseroan dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh PT PP (Persero) Tbk sebagai entitas induk melalui PP University.

INDUCTION PROGRAM TO THE BOARD OF COMMISSIONERS

PP Presisi recognizes that the Board of Commissioners' understanding of the Company is very important for the Board of Commissioners to perform the oversight function, therefore the Corporate Secretary conducts an introduction program for new members of the Board of Commissioners. Program Objectives Corporate Introduction To the Board of Commissioners to provide an overview of business activities, future corporate plans, work guidelines and other matters under the supervision of the Board of Commissioners.

CONTINUOUS EDUCATION AND TRAINING

The effectiveness of supervisory functions undertaken by the Board of Commissioners will be more effective if the Board of Commissioners knows all the details and developments of the Company and the conditions of the industry run by the Company. The knowledge of the Board of Commissioners on all the details and developments of the Company and the discipline of knowledge of the members of the Board of Commissioners can be enhanced through training, workshops, conferences, or in other forms, either internally or externally. For that purpose, the Company may utilize the facilities provided by PT PP (Persero) Tbk as a holding entity through PP University.

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

KRITERIA ANGGOTA & PENGANGKATAN DIREKSI

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
   A. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
   B. cakap melakukan perbuatan hukum;
   C. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
      a. tidak pernah dinyatakan pailit;
      b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
      c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yangberkaitan dengan sektor keuangan; dan
      d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
         i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
         ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

CRITERIA AND PROCESS OF APPOINTMENT MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Those who may be appointed as members of the Board of Directors are individuals who meet the requirements at the time of appointment and during their tenure:
   A. have good character, morals, and integrity;
   B. able to do legal action;
   C. within 5 (five) years before appointment and during the term of office:
      a. never declared bankrupt;
      b. has never been a member of the Board of Directors and / or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt;
      c. has never been punished for committing a criminal offense that is detrimental to state finances and / or related to the financial sector; and
      d. has never been a member of the Board of Directors and / or any member of the Board of Commissioners during his tenure:
         i. never held an annual GMS;
         ii. his / her accountability as a member of the Board of Directors and / or a member of the Board of Commissioners has never been accepted by the GMS or has not given any responsibility as a member of the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders; and

iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

D. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan

E. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas, anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

iii. has ever caused a company obtaining license, approval or registration from OJK does not fulfill the obligation to submit annual report and / or financial report to OJK.

D. has a commitment to comply with laws and regulations; and

E. have knowledge and / or expertise in the field required by the Company.

3. In addition to meeting the above-mentioned requirements, members of the Board of Directors shall be required to comply with the provisions of other laws and regulations.
4. Proposals for the appointment, dismissal and / or replacement of members of the Board of Directors to the General Meeting of Shareholders shall take into account the recommendations of the Board of Commissioners or committees performing the nomination function.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. The Board of Directors is in charge of carrying out and is responsible for the maintenance of the Company for the benefit of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company stipulated in the articles of association.
2. In carrying out its duties and responsibilities of management, the Board of Directors shall convene the Annual General Meeting of Shareholders and other General Meeting of Shareholders as stipulated in legislation and bylaws.
3. Each member of the Board of Directors shall perform duties and responsibilities in good faith, with full responsibility and prudence.
4. In order to support the effectiveness of the implementation of duties and responsibilities, the Board of Directors may establish a committee and shall evaluate the performance of the committees at the end of each financial year.

5. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:
   a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
   b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/ pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya.
7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh - RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.

PIAGAM DIREKSI

Perseroan menyadari bahwa Direksi memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi pengawasannya, sehingga dibutuhkan sebuah charter yang mengatur tentang Kriteria Anggota & Pengangkatan Direksi dan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi yang dapat menjadi pedoman kerja Direksi. Direksi PP Presisi telah memiliki Charter yang disusun mengacu kepada Peraturan OJK No. 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris *Emiten* atau Perusahaan Publik serta peraturan lainnya yang berlaku.

PROSEDUR REMUNERASI DIREKSI

Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS mengacu kepada prosedur yang ditentukan Komite Nominasi dan Remunerasi. Total gaji, tunjangan dan tantiem seluruh Direksi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp3,9 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp1,9 miliar. Pemberian *tantiem* kepada

5. The Board of Directors together with the Board of Commissioners shall prepare:
   a. guidelines binding each member of the Board of Directors and Board of Commissioners, in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.
   b. code of ethics applicable to all Directors applicable to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, employees / employees, and supporters of organs owned by the Company, in accordance with applicable laws and regulations.
6. Each member of the Board of Directors shall be fully liable for the loss of the Company due to the error or negligence of the members of the Board of Directors in performing their duties.
7. The division of duties and authority of each member of the Board of Directors shall be stipulated by the GMS, in the event that the GMS does not stipulate, the division of duties and authority of each member of the Board of Directors shall be determined on the basis of the Board of Directors' resolutions.

BOARD OF DIRECTORS CHARTER

The Company realizes that the Board of Directors has a very important role in carrying out its oversight function, so that a charter that regulates Member Criteria & Appointment of Directors and Duties and Responsibilities of the Board of Directors can be used as guidance for the Board of Directors. The Board of Directors of PP Presisi already has a Charter which is compiled based on OJK Regulation no. 33 / POJK.04 / 2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and other applicable regulations.

REMUNERATION PROCEDURES OF THE BOARD OF DIRECTORS

The salary or honorarium and other allowances of the members of the Board of Directors stipulated by the GMS shall refer to the procedures prescribed by the Nomination and Remuneration Committee. The total salaries, allowances and tantiem of all Directors for the period ended December 31, 2017 amounted to Rp3.9 billion, compared to the same period in 2016 amounting to Rp1.9 billion. The grant of tantiem to the

Direksi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dan dibayarkan secara tahunan berdasarkan pencapaian target kinerja yang ditentukan. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris

Board of Directors shall be made on the basis of the resolution of the General Meeting of Shareholders, and shall be paid annually on the basis of the achievement of the specified performance targets. Salaries, fees and other allowances (if any) for the members of the Board of Directors are determined by the GMS and such authority by the GMS may be delegated to the Board of Commissioners

RAPAT DIREKSI

Pada tahun 2017, Direksi mengadakan rapat sebanyak 12 kali rapat, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS

In 2017, the Board of Directors held 12 meetings with the following attendance:

Table of Level of Attendance of the Board of Directors Meeting

Name	Position	Attendance	Percentage of Attendance
Board of Directors			
Iswanto Amperawan	President Director	4 of 4	100%
Benny Pidakso	Director	4 of 4	100%
Hasanin Ade Putra	Director	4 of 4	100%
Arief Subyandono*	Independent Director	1 of 4	30%

*Mulai menjabat sejak 14 Agustus 2017
*Appointed since August 14, 2017

JABATAN RANGKAP DIREKSI DAN INDEPENDENSI DIREKTUR INDEPENDEN

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

MULTIPLE MEMBERSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS AND INDEPENDENCY OF INDEPENDENT DIRECTORS

Members of the Board of Directors are prohibited from holding multiple positions if such dual positions are prohibited and / or contrary to statutory regulations. Each member of the Board of Directors is prohibited from taking personal profit directly or indirectly from the Company's activities other than legitimate income.

PROGRAM PENGENALAN PERUSAHAAN KEPADA DIREKSI

PP Presisi memiliki Program Pengenalan Perusahaan Kepada Direksi yang terdiri atas pengenalan terhadap bisnis dan operasional maupun Tata Kelola yang dijalankan oleh Perseroan. Hal ini penting untuk mempercepat adaptasi Direksi sehingga Direksi yang bersangkutan dapat langsung terjun menjalankan tugasnya sehari-hari. Hal tersebut penting agar proses managemen dalam terus berjalan secara berkesinambungan.

INDUCTION PROGRAM TO THE BOARD OF DIRECTORS

PP Presisi has a Corporate Introduction Program to the Board of Directors consisting of business and operational recognition and Governance run by the Company. It is important to accelerate the adaptation of the Board of Directors so that the Directors concerned can directly perform their daily duties. It is important that the management process in continuous running on an ongoing basis.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG BERKELANJUTAN

Di dalam dunia usaha yang sangat dinamis di tengah perubahan struktur perekonomian makro yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi mendorong setiap perusahaan untuk terus aktif berinovasi dan melakukan transformasi jika perusahaan tersebut ingin terus tumbuh secara berkesinambungan. Hal ini disadari Perseroan yang terus melakukan transformasi bisnis untuk menjawab tantangan perubahan situasi dan kondisi perekonomian yang didorong kemajuan teknologi, serta perkembangan industry konstrusi yang signifikan. Tentunya kemampuan Manajemen untuk membaca perkembangan jaman serta mengantisipasinya menjadi sangat krusial. Karenanya Perseroan mewajibkan Direksi untuk mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Yang Berkelanjutan baik yang diselenggarakan oleh PP University maupun Lembaga-lembaga Pendidikan Tinggi. Perseroan beserta dengan Lembaga-lembaga tersebut menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan baik sekarang maupun di masa yang akan datang, termasuk yang menunjang transformasi bisnis yang sedang dilakukan oleh Perseroan. Selain program-program tersebut, program Pendidikan Dan Pelatihan Yang Berkelanjutan dilakukan dengan mengirim Direksi untuk menghadiri konferensi-konferensi yang relevan serta mengikutsertakan Direksi menjadi anggota asosiasi yang relevan.

CONTINUOUS EDUCATION AND TRAINING

In a vibrant business world amidst the macroeconomic structures that are heavily influenced by technological developments, each company is encouraged to continue actively innovating and transforming if the company wants to continue to grow sustainably. It is realized that the Company is continuously transforming its business to respond to the challenges of changing the situation and economic conditions that are driven by technological advances, as well as the development of significant construsion industry. Of course the ability of Management to read the development of the era and anticipate it becomes very crucial. Therefore, the Company requires the Board of Directors to participate in continuing Education and Training, both held by PP University and Higher Education Institutions. The Company, together with such Institutions, shall prepare the curriculum in accordance with the needs of both present and future, including those that support the business transformation being undertaken by the Company. In addition to these programs, the Ongoing Education and Training program is conducted by sending the Board of Directors to attend relevant conferences and engaging the Board of Directors to become members of relevant associations.

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagai salah satu organ di dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SK/PP-RE/KOM/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit Perseroan.

Persyaratan keanggotaan, proses seleksi, dan tata cara pengangkatan, dilakukan merujuk kepada Peraturan OJK dan Peraturan Bursa yang berlaku serta *best practices* GCG yang berlaku umum untuk menjaga independensi dan integritas Komite Audit.

ESTABLISHING AUDIT COMMITTEE

The Company has established the Audit Committee as one of the organs in the implementation of Good Corporate Governance (GCG) based on the Decision Letter of the Board of Commissioners no. 001 / SK / PP-RE / KOM / VIII / 2017 dated August 14, 2017 concerning Appointment of Members of the Audit Committee of the Company.

Membership requirements, selection process, and procedure of appointment shall be made in accordance with applicable OJK and Exchange Regulations and GCG best practices to maintain the independence and integrity of the Audit Committee.

Keanggotaan Komite Audit per tanggal 31 Desember 2017

Membership of the Audit Committee as of December 31, 2017

Ir. Ketut Darmawan

Komisaris Independen,

Warga Negara Indonesia,

58 tahun

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari ITB Bandung pada tahun 1983. Pada awalnya, beliau merupakan anggota PT PP sejak tahun 1983 diawali sebagai Staff Cabang III Jakarta, Project Manager PT PP pada Cabang III Jakarta (1990—1993), Koordinator Project PT PP pada Cabang III Jakarta (1990-1993), Manajer Pemasaran PT PP pada Divisi Pemasaran (1995-1999), Wakil Kepala Cabang PT PP pada Cabang III Jakarta (1993-1995), Kepala Divisi Pemasaran PT PP pada Divisi Pemasaran (1999 – Agustus 2006), dan terakhir sebagai Direktur Pemasaran pada tahun 2006-2011 dan Direktur Operasi pada tahun 2011-29 April 2016. Setelah itu beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 14 Agustus 2017

Independent Commissioner,

Indonesian citizen,

58 years old

Mr. Darmawan earned his Bachelor's Degree in Civil Engineering from Bandung Institute of Technology in 1983. He initially joined PT PP in 1983 as a Staff of Branch III Jakarta, Project Manager of PT PP's Branch III Jakarta (1990 – 1993), Project Coordinator of PT PP's Branch III Jakarta (1990-1993), Marketing Manager of PT PP's Marketing Division (1995-1999), Deputy Branch Head of PT PP's Branch III Jakarta (1993-1995), Head of Marketing Division of PT PP's Marketing Division (1999-August 2006), and lastly served as Marketing Director from 2006-2011 and Operation Director from 2011-April 29, 2016. Subsequently, He has served as the Company's Independent Commissioner since August 14, 2017.

Tri Sari Palupi, ST

Anggota

Warga Negara Indonesia

Usia 46 tahun

Saat ini menjabat sebagai Komite Audit di Perseroan. Sebelumnya menjabat sebagai Account Manager di PT PP (2006-2010), A/P Manager di PT PP (2010-2013), Procurement Manager di PT PP (2013-2016) dan Kepala Departemen Supply Chain Management di PT PP (2016-sekarang)

Member

Indonesian citizen

Age 46 years old

He currently serves as the Audit Committee of the Company. Previously served as Account Manager at PT PP (2006-2010), A / P Manager at PT PP (2010-2013), Procurement Manager at PT PP (2013-2016) and Head of Supply Chain Management Department at PT PP (2016-present)

Abdullah Sigit, SH

Komisaris

Warga Negara Indonesia

Usia 49 tahun

Saat ini menjabat sebagai Komite Audit di Perseroan. Sebelumnya bekerja di PT Prakarsa Dirganeka (2001-2006), Patria Park (2006-2013), Legal di PT PP (2013-2017), dan Kepala Departemen Advokasi di PT PP (2017-sekarang)

Commissioner

Indonesian citizen

Age 49 years old

He currently serves as the Audit Committee of the Company. He previously worked for PT Prakarsa Dirganeka (2001-2006), Patria Park (2006-2013), Legal in PT PP (2013-2017), and Head of Advocacy Department at PT PP (2017-present)

Komite Audit telah memiliki Piagam Komite Audit sebagai panduan pelaksanaan tugas Komite Audit yang telah mengacu dan sesuai dengan POJK No. 55, dimana piagam ini disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan tanggal 14 Agustus 2017 dengan menandatangani Piagam Komite Audit tersebut. Masa jabatan anggota Komite Audit adalah tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk masa 1 (satu) periode berikutnya. Masa jabatan Komite Audit terhitung sejak 14 Agustus 2017 sampai dengan paling lama 3 (tiga) tahun.

The Audit Committee already has the Audit Committee Charter as a guide to performing the duties of the Audit Committee which have been referred to and in accordance with the POJK No. 55, whereby the Charter is approved by the Board of Commissioners of the Company dated 14 August 2017 by signing the Charter of the Audit Committee. The term of office of the members of the Audit Committee shall not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the articles of association and may be re-elected only for the next period of 1 (one) period. The term of office of the Audit Committee shall be effective from August 14, 2017 up to a maximum of 3 (three) years.

Seluruh anggota Komite Audit memiliki kompetensi dan pengalaman kerja yang panjang di bidang Akuntansi, Keuangan, Audit, GCG serta Menejerial Perusahaan. Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham baik langsung maupun tidak langsung dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen. Untuk menjamin independensi seluruh anggota Komite Audit, setiap tahun Perseroan melakukan evaluasi serta meminta seluruh anggota Komite Audit menandatangani pakta pernyataan independen dan integritas.

All members of the Audit Committee have long-term competence and work experience in Accounting, Finance, Audit, GCG and Corporate Managerial. All members of the Audit Committee have no financial, management, direct or indirect shareholding and / or family relationship with the BoC, BoD and Controlling Shareholders, which may affect their ability to act independently. To ensure the independence of all members of the Audit Committee, each year the Company conducts an evaluation and requests all members of the Audit Committee to sign a pact of independent and integrity statements.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

1. Memastikan bahwa telah dipatuhi prosedur review yang memuaskan terhadap penyelenggaraan kegiatan Perseroan sesuai dengan Standar Operating Procedures yang berlaku;
2. Melakukan penelaahan atas perencanaan, pelaksanaan serta hasil audit yang dilakukan oleh Auditor Internal (SPI) maupun Auditor Eksternal untuk memastikan bahwa pelaksanaan dan pelaporan para auditor sudah memenuhi standar audit;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
4. Melaporkan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya dengan mencantumkan perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan Komite dalam Laporan Triwulan ataupun tahunan dan menyampaikan kepada Dewan Komsiaris;
5. Komite Audit membuat program/rencana kerja tahunan yang berisi rencana jadwal kerja selama 1 (satu)tahun;
6. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada public dan/atau pihak otoritas seperti laporan keuangan, proyeksi, Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, laporan manajemen dan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES AUDIT COMMITTEE

1. Ensure that compliance with satisfactory review procedures is in place for the operation of the Company in accordance with applicable Standard Operating Procedures;
2. Reviewing the planning, implementation and audit results conducted by the Internal Auditor (SPI) and the External Auditor to ensure that the auditor's implementation and reporting already meets the audit standards;
3. Provide recommendations on the improvement of management control system and its implementation;
4. Report the activities and results of the assignment it receives by including a comparison of the realization of activities with the Committee's annual work program in the Quarterly or Annual Report and submit to the Board of Commissioners;
5. The Audit Committee creates an annual work plan / plan containing a one-year work schedule;
6. Reviewing the financial information to be issued to the public and / or authorities such as the Company's financial statements, projections, long-term plans, work plans and budgets, management reports and others related to the financial information of the Company;

7. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
8. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntansi atas jasa yang diberikannya;
9. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
10. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
11. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris;
12. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
13. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
14. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan

7. Reviewing the compliance with laws and regulations relating to the Company's activities;
8. Provide an independent opinion in the event of any disagreement between management and Accounting for the services it provides;
9. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of Accountants based on the independence, scope of the assignment, and fees;
10. Reviewing the conduct of audits by internal auditors and overseeing the implementation of follow-up actions by the Board of Directors on the findings of internal auditors;
11. Reviewing the risk management activities conducted by the Board of Directors, if the Company does not have a risk monitoring function under the Board of Commissioners;
12. Review complaints relating to the Company's accounting and reporting process;
13. Review and advise the Board of Commissioners regarding the potential conflict of interest of the Company; and
14. Maintain confidentiality of Company documents, data and information

RAPAT KOMITE AUDIT

Sejak pembentukannya pada tanggal 14 Agustus 2017 hingga periode yang yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Komite Audit telah menyelenggarakan rapat sebanyak 1 kali pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit. Agenda pembahasan rapat tersebut meliputi kelengkapan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas Komite Audit serta program kerja Komite Audit tahun 2018.

THE AUDIT COMMITTEE MEETING

Since its establishment on August 14, 2017 until the period ended December 31, 2017, the Audit Committee has held a meeting of one meeting attended by all members of the Audit Committee. The meeting's agenda covers the completeness of the infrastructure needed to support the implementation of the Audit Committee's duties and the work program of the Audit Committee in 2018.

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Perseroan memiliki Program Peningkatan Kompetensi Komite Audit baik yang diselenggarakan oleh PP University, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan eksternal serta asosiasi profesi.

PROGRAM FOR IMPROVING COMPETENCY OF AUDIT COMMITTEE

The Company has an Audit Committee Competency Improvement Program, both held by PP University, external Education and Training Institution and professional associations.

KOMITE NOMINASI & REMUNERASI
NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE

PEMBENTUKAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai yang dipersyaratkan dalam POJK No. 34 sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK/PP-RE/KOM/VIII/2017 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 14 Agustus 2017. Persyaratan keanggotaan, proses seleksi, dan tata cara pengangkatan, dilakukan merujuk kepada Peraturan OJK dan Peraturan Bursa yang berlaku serta *best practices* GCG yang berlaku umum untuk menjaga independensi dan integritas Komite Nominasi dan Remunerasi.

ESTABLISHING OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

The Company has established the Nomination and Remuneration Committee as required in POJK No. 34 in accordance with the Decision Letter of the Board of Commissioners. 002 / SK / PP-RE / KOM / VIII / 2017 on the Appointment of the Nomination and Remuneration Committee on 14 August 2017. Membership requirements, selection process and appointment procedures are referred to the applicable OJK Regulations and Exchange Regulations and GCG best practices which is generally applicable to maintaining the independence and integrity of the Nomination and Remuneration Committee.

Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi per tanggal 31 Desember 2017

Membership of the Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2017

Ir. Ketut Darmawan

Komisaris Independen,

Warga Negara Indonesia,

58 tahun

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari ITB Bandung pada tahun 1983. Pada awalnya, beliau merupakan anggota PT PP sejak tahun 1983 diawali sebagai Staff Cabang III Jakarta, Project Manager PT PP pada Cabang III Jakarta (1990—1993), Koordinator Project PT PP pada Cabang III Jakarta (1990-1993), Manajer Pemasaran PT PP pada Divisi Pemasaran (1995-1999), Wakil Kepala Cabang PT PP pada Cabang III Jakarta (1993-1995), Kepala Divisi Pemasaran PT PP pada Divisi Pemasaran (1999 – Agustus 2006), dan terakhir sebagai Direktur Pemasaran pada tahun 2006-2011 dan Direktur Operasi pada tahun 2011- 29 April 2016. Setelah itu beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 14 Agustus 2017

Independent Commissioner,

Indonesian citizen,

58 years old

Mr. Darmawan earned his Bachelor's Degree in Civil Engineering from Bandung Institute of Technology in 1983. He initially joined PT PP in 1983 as a Staff of Branch III Jakarta, Project Manager of PT PP's Branch III Jakarta (1990 – 1993), Project Coordinator of PT PP's Branch III Jakarta (1990-1993), Marketing Manager of PT PP's Marketing Division (1995-1999), Deputy Branch Head of PT PP's Branch III Jakarta (1993-1995), Head of Marketing Division of PT PP's Marketing Division (1999-August 2006), and lastly served as Marketing Director from 2006-2011 and Operation Director from 2011-April 29, 2016. Subsequently, He has served as the Company's Independent Commissioner since August 14, 2017.

Hendiarso, SE

Anggota

Warga Negara Indonesia

Usia 49 tahun

Saat ini menjabat sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi di Perseroan. Sebelumnya menjabat sebagai Assistant Site Administration Manager di PT PP (1995-2001), Staff Keuangan di PT PP DVO III (2001-2004), Staff Keuangan di PT Prima Jasa Aldodua (2004-2010), Staff SDM di PT Prima Jasa Aldodua (2010-2014), Staff SDM di PT PP (2014-sekarang).

Member

Indonesian citizen

Age 49 years old

He currently serves as the Nomination and Remuneration Committee in the Company. Previously served as Assistant Site Administration Manager at PT PP (1995-2001), Finance Staff at PT PP DVO III (2001-2004), Financial Staff at PT Prima Jasa Aldodua (2004-2010), HR Staff at PT Prima Jasa Aldodua 2010-2014), HR Staff in the Company (2014-present).

Sri Bita Sutia Selvi, SE

Anggota

Warga Negara Indonesia

Usia 28 tahun

Saat ini menjabat sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi di Perseroan. Sebelumnya menjabat sebagai staff HRD di PT PP (2012-2016), Staff compensation, benefit & industrial Relation di PT PP (2016-2017), Kepala Departemen HR Compensation, Benefit & Industrial Relation di PT PP (2017-sekarang).

Member

Indonesian citizen

Age 28 years old

He currently serves as the Nomination and Remuneration Committee in the Company. Previously served as HRD staff at PT PP (2012-2016), Staff Compensation, Benefit & Industrial Relations at PT PP (2016-2017), Head of R ompensation, Enefit & Industrial Relations Department (2017-present).

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Sejak pembentukannya pada tanggal 14 Agustus 2017 hingga periode yang yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Komite Audit telah menyelenggarakan rapat sebanyak 1 kali pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite Audit. Agenda pembahasan rapat tersebut meliputi kelengkapan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas Komite Audit serta program kerja Komite Audit tahun 2018.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Since its establishment on August 14, 2017 until the period ended December 31, 2017, the Audit Committee has held a meeting of one meeting attended by all members of the Audit Committee. The meeting's agenda covers the completeness of the infrastructure needed to support the implementation of the Audit Committee's duties and the work program of the Audit Committee in 2018.

1. **Secara umum**
   a. Mengawasi tugas dan tanggung jawab Direksi terkait visi dan misi Perseroan;
   b. Mengembangkan kebijakan sumber daya manusia, termasuk namun tidak terbatas pada kebijakan nominasi remunerasi, pengelolaan bakat, retensi, rencana suksesi, pelatihan, desain, organisasi dan rekrutmen; dan
   c. Mengevaluasi dan mengimplementasikan tata kelola perusahaan terkait kebijakan sumber daya manusia dan Pedoman Perilaku.
2. **Kebijakan Nominasi**
   a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
   b. Memberikan rekomendasi mengenai kriteria calon anggota Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
3. **Kebijakan Remunerasi**
   a. Melakukan Evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi; dan
   b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      i. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
      ii. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

1. **Generally**
   a. Overseeing the duties and responsibilities of the Board of Directors regarding the vision and mission of the Company;
   b. Develop human resource policies, including but not limited to nomination policies for remuneration, talent management, retention, succession planning, training, design, organization and recruitment; and
   c. Evaluate and implement corporate governance regarding human resource policies and the Code of Conduct.
2. **Nomination Policy**
   a. Establish and provide recommendations on the system and procedures for the selection and / or replacement of members of the Board of Commissioners and Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders of the Company;
   b. Provide recommendation on criteria of candidates for the Board of Commissioners and / or Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders;
3. **Remuneration Policy**
   a. Evaluating the remuneration and nomination policies; and
   b. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding:
      i. Remuneration policy for the Board of Commissioners and Board of Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders of the Company;
      ii. Remuneration policy for Executive Officers and employees as a whole to be submitted to the Board of Directors.

RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Sejak pengangkatan pada 14 Agustus 2017, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 1 kali pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota Nominasi dan Remunerasi. Agenda pembahasan rapat tersebut meliputi kelengkapan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas, penegasan tugas dan tanggung jawab komiteserta serta program kerja tahun 2018.

MEETING OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Since the appointment on 14 August 2017, the Nomination and Remuneration Committee has held a one-time meeting attended by all Nomination and Remuneration members. The meeting agenda covers the completeness of the infrastructure needed to support the implementation of tasks, affirmation of duties and responsibilities komiteserta and work programs in 2018.

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Perseroan memiliki Program Peningkatan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi baik yang diselenggarakan oleh PP University, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan eksternal serta asosiasi profesi.

PROGRAM FOR IMPROVING COMPETENCY OF NOMINATION COMMITTEE AND REMUNERATION

The Company has a Competency Enhancement Program for the Nomination and Remuneration Committee, both held by PP University, external Education and Training Institution and professional associations.

SEKRETARIS PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARY

PEMBENTUKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan dibentuk untuk menjalankan fungsi sebagai fasilitator Perusahaan dan Direksi dengan pihak eksternal yang mencakup hubungan dengan semua pemangku kepentingan,termasuk publik. Sekretaris Perusahaan ditunjuk dan diangkat serta bertanggung jawab kepada Direksi. Mengacu kepada Surat Keputusan Direksi No. 004/SK/PP-PRESISI/2017 tanggal 1 Agustus 2017, Perseroan telah menunjuk Benny Pidakso, sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan. Persyaratan, proses seleksi, dan tata cara pengangkatan, dilakukan merujuk kepada Peraturan OJK dan Peraturan Bursa yang berlaku serta *best practices* GCG yang berlaku umum.

Profile Sekretaris Perusahaan dapat dilihat di profile anggota Direksi

ESTABLISHMENT OF SECRETARY COMPANY

The Corporate Secretary is established to perform the function of facilitating the Company and the Board of Directors with external parties that include relationships with all stakeholders, including the public. The Corporate Secretary is appointed and appointed and responsible to the Board of Directors. Referring to Directors Decree No. 004 / SK / PP-PRESISI / 2017 dated 1 August 2017, the Company has appointed Benny Pidakso, as Corporate Secretary of the Company. The requirements, selection process, and procedure of appointment shall be made in accordance with applicable OJK Regulations and Exchange Regulations and generally accepted GCG best practices.

Profile of Corporate Secretary can be seen in profile of member of Board of Directors

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan atau Pasar Publik;
3. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya;
4. Sebagai penghubung atau contact person atau Perseroan atau Perusahaan Publik dengan OJK dan masyarakat;
5. Mengelola RUPS;
6. Mengelola Rapat Direksi;

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE SECRETARY OF THE COMPANY

1. Following the development of the Capital Market in particular the prevailing laws and regulations in the Capital Market;
2. Providing services to the public for any information required by investors relating to the condition of the Company or the Public Market;
3. Providing input to the Board of Directors of the Company or Public Company to comply with the provisions of Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market and its implementing regulations;
4. As liaison or contact person or Company or Public Company with OJK and community;
5. Manage GMS;
6. Managing Board of Directors Meetings;

7. Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan merecord Agenda, Minute, Kebijakan, Keputusan dan data-data yang dihasilkan didalam Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi.
8. Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG;
9. Mengangani dan mengkoordinir Permasalahan Legal Perusahaan;
10. Menata-usahakan serta menyimpan dokumen-dokumen Perusahaan;
11. Mengikuti perkembangan Peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
12. Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
13. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau *Stakeholder* atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi perusahaan:
    a. Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*);
    b. Laporan Kinerja Perusahaan Tahunan (*Annual Report*);
    c. Informasi Fakta Material;
    d. Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode khusus, dll);
14. Sebagai penghubung antara perusahaan dengan lembaga terkait dan masyarakat (luar dan lingkungan).

7. Managing Joint Meetings of Commissioners and Directors and recording Agenda, Minute, Policies, Decisions and data generated in the Joint Meeting of Commissioners and Board of Directors.
8. Overseeing the application of applicable regulations while keeping the GCG principles in mind;
9. Overseeing the application of applicable regulations while maintaining the GCG principles Handling and coordinating the Company Legal Issues;
10. Arranging and storing Company documents;
11. Following the development of the Regulations applicable in the field of Capital Market;
12. Providing input to the Board of Directors to comply with Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market;
13. Providing services to the public or Stakeholder to the information needed by investors related to the condition of the company:
    a. Annual Financial Report (Audited);
    b. Annual Report (Annual Report);
    c. Material Facts Information;
    d. Meaningful products or inventions (awards, flagship projects, inventions of specific methods, etc.);
14. As a liaison officer between the company and related institutions and the community (outside and environment).

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Selama tahun 2017, Sekretaris Perusahaan membantu Direksi dalam bidang Kepatuhan, Tata Kelola, Administrasi Perusahaan, Komunikasi Internal dan Komunikasi Eksternal antara lain sebagai berikut : memberikan *update* dan masukan kepada Direksi dan Manajemen serta Dewan Komisaris tentang perkembangan peraturan pasar modal serta peraturan-peraturan lainnya yang relevan, membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Tata Kelola, menyelenggarakan manajemen administrasi di tingkat Perseroan, menyampaikan kewajiban pelaporan Perseroan kepada OJK, BEI, dan *website* Perseroan, serta mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang terkait dengan Penawaran Perdana Saham dari persiapan, pendaftaran, paparan publik, *roadshow* hingga tercatat pada BEI.

IMPLEMENTATION OF TASKS AND RESPONSIBILITY

During 2017, the Corporate Secretary assists the Board of Directors in the areas of Compliance, Corporate Governance, Corporate Administration, Internal Communication and External Communication, among others as follows: to provide updates and inputs to the Board of Directors and Management and Board of Commissioners on the development of capital market regulations and other regulations relevant, assisting the Board of Directors and the Board of Commissioners in the implementation of Good Corporate Governance, administering the administrative management at the Company level, submitting the Company's reporting obligations to OJK, BEI and the Company website, and coordinating all activities related to the Initial Public Offering of preparation, registration, roadshow to be listed on BEI.

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Perseroan memiliki Program Peningkatan Sekretaris Perusahaan baik yang diselenggarakan oleh PP University, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan eksternal serta menjadi asosiasi profesi (*Indonesia Corporate Secretary Association*, ICSA).

IMPROVEMENT PROGRAM FOR CORPORATE SECRETARY'S COMPETENCY

The Company has a Corporate Secretary Enhancement Program, which is organized by PP University, an External Education and Training Institution and a professional association (Indonesia Corporate Secretary Association, ICSA).

HUBUNGAN INVESTOR
INVESTOR RELATIONS

Memberikan informasi terkini Perseroan merupakan komitmen PP Presisi kepada seluruh pemangku kepentingan. Karenanya PP Presisi selalu berusaha dengan berkomunikasi secara rutin dengan para pemegang saham, investor, analis, dan media. Komunikasi tersebut bertujuan untuk membangun dan mengembangkan kepercayaan publik serta meningkatkan pemahaman tentang kegiatan bisnis Perseroan yang baru saja menjadi *emiten* di BEI. Komunikasi rutin diharapkan juga akan memperkuat goodwill dan reputasi Perseroan di kalangan investor, analis serta dengan media.

Hubungan investor secara aktif telah menjalin komunikasi dengan para investor dan analis melalui pertemuan tatap muka *one-on-one, group meeting, investor roadshows* (IPO) dan *investor conference*.

Komunikasi serupa juga dilakukan dengan media antara lain melalui kunjungan redaksi. Hubungan investor secara aktif juga melakukan komunikasi melalui *website* Perseroan.

Providing up-to-date information The Company is a PP Presisi's commitment to all stakeholders. Therefore PP Presisi always strives to communicate regularly with shareholders, investors, analysts, and the media. The communication aims to build and develop public trust and improve understanding of the business activities of the Company which has just become an issuer in IDX. The routine communication is also expected to strengthen the Company's goodwill and reputation among investors, analysts and with the media.

Investor relations has actively communicated with investors and analysts through one-on-one, group meeting, investor roadshows (IPO) and investor conference meetings.

Similar communication was also conducted with the media, among others, through the visit of the editor. Investor relations actively also communicates through the Company's website.

AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT

PEMBENTUKAN AUDIT INTERNAL

Sesuai dengan POJK No. 56 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 003/SK/PPPRESISI/DIR/2017 tanggal 1 Agustus 2017,mengenai pembentukan dan pengangkatan Unit Audit Internal, Perseroan telah telah menunjuk Retnani Perdaniaty sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Perseoran telah membentuk Piagam Audit Internal yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan kemudian telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 1 Agustus 2017.

ESTABLISHMENT OF INTERNAL AUDIT

In accordance with POJK No. 56 and based on the Decree of the Board of Directors of the Company. On the establishment and appointment of the Internal Audit Unit, the Company has appointed Retnani Perdaniaty as Head of the Company's Internal Audit Unit. The Company has established an Internal Audit Charter approved by the Board of Commissioners and subsequently determined by the Board of Directors of the Company on 1 August 2017.

Profil Kepala Unit Audit Internal

Profile of Head of Internal Audit Unit

Retnani Perdaniati, SE, QIA

Kepala Unit Audit Internal

Warga Negara Indonesia

Usia 32 tahun

Saat ini menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal di Perseroan sejak tahun 2016. Sebelumnya menjabat beberapa jabatan pada PT PP (Persero) Tbk. : sebagai Junior Auditor & Auditor Madya (2014-2016), Finance&Accounting Staff (2008-2014).

Memiliki kualifikasi QIA (Qualified Internal Auditor) yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)

Head of Internal Audit Unit

Indonesian citizen

Age 32 years old

He currently serves as Head of Internal Audit Unit of the Company since 2016. Previously held several positions at PT PP (Persero) Tbk. : as Junior Auditor & Auditor Madya (2014-2016), Finance & Accounting Staff (2008-2014).

Having qualified QIA (Qualified Internal Auditor) issued by Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB AUDIT INTERNAL

Secara berkala, audit internal mengevaluasi keterbukaan atas risiko yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan dan sistem informasi meliputi efektifitas dan efisiensi kegiatan operasi, pengamanan aset, dan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kontrak

Audit Internal bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya secara fungsional kepada Komite Audit dan secara administratif kepada Direktur Utama. Hal ini dilakukan untuk mencapai tingkat independensi yang dibutuhkan.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF INTERNAL AUDITS

Periodically, internal audits evaluate disclosure of risks associated with corporate management and information systems including the effectiveness and efficiency of operations, asset safeguards, and compliance with laws, regulations and contracts

The Internal Audit is responsible and reports its work functionally to the Audit Committee and administratively to the President Director. This is done to achieve the required level of independence.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Menjadi penilai independen yang berperan membantu Direksi dalam mengamankan investasi dan aset Perusahaan secara efektif dari sisi akuntansi dan audit;
2. Melakukan analisa dan evaluasi efektivitas sistem dan prosedur pada semua kegiatan Perusahaandan fungsi-fungsi pendukungnya;
3. Melakukan koordinasi dengan Komite Audit dan auditor eksternal agar kelancaran proses auditdapat tercapai.
4. Mengakses seluruh informasi yang relevan, melakukan komunikasi secara langsung denganDireksi, dan Dewan Komisaris, serta Komite Audit dengan sepengetahuan Komisaris
5. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, serta Komite Audit;
6. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
7. Menyusun usulan perubahan dan melaksanakan Piagam Audit Internal;
8. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperoleh, dalam kaitan denganpenilaian efektivitas sistem audit;
9. Menilai dan menganalisa aktivitas Perseroan, namun tidak mempunyai kewenangan dalampelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang ditelaah/diaudit;
10. Kepala Audit Internal dapat mengalokasikan sumber daya, fokus, ruang lingkup, jadwal auditor, dan penerapan teknik audit untuk mencapai tujuan audit, mengklarifikasi dan membicarakan hasil audit,meminta tanggapan lisan/tertulis pada *auditee*, memberikan saran dan rekomendasi.

IMPLEMENTATION OF TASKS AND RESPONSIBILITY

1. Being an independent appraiser that assists the Board of Directors in securing the Company's investments and assets effectively from the accounting and auditing side;
2. Analyze and evaluate the effectiveness of systems and procedures on all activities of the Company and its supporting functions;
3. Coordinate with the Audit Committee and external auditors to smooth the audit process can be achieved.
4. Access all relevant information, communicate directly with the Board of Directors, and the Board of Commissioners, and the Audit Committee with the knowledge of the Board of Commissioners
5. Conducting regular and incidental meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee;
6. Coordinate its activities with external auditor's activities;
7. Prepare proposed changes and implement the Internal Audit Charter;
8. Verify and test the reliability of information obtained, in relation to the audit system effectiveness assessment;
9. Assess and analyze the activities of the Company, but has no authority in the execution and responsibility for the activities reviewed / audited;
10. The Head of Internal Audit can allocate resources, focus, scope, auditor schedule, and application of audit techniques to achieve audit objectives, clarify and discuss audit results, request an oral / written response on the auditee, provide suggestions and recommendations.

AKUNTAN PUBLIK
PUBLIC ACCOUNTANT

Penunjukan penugasan Kantor Akuntan Publik (KAP) dilakukan melalui keputusan RUPS, yang mana Komite Audit dapat memberikan masukan berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukannya.

Kriteria pemilihan Auditor Eksternal antara lain bahwa :

1. Auditor Eksternal tidak memiliki hubungan afiliasi dan terbebas dari benturan kepentingan Dewan Komisaris, Direksi dan pihak lain yang memiliki kepentingan pada Perseroan.
2. KAP harus memiliki reputasi yang baik dan terdaftar di OJK.
3. KAP harus memiliki kinerja yang baik dan menjunjung tinggi kode etik profesi.

Perseroan menunjuk KAP Hertanto, Grace, Karunawan sebagai KAP yang melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017.

Selain melakukan audit terhadap Laporan Keuangan, KAP Hertanto, Grace, Karunawan tidak memberikan jasa lainnya kepada Perseroan.

Entitas Anak menunjuk KAP Hertanto, Grace, Karunawan sebagai KAP yang melakukan audit laporan keuangan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017.

Selain melakukan audit terhadap Laporan Keuangan, KAP Hertanto, Grace, Karunawan tidak memberikan jasa lainnya kepada Entitas Anak.

The appointment of the assignment of the Public Accounting Firm (KAP) is made through the resolutions of the GMS, in which the Audit Committee may provide input based on the results of the review which it has undertaken.

Criteria for the selection of External Auditors include that:

1. The External Auditor has no affiliation relationship and is free from conflicts of interest of the Board of Commissioners, Board of Directors and other parties with an interest in the Company.
2. KAP must have a good reputation and be registered on OJK.
3. KAP must have a good performance and uphold the code of ethics profession.

The Company appoints KAP Hertanto, Grace, Karunawan as KAP to audit the Company's consolidated financial statements for the period ended 31 December 2017.

In addition to auditing the Financial Statements, KAP Hertanto, Grace, Karunawan provide no other services to the Company.

The Subsidiary appoints KAP Hertanto, Grace, Karunawan as KAP to audit the Subsidiaries' financial statements for the period ended 31 December 2017.

In addition to auditing the Financial Statements, KAP Hertanto, Grace, Karunawan provide no other services to the Subsidiary.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM

Manajemen Perseroan telah menyusun sistem pengawasan internal sebagai bagian usaha untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sistem pengawasan internal yang memadai untuk mengidentifikasikan bahwa kegiatan operasional dan keuangan telah berjalan secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan telah dapat diandalkan, aset perusahaan telah aman, kepatuhan terhadap SOP serta panduan pekerjaan lainnya telah dilakukan.

Pengendalian internal yang telah dilakukan Perseroan, antara lain :

1. Pelaksanaan audit berbasis risiko secara berkelanjutan.
2. Tindak lanjut terhadap temuan audit baik yang berasal dari audit internal maupun audit eksternal.
3. Komunikasi audit yang dilakukan secara aktif dengan audit internal, audit eksternal dan komite audit.
4. Pengawasan terhadap kegiatan usaha untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran, SOP yang telah ditetapkan, dan peraturan lainnya.
5. *Review* bulanan atas *budget*, realisasi, dan deviasinya serta penanganan masalah-masalah yang dihadapi.

The Company's management has established an internal control system as part of its business to create sustainable growth. Inadequate internal supervisory systems to identify that operational and financial activities are running effectively and efficiently, financial reporting has been reliable, company assets are secure, compliance with SOPs and other work guides have been conducted.

Internal controls that have been carried out by the Company include:

1. Continuous implementation of risk-based audit.
2. Follow up on audit findings from both internal and external audit.
3. Active audit communications with internal audits, external audits and audit committees.
4. Supervision of business activities to ensure that all activities have been carried out in accordance with budget, SOPs established, and other regulations.
5. Monthly review of budget, realization, and deviation as well as handling problems faced.

REVIEW ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Untuk meningkatkan sistem pengendalian internal, Perseroan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang mendorong penerapan transparansi operasional dan keuangan untuk menanamkan integritas pada setiap aktivitas. Selanjutnya Perseroan melakukan *review* atas efektivitas pengendalian internal, terutama melalui Unit Audit Internal yang memiliki tanggung jawab utama untuk melakukan audit operasional dan keuangan dan penilaian terhadap pengendalian internal di setiap lini bisnis dan unit operasional. Review atas efektivitas sistem pengendalian internal dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari *early warning system* yang bersifat aktif.

REVIEW ON EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL SYSTEM

To improve the internal control system, the Company prioritizes the principles of good corporate governance that encourage operational and financial transparency to instill integrity in every activity. The Company further reviews the effectiveness of internal controls, particularly through the Internal Audit Unit which has primary responsibility for conducting operational and financial audits and an assessment of internal controls in every business line and operational unit. A review of the effectiveness of the internal control system is carried out continuously as part of an active early warning system.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT SYSTEM

PENERAPAN ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM)

Perseroan menyadari bahwa dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak dapat menghindari adanya risiko-risiko baik yang berasal dari luar maupun dari dalam Perseroan. Dalam pengelolaan risiko, Perseroan melakukannya dengan pendekatan Tata Kelola Perusahaan karena salah satu bentuk penerapan praktik-praktik terbaik tata kelola perusahaan yang benar adalah pengelolaan risiko. Di dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang dihadapi, Perseroan menyusun ERM. Saat ini penyusunan ERM masih terus dikembangkan untuk mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan dari para pemangku kepentingan, antara lain Unit Audit Internal yang berkepentingan pada risk based audit, serta tidak kalah penting yaitu divisi operasional yang menjalankan kegiatan transaksi sehari-hari.

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM) IMPLEMENTATION

The Company realizes that in conducting its business, the Company can not avoid any risks arising from outside or inside the Company. In risk management, the Company does so with the Corporate Governance approach because one of the best practices of corporate governance practices is risk management. In identifying and mitigating the risks faced, the Company prepares the ERM. Currently, ERM preparation is still being developed to accommodate the needs of stakeholders, such as the Internal Audit Unit with an interest in risk based audit, as well as an important operational division that conducts daily transactional activities.

PROFIL RISIKO DAN MITIGASINYA

Risiko Pelaksanaan Proyek

Risiko pelaksanaan proyek yang berdampak terhadap Perseroan terkait dengan keterlambatan proyek. Penyebabnya adalah ketersediaan sumber daya (*resources*) baik peralatan, material maupun tenaga kerja yang kurang, juga dapat disebabkan oleh kondisi iklim yang tidak mendukung. Pelaksanaan proyek Perseroan dilakukan di lapangan dalam keadaan terbuka, risiko curah hujan menimbulkan kendala pada proyek konstruksi dan kesulitan dalam beraktivitas yang dapat menyebabkan terjadinya kehilangan waktu kerja. Pada umumnya, kontrak kerja yang dimiliki oleh Perseroan memberikan kompensasi berupa perpanjangan waktu untuk kondisi cuaca yang tidak normal dan tidak dapat diantisipasi sebelumnya. Kendati pun demikian, hal tersebut tidak menghalangi kontraktor untuk menjadikan kehilangan waktu kerja akibat curah hujan sebagai salah satu penyebab keterlambatan proyek. Selain dapat menyebabkan keterlambatan proyek, risiko curah hujan juga dapat menyebabkan terjadinya risiko longsor pada lokasi-lokasi tertentu yang memiliki elevasi yang beresiko. Risiko pelaksanaan proyek bisa berakibat pada bertambahnya biaya proyek, yang berakibat penurunan laba perusahaan.

RISK PROFIL AND MITIGATION

Project Implementation Risk

Project implementation risks affecting the Company related to project delays. The cause is the availability of resources (resources) both equipment, materials and labor are less, can also be caused by unfavorable climatic conditions. Implementation of the Company's projects is done in the field in an open state, the risk of rainfall poses constraints on construction projects and difficulties in activities that can lead to loss of working time. Generally, the Company's work contract provides compensation in the form of extension of time for abnormal and unanticipated weather conditions. Nevertheless, it does not prevent contractors from making lost work time due to rainfall as one of the causes of project delays. In addition to causing project delays, the risk of rainfall can also cause the risk of landslides at certain locations that have elevated elevations. The risk of project implementation may result in increased project costs, resulting in a decrease in corporate profits.

Mitigasi

Untuk mengurangi dampak risiko ini, perusahaan menerapkan SCM (*Supply Chain Management)*, *scheduling, planning detail resources*, evaluasi cuaca dan iklim yang ada sehingga dapat memberikan perencanaan yang matang dan pelaksanaan proyek yang lebih optimal.

Mitigation

To reduce this risk impact, the company implements SCM (Supply Chain Management), scheduling, planning detail resources, weather and climate evaluation so that it can provide more mature planning and more optimal project implementation.

RISIKO PERSAINGAN USAHA

Persaingan usaha di sektor jasa konstruksi semakin ketat baik dengan sesama BUMN maupun dengan swasta yang berisiko pada semakin rendahnya *profit margin* yang didapat oleh perusahaan, bahkan dapat juga menyebabkan pada sedikitnya proyek yang akan diperoleh oleh perusahaan.

Mitigasi

Untuk mengurangi dampak risiko ini, perusahaan menerapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Memperkuat posisi keunggulan kompetitif sebagai perusahaan jasa konstruksi yang berintegrasi berbasis peralatan yang dapat menyediakan jasa kontruksi secara lengkap (*one stop solution*) bagi konsumen. Keunggulan kompetitif ini tidak dimiliki oleh para pesaingnya.
2. Melakukan project management untuk menjamin proyek dapat di*deliver* sesuai dengan jangka waktu proyek
3. Melakukan *cost management* untuk menjaga tingkat profitabilitas.

BUSINESS COMPETITION RISK

Business competition in the construction services sector is getting tighter with both state-owned and private companies at risk of lower profit margin earned by the company, and may also cause at least the project to be obtained by the company.

Mitigation

To mitigate this risk impact, the company implemented the following policies:

1. Strengthen the position of competitive advantage as an integrated equipment-based construction service company that can provide a one stop solution for consumers. This competitive advantage is not owned by its competitors.
2. Conducting project management to ensure the project can be delivered within the project period
3. Perform cost management to maintain the level of profitability.

RISIKO PEMBAYARAN

Risiko pembayaran muncul akibat adanya pembayaran uang muka dan termin dari Pemilik Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak. Umumnya risiko ini terjadi pada proyek-proyek dengan pemilik pekerjaan swasta dan BUMN tanpa uang muka. Dampak dari risiko ini berpengaruh pada terganggunya arus kas proyek dan juga cash flo perusahaan. Beberapa cara perseroan untuk menangani risiko antara lain dengan menetapkan standar batas waktu maksimal periode pembayaran uang muka dan termin serta penerapan bunga bank atas keterlambatannya. Jika pembayaran sudah melebihi jangka waktu yang diperjanjikan, maka perusahaan akan menghentikan pelaksanaan proyek tersebut dengan semua akibat biaya yang muncul menjadi beban pemilik proyek.

PAYMENT RISK

Payment risks arise as a result of advance payments and terminations from the Employment Owner not in accordance with the contract. Generally these risks occur in projects with private employment owners and SOEs with no down payment. The impact of these risks affects the disruption of the cash flow project and also the company's cash flo. Some ways the company to handle the risk, among others, by setting the standard deadline for the maximum period of advance payment and termin as well as the application of bank interest on the delay. If the payment has exceeded the contracted period, then the company will terminate the project with all costs resulting from the expense of the project owner.

Mitigasi

Untuk mengurangi dampak risiko ini, perusahaan menerapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Perusahaan mengutamakan pembayaran melalui Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau sering disebut LC lokal
2. Perusahaan mengutamakan proyek-proyek yang mana posisi perusahaan sebagai subkontraktor, serta menghindari proyek-proyek *turnkey*
3. Perusahaan secara aktif memonitor *portofolio* proyek-proyek yang sedang dikerjakan dengan proyek-proyek yang akan diambil

Mitigation

To mitigate this risk impact, the company implemented the following policies:

1. Companies prioritize payment through Domestic Letters of Credit (SKBDN) or often called LC local.
2. The company prioritizes projects in which the company is positioned as a subcontractor, and avoids turnkey projects
3. The company actively monitors the portfolio of projects being undertaken with projects to be taken

RISIKO PROSES TENDER DAN EKSEKUSI PROYEK

Risiko proyek dapat terjadi pada saat tender, pelaksanaan dan komisioning. Pada saat tender, risiko tinggi terjadi apabila perseroan tidak bisa memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam dokumen tender seperti pengalaman dalam mengerjaan pekerjaan sejenis atau adanya personil dengan kemampuan tertentu. Hal ini berakibat perseroan tidak bisa mengikuti tender sehingga target pencapaian laba perseroan tidak tercapai. Risiko pada tahap pelaksanaan antara lain pekerjaan desain dan waktu pengiriman bahan baku. Risiko tahap komisioning terjadi apabila kinerja tidak sesuai dengan spesifikasi. Risiko-risiko ini menyebabkan perseroan harus membayar denda sehingga mengurangi laba perusahaan.

Mitigasi

Dalam merespon risiko-risiko tersebut perusahaan melakukan peningkatan kompetensi SDM, Kerjasama Operasi dengan perusahaan yang berpengalaman, kerjasama dengan pembuat peralatan/mesin dan mengasuransikan semua pekerjaan.

TENDER PROCESS AND PROJECT EXECUTION RISK

Project risk may occur during tender, execution and commissioning. At the time of the tender, high risk occurs if the company can not meet the criteria required in the tender documents such as experience in working on similar work or the presence of personnel with certain capabilities. This resulted in the company can not follow the tender so that the target achievement of the company's profit is not achieved. Risks at the implementation stage include design work and delivery time of raw materials. The risk of commissioning stage occurs when performance does not meet specifications. These risks have caused the company to pay a fine to reduce the company's profit.

Mitigation

In response to these risks the company improves human resources competencies, Joint Operations with experienced companies, cooperation with equipment makers / machines and insures all jobs.

RISIKO KELANGKAAN SUMBER DAYA DAN PASOKAN BAHAN BAKU

Risiko kelangkaan sumber daya terjadi pada sumber daya manusia dan material baik material alam maupun produk pabrik. Kebutuhan sumber daya yang semakin meningkat sedangkan pasokan di lapangan terbatas menjadi salah satu penyebabnya. Hal ini sebanding dengan semakin meningkatnya proyek yang dikerjakan perseroan. Oleh karena itu kenaikan upah pekerja dan kenaikan harga material utama tidak dapat dihindari. Dampak risiko ini adalah berkurangnya pencapaian laba proyek dan perusahaan. Risiko bertambah apabila perseroan tidak bisa mengajukan klaim akibat kenaikan tersebut.

Mitigasi

Untuk mengatasi risiko ini, perseroan menetapkan pengambilan proyek dengan nilai kontrak tertentu dan melakukan kontrak payung terhadap material utama guna mempertahankan kecukupan persediaan bahan baku dan stabilitas harga.

RESOURCE SCARCITY AND RAW MATERIAL SUPPLY RISKS

The risk of resource scarcity occurs in human and material resources both natural materials and factory products. The need for increased resources while limited field supply becomes one of the causes. This is in line with the increasing number of projects the company undertakes. Therefore, the increase of workers' wage and the rise in the price of the main material can not be avoided. The impact of these risks is a decrease in project and company profits. The risk increases if the company can not claim due to the increase.

Mitigation

To overcome this risk, the company sets the project with a certain contract value and performs an umbrella contract on the main material in order to maintain sufficient raw material inventory and price stability.

RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI, SOSIAL, DAN POLITIK

Risiko ini berkaitan dengan dampak negatif dari perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan politik terhadap operasional Perseroan. Kondisi ekonomi seperti terjadinya krisis ekonomi di negara pengekspor produk yang diperlukan perseroan serta tidak adanya *tax treaty agreement* akan mengakibatkan naiknya harga produk. Kebijakan pemerintah serta kondisi politik memberikan dampak pada investasi dan pembangunan. Dampaknya, penurunan terhadap perolehan proyek perseroan sehingga pencapaian laba perseroan juga tidak sesuai target. Risiko sosial terjadi pada proyek yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, baik itu keamanan, LSM, atau partisipasi yang inginkan. Risiko ini berakibat pada terhambatnya pelaksanaan proyek dan keterlambatan penyelesaian proyek sehingga laba perusahaan bisa berkurang.

Mitigasi

Perusahaan merespon hal tersebut dengan cara mencantumkan pasal eskalasi dalam kontraknya.

CHANGING ECONOMIC, SOCIAL AND POLITICAL CONDITIONS RISK

This risk is related to the negative impact of changes in economic, social and political conditions on the Company's operations. Economic conditions such as the economic crisis in the exporting country of products required by the company and the absence of a tax treaty agreement will result in higher product prices. Government policies and political conditions have an impact on investment and development. The impact, the decrease on the acquisition of the company's project so that the company's profit achievement is also not on target. Social risk occurs in projects that are directly related to the community, whether it is security, NGOs, or desired participation. This risk results in delays in project implementation and delays in project completion so that the company's profits can be reduced.

Mitigation

The Company responds to this by including an escalation article in its contract.

RISIKO KURS VALUTA ASING

Perubahan kurs Rupiah terhadap mata uang asing dihadapi oleh perseroan terutama pada proyek yang menggunakan material import. Perubahan beda kurs Rupiah terhadap mata uang asing tersebut dapat meningkatkan rugi selisih kurs yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan laba Perseroan.

Mitigasi

Untuk mengatasinya, perusahaan telah mempunyai *work instruction* tentang lindung nilai serta melakukan perjanjian dengan *vendor* untuk melakukan pembayaran secara *back to back* sesuai dengan mata uang dalam kontrak induk atau melakukan hedging.

EXCHANGE RATE RISK

Changes in the Rupiah exchange rate against foreign currencies are faced by the company mainly on projects that use imported materials. Changes in the Rupiah exchange rate against such foreign currency may increase the foreign exchange loss resulting in a decrease in profit of the Company.

Mitigation

To overcome this, the company already has a workshop on hedging and agreements with vendors to make back-to-back payments in accordance with the currency in the master contract or hedging.

RISIKO TUNTUTAN ATAU GUGATAN HUKUM

Risiko tuntutan atau gugatan hukum terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara kontrak dengan realisasi pelaksanaannya. Risiko ini bisa melibatkan perseroan dengan pemilik pekerjaan atau dengan vendor. Dampak risiko ini adalah menurunnya reputasi perseroan.

Mitigasi

Dalam merespon ini perusahaan mencantumkan pasal-pasal hak dan kewajiban secara detail dan pasal tentang cara penyeselesaian jika terjadi perselisihan dalam kontrak.

RISK OF LITIGATION OR LAWSUIT

Risk of litigation or lawsuit occurs when there is a discrepancy between the contract and the realization of its implementation. This risk may involve the company with the owner of the job or with the vendor. The impact of this risk is the declining reputation of the company.

Mitigation

In responding to this the company includes articles of rights and obligations in detail and clauses on how to settle in case of disputes in the contract.

SANKSI ADMINISTRATIF YANG DIKENAKAN KEPADA PERSEROAN, ENTITAS ANAK, ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

WRITTEN ADMINISTRATIVE SANCTIONS TO THE COMPANY, SUBSIDIARIES, MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND MEMBERS BOARD OF COMMISSIONERS

Selama tahun 2017, tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan oleh otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya kepada Perseroan, Entitas Anak, serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak.

During 2017, there are no administrative sanctions imposed by the Capital Market authorities and other authorities to the Company, Subsidiaries, and each member of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company and Subsidiaries.

KODE ETIK PERSEROAN
CODE OF CONDUCT

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, beretika, sehingga perlu penyelarasan etika usaha dan etika kerja dengan Visi dan Misi Perseroan serta Panduan Pelaksanaan GCG. Untuk itu Perseroan menyusun Kode Etik Perseroan (*Code of Conduct*) yang pada tanggal 14 Agustus 2017 ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Code of Conduct berisi tentang pedoman etika usaha dan etika kerja sebagai acuan bagi Warga Perseroan meliputi Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PP Presisi dalam menjalankan aktivitas bisnis serta berhubungan dengan para pemangku kepentingan.

Code of Conduct berisi tentang pedoman etika usaha dan etika kerja sebagai acuan bagi Warga Perseroan meliputi Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PP Presisi dalam menjalankan aktivitas bisnis serta berhubungan dengan para pemangku kepentingan.

In conducting its business activities, the Company is always required to implement it in a trustful, ethical manner, so it is necessary to align business ethics and work ethics with the Company's Vision and Mission and GCG Implementation Guide. For that purpose, the Company formulates the Code of Conduct which on August 14, 2017 is signed by the Board of Commissioners and the Board of Directors.

The Code of Conduct contains guidelines on business ethics and work ethics as a reference for the Company's Citizens including Board of Commissioners, Directors and Employees of PP Presisi in conducting business activities and dealing with stakeholders.

The Code of Conduct contains guidelines on business ethics and work ethics as a reference for the Company's Citizens including Board of Commissioners, Directors and Employees of PP Presisi in conducting business activities and dealing with stakeholders.

POKOK-POKOK KODE ETIK PERSEROAN
PRINCIPLES OF THE COMPANY'S CODE OF CONDUCT

ETIKA USAHA

1. Hubungan Dengan Pegawai
2. Hubungan dengan Pelanggan
3. Hubungan dengan Penyedia Barang dan Jasa (Pemasok)
4. Hubungan dengan Kompetitor (Pesaing)
5. Hubungan dengan Masyarakat sekitar
6. Etika Perusahaan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup
7. Hubungan dengan Media
8. Hubungan dengan komunitas/ organisasi seprofesi
9. Integritas Dan Akurasi Pembukuan

BUSINESS ETHICS

1. Relationship With Employees
2. Customer Relationship
3. Relationship with Manufacturers and Suppliers (Suppliers)
4. Relationship with Competitors (Competitors)
5. Relationship with Community around
6. Company Ethics related to Occupational Safety and Health and Environment
7. Media Relations
8. Relationships with community / professional organizations
9. Integrity And Accuracy of Bookkeeping

ETIKA KERJA

1. Ketaatan terhadap Hukum
2. Benturan kepentingan
3. Pemberian dan Penerimaan Hadiah / Gratifikasi/ Suap dan lainnya
4. Persamaan dan Penghormatan Pada HAM
5. Kontribusi dan Aktifitas Politik
6. Pengawasan dan Penggunaan Aset
7. Kerahasiaan Data dan Informasi

WORK ETHICS

1. Obedience to the Law
2. Conflict of interest
3. Gifts and Gratuities / Gifts and Bribes and more
4. Equality and Respect for Human Rights
5. Political Contributions and Activities
6. Supervision and Use of Assets
7. Data and Information Confidentiality

PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Komitmen *Code of Conduct*
2. Sosialisasi dan Internalisasi
3. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran
4. Sanksi atas Pelanggaran

IMPLEMENTATION GUIDE

1. Code of Conduct Commitment
2. Socialization and Internalization
3. Infringement Reporting Mechanism
4. Sanctions for Violations

SOSIALISASI KODE ETIK DAN UPAYA PENEGAKANNYA

Upaya Perseroan untuk memberikan pemahaman dan mengingatkan kembali kepada karyawan tentang tata nilai dan Kode Etik dilakukan dengan sosialisasi melalui penyampaian materi yang berkaitan dengan pemahaman tata kelola perusahaan yang baik, standar etika yang berlaku dan pemberian sanksi bagi yang melanggarnya, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan praktik tata kelola Perusahaan yang baik (GCG) yang selanjutnya akan dilakukan evaluasi secara berkala untuk dilakukan penyempurnaan bila diperlukan.

Seluruh Pejabat Perseroan bertanggungjawab untuk memastikan *Code of Conduct* telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan.

SOCIALIZATION OF ETHICS CODE AND ENFORCEMENT EFFORT

The Company's efforts to provide insight and remind to employees about the values and Code of Conduct are carried out through the dissemination of materials relating to a sound understanding of good corporate governance, applicable ethical standards and sanctions for those who violate them, as well as other related matters with good corporate governance practices (GCG) which will be periodically evaluated for improvement if necessary.

All Company Officials are responsible for ensuring the Code of Conduct has been socialized to all employees.

Adapun tujuan dari sosialisasi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemahaman isi dari *Code of Conduct*
2. Mewujudkan kesadaran dari seluruh Pegawai untuk melaksanakan *Code of Conduct* ini.
3. Memberikan pengertian bahwa *Code of Conduct* merupakan bagian tak terpisahkan dari praktik bisnis dan penilaian kinerja seluruh Pegawai Perusahaan.

The objectives of the socialization are as follows:

1. Creating an understanding of the contents of the Code of Conduct
2. Realizing awareness of all Employees to implement this Code of Conduct.
3. Providing the understanding that Code of Conduct is an integral part of business practices and performance appraisal of all Company Employees.

PEMBERLAKUAN DAN PENERAPAN KODE ETIK BAGI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN SELURUH KARYAWAN

Perseroan menyatakan bahwa Kode Etik berlaku bagi seluruh jajaran Perseroan dan setiap individu yang ada di Perseroan meliputi Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Perseroan. Seluruh Insan Perseroan diharuskan mendatangani Surat Pernyataan Kepatuhan.

IMPLEMENTATION AND ENFORCEMENT OF ETHICS CODES FOR BOARD OF COMMISSIONERS, DIRECTORS AND WHOLE EMPLOYEES

The Company declares that the Code of Ethics applies to all levels of the Company and every individual in the Company includes the Board of Commissioners, the Board of Directors and all of the Company's employees. All Company Persons are required to sign a Compliance Statement.

MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN

Pelaporan atas pelanggaran *Code of Conduct* dilakukan sebagai berikut :

1. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan maka pegawai wajib melaporkan pelanggaran tersebut melalui Kotak Pengaduan/*Whistle Blowing System*, kepada Atasan Langsung dan Kepala SPI.
2. Pengungkapan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/ fitnah.
3. Pelapor wajib mencantumkan identitasnya dengan jelas pada laporan yang dibuat, disertai dengan bukti pendukung yang relevan. Penerima laporan wajib merahasiakan identitas pelapor.
4. Perusahaan wajib menindaklanjuti setiap laporan yang diterima sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.

REPORTING MECHANISMS FOR VIOLATIONS

Reporting of Code of Conduct violations as follows:

1. In the event of any violation or deviation, the employee shall report the violation through the Complaint Box / Whistle Blowing System, to the Direct Superior and the SPI Head.
2. Disclosure must be done in good faith and is not a personal complaint nor is it based on bad will / defamation.
3. The Reporting Party shall clearly identify its identity on the report made, accompanied by relevant supporting evidence. The recipient of the report shall keep the identity of the complainant confidential.
4. The Company shall follow up any reports received pursuant to applicable procedures and mechanisms.

SANKSI ATAS PELANGGARAN

1. Setiap warga PP Presisi yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap *Code of Conduct* ini akan diberikan sanksi sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
2. Sanksi bagi Pegawai yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Atasan Langsung atau Direksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya setelah mendapat laporan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan.
3. Direksi memberikan arahan atas tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/ atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh Atasan Langsung di lingkungan masing-masing.
4. Sanksi bagi Direksi yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Dewan Komisaris.
5. Sanksi bagi Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham.
6. Bila Mitra Kerja atau *Stakeholders* yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib

SANCTIONS FOR VIOLATIONS

1. Every citizen of PP Presisi proven to violate the Code of Conduct will be given sanctions in accordance with applicable policies and legislation that is:
2. Sanctions for employees who commit offenses are decided by the Direct Principal or the Board of Directors in accordance with the level of the offense after receiving a report of the offense committed by the Employee concerned.
3. The Board of Directors provides guidance on coaching actions, disciplinary and / or other measures and prevention that must be implemented by the Direct Leader in their respective neighborhoods.
4. Sanctions for the Board of Directors committing the violation are decided by the Board of Commissioners.
5. Sanctions for the Board of Commissioners committing violations are decided by the Shareholders.
6. If the Partners or Stakeholders who commits an offense, will be subject to the provisions as contained in the contract. If related to a crime can be forwarded to the authorities

BUDAYA DAN NILAI PERUSAHAAN
CORPORATE CULTURE AND VALUE

Budaya Perseroan ini, dihayati dan dijalankan dengan sukarela dan sukacita oleh Perseroan. Budaya Perusahaan ini meliputi 3 (tiga) hal: Budaya kerja keras, Budaya disiplin, Budaya bersyukur.

Sebagai penyempurnaan dari Budaya Perusahaan tersebut di atas, manajemen telah merumuskan nilai–nilai Perusahaan yang disingkat dengan sebutan "PPBID" terdiri dari:

The Company voluntarily and graciously lives by and carries out its Corporate Culture. The Corporate Culture include 3 (three) elements: Culture of Hard Work, Culture of Discipline, Culture of Gratefulness.

To further perfect the Corporate Cultures referred to above, the management has defined the Corporate Values under the acronym "PPBID", consisting of:

P.peduli | cares

BERORIENTASI PADA KEPUASAN PELANGGAN

- **Responsif**
- **Proaktif**

CUSTOMER SATISFACTION ORIENTED

- *Responsive*
- *Proactive*

P.profesional | professional

KOMPETEN DAN BERTANGGUNG JAWAB

- **Kerja keras, kerja cerdas dan inovatif**
- **Bertanggung jawab terhadap tugas**
- **Fleksibel dan gesit**
- **Keinginan belajar dan melakukan perbaikan terus menerus**
- **Berwawasan global**

COMPETENT AND RESPONSIBLE

- *Hard work, smart and innovative work*
- *Responsible for the task*
- *Flexible and nimble*
- *The desire to learn and make continuous improvement*
- *Global perspective*

B.bersyukur | be grateful

BERJIWA BESAR

- **Sopan santun, toleransi, saling hormat**
- **Beriman dan bertaqwa**
- **Berpikir positif**
- **Kerja ikhlas**

HAVING GREAT SOUL

- *Courtesy, tolerance, mutual respect*
- *Faithful and devout*
- *Positive thinking*
- *Work sincerely*

I.integritas | integrity

KESELARASAN PIKIRAN, PERKATAAN, PERBUATAN

- **Mengutamakan kepentingan perusahaan**
- **Jujur dan transparan**
- **Amanah menjalankan tugas**

ALIGNMENT OF MIND, WORDS, ACTS

- *Give priority to the company's interests*
- *Honest and transparent*
- *Amanah perform task*

D.disiplin | discipline

TAAT DAN TERTIB

- **Taat pada hukum, peraturan dan etika**
- **Tepat janji, tepat waktu**

OBEDIENT AND ORDERLY

- *Obey the laws, regulations and ethics*
- *Exactly promise, on time*

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN
STOCK OWNERSHIP PROGRAM BY EMPLOYEE AND / OR MANAGEMENT

Hingga saat ini Perseroan belum melakukan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen.

Up to now the Company has not yet had employees' and or management's share ownership program.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
VIOLATION REPORTING SYSTEM/ WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

Saat ini Perseroan belum memiliki Sistem Pelaporan Pelanggaran (*whistleblowing system*) yang baku, namun Perseroan memandang pentingnya masukan dari semua pihak yang bertujuan pengawasan, mencegah terjadinya penyimpangan dan menindaklanjuti adanya pengaduan yang bersifat membangun tentang berbagai jenis pelanggaran yang dapat merugikan Perseroan.

Currently, the Company does not have a standard whistleblowing system, but the Company considers the importance of input from all parties with the objective of monitoring, preventing irregularities and following up on constructive complaints about various types of violations that could harm the Company.

CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

1. Setiap Pemangku Kepentingan dapat melaporkan kepada Perseroan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan, penyimpangan atau pelanggaran terkait etika bisnis dan hukum yang berlaku, peraturan perusahaan, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran lainnya yang dapat merugikan Perseroan maupun pemangku kepentingan.
2. Perseroan berharap penyampaian laporan tidak berupa informasi yang berdasarkan rumor dan dengan itikad yang tidak baik.

HOW TO SUBMIT THE REPORT OF VIOLATIONS

1. Each Stakeholder may report to the Company in case of any misuse, abuse or violation of the business ethics and applicable law, company regulations, misuse of authority and other violations that may harm the Company or its stakeholders.
2. The Company hopes that the submission of reports is not information based on rumors and in bad faith.

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Perseroan akan memberikan perlindungan bagi pelapor dengan menjaga kerahasiaan identitas pelapor/*whistle blower* dan dijamin oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

PROTECTION FOR REPORTERS

The Company will provide protection to the complainant by maintaining the confidentiality of the reporting identity / whistle blower and guaranteed by the Board of Directors and Board of Commissioners.

PENANGANAN PENGADUAN

1. Perseroan menerima semua pelaporan atau pengaduan yang disampaikan secara tertulis dengan nama, alamat dan telepon pengirim yang dapat dihubungi.
2. Direksi selanjutnya meriviu setiap laporan pelanggaran yang diterima untuk memastikan kebenaran dan segera ditindalanjuti untuk meniminalisir dampak kerugian yang ditimbulkan dengan tetap melindungi identitas pelapor.

THE HANDLING OF COMPLAINTS

1. The Company receives all reporting or complaints submitted in writing with the name, address and telephone of the sender who can be contacted.
2. The Board of Directors further issues any reports of infringements received to ensure truthfulness and are immediately urged to minimize the impact of losses incurred while maintaining the identity of the reporting party.

ALAMAT PENGADUAN

Laporan pengaduan dapat disampaikan secara tertulis dengan amplop bertuliskan "Rahasia/ *Confidential*" kepada :

PT PP Presisi Tbk
Plaza PP, Wisma Robinson lantai 3
Jl. TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo
Jakarta 13760
Up. Presiden Direktur

WBS ADDRESS

A complaint report may be submitted in writing with an envelope bearing the words "Secret / Confidential" to:

PT PP Presisi Tbk
Plaza PP, Wisma Robinson 3rd floor
Jl. TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo
Jakarta 13760
Up. President Director

HASIL DARI PENANGANAN PENGADUAN

Hasil dan penelusuran ada tidaknya pelanggaran dari laporan yang diterima, akan menjadi pertimbangan dan keputusan Perseroan untuk proses selanjutnya yang dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh Perseroan dengan mempertimbangkan independensi, akan menjadi dasar Perseroan untuk proses tindak lanjut selanjutnya.

Selama tahun 2017, Perseroan tidak menerima pengaduan.

RESULT FROM COMPLAINTS HANDLING

The results and investigation of whether or not a violation of the report received will be taken into consideration and the Company's decision to further process conducted by a party appointed by the Company taking into account its independence shall become the basis of the Company for further follow-up process.

During 2017, the Company did not receive complaints.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
DATA AND INFORMATION ACCESS

Salah satu bentuk implementasi prinsip-prinsip TARIF adalah menyediakan informasi operasional & keuangan yang *accountable, reliable, transparent* dan tepat waktu serta mudah diakses oleh seluruh Pemangku Kepentingan. Karenanya Perseroan menyediakan serta meng-*update website* secara regular. Selain informasi operasional & keuangan, *website* Perseroan juga menyediakan informasi terkini tentang Perseroan. Diharapkan melalui *website* ini, Perusahaan dapat memberikan informasi yang layak dan baik kepada seluruh Pemangku Kepentingan. *Website* Perseroan adalah www.pp-presisi.co.id.

Selain melalui *website*, Perseroan juga menyediakan saluran komunikasi melalui email sebagai berikut :

corsec@pp-presisi.co.id

investor.relations@pp-presisi.co.id

One form of implementation of the principles of TARIF is to provide operational & financial information that is accountable, reliable, transparent and timely and easily accessible to all Stakeholders. Therefore the Company provides and updates the website regularly. In addition to operational & financial information, the Company's website also provides up-to-date information about the Company. It is expected that through this website, the Company can provide all parties with proper and proper information. The Company Website is www.pp-presisi.co.id.

In addition to the website, the Company also provides communication channels via email as follows:

corsec@pp-presisi.co.id

investor.relations@pp-presisi.co.id

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
ASSESSMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

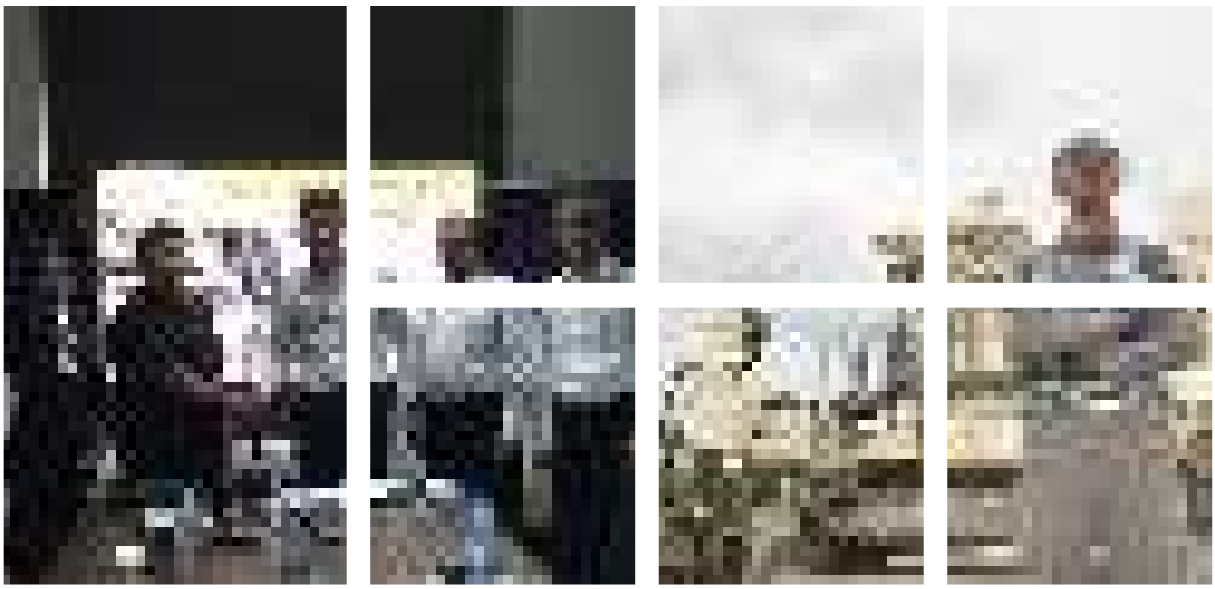

Walaupun Perseroan sedang dalam taraf pengembangan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), Perseroan menyadari pentingnya penilaian penerapannya untuk mengetahui tingkat kecukupan penerapan dan tingkat kepatuhan terhadap GCG. Selama 2017, penilaian penerapan GCG dilakukan secara *self assessment*. Hasil *self assessment* tersebut menjadi masukan untuk dapat ditindaklanjuti bagi pengembangan dan implementasi GCG di masa mendatang. Untuk pengembangan GCG mendatang, Perseroan berkomitmen untuk melakukan penilaian penerapan GCG yang pelaksanaannya dilakukan oleh Asesor Independen untuk meningkatkan independensi & integritas penilaian.

Although the Company is in the midst of developing Good Corporate Governance (GCG), the Company realizes the importance of appraisal of its application to determine the level of adequacy of implementation and compliance with GCG. During 2017, the assessment of GCG implementation is conducted by self assessment. The result of the self assessment becomes an input to be followed up for the development and implementation of GCG in the future. For the upcoming GCG development, the Company is committed to carrying out an assessment of GCG implementation which is carried out by an Independent Assessor to enhance the independence and integrity of the assessment.

Chapter-6

BAB-6

Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporte Social Responsibility Policy

Corporte Social Responsibility Programs

Chapter-6

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Perseroan memandang bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) merupakan salah satu nilai utama dan bagian tak terpisahkan dari budaya perusahaan. Perseroan meyakini bahwa pertumbuhan sudah seha rusnya tidak terbatas hanya pada keuntungan perusahaan semata.

The Company considers that Corporate Social Responsibility (CSR) is one of the main values and inseparable parts of corporate culture. The Company believes that growth is not necessarily limited to profit oriented only .

KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY

Perseroan memiliki program CSR jangka panjang, yaitu menjadikan CSR sebagai bagian dari Value Creation Strategy yang akan meningkatkan Stakeholders Value. Hal didasarkan pada pemikiran bahwa program CSR harus dilaksanakan secara berkesinambungan serta harus memberikan manfaat jangka panjang tidak saja kepada pihak yang mendapatkan manfaat secara langsung, tetapi juga kepada seluruh Pemangku Kepentingan. Dari program jangka panjang tersebut, Perseroan merumuskan program tahunan yang memiliki fokus tersendiri tetapi masih merupakan satu kesatuan dari tahun ke tahun yang akan mendukung program jangka panjang .

Program CSR tahun 2017 berfokus kepada program CSR yang mampu menanggulangi dinamika sosial masyarakat yang berada di sekitar lokasi Perseroan maupun Entitas Anak beroperasi melalui peningkatan partisipasi aktif masyarakat di dalam kegiatan usaha Perseroan maupun Entitas Anak dan Program Kemitraan serta program Bina Lingkungan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi lingkungan hidup atau lingkungan tempat tinggal masyarakat sekitar.

The Company has a long-term CSR program, which makes CSR as part of the Value Creation Strategy that will increase Stakeholders Value. It is based on the idea that CSR programs should be implemented on an ongoing basis and must provide long-term benefits not only to those who benefit directly, but also to all stakeholders. From the long-term program, the Company formulates an annual program that has its own focus but is still a single entity from year to year that will support long-term programs.

CSR program in 2017 focuses on CSR programs that are able to cope with the social dynamics of the communities surrounding the Company and Subsidiaries' operations through increasing the active participation of the community in the business of the Company and Subsidiaries and Partnership Program and Community Development program to improve and improve environmental conditions life or neighborhood of the surrounding community.

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAMS

CSR bukan lagi menjadi kewajiban bagi Perseroan, tetapi telah menjadi bagian yang hakiki bagi kehidupan sehari-hari Perseroan

CSR is no longer an obligation for the Company, but has become an essential part of the daily life of the Company

1 *Program Bina Lingkungan*
Community Development Program

Program Bina Lingkungan memiliki latar belakang untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekitar lokasi operasional dan lokasi proyek Perseroan serta lingkungan tempat tinggal masyarakat setempat. Tujuan program ini adalah untuk mencegah kerusakan lingkungan alam tempat operasional Perseroan, serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal masyarakat setempat di dalam kerangka pembangunan manusia seutuhnya.

Program yang telah dilaksanakan adalah dengan mengimplementasikan Sistem Pengelolaan Limbah Terpadu yang dikenal sebagai sistem "Upaya Kelola Lingkungan & Upaya Pemantauan Lingkungan" (UKL dan UPL). Usaha untuk menjaga kualitas lingkungan hidup telah dapat memenuhi standar internasional yaitu dengan diperolehnya Sertifikat ISO 14001:2007 – Environmental Management System. Kepatuhan terhadap ISO 14001:2007 – Environmental Management System dipantau oleh departemen Safety, Health & Environment (SHE)

The Community Development Program has the background to improve the quality of the environment around the operational location and location of the Company's project as well as the local communities' neighborhoods. The objective of the program is to prevent damage to the natural environment in which the Company operates, as well as to improve the quality of the local communities' neighborhood within the framework of complete human development.

The program has been implemented by implementing an Integrated Waste Management System known as the "Environmental Management & Environmental Monitoring Effort" system (UKL and UPL). Efforts to maintain the quality of the environment have been able to meet international standards by obtaining ISO 14001: 2007 Certificate - Environmental Management System. Compliance with ISO 14001: 2007 - Environmental Management System is monitored by Safety, Health & Environment (SHE)

2 *Program Peningkatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)*
Health and Safety Improvement Program (HSE)

Karyawan merupakan aset berharga bagi kelangsungan operasi Perseroan menginspirasi latar belakang Program Peningkatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bahwa K3 memegang peranan penting dalam menjamin proses produksi yang berkelanjutan. Hal tersebut mendapat perhatian penuh Perseroan dengan diraihnya OHSAS 18001:2015 - Occupational Health and Safety Management Systems.

Program - program yang dilaksanakan di dalam Program Peningkatan K3 meliputi :

Employees are a valuable asset for the continuity of operations The Company inspired the background of the Health and Safety Enhancement Program (K3) that K3 plays an important role in ensuring a sustainable production process. It receives the Company's full attention with OHSAS 18001: 2015 - Occupational Health and Safety Management Systems.

Programs implemented within the OSH Enhancement Program include:

Program - program yang dilaksanakan di dalam Program Peningkatan K3 meliputi :
HSE Enhancement Program include:

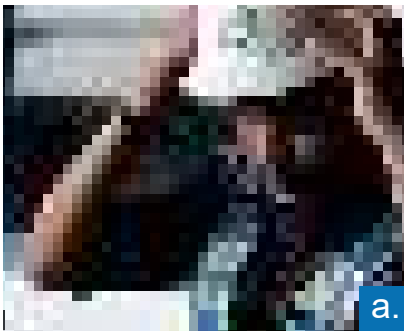

Pelaksanaan Sistem Tanggap Darurat. Perseroan menyediakan sarana dan prasarana K3 seperti fasilitas pemadam kebakaran serta Alat Pelindung Diri (APD) dan melakukan perawatan rutin dan melakukan tes kehandalan untuk menjamin bahwa semua sarana dan prasarana K3 tersebut dapat digunakan bilamana dibutuhkan.

Implementation of Emergency Response System. The Company provides HSE facilities and infrastructure such as fire extinguishers and Personal Protective Equipment (APD) and performs routine maintenance and reliability tests to ensure that all HSE facilities and infrastructure can be used where needed.

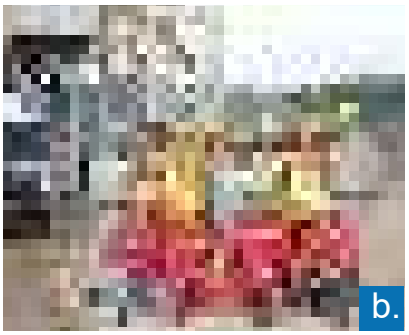

Penerapan K3 scorecard untuk mengukur kinerja pelaksanaan K3, yang selalu dibahas di dalam Rapat Bulanan Managemen

The implementation of HSE scorecard to measure the performance of HSE implementation, which is always discussed in Monthly Management

Melakukan sosialisasi dan training K3 kepada seluruh lapisan karyawan termasuk Direksi agar budaya sadar K3 melembaga.

HSE socialization and training to all level of employees including the Board of Directors in order to improve HSE awareness.

3 Program Kemitraan dan Pengembangan Sosial Budaya
Program of Partnership and Socio-Cultural Development

Latar belakang Program Kemitraan adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat setempat yang bermukim di sekitar area oparasional dan/atau lokasi proyek Perseroan, dalam rangka untuk menumbuhkembangkan rasa ikut memiliki Perseroan oleh masyarakat sekitar melalui partisipasi di dalam proses pengembangan usaha serta operasi bisnis Perseroan. Dengan meningkatnya rasa ikut memiliki terhadap Perseroan oleh masyarakat setempat, diharapkan dapat mencegah terjadinya dinamika sosial masyarakat setempat dalam konteks negatif. Masyarakat setempat akan senantiasa mendukung Perseroan serta menjaga aset Perseroan.

The Background of the Partnership Program is to increase the participation of local communities living around the oparational areas and / or project sites of the Company, in order to foster a sense of belonging to the Company by the local community through participation in the business development process and the Company's business operations. With the increased sense of belonging to the Company by the local community, it is expected to prevent the social dynamics of local communities in a negative context. The local community will always support the Company and maintain the assets of the Company.

Program - program yang dilaksanakan di dalam Program Kemitraan meliputi :
Partnership Program include:

- Melibatkan masyarakat setempat melalui koperasi ataupun pengusaha kecil setempat untuk menjadi sub-kontraktor lokal, untuk kegiatan-kegiatan yang dapat dikerjakan oleh mereka.
  Engage local communities through cooperatives or local small entrepreneurs to become local sub-contractors, for activities that can be done by them.
- Memberikan pelatihan manajemen moderen kepada pengusaha kecil setempat yang memiliki potensi untuk berkembang.
  Provide modern management training to local small entrepreneurs who have the potential to grow.
- Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat setempat untuk menjadi karyawan dan pekerja pada proyek-proyek Perseroan.
  Provide the widest opportunity to local communities to become employees and workers on the Company's projects.

Latar belakang Program Pengembangan Sosial Budaya adalah untuk membentuk manusia seutuhnya meliputi intelektual, moral dan budi pekerti.
The background of the Socio-Cultural Development Program is to improve intellectual, moral and character.

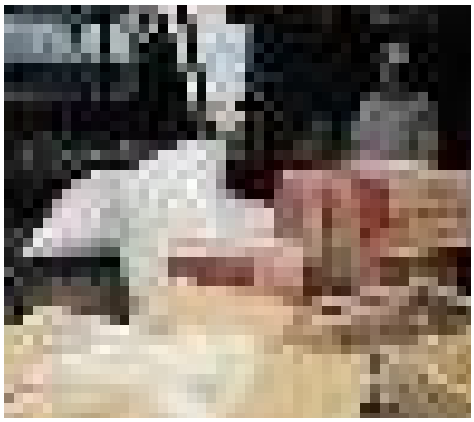

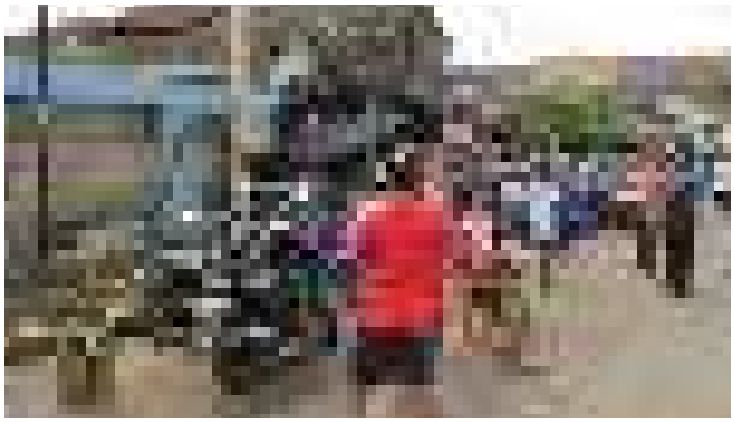

Bantuan air bersih dan sembako kepada masyarakat korban banjir Rt 002/RW 002 Kel. Ciketing Kec. Bantar Gebang, Bekasi
Water and basic food aid to flood victims Rt 002 / RW 002 Kel. Ciketing Kec. Bantar Gebang, Bekasi

Pemberian santunan kepada anak yatim di lingkungan perusahaan
Assitance aid to orphans who live around the company location

Bantuan kepada yayasan yatim piatu Bayt Al-Hanan di komplek Limus Pratama
Assistance to Bayt Al-Hanan orphanage at Limus Pratama complex

Pemberian hewan kurban pada masjid Baitul Rachman, Narogong
Qurban Aid at the mosque Baiturrahman, Narogong

Bantuan sembako pada korban banjir di lingkungan workshop perusahaan
Aid for flood victims who live around the company workshop location

4 Program Peningkatan Keamanan Produk dan Jasa
The Security Of Products And Services Improvement Program

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas produk dan jasa, di antaranya adalah tingkat pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di atas, di samping penerapan system manajemen mutu itu sendiri. Telah menjadi komitmen Perseroan bahwa Keamanan Produk dan Jasa yang dihasilkan merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar. Sebagai landasan pelaksanaan komitmen tersebut, Perseroan telah meraih ISO 9001:2015-Management Quality. Selain itu, Perseroan juga memiliki Quick Response Unit (Call Center) sebagai sarana bagi konsumen atau karyawan proyek untuk menyampaikan informasi tentang keluhan terhadap alat berat yang digunakan di dalam proyek.

It can not be denied that many factors can affect the quality of products and services, among them is the level of implementation of corporate social responsibility above, in addition to the implementation of the quality management system itself. It has become the Company's commitment that the Security of Products and Services produced is a non-negotiable requirement. As the cornerstone of this commitment, the Company has achieved ISO 9001: 2015- Quality Management. In addition, the Company also has a Quick Response Unit (Call Center) as a tool for consumers or project employees to submit information about complaints against heavy equipment used in the project.

Chapter-7

BAB-7

Laporan Keuangan Konsolidasian

Consolidated Financial Report

Chapter-7

LAPORAN KEUANGAN
CONSOLIDATED FINANCIAL REPORT

PT. PP PRESISI Tbk
Ged. PP Plaza, Jl. TB. Simatupang No. 57
Pasar Rebo – Jakarta Timur.
Workshop :
Jl. Raya Narogong Km. 15 Pangkalan 6
Ciketing - Bekasi Timur, 17153
Telepon : (021) 824-83255/240, Fax : (021) 823 0353
Email : headoffice@pp-peralatan.com

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk (Dahulu/ *Formerly* PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI) DAN ENTITAS ANAK/*AND ITS SUBSIDIARY*

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI DAN INFORMASI TAMBAHAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AND SUPPLEMENTARY INFORMATION

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016

FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2017 AND 2016

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
AND INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

No.024.03.01/LAI-PPRE/HGK.HO-2018
Tanggal 9 Februari 2018/ *Dated February 9, 2018*

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

	Halaman/ *Page*	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		*DIRECTORS' STATEMENT LETTER*
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	1	*INDEPENDENT AUDITORS' REPORT*
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016		*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS* *For the years ended December 31, 2017 and 2016*
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	4	*Consolidated Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	6	*Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	7	*Consolidated Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	8	*Consolidated Statements of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	9	*Notes to Consolidated Financial Statements*
INFORMASI TAMBAHAN		***SUPPLEMENTARYINFORMATION***
Daftar I : Informasi Laporan Posisi Keuangan Entitas Induk		*Schedule I : Information on Staetements of Financial Position of Parent Entity*
Daftar II : Informasi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Induk		*Schedule II : Information on Statements of Profit or Loss and Other Comprehesive Income of Parent Entity*
Daftar III : Information Laporan Perubahan Ekuitas Entitas Induk		*Schedule III : Information on Statements of Changes in Equity of Parent Entity*
Daftar IV : Informasi Laporan Arus Kas Entitas Induk		*Schedule IV : Information on Statements of Cash Flows of Parent Entity*

HGK

HGK

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI)
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2017, 2016 AND 2015
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2017	31 Desember/ *December 31,* 2016 *)	31 Desember/ *December 31,* 2015 *)	
ASET					***ASSETS***
ASET LANCAR					***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	6	1.132.459.133.995	210.955.959.903	9.935.359.670	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha, bersih					*Trade receivable, net*
Pihak ketiga	7	473.621.120.412	18.672.947.184	21.172.323.568	*Third parties*
Pihak berelasi	7	128.592.118.421	82.147.743.025	38.764.954.771	*Related parties*
Piutang retensi					*Retention receivables*
Pihak ketiga	8	9.482.718.641	6.018.696.009	3.884.423.508	*Third parties*
Pihak berelasi	8	13.361.796.928	4.750.557.675	1.315.538.076	*Related parties*
Tagihan bruto pemberi kerja					*Gross Receivable from project owners:*
Pihak ketiga	9	45.363.244.176	4.578.628.011	16.260.227.368	*Third parties*
Pihak berelasi	9	464.995.584.127	90.361.902.132	3.169.777.960	*Related parties*
Piutang Lain-lain - pihak berelasi	10	57.171.692.739	60.366.794	-	*Other Receivables - Related parties*
Persediaan	11	58.514.079.891	2.802.845.610	3.530.206.609	*Inventories*
Uang muka	12	94.857.048.094	3.395.495.060	265.033.260	*Advances*
Pajak dibayar dimuka	13a	157.154.600.278	40.154.651.567	12.821.223.405	*Prepaid taxes*
Biaya dibayar dimuka	14	25.556.247.428	3.086.128.606	6.229.877.328	*Prepaid expenses*
Jumlah Aset Lancar		**2.661.129.385.130**	**466.985.921.576**	**117.348.945.523**	***Total Current Assets***
ASET TIDAK LANCAR					***NON CURRENT ASSETS***
Aset tetap, bersih	15	2.206.321.174.798	599.403.531.618	261.196.827.337	*Fixed assets, net*
Goodwill	29	246.863.514.371	-	-	*Goodwill*
Aset tidak berwujud, bersih	29	11.273.230.535	-	-	*Intangible assets, net*
Jumlah Aset Tidak Lancar		**2.464.457.919.704**	**599.403.531.618**	**261.196.827.337**	***Total Non Current Assets***
JUMLAH ASET		**5.125.587.304.834**	**1.066.389.453.194**	**378.545.772.860**	***TOTAL ASSETS***

*) Disajikan kembali (lihat Catatan No.5)

**) As restated (see Note 5)*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of the consolidated financial statements

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI)
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2017, 2016 AND 2015
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2017	31 Desember/ *December 31,* 2016 *)	31 Desember/ *December 31,* 2015 *)	
LIABILITAS JANGKA PENDEK					***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha					*Trade Payables*
Pihak ketiga	16	950.327.825.857	168.043.682.873	33.349.886.004	*Third parties*
Uang muka pemberi kerja					*Advances from Project Owners*
Pihak ketiga	18	83.147.253.205	1.430.372.743	4.979.975.753	*Third parties*
Pihak berelasi	18	34.434.880.452	45.789.216.572	-	*Related parties*
Utang lain - lain	17				*Other short term Liabilities*
Pihak ketiga		10.014.069.374	600.199.721	1.083.786.834	*Third parties*
Pihak berelasi		6.043.378.223	5.589.861.593	2.630.120.730	*Related parties*
Utang pajak	13b	19.250.513.384	589.721.092	2.951.600.116	*Taxes Payable*
Utang bank Jangka Pendek	20	200.000.000.000	200.000.000.000	-	*Bank loans*
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun					*Current maturity of long-term liabilities*
Utang bank	20	55.000.000.000	127.566.715.966	55.506.470.639	*Bank loans*
Sewa pembiayaan	19	50.007.083.747	9.245.086.950	14.492.096.002	*Finance lease liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**1.408.225.004.242**	**558.854.857.510**	**114.993.936.078**	***Total Current Liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG					***NON-CURRENT LIABILITIES***
Jaminan proyek		-	8.986.760.605	6.438.502.237	*Project guarantee*
Liabilitas imbalan kerja	21	7.324.002.515	1.513.533.602	1.201.589.736	*Employee benefits obligation*
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun					*Long-term liabilities - net of current maturity*
Utang bank	20	995.964.245.624	249.792.439.324	135.423.889.725	*Bank loans*
Sewa pembiayaan	19	273.926.842.700	35.296.229.637	25.831.545.956	*Finance lease liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**1.277.215.090.839**	**295.588.963.168**	**168.895.527.654**	***Total Non-current Liabilities***
JUMLAH LIABILITAS		**2.685.440.095.081**	**854.443.820.678**	**283.889.463.732**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS					***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp.100 per saham pada 31 Desember 2017 dan Rp.1.000.000 per saham pada 31 Desember 2016 dan 2015					*Capital stock - Rp,100 par value per share at December 31,2017 and Rp,1,000,000 per share at December 31, 2016 and 2015*
Modal dasar - 24.000.000.000 saham pada 31 Desember 2017 dan 440.000 saham pada 31 Desember 2016 dan 2015					*Authorized - 24,000,000,000 shares at December 31, 2017 and 440,000,000 shares at December 31, 2016 and 2015*
Modal ditempatkan dan disetor - 10.224.271.000 saham pada 31 Desember 2017, 110.760 saham pada 31 Desember 2016 dan 32.000. saham pada 31 Desember 2015.	22	1.022.427.100.000	110.760.000.000	32.000.000.000	*Subscribed and paid-up - 10.224.271.000 shares at December 31, 2017, 110,760 shares at December 31, 2016 and 32,000 shares at December 31, 2015*
Tambahan modal disetor	23	749.560.161.538	-	-	*Additional paid-in capital*
Penghasilan komprehensif lain		(513.260.059)	(12.956.269)	(5.940.334)	*Other comprehensive income*
Selisih lebih nilai revaluasi aset tetap		3.117.386.346	-	-	*Surplus of fixed assets revaluation*
Sado Laba:					*Retained Earnings:*
Ditentukan penggunaannya		-	-	-	*Appropriated*
Belum ditentukan Penggunaannya		218.400.998.025	101.198.588.785	62.662.249.462	*Unappropriated*
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		1.992.992.385.850	211.945.632.516	94.656.309.128	*Equity attributable to owners of the Company*
Kepentingan nonpengendali		447.154.823.903	-	-	*Non-controlling interests*
Jumlah Ekuitas		**2.440.147.209.753**	**211.945.632.516**	**94.656.309.128**	***Total Equity***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**5.125.587.304.834**	**1.066.389.453.194**	**378.545.772.860**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

*) Disajikan kembali (lihat Catatan No.5)

**) As restated (see Note 5)*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of the consolidated financial statements

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI)
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2017 AND 2016
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	2017	2016 *)	
PENDAPATAN BERSIH	24	1.816.312.696.974	371.235.818.481	***NET REVENUE***
HARGA POKOK PENDAPATAN	25	(1.370.417.993.512)	(276.013.895.645)	***COST OF REVENUE***
LABA KOTOR		**445.894.703.462**	**95.221.922.836**	***GROSS PROFIT***
Beban Usaha	26	**(57.029.632.669)**	**(13.938.909.707)**	***Operating Expenses***
Pendapatan (Beban) Keuangan	27	**(87.614.645.245)**	**(26.716.677.576)**	***Finance Income (Expenses)***
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	28	**89.586.515**	**(1.632.145.266)**	***Other Income (Expenses)***
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**301.340.012.063**	**52.934.190.287**	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				***INCOME TAX (EXPENSE)***
Pajak kini	13.c	(12.888.722.269)	(5.662.534.211)	*Current Tax*
Pajak final	13.c	(43.900.823.398)	(5.908.833.273)	*Final Tax*
Jumlah (Beban) Pajak Penghasilan		**(56.789.545.667)**	**(11.571.367.484)**	***Total Income Tax (Expenses)***
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		**244.550.466.396**	**41.362.822.803**	***NET PROFIT CURRENT YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba (Rugi)				***Item that will not be reclassified subsuquently to profit or loss***
Selisih lebih nilai revaluasi aset tetap		3.117.386.346	-	*Surplus of fixed assets revaluation*
Pengukuran kembali atas program imbalan kerja		(500.303.790)	(7.015.935)	*Remeasurement of employee benefit obligation*
		2.617.082.556	(7.015.935)	
Pos yang Akan Direklasifikasi Ke Laba (Rugi)		-	-	***Item that will be reclassified subsequently to profit or loss***
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**247.167.548.952**	**41.355.806.868**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
Jumlah Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:				***Total Profit For The Year Attibutable to***
Pemilik entitas induk		188.300.612.373	41.362.822.803	*Owners of the Company*
Kepentingan non-pengendali		56.249.854.023	-	*Non-controlling interest*
		244.550.466.396	**41.362.822.803**	
Jumlah Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada:				***Total Comprehensive income For The Year Attibutable to***
Pemilik entitas induk		190.605.335.908	41.355.806.868	*Owners of the Company*
Kepentingan non-pengendali		56.562.213.044	-	*Non-controlling interest*
		247.167.548.952	**41.355.806.868**	
LABA PER SAHAM DASAR		**41**	**116**	***BASIC EARNINGS PER SHARE***

*) Disajikan kembali (lihat Catatan No.5)

**) As restated (see Note 5)*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of the consolidated financial statements

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI)
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2017 AND 2016
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ *Attributable to owners of the parent entity*									
					Saldo laba / *Retained earning*					
	Modal ditempatkan dan disetor / *Issued and paid-up*	Tambahan Modal disetor / *Paid-in Capital*	Penghasilan Komprehensif Lain / *Other Comprehensive Income*	Selisih lebih nilai revaluasi aset tetap / Surplus of fixed assets *revaluation*	Ditentukan pengunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*	Jumlah/*Total*	Kepentingan nonpengendali/ *Non-controlling interest*	Jumlah Ekuitas / *Total Equity*	
Saldo per 1 Januari 2015	**32.000.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37.308.059.791**	**69.308.059.791**	**-**	**69.308.059.791**	***Balance as of January 1, 2015***
Dividen tahun 2014	-		-	-	-	(2.620.911.082)	(2.620.911.082)	-	(2.620.911.082)	*Dividend 2014*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	(5.940.334)	-	-	-	(5.940.334)	-	(5.940.334)	*Remeasurement of employee benefit liability*
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	27.975.100.753	27.975.100.753	-	27.975.100.753	*Profit for the year*
Saldo per 31 Desember 2015	**32.000.000.000**	**-**	**(5.940.334)**	**-**	**-**	**62.662.249.462**	**94.656.309.128**	**-**	**94.656.309.128**	***Balance as of December 31, 2015***
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	41.362.822.803	41.362.822.803	-	41.362.822.803	*Profit for the year*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	(7.015.935)	-	-	-	(7.015.935)	-	(7.015.935)	*Remeasurement of employee benefit liability*
Dividen tahun 2015	-	-	-	-	-	(2.826.483.480)	(2.826.483.480)	-	(2.826.483.480)	*Dividend 2015*
Setoran modal dengan penyerahan aset tetap	78.760.000.000	-	-	-	-	-	78.760.000.000	-	78.760.000.000	*Conversion paid-in capital from fixed assets*
Saldo per 31 Desember 2016	**110.760.000.000**	**-**	**(12.956.269)**	**-**	**-**	**101.198.588.785**	**211.945.632.516**	**-**	**211.945.632.516**	***Balance as of December 31, 2016***
Dividen tahun 2016	-	-	-	-	-	(4.098.203.133)	(4.098.203.133)	-	(4.098.203.133)	*Dividend 2016*
Konversi modal disetor dari laba ditahan	67.000.000.000	-	-	-	-	(67.000.000.000)	-	-	-	*Conversion paid-in capital from retained earning*
Tambahan modal disetor	609.545.000.000	-	-	-	-	-	609.545.000.000	-	609.545.000.000	*Additional paid-in capital*
Penawaran umum perdana	-						-	-	-	*Initial public offering*
penerbitan saham	235.122.100.000	749.560.161.538	-	-	-	-	984.682.261.538	-	984.682.261.538	*Issuance of shares*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-		(500.303.790)	-	-	-	(500.303.790)	(3.294.903)	(503.598.693)	*Remeasurement of employee benefit liability*
Bagian kepentingan non pengendali atas akuisisi entitas anak	-	-	-	-	-	-	-	390.592.610.859	390.592.610.859	*Non controlling interest from aquisition of subsidiary*
Selisih lebih nilai revaluasi aset tetap	-	-	-	3.117.386.346	-	-	3.117.386.346	315.653.924	3.433.040.270	*Surplus of fixed assets revaluation*
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	188.300.612.373	188.300.612.373	56.249.854.023	244.550.466.396	*Profit for the year*
Saldo 31 Desember 2017	**1.022.427.100.000**	**749.560.161.538**	**(513.260.059)**	**3.117.386.346**	**-**	**218.400.998.025**	**1.992.992.385.850**	**447.154.823.903**	**2.440.147.209.753**	***Balance as of December 31, 2017***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of the consolidated financial statements

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI)
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2017 AND 2016
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2017	2016	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***Cash Flows From Operating Activities***
Penerimaan kas dari pelanggan	1.333.575.594.687	325.103.385.026	*Cash Receipts from Customers*
Pembayaran kas kepada :			*Payments to :*
Pemasok dan subkontraktor	(651.920.688.497)	(118.595.399.922)	*Supplier and Subcontractors*
Karyawan dan Pihak Ketiga Lainnya	(95.815.252.355)	(54.189.857.527)	*Employees and third party*
Kas yang dihasilkan Operasi	**585.839.653.835**	**152.318.127.577**	*Cash generated from operation*
Pembayaran pajak-pajak	(147.336.996.485)	(14.850.472.798)	*Taxes payment*
Penerimaan pajak (restitusi)	-	8.663.349.366	*Taxes received (restitution)*
Pembayaran bunga	(87.367.363.630)	(35.892.997.146)	*Payments of interest expense*
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**351.135.293.720**	**110.238.006.999**	***Net Cash provided by Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Akuisisi entitas anak	(798.000.000.000)	-	*Acquisition of a subsidiary*
Perolehan aset tetap	(872.072.498.477)	(274.737.143.906)	*Acquisition of fixed assets*
Penerimaan penjualan aset tetap	7.795.673.215	2.710.000.000	*Proceed from sale of fixed asset*
Penerimaan piutang lain lain	5.142.533.766	-	*Receipts from other receivable*
Kas Bersih (digunakan untuk) Aktivitas Investasi	**(1.657.134.291.496)**	**(272.027.143.906)**	***Net Cash provided by Investing Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***Cash Flows From Financing Activities***
Penerimaan setoran modal	600.000.000.000	-	*Paid-up capital*
Setoran modal dari penawaran umum perdana saham	235.122.100.000	-	*Addition of share capital from initial public offering*
Agio saham dari penawaran umum perdana saham	775.902.930.000	-	*Paid-in capital in excess of par value from initial public offering*
Beban emisi saham	(26.342.768.461)	-	*Share issuance costs*
Penerimaan utang bank	800.440.816.114	488.493.560.000	*Receipt of bank loans*
Pembayaran utang bank	(203.509.037.351)	(85.677.409.174)	*Payment of bank loans*
Penerimaan utang non bank	98.830.023.511	-	*Receipt of non bank loans*
Pembayaran utang non bank	(68.988.885.602)	(40.006.413.686)	*Payment of non bank loans*
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	**2.211.455.178.211**	**362.809.737.140**	***Net Cash provided by (used in) Financing Activities***
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	905.456.180.435	201.020.600.233	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS YANG DIPEROLEH DARI AKUISISI ENTITAS ANAK	16.046.993.657	-	***CASH AND CASH EQUIVALENT FROM ACQUISITION OF A SUBSIDIARY***
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	210.955.959.903	9.935.359.670	***CASH AND CASH EQUIVALENTS - BEGINNING***
SALDO KAS DAN SETARA KAS - AKHIR	**1.132.459.133.995**	**210.955.959.903**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS ENDING***

*) Disajikan kembali (lihat Catatan No.5)

**) As restated (see Note 5)*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of the consolidated financial statements

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk (dahulu PT Pembangunan Perumahan Peralatan Konstruksi) semula bernama PT Prima Jasa Aldodua merupakan Perusahaan yang didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris No. 2 dari Notaris Muhammad Chotib, S.H., tanggal 6 Mei 2004. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. C-16498 HT.01.01.TH.2004 tanggal 1 Juli 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 24 April 2012 tambahan No.20149.

Modal dasar Rp.1.000.000.000 terdiri dari 1.000 lembar saham dengan nominal saham Rp.1.000.000 dan modal disetor Rp.500.000.000 dengan komposisi saham sebagai berikut:

i. Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan (YKPP) sebesar 495 lembar saham.
ii. Ir. Betty Ariana sebesar 5 lembar saham

Anggaran Dasar Perusahaan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya yaitu:

1. PT Prima Jasa Aldodua pada tanggal 27 Agustus 2004 telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan hasil keputusan No. 02/BA/RUPSLB/2004 tentang perubahan anggaran dasar dalam hal perubahan modal dasar yang semula Rp.1.000.000.000 terdiri dari 1.000 lembar saham dengan nominal Rp.1.000.000 menjadi Rp.40.000.000.000 terdiri dari 40.000 lembar saham dengan nominal Rp.1.000.000 dan modal disetor menjadi Rp.10.000.000.000. Risalah RUPSLB tersebut telah dituangkan dalam Akta Notaris No. 6 dari Notaris Muhammad Chotib, S.H., tanggal 22 Desember 2004. Akta tersebut telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. C-14724 HT.01.04.TH 2005 tanggal 31 Mei 2005.

2. PT Prima Jasa Aldodua pada tanggal 22 Juni 2007 mengadakan RUPS Luar Biasa dengan hasil keputusan No. 02/BA/RUPSLB/2007 tentang Penyesuaian Undang-undang Perusahaan

1. GENERAL

a. The Company's Establishment

PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk (formerly PT Pembangunan Perumahan Peralatan Konstruksi) was initially named PT Prima Jasa Aldodua a Company was established in Jakarta based on notarial deed No. 2 of Notary Muhammad Chotib, S.H., dated May 6, 2004. These amendments have been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with No. C-16498 HT.01.01.TH.2004 dated July 1, 2004 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 33 dated April 24, 2012, supplement No. 20149.

The authorized capital to Rp.1,000,000,000 consisting of 1,000 shares with a nominal shareRp.1,000,000 and paid up capital of Rp.500,000,000 with the following composition of shares:

i. Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan (YKPP) amounting to 495 shares.
ii. Ir Betty Ariana amounting to 5 shares.

TheArticles of Association of the Company have been amended for several times as follows:

1. On August 27, 2004 PT Prima Jasa Aldodua has held a General Meeting of Shareholders with the results of the decision No. 02/BA/EGM/2004 on changes in the constitution in terms of changes in the authorized capital from Rp.1,000,000,000, consisting of 1,000 shares with a nominal Rp.1,000,000 to Rp.40,000,000,000, consisting of 40,000 shares with a nominal Rp.1,000,000, and Paid-in Capital to Rp.10,000,000,000. The Extraordinary General Meeting was published in the Notary No. 6 of Notary named Muhammad Chotib, S.H., at December 22, 2004. These amendments have been Approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. C-14724 HT.01.04.TH 2005 dated May 31, 2005.

2. On June 22 2007, PT Prima Jasa Aldodua held a Meeting of the Extraordinary General Shareholders by the decision No. 02/BA/EGM/2007 about the adjustment of the Companies Act 40 of 2007 and

No. 40 tahun 2007 dan meningkatkan modal disetor yang semula Rp.10.000.000.000 menjadi Rp.32.000.000.000. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut telah dituangkan dalam Akta Notaris No. 3 dari Notaris Muhammad Chotib, S.H., tanggal 25 Februari 2008. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-24457.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 12 Mei 2008.

3. PT Prima Jasa Aldodua pada tanggal 27 Desember 2010 merubah maksud dan tujuan Kegiatan Usaha Anggaran Dasar Perusahaanya itu menyelenggarakan usaha dalam bidang Biro Jasa Konstruksi. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut telah dituangkan dalam Akta Notaris No. 4 tanggal 27 Desember 2010. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-18028.A.H.01.02 Tahun 2011 tanggal 11 April 2011.

4. PT Prima Jasa Aldodua pada tanggal 6 Juni 2014 mengadakan RUPS Luar Biasa No. 02/BA/RUPSLB/2014 tentang Akuisisi Saham oleh PT PP (Persero) Tbk. Maka komposisi saham berubah menjadi:

   a. PT PP (Persero) Tbk sebanyak 99,98% atau 31.995 lembar saham;
   b. YKKPP sebanyak 0,02% atau 5 lembar saham;

   Serta merubah nama Perusahaan dari PT Prima Jasa Aldodua (PT PJA) menjadi PT Pembangunan Perumahan Alat Konstruksi (PT PP Alkon).

5. Risalah RUPSLB tersebut telah dituangkan dalam Akta Notaris No. 16 dari notaris Wiwiek Widhi Astuti, S.H., tanggal 6 Juni 2014. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-05280.40.20.2014 tanggal 4 Juli 2014.

Berdasarkan akta pernyataan Keputusan Diluar Rapat Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 54 tanggal 19 September 2014 oleh Notaris Ilmiawan Dekrit S., S.H., M.H. PT PP Alat Konstruksi (PP Alkon) berubah namanya menjadi PT PP Peralatan Konstruksi (PT PP Alat).

increasing in paid up capital from Rp.10,000,000,000, up to Rp.32,000,000,000. Meeting of the Extraordinary General Shareholders has been outlined in the Notary No. 3 from Muhammand Chotib, S.H., dated February 25, 2008. These amendements have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-24457.AH.01.02 Tahun 2008 dated May 12, 2008.

3. On December 27, 2010 PT Prima Jasa Aldodua changing the intent and purpose of the Articles of Association of Business Activities are organized effort in the field of Construction Services Bureau. Meeting of the Extraordinary General Shareholders has been outlined in the Notary No. 4 on December 27, 2010. These amendments have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-18028.AH01.02 Year 2011 dated April 11, 2011 .

4. On June 6, 2014 PT Prima Jasa Aldodua held an Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 02/BA/RUPSLB/2014 about the Acquisition of Shares by PT PP (Persero) Tbk. Then the composition of the shares changed to:

   a. PT PP (Persero) Tbk at amount of 99.98% or 31,995 shares;
   b. YKKPP at amount of 0.02% or 5 shares;

   And changed the Company name from PT Prima Jasa Aldodua (PT PJA) to PT Pembangunan Perumahan Alat Konstruksi (PT PP Alkon).

5. Meeting of the Extraordinary General Shareholder has been outlined in the Deed No. 16 of Notary Wiwiek Widhi Astuti, S.H., dated June 6, 2014. These amendments have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-05280.40.20.2014 dated July 4, 2014.

Based on the statement deed of Decision Outside General Meeting of Shareholders as a Substitution of an Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 54 dated September 19, 2014 by Notary Ilmiawan Dekrit S., S.H., M.H. PT PP Alat Konstruksi (PP Alkon) changed its name into PT PP Peralatan Konstruksi (PT PP Alat).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Pemegang Saham Luar Biasa No. 29 tanggal 14 Desember 2016 oleh Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., komposisi saham PT PP Alat berubah menjadi:

a. PT PP (Persero) Tbk sebanyak 99,98% atau 110.738 lembar saham;
b. YKKPP sebanyak 0,02% atau 22 lembar saham.

Berdasarkan akta No. 18 tanggal 5 Mei 2017 dari Notaris Andri Noverin Perdana, S.H., M.Kn., Notaris pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0011798.AH.01.02.TAHUN 2017 PT PP Peralatan Konstruksi (PT PP Alat) berubah namanya menjadi PT Pembangunan Perumahan Presisi (PT PP Presisi).

Anggaran Dasar telah diubah terakhirberdasarkan Keputusan Sirkular Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akta No. 11 tanggal 17 Juli 2017 dari Notaris Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H., yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0014790.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 19 Juli 2017. Para pemegang saham antara lain menyetujui Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham dan menyetujui peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.

Sesuai dengan anggaran dasar, kegiatan usaha utama Perusahaan adalah bergerak dalam bidang industri konstruksi, *Engineering Procurement&Construction (“EPC”),* pekerjaaan mekanikal-elektrikal, jasa transportasi/angkutan, jasa penyewaan, perdagangan, pertambangan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Perusahaan Terbatas.

Kantor pusat PT Pembangunan Perumahan Presisi (PP Presisi) beralamat di Jalan Letjend TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo - Jakarta Timur.

Entitas induk langsung dan terakhir Perusahaan adalah PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, yang didirikan dan berdomisili di Indonesia.

Based on the statement deed of Decision Outside General Meeting of Shareholders as a Substitution of an Extraordinary General Meeting No. 29 dated December 14, 2016 by Notary Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., the composition of PT PP Alat shares changed to:

a. PT PP (Persero) Tbk amount of 99,98% or 110,738 shares;
b. YKKPP of 0.02% or 22 shares.

Based on notarial deed. No. 18 dated May 5, 2017 of Notary Andri Noverin Perdana, S.H., M.Kn., a notary substitute of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., which has obtained approval from the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, in his the Decision Letter No. AHU-0011798.AH.01.02.TAHUN 2017 PT PP Peralatan Konstruksi (PT PP Alat) changed its name to PT Pembangunan Perumahan Presisi (PT PP Presisi).

The Articles of Association have been last amended based on Circular Shareholder Decision as set forth in the Deed. No. 11 dated July 17, 2017 of Notary Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H., which has obtained approval from the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, in accordance with Decision Letter No. AHU-0014790.AH.01.02.TAHUN 2017 dated July 19, 2017. The shareholders approved, among other things, the Company to conduct the initial public offering of shares and approved the increase of Authorized Capital, Issued Capital and Paid-in Capital.

Based on the articles of association, the Company's principal business activities are engaged in the construction industry, Engineering Procurement & Construction ("EPC"), mechanical-electrical works, transportation / logistic services, rental services, trading, mining, by applying Limited Liability Company principles.

The head office of PT Pembangunan Perumahan Presisi (PP Presisi) is located at Jalan Letjend TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo - East Jakarta.

The Company’s immediate and the ultimate parent company is PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, incorporated and domiciled in Indonesia.

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan

Saham Perusahaan ditawarkan perdana kepada masyarakat dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Nopember 2017. Penawaran perdana saham Perusahaan sejumlah 2.351.221.000 saham dengan nilai nominal Rp.100 per saham, disetujui untuk dicatatkan pada tanggal 16 Nopember 2017 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan suratnya No. S-442/D.04/2017.

Pada tanggal 31 Desember 2017, seluruh saham Perusahaan sejumlah 2.351.221.000 dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

b. The Company Share's Public Offering

The Company's shares of stock were initially offered to the public and listed on the Indonesia Stock Exchange on November 20, 2017. The Company's initial public offering of 2,351,221,000 shares with a par value of Rp.100 per share, was approved for listing on November 16, 2017 by the Financial Services Authority (OJK) in its letter No. S-442/D.04/2017.

As of December 31, 2017, all of the Company's 2,351,221,000 shares are listed on the Indonesia Stock Exchange.

c. DewanKomisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PP Peralatan Konstruksi No. 07 tanggal 7 Februari 2017 oleh Notaris Ilmiawan Dekrit S., S.H., M.H. yang pemberitahuan perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0063131 tanggal 13 Februari 2017. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PP Presisi per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

c. Board of Commissioners and Directors

Circular Shareholder in lieu of the Extraordinary General Shareholders Meeting of PT PP Peralatan Konstruksi No. 07 dated February 7, 2017 by Notary Ilmiawan Dekrit S., S.H., M.H. That this change notice has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0063131 dated February 13, 2017. The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PP Presisi as of December 31, 2017 are as follows:

31 Desember/ *December 31, 2017*

Dewan Komisaris				***Board of Commissioner***
Komisaris Utama	:	Ir. Muhammad Toha Fauzi	:	*President Commissioner*
Komisaris	:	Ir. Nawang Sri Retno Kartiko	:	*Commissioner*
Komisaris	:	Ir. Ketut Darmawan	:	*Commissioner*
Dewan Direksi				***Board of Director***
Direktur Utama	:	Ir. Iswanto Amperawan	:	*President Director*
Direktur Keuangan	:	Benny Pidakso, S.E	:	*Director of Finance*
Direktur Operasi	:	Ir. Hasanin Ade Putra	:	*Director of Operation*
Direktur Peralatan	:	Ir. Arief Subyandono	:	*Director of Equipment*

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PP Peralatan Konstruksi No. 52 tanggal 17 Oktober 2016 oleh Notaris Ilmiawan Dekrit S., S.H., M.H. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT PP Alat per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Based on statement deed of Circular Shareholder Decision as a Substitution of an Extraordinary General Shareholders Meeting of PT PP Peralatan Konstruksi No. 52 dated October 17, 2016 by Notary Ilmiawan Dekrit S., S.H., M.H. The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of PT PP Alat as of December 31, 2016 are as follows:

(Lanjutan/*Continued*)

31 Desember / *December 31, 2016*

Dewan Komisaris				***Board of Commissioner***
Komisaris Utama	:	Agus Purbianto, S.E., Ak., M.M	:	*President Commissioner*
Komisaris	:	Ir. Nawang Sri Retno Kartiko	:	*Commissioner*
Komisaris	:	Ir. Harry Nugroho	:	*Commissioner*
Dewan Direksi				***Board of Director***
Direktur Utama	:	Ir. Handoko Yudianto	:	*President Director*
Direktur Keuangan	:	Benny Pidakso, S.E	:	*Director of Finance*
Direktur Operasi	:	Ir. Hasanin Ade Putra	:	*Director of Operation*
Direktur Peralatan	:	Ir. Joko Heni Widodo	:	*Director of Equipment*

d. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

d. Human Resource

Human Resources for the year ended December 31, 2017 and 2016, follows (unaudited):

	31 Desember/ *December 31,* 2017	**31 Desember/ *December 31,* 2016**	
Pegawai Bulanan Tetap	22	13	*Fixed Monthly Employee*
Pegawai Bulanan Khusus	9	3	*Monthly Special Employee*
Pegawai Bulanan Khusus Lokal	14	12	*Local Special Monthly Employee*
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu	46	40	*Uncertain Time Working Agreement*
Perjanjian Waktu Tertentu	-	13	*Specific Time Agreement*
Pelatihan Manajemen	35	-	*Management Trainee*
	126	**81**	

Sumber Daya Manusia berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Human resource based on the level of education is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2017	**31 Desember/ *December 31,* 2016**	
Pasca Sarjana	4	2	*Post Graduate*
Sarjana	64	30	*Scholar*
Sarjana Muda	21	13	*Bachelor*
Non Akademi	37	36	*Non-Academic*
	126	**81**	

e. Entitas anak

Laporan keuangan konsolidasian meliputi akun-akun Perusahaan dan entitas anak yang signifikan sebagai berikut:

e. Subsidiary

The consolidated financial statements include the accounts of the Company and significant subsidiary, listed as follows:

Entitas anak/ *Subsidiary*	Kegiatan usaha/ *Activity*	Tempat kedudukan/ *Domicile*	Tahun memulai kegiatan komersil/ *Commencement of commercial operations*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Jumlah aset/ *Total assets*	Jumlah pendapatan/ *Total revenue*
PT Lancarjaya Mandiri Abadi	Jasa konstruksi/ *Construction services*	Jakarta	1997	51%	1.409.179.133.424	784.659.279.591

PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA)

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 7 tanggal 22 Juni 2017 dari Irfansah. S.H., M.K.n, Notaris di Karawang, Perusahaan telah mengakuisisi saham LMA sejumlah 331.500 lembar saham dari pihak ketiga, mewakili 51% kepemilikan saham dengan harga Rp.798.000.000.000.

PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA)

Based on Deed of Sale and Purchase of Shares No. 7 dated June 22, 2017, of Irfansah. S.H., M.Kn., a Notary in Karawang, the Company acquired 331,500 shares of stock of LMA from a third party, representing 51% ownership interest at a purchase price of Rp.798,000,000,000.

2. PERUBAHAN ATAS PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK")

Penerapan dari perubahan standar interpretasi akuntansi atas standar akuntansi berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2017 dan relevan bagi Perusahaan namun tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian periode berjalan:

- Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK 3 (revisi 2016): Laporan Keuangan Interim
- PSAK 24 (revisi 2016): Imbalan Kerja
- PSAK 58 (revisi 2016): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan
- PSAK 60 (revisi 2016): Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- ISAK 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 31 "Properti Investasi"
- ISAK 32: Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan

2. CHANGES TO THE STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("ISAK")

The adoption of the following revised accounting standards and interpretation of the accounting standards, which are effective from January 1, 2017 and relevant for Company, but did not result in substantial changes to the Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current period interim the consolidated financial statements:

- *Amendments to PSAK 1, Presentation of Financial Statements*
- *PSAK 3 (revised 2016), Interim Financial Statements*
- *PSAK 24 (revised 2016), Employee Benefits*
- *PSAK 58 (revised 2016), Non-current Assets Held for Sale and Discounted Operation*
- *PSAK 60 (revised 2016), Financial Instruments: Disclosure*
- *ISAK 31, Interpretation of PSAK 31: Investing Property*
- *ISAK 32, Definition and Hierarchy of Financial Accounting Standards*

Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan dan relevan bagi Perusahaan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018 adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 16: Aset Tetap
- Amandemen PSAK 2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan
- Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi

New standards, amendments and interpretations issued and relevant for company but not yet effective for the financial year beginning January 1, 2018 are as follows:

- *Amendment to PSAK 16, Fixed Asset*
- *Amendment to PSAK 2, Cash Flows Statement - Disclosure Initiative*
- *Amendment to PSAK 46, Taxaion - Recognition of deferred tax asset for unrealized losses*

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi PSAK dan ISAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK–IAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah biaya historis, kecuali properti dan instrumen keuangan tertentu yang diukur pada jumlah revaluasian atau nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the PSAK and ISAK issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant (DSAK–IAI), and regulations in the Capital Market including Regulations of Financial Services Authority/ Capital Market and Supervisory Board and Financial Institution (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 regarding guidelines for the presentation of financial statements, decree of Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 regarding presentation and disclosure of financial statements of the issuer or public company.

b. Basis of Preparation

The consolidated financial statements have been prepared on the historical cost basis except for certain properties and financial instruments that are measured at revalued amounts or fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

c. Dasar Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Grup (termasuk entitas terstruktur). Pengendalian tercapai jika Perusahaan memiliki kekuasaan atas *investee;* eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Perusahaan menilai kembali apakah entitas tersebut adalah investee jika fakta dan keadaan yang mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang disebutkan di atas.

Ketika Perusahaan memiliki hak suara kurang dari mayoritas di-investee, ia memiliki kekuasaan atas investee ketika hak suara investor cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak. Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Perusahaan cukup untuk memberikan Perusahaan kekuasaan, termasuk (i) ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik hak suara lain; (ii) hak suara potensial yang dimiliki oleh Perusahaan, pemegang suara lain atau pihak lain; (iii) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan (iv) setiap fakta dan keadaan tambahan apapun mengindikasikan bahwa Perusahaan memiliki, atau tidak memiliki, kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola suara pemilikan dalam RUPS sebelumnya.

Konsolidasi entitas anak dimulai ketika Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan akan dihentikan ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak. Secara khusus, pendapatan dan beban entitas anak diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain dari tanggal diperolehnya pengendalian Perusahaan sampai tanggal ketika Perusahaan berhenti mengendalikan entitas anak.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan untuk kepentingan nonpengendali. Perusahaan juga mengatribusikan total laba komprehensif entitas

c. Basis of Consolidated

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities (including structured entities) controlled by the Company and its subsidiaries. Control is achieved where the Company has the power over the investee; is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and has the ability to use its power to affect its returns.

The Company reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control listed above.

When the Company has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally. The Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the Company's voting rights in an investee are sufficient to give it power, including (i) the size of the Company's holding of voting rights relative to the size and dispersion of holding of the other vote holders; (ii) potential voting rights held by the Company, other vote holders or other parties; (iii) rights arising from other contractual arrangements; and (iv) any additional facts and circumstances that indicate that the Company has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous shareholders' meetings.

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Specifically, income and expense of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Company gains control until the date when the Company ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the noncontrolling interest. Total comprehensive income of subsidiaries is attributed to the owners of the

anak kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Company and the noncontrolling interest even if this results in the non-controlling interest having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with the accounting policies.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

When necessary, adjustment are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with the Group's accounting policies.

Seluruh aset dan liabilitas dalam intra Grup, ekuitas, pendapatan, biaya dan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam Grup dieliminasi secara penuh pada saat konsolidasi.

All intra Group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

Perubahan kepemilikan Grup pada entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian Grup atas entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jumlah tercatat dari kepemilikan Grup dan kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepentingan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan dengan pemilik entitas induk.

Changes in the Group ownership interest in existing subsidiaries that do not result in the Group losing control over the subsidiaries are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Group's interest and the non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interest are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the Company.

Ketika Grup kehilangan pengendalian pada entitas anak, keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi dan dihitung sebagai perbedaan antara (i) agregat nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa kepemilikan (retained interest) dan (ii) jumlah tercatat sebelumnya dari aset (termasuk goodwill), dan liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan nonpengendali. Seluruh jumlah yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas anak yang dicatat seolah-olah Grup telah melepaskan secara langsung aset atau liabilitas terkait entitas anak (yaitu direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer ke kategori lain dari ekuitas sebagaimana ditentukan / diizinkan oleh standar akuntansi yang berlaku). Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal untuk akuntansi berikutnya dalam PSAK 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran atau, ketika berlaku, biaya perolehan pada saat pengakuan awal dari investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

When the Group losses control of a subsidiary, a gain or loss is recognized in profit or loss and is calculated as the difference between (i) the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and (ii) the previous carrying amount of the assets (including goodwill), and liabilities of the subsidiary and any non-controlling interest. All amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that subsidiary are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities of the subsidiary (i.e. reclassified to profit or loss or transferred to another category of equity as specified/permitted by applicable accounting standards). The fair value of any investment retained in the former subsidiary at the date when control is lost is regarded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting under PSAK 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement or, when applicable, the cost on initial recognition of an investment in an associate or a joint venture.

(Lanjutan/*Continued*)

d. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Akuisisi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh Grup, liabilitas yang diakui oleh Grup kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya terkait akuisisi diakui di dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Pada tanggal akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih diakui pada nilai wajar kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Goodwill diukur sebagai selisih lebih dari nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada) atas jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi. Jika, setelah penilaian kembali, jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambilalih pada tanggal akuisisi melebihi jumlah imbalan yang dialihkan, jumlah dari setiap kepentingan non pengendali pada pihak diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi (jika ada), selisih lebih diakui segera dalam laba rugi sebagai pembelian dengan diskon.

Kepentingan non pengendali yang menyajikan bagian kepemilikan dan memberikan mereka hak atas bagian proposional dari aset neto entitas dalam hal terjadi likuidasi pada awalnya diukur baik pada nilai wajar ataupun pada bagian proporsional kepemilikan kepentingan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan dasar pengukuran dilakukan atas dasar transaksi. Kepentingan nonpengendali jenis lain diukur pada nilai wajar atau, jika berlaku, pada dasar pengukuran lain yang ditentukan oleh standar akuntansi lain.

Bila imbalan yang dialihkan oleh Grup dalam suatu kombinasi bisnis termasuk aset atau liabilitas yang berasal dari pengaturan imbalan kontinjen (*contingent consideration*

d. Business Combination Under Common Control

Acquisitions of businesses are accounted for using the acquisition method. The consideration transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the sum of the acquisition-date fair values of the assets transferred by the Group, liabilities incurred by the Group to the former owners of the acquiree, and the equity interests issued by the Group in exchange for control of the acquiree. Acquisition-related costs are recognized in profit or loss as incurred.
.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their fair value except for certain assets and liabilities that are measured in accordance with the relevant standards.

Goodwill is measured as the excess of the sum of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree, and the fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquire (if any) over the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the liabilities assumed. If, after the reassessment, the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and liabilities assumed exceeds the sum of the consideration transferred, the amount of any non controlling interests in the acquiree and the fair value of the acquirer's previously held interest in the acquiree (if any), the excess is recognized immediately in profit or loss as a bargain purchase option.

Non controlling interests that are present ownership interests and entitles their holders to a proportionate share of the entity's net assets in the event of liquidation may be initially measured either at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. The choice of measurement basis is made on a transaction-by-transaction basis. Other types of non-controlling interests are measured at fair value or, when applicable, on the basis specified in another accounting standard.

When the consideration transferred by the Group in a business combination includes assets or liabilities resulting from a contingent consideration arrangement, the contingent

arrangement), imbalan kontinjen tersebut diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan termasuk sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis.

consideration is measured at its acquisition-date fair value and included as part of the consideration transferred in a business combination.

Perubahan dalam nilai wajar atas imbalan kontinjen yang memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran disesuaikan secara retrospektif, dengan penyesuaian terkait terhadap goodwill. Penyesuaian periode pengukuran adalah penyesuaian yang berasal dari informasi tambahan yang diperoleh selama periode pengukuran (yang tidak melebihi satu tahun sejak tanggal akuisisi) tentang fakta-fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.

Changes in the fair value of the contingent consideration that qualify as measurement period adjustments are adjusted retrospectively, with corresponding adjustments against goodwill. Measurement period adjustments are adjustments that arise from additional information obtained during the measurement period (which cannot exceed one year from the acquisition date) about facts and circumstances that existed at the acquisition date.

Akuntansi berikutnya untuk perubahan nilai wajar dari imbalan kontinjensi yang tidak memenuhi syarat sebagai penyesuaian periode pengukuran tergantung pada bagaimana imbalan kontinjensi diklasifikasikan. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali pada setiap tanggal pelaporan dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas diukur kembali pada nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan, dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi.

The subsequent accounting for changes in the fair value of the contingent consideration that do not qualify as measurement period adjustments depends on how the contingent consideration is classified. Contingent consideration that is classified as equity is not remeasured at subsequent reporting dates and its subsequent settlement is accounted for within equity. Contingent consideration that is classified as an asset or liability is remeasured subsequent to reporting dates at fair value, with changes in fair value recognised in profit or loss.

Bila suatu kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepemilikan terdahulu Grup atas pihak terakuisisi diukur kembali ke nilai wajar pada tanggal akuisisi dan keuntungan atau kerugian dihasilkan, jika ada, diakui dalam laba rugi. Jumlah yang berasal dari kepemilikan sebelum tanggal akuisisi yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi dimana perlakuan tersebut akan sesuai jika kepemilikan tersebut dilepas/dijual.

When a business combination is achieved in stages, the Group's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and the resulting gain or loss, if any, is recognized in profit or loss. Amounts arising from interests in the acquiree prior to the acquisition date that have previously been recognized in other comprehensive income are reclassified to profit or loss where such treatment would be appropriate if that interests were disposed of.

Jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangannya. Selama periode pengukuran, pihak pengakuisisi menyesuaikan, aset atau liabilitas tambahan yang diakui, untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. Those provisional amounts are adjusted during the measurement period, or additional assets or liabilities are recognized, to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date that, if known, would have affected the amount recognized as of that date.

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan dimana aset dan liabilitas yang diperoleh dari

Business combination of entities under common control that qualifies as a business are accounted for under pooling of interest method

kombinasi bisnis dicatat oleh pengakuisisi pada jumlah tercatatnya.

Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat disajikan sebagai tambahan modal disetor dan tidak diakui ke laba rugi.

Metode penyatuan kepemilikan diterapkan seolah-olah entitas telah bergabung sejak periode dimana entitas yang bergabung berada dalam sepengendali.

where assets and liabilities acquired in the business combination are recorded by the acquirer at their book values.

The difference between the transfer price and the book value is presented as Additional Paid in Capital and is not recycled to profit or loss.

The pooling of interest method is applied as if the entities had been combined from the period when the merging entities were placed under common control

e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Konsolidasi (entitas pelapor):

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

   i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor;
   ii. memiliki pengaruh signifikan entitas pelapor ; atau
   iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain).

   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor

e. Transaction with Related parties

Related party is a person or entity that is related to the Consolidation (reporting entity):

a. A person or a close member have a related to a reporting entity if that person:

   i. Have joint control or control over the reporting entity;

   ii. Have significant influence over the reporting entity;
   iii. Is the key management personnel of the reporting entity or the parent of the reporting entity.

b. An entity is related to the reporting entity if it meets one of the following:

   i. The entity and the reporting entity are members of the same consolidation (it means each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).

   ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a consolidation member which the other entity is the member).

   iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
   iv. One entities is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.

   v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting

atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).

vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is an entity that sponsored the program, so the sponsoring entity are also related to the reporting entity.

vi. Controlled entity or jointly controlled by a person identified in (a).

vii. A person identified in (a) (i) has a significant influence over the entity or key management member of an entity (or parent of the entity).

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

f. Aset Keuangan

f. Financial Assets

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian atau penjualan asetkeuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

All financial assets are recognized and derecognized on trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the timeframe established by the market concerned, and are initially measured at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as at fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value.

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai berikut:

- Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi
- Investasi dimiliki hingga jatuh tempo
- Aset keuangan tersedia untuk dijual
- Pinjaman yang diberikan dan piutang

The Company's financial assets are classified as follows:

- *Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL)*
- *Held-to-maturity investments*
- *Available-for-sale (AFS) financial assets*
- *Loans and receivable*

Metode suku bunga efektif

Effective interest method

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau biaya selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yangsecara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya)

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating interest income or expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts or payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen utang selain dari aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai FVTPL.

Income is recognized on an effective interest basis for debt instruments other than those financial assets classified as FVTPL.

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Financial assets at FVTPL

Aset keuangan diklasifikasi dalam FVTPL, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL.

Financial assets are classified as at FVTPL when the financial asset is either held for trading or it is designated as at FVTPL.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola Konsolidasi secara bersama dan mempunyai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

A financial asset is classified as held for trading if:

- *it has been acquired principally for the purpose of selling in the near term; or*
- *on initial recognition it is part of a portfolio of identified financial instruments that the Group manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or*
- *it is a derivative that is not designated and effective as a hedging instrument.*

Aset keuangan selain aset keuangan yang diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal jika:

- penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya, dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan, dan informasi tentang Perusahaan disediakan secara internal kepada manajemen kunci entitas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi), misalnya direksi dan CEO

A financial asset other than a financial asset held for trading may be designated as at FVTPL upon initial recognition if:

- *such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would otherwise arise; or*
- *a consolidation of financial assets, financial liabilities or both is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the Company is provided internally on that basis to the entity's key management personnel (as defined in PSAK 7: Related Party Disclosures), for example the entity's board of directors and chief executive officer.*

Aset keuangan FVTPL disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi

Financial assets at FVTPL are stated at fair value, with any resultant gain or loss recognized in profit or loss. The net gain or loss recognized in profit or loss incorporates any dividend or

mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan.

interest earned on the financial asset.

Dimiliki hingga jatuh tempo

Held to Maturity

Perusahaan mempunyai wesel tagih yang dikeluarkan oleh entitas asosiasi yang diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo karena Perusahaan memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki wesel tersebut hingga jatuh tempo. Wesel tagih diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai, dengan pendapatan diakui berdasarkan metode hasil efektif.

The Company has a note receivable issued by an associate which is classified as held to maturity as the Company has a positive intent and ability to hold the notes to maturity. The notes are measured at amortized cost using the effective interest method less impairment, with revenue recognized on an effective yield basis.

Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS)

Available-for-sale (AFS)

AFS aset keuangan adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan baik sebagai AFS atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) dimiliki hingga jatuh tempo atau (c) aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi.

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are either designated as AFS or are not classified as (a) loans and receivables, (b) held-to-maturity investments or (c) financial assets at fair value through profit or loss.

Obligasi dan saham milik Perusahaan yang tercatat di bursa dan diperdagangkan pada pasar aktif diklasifikasikan sebagai AFS dan dinyatakan pada nilai wajar.

Listed shares and bonds held by the Company that are traded in an active market are classified as AFS and are stated at fair value.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan di ekuitas sebagai akumulasi revaluasi investasi AFS kecuali untuk kerugian penurunan nilai, bunga yang dihitung dengan metode suku bunga efektif dan laba rugi selisih kurs atas aset moneter yang diakui pada laba rugi. Jika investasi dilepas atau mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakumulasi pada revaluasi investasi AFS direklas ke laba rugi.

Gains and losses arising from changes in fair value are recognized in other comprehensive income and in equity as accumulated in AFS Investment Revaluation, with the exception of impairment losses, interest calculated using the effective interest method, and foreign exchange gains and losses on monetary assets, which are recognized in profit or loss. Where the investment is disposed of or is determined to be impaired, the cumulative gain or loss previously accumulated in AFS Investment Revaluation is reclassified to profit or loss.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak tercatat di bursa yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diklasifikasikan sebagai AFS, diukur pada biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Investments in unlisted equity instruments that are not quoted in an active market and whose fair value cannot be reliably measured are also classified as AFS, measured at cost less impairment.

Dividen atas instrumen ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat hak Perusahaan untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

Dividends on AFS equity instruments, if any, are recognized in profit or loss when the Company's right to receive the dividends are established.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Loans and receivables

Kas dan setara kas, kecuali kas, piutang pelanggan dan piutang lain-lain dengan

Cash and cash equivalents, except cash on hand, receivable from customers and other

pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

receivables that have fixed or determinable payments that are not quoted in an active market are classified as "loans and receivables". Loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method less impairment.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang lancar dimana pengakuan bunga tidak material.

Interest is recognized by applying the effective interest method, except for short-term receivables when the recognition of interest would be immaterial.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen utang selain dari instrumen keuangan FVTPL.

Income is recognized on an effective interest basis for debt instruments other than those financial instruments at FVTPL.

Penurunan nilai aset keuangan

Impairment of financial assets

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dinilai terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Financial assets, other than those at FVTPL, are assessed for indicators of impairment at each reporting date. Financial assets are impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the investment have been affected.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang dalam nilai wajar dari instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti obyektif terjadinya penurunan nilai.

For listed and unlisted equity investments classified as AFS, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

For all other financial assets, objective evidence of impairment could include:

- *significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or*
- *default or delinquency in interest or principal payments; or*
- *it becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organisation.*

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang tidak akan dievaluasi secara individual akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

For certain categories of financial asset, such as receivables, assets that are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Company's past experiences of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

For financial assets carried at amortized cost, the amount of the impairment is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan, jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat imbal hasil yang berlaku di pasar untuk aset keuangan yang serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

For financial asset carried at cost, the amount of the impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of the estimated future cash flows discounted at the current market rate of return for a similar financial asset. Such impairment loss will not be reversed in subsequent periods.

Jumlah tercatat aset keuangan dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang jumlah tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadanganpiutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

When an AFS financial asset is considered to be impaired, cumulative gains or losses previously recognized in equity are reclassified to profit or loss.

Kecuali instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya dibalik melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai, sepanjang nilainya tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

With the exception of AFS equity instruments, if, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed through profit or loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment is reversed does not exceed what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dibalik melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif lain.

In respect of AFS equity investments, impairment losses previously recognized in profit or loss are not reversed through profit or loss. Any increase in fair value subsequent to an impairment loss is recognized directly in other comprehensive income.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

Penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Perusahaan masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Perusahaan mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan, dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

Derecognition of financial assets

The Company derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralised borrowing for the proceeds received.

On derecognition of financial asset in its entirety, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss.

On derecognition of financial asset other than its entirety (e.g., when the Company retains an option to repurchase part of a transferred asset), the Company allocates the previous carrying amount of the financial asset between the part it continues to recognize under continuing involvement, and the part it no longer recognizes on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

(Lanjutan/*Continued*)

g. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajarnya. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, yang sesuai, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

Klasifikasi sebagai liabilitias atau ekuitas

Instrumen utang dan ekuitas yang diterbitkan oleh Konsolidasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Pembelian kembali instrumen ekuitas Perusahaan (saham treasuri) diakui dan dikurangkan secara langsung dari ekuitas. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan atau pembatalan instrumen ekuitas Perusahaan tersebut tidak diakui dalam laba rugi.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL atau pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (FVTPL).

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL pada saat liabilitas keuangan baik dimiliki untuk diperdagangkan atau ditetapkan pada FVTPL.

Liabilitas Keuangan dimiliki untuk diperdagangkan jika:

- diperoleh terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau

g. Financial Liabilities and Equity Instruments

Financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial liabilities (other than financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value of the financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

Classification as debt or equity

Debt and equity instruments issued by the Consolidation are classified as either financial liabilities or as equity in accordance with the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Company are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Repurchase of the Company's own equity instruments (treasury shares) is recognized and deducted directly in equity. No gain or loss is recognized in profit or loss on the purchase, sale, issue or cancellation of the Company's own equity instruments.

Financial liabilities

Financial liabilities are classified as either "at FVTPL" or "at amortized cost".

Financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities are classified as at FVTPL when the financial liability is either held for trading or it is designated as at FVTPL.

A financial liability is classified as held for trading if:

- *it has been acquired principally for the purpose of repurchasing in the near term; or*

- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual terkini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai

Liabilitas keuanganselain liabilitas keuangan yang diperdagangkan dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal jika:

- mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal kepada manajemen kunci entitas (sebagaimana didefenisikan dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi), misalnya direksi dan CEO

Liabilitas keuangan sebagai FVTPL yang diukur pada nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup setiap bunga yang dibayar dari liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan meliputi utang usaha dan lainnya, obligasi dan wesel bayar, bank dan pinjaman lainnya, pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya

- *on initial recognition it is part of an identified portfolio of financial instruments that the entity manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or*
- *it is a derivative that is not designated and effective as a hedging instrument.*

A financial liability other than a financial liability held for trading may be designated as at FVTPL upon initial recognition if:

- *such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would otherwise arise; or*
- *a consolidation of financial assets, financial liabilities or both is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the Consolidation is provided internally on that basis to the entity's key management personnel (as defined in PSAK 7: Related Party Disclosures) for example the entity's board of directors and chief executive officer.*

Financial liabilities at FVTPL are stated at fair value, with any resultant gain or loss recognized in profit or loss. The net gain or loss recognized in profit or loss incorporates any interest paid on the financial liability.

Financial liabilities at amortized cost

Financial liabilities, which include trade and other payables, bonds and notes payable, bank and other borrowings, are initially measured at fair value, net of transaction costs, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period to the net carrying

transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

amount on initial recognition.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Derecognition of financial liabilities

The Company derecognizes financial liabilities when, and only when, the Company's obligations are discharged, cancelled or they expire. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

h. Saling hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan poisisi keuangan jika Konsolidasi tersebut memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus dapat ada pada saat ini dari pada bersifat kontinjen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan.

h. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of financial position when the consolidation has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously. A right to set-off must be available today rather than being contingent on a future event and must be exercisable by any of the counterparties, both in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy.

i. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

i. Cash and Cash Equivalent

For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

j. Investasi pada entitas asosiasi dan Ventura Bersama

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Konsolidasi mempunyai pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Ventura bersama adalah pengaturan bersama di mana para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto dari pengaturan tersebut. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk

j. Investments in Associates and Joint Ventures

An associate is an entity over which the Consolidation has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies.

A joint venture is a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangements have rights to the net assets of the joint arrangement. Joint control is the contractually agreed sharing of control of an

berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan tentang aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require unanimous consent of the parties sharing control.

Penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi atau ventura bersama dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai dengan PSAK 58, Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Dengan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Konsolidasi atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi atau ventura bersama yang terjadi setelah perolehan. Ketika bagian Konsolidasi atas kerugian entitas asosiasi atau ventura bersama melebihi kepentingan Konsolidasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, yang secara substansi, membentuk bagian dari investasi bersih Konsolidasi dalam entitas asosiasi atau ventura bersama), Konsolidasi menghentikan pengakuan bagiannya atas kerugian selanjutnya. Kerugian selanjutnya diakui hanya apabila Konsolidasi mempunyai kewajiban bersifat hukum atau konstruktif atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama.

The results of operations and assets and liabilities of associates or joint ventures are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method of accounting, except when the investment is classified as held for sale, in which case, it is accounted for in accordance with PSAK 58, Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. Under the equity method, an investment in an associate or a joint venture is initially recognized in the consolidated statement of financial position at cost and adjusted thereafter to recognize the Consolidation's share of the profit or loss and other comprehensive income of the associate or joint venture. When the Consolidation's share of losses of an associate or a joint venture exceeds the Consolidation's interest in that associate or joint venture (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Consolidation's net investment in the associate or joint venture) the Consolidation discontinues recognizing it's share of further losses. Additional losses are recognized only to the extent that the Consolidation has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate or joint venture.

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas sejak tanggal saat investee menjadi entitas asosiasi atau ventura bersama. Setiap kelebihan biaya perolehan investasi atas bagian Konsolidasi atas nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi dan liabilitas dari entitas asosiasi atau ventura bersama yang diakui pada tanggal akuisisi, diakui sebagai goodwill. Goodwill termasuk dalam jumlah tercatat investasi, dan diuji penurunan nilainya sebagai bagian dari investasi. Setiap kelebihan kepemilikan Konsolidasi dari nilai wajar bersih aset yang teridentifikasi dan liabilitas atas biaya perolehan investasi, sesudah pengujian kembali segera diakui di dalam laba rugi pada periode diperolehnya investasinya.

An investment in an associate or a joint venture is accounted for using the equity method from the date on which the investee becomes an associate or a joint venture. Any excess of the cost of acquisition over the Consolidation's share of the net fair value of identifiable assets and liabilities of the associate or a joint venture recognized at the date of acquisition, is recognized as goodwill, which is included within the carrying amount of the investment. Any excess of the Consolidation's share of the net fair value of the identifiable assets and liabilities over the cost of acquisition, after reassessment, is recognized immediately in profit or loss in the period in which the investment is acquired.

Persyaratan dalam PSAK 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, diterapkan untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui setiap penurunan nilainya sehubungan dengan investasi pada entitas

The requirements of PSAK 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement, are applied to determine whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Consolidation's investment in an associate or

asosiasi atau ventura bersama. Jumlah tercatat investasi yang tersisa (termasuk goodwill) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48, Penurunan Nilai Aset, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai diakui langsung pada nilai tercatat investasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

joint venture. When necessary, the entire carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment in accordance with PSAK 48, Impairment of Assets, as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with its carrying amount. Any impairment loss recognized forms part of the carrying amount of the investment. Any reversal of that impairment loss is recognized in accordance with PSAK 48 to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.

Konsolidasi menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal saat investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama atau ketika investasi diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Ketika Konsolidasi mempertahankan kepemilikan dalam entitas yang sebelumnya merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama dan sisa investasi tersebut merupakan aset keuangan, Konsolidasi mengukur setiap sisa investasi pada nilai wajar pada tanggal tersebut dan nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal sesuai dengan PSAK 55. Group mengakui keuntungan dan kerugian atas pelepasan investasi asosiasi atau ventura bersama dalam laba rugi dengan turut memperhitungkan nilai wajar dari investasi yang tersisa. Selanjutnya, Konsolidasi mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut dengan menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika entitas asosiasi atau ventura bersama telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas yang terkait. Seluruh jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi atau ventura bersama direklasifikasi ke laba rugi (sebagai penyesuaian reklasifikasi) pada saat penghentian metode ekuitas.

The Consolidation discontinues the use of the equity method from the date when the investment ceases to be an associate or a joint venture, or when the investment is classified as held for sale. When the Consolidation retains an interest in the former associate or joint venture and the retained interest is a financial asset, the Consolidation measures any retained investment at fair value at that date and the fair value is regarded as its fair value on initial recognition in accordance with PSAK 55. The difference between the carrying amount of the associate or joint venture at the date the equity method was discontinued, and the fair value of any retained interest and any proceeds from disposing of a part of interest in the associate or joint venture is included in the determination of the gain or loss on disposal of the associate or joint venture. In addition, the Consolidation accounts for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that associate or joint venture on the same basis as would be required if that associate or joint venture had directly disposed of the related assets or liabilities. Therefore, if a gain or loss previously recognized in other comprehensive income by that associate or joint venture would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities, the Consolidation reclassifies the gain or loss from equity to profit or loss (as a reclassification adjustment) when the equity method is discontinued.

Konsolidasi melanjutkan penerapan metode ekuitas jika investasi pada entitas asosiasi menjadi investasi pada ventura bersama atau investasi pada ventura bersama menjadi investasi pada entitas asosiasi. Tidak terdapat pengukuran kembali ke nilai wajar pada saat perubahan kepentingan.

The Consolidation continues to use the equity method when an investment in an associate becomes an investment in a joint venture or an investment in a joint venture becomes an investmet in an associate. There is no remeasurement to fair value upon such changes in ownership interests.

Jika Konsolidasi mengurangi bagian kepemilikan pada entitas asosiasi atau ventura bersama tetapi Konsolidasi tetap menerapkan metode ekuitas, Konsolidasi mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan atau kerugian yang telah

When the consolidation reduces its ownership interest in an associate or a joint venture but the Consolidation continues to use the equity method, the Consolidation reclassifies to profit or loss the proportion of the gain or loss that had

diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan pengurangan bagian kepemilikan (jika keuntungan atau kerugian tersebut akan direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset atau liabilitas yang terkait).
Ketika Konsolidasi melakukan transaksi dengan entitas asosiasi atau ventura bersama, keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi dengan entitas asosiasi atau ventura bersama diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Konsolidasi hanya sepanjang kepemilikan dalam entitas asosiasi atau ventura bersama yang tidak terkait dengan Konsolidasi.

previously been recognized in other comprehensive income relating to that reduction in ownership interest (if that gain or loss would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities).

When a consolidation entity transacts with an associate or a joint venture, profits and losses resulting from the transactions with the associate or joint venture are recognized in the Consolidation's consolidated financial statements only to the extent of its interest in the associate or joint venture that are not related to the Consolidation.

k. Kepemilikan dalam Operasi Bersama

Operasi bersama adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas terkait dengan pengaturan tersebut. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian .

Ketika entitas Konsolidasi melakukan kegiatan berdasarkan operasi bersama, Konsolidasi sebagai operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama:

- Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama
- Liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang menjadi kewajiban bersama
- Pendapatan dari penjualan bagiannya atas ouput yang dihasilkan dari operasi bersama
- Bagiannya atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama; dan
- Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang ditanggung bersama

Konsolidasi mencatat aset, liabilitas, pendapatan dan beban terkait dengan kepemilikannya dalam operasi bersama sesuai dengan PSAK yang dapat diterapkan untuk aset, liabilitas, pendapatan dan beban tertentu.

Ketika entitas Konsolidasi melakukan transaksi dengan operasi bersama di mana entitas Konsolidasi tersebut bertindak sebagai salah satu operator bersamanya (seperti penjualan atau kontribusi aset), Konsolidasi melakukan transaksi dengan pihak lain dalam operasi bersama dan, dengan demikian, operator

k. Interest in Joint Operations

A joint operation is a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement. Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangements, which exists only when decisions about the relevant activities require unanimous consent of the parties sharing control.

When a consolidation entity undertakes its activities under joint operations, the Consolidation as a joint operator recognizes in relation to its interest in a joint operation:

- *Its assets, including its share of any assets held jointly.*
- *Its liabilities, including its share of any liabilities incurred jointly.*
- *Its revenue from the sale of its share of the output arising from the joint operation.*
- *Its share of the revenue from the sale of the output by the joint operation.*
- *Its expenses, including its share of any expenses incurred jointly.*

The Consolidation accounts for the assets, liabilities, revenues and expenses relating to its interest in a joint operation in accordance with the PSAKs applicable to the particular assets, liabilities, revenues and expenses.

When a consolidation entity transacts with a joint operation in which a consolidation entity is a joint operator (such as a sale or contribution of assets), the Consolidation is considered to be conducting the transaction with the other parties to the joint operation, and gains and losses resulting from the transactions are recognized in

bersama mengakui keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari transaksi diakui di dalam laporan keuangan konsolidasian Grup tersebut hanya sebatas kepentingan para pihak lain dalam operasi bersama.

the Consolidation's Group financial statements only to the extent of other parties' interests in the joint operation.

Ketika entitas Grup melakukan transaksi dengan operasi bersama di mana entiitas Konsolidasi tersebut bertindak sebagai salah satu operator bersamanya (seperti pembelian aset), Konsolidasi tidak mengakui bagian keuntungan dan kerugiannya sampai Konsolidasi menjual kembali aset tersebut kepada pihak ketiga.

When a Group entity transacts with a joint operation in which a consolidation entity is a joint operator (such as a purchase of assets), the Consolidation does not recognize its share of the gains and losses until it resells those assets to a third party.

I. Piutang dan Penurunan Nilai Wajar Piutang

Piutang disajikan sebesar nilai wajar sesuai PSAK No. 50 (Revisi 2006 dan 2010) dan PSAK 60 serta PSAK No. 55 (Revisi 2006 dan 2011). Indikasi penurunan nilai piutang ditetapkan pada setiap individu pemberi kerja secara terseleksi dengan mempertimbangkan resiko dari tidak tertagihnya piutang. Berdasarkan kebijakan akuntansi yang telah disetujui oleh manajemen yang berlaku sejak bulan Desember 2010 tentang Penurunan Nilai Wajar Piutang Usaha Perusahaan, pelaksanaan peraturan penurunan nilai wajar piutang usaha bila terjadi indikasi penurunan (*impairment*) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengelompokkan piutang usaha menjadi:
   a. Piutang Pemerintah, BUMN dan BUMD.
   b. Piutang Swasta Tbk, Non Tbk dan Asing.
2. Penurunan nilai piutang usaha dengan rincian:
   a. Kelompok piutang: Pemerintah, BUMN dan BUMD piutang usaha pada Pemerintah BUMN dan BUMD (tingkat resiko rendah karena pelaksanaan pekerjaan telah dianggarkan dalam APBN/APBD atau RKAP yang telah disetujui Pemegang Saham Kementerian BUMN). Dilakukan penurunan nilai jika piutang usaha sudah berumur di atas 1 (satu) tahun dengan penurunan nilai piutang usaha secara individu sebagai berikut:

I. Account Receivable and Impairment

Account receivable are presented at fair value in conformity with PSAK No. 50 (Revised 2006 and 2010) and PSAK 60 and PSAK No. 55 (Revised 2006 and 2011). The indication of the decrease in the amount of account receivables assigned to each individual employer selectively by considering the risk of uncollectible account receivables. Based on accounting policies that have been approved by management since December 2010 about Fair Value Reduction of Accounts Receivable Company, the implementation of regulation decline in fair value of account receivables in the event of impairment with the following conditions:

1. Receivables classification into:
   a. Receivables from the Government, BUMN and BUMD.
   b. Receivables from Public Companies, Non Public Companies and Foreign Entities.
2. Impairment of receivables with descriptions:
   a. Receivables Consolidation: Government, BUMN and BUMD Receivables from the Government, BUMN and BUMD (low risk level because the implementation of work has been budgeted in APBN/ APBD or RKAP as approved by Shareholder of the ministry of BUMN. Impaired if the account receivables are above one year with impairment of individual account receivables as follows:

(Lanjutan/*Continued*)

Umur Piutang/*Aging of Receivable*	Penurunan Nilai Wajar Piutang/*Impairment of Receivables*	Akumulasi Penurunan Nilai Wajar Piutang/*Accumulated Impairment of Receivables*
> 12 s/d 15 bulan/*month*	5%	5%
> 15 s/d 18 bulan/*month*	5%	10%
> 18 s/d 21 bulan/*month*	10%	20%
> 21 s/d 24 bulan/*month*	10%	30%
> 24 s/d 27 bulan/*month*	10%	40%
> 28 s/d 30 bulan/*month*	20%	60%
> 30 s/d 33 bulan/*month*	20%	80%
> 33 s/d 36 bulan/*month*	20%	100%

b. Kelompok Piutang: Piutang Swasta Tbk, Non Tbk dan Asing

Penurunan nilai dihitung masing-masing individu yaitu setelah jatuh tempo pada tahun pertama menggunakan *Discounted Cash Flow* (DFC) dengan tingkat bunga sesuai dengan Suku Bunga Bank Indonesia (SBI). Tahun ke-2 dan selanjutnya berdasarkan DCF dan penurunan sesuai butir (a) di atas, mana yang lebih besar.

c. Kelompok Piutang Perlakuan Khusus

Jika piutang usaha pada Pemerintah, BUMN dan BUMD telah berumur lebih dari 1 (satu) tahun dan setelah dilakukan analisa resiko terdapat keyakinan sulit untuk dilunasi atau tidak dapat tertagih maka dilakukan penurunan nilai secara individual dengan menggunakan DCF dan berdasarkan penurunan sesuai butir 1 (satu) di atas, mana yang lebih besar.

b. Account Receivables Classification: from National Public Companies, Non Public Companies and foreign entities

Impairment is calculated on the individual respectively, after maturity in the first year using Discounted Cash Flow (DFC) with interest rate in accordance with the Interest Rate of Bank Indonesia (SBI). Year 2 and then based on DCF and decrease according to (a) above, whichever is greater.

c. Account Receivables Classification Under Particular Treatment

When account receivables from the Government, BUMN and BUMD are outstanding for more than one year and after being risk analited there is a conviction that is hard to be paid or can't be collectible so it does the impairment individually with using DCF and based on impairment according to (1) above whichever is higher.

m. Piutang Retensi

Piutang retensi merupakan piutang Perusahaan kepada pemberi kerja yang akan dilunasi oleh pemberi kerja setelah pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak. Piutang retensi diukur pada nilai wajar piutang berdasarkan penerimaan arus kas yang diharapkan.

Piutang retensi dicatat pada saat penerimaan atas tagihan termin yang ditahan oleh pemberi kerja sejumlah persentase yang telah ditetapkan dalam kontrak sampai dengan masa pemeliharaan.

m. Retention Receivables

Retention receivables are receivables from customers collectable after the fulfillment of the conditions as set in the contract, or until defect shave been rectified. The retentions are measured at the fair value of the consideration receivable based on the expected timing of cash inflows.

Retentions receivables are recorded at the timeof receipt of the final invoice to customers untilthe fulfillment of the conditions specified in the contract.

(Lanjutan/*Continued*)

n. Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja

Piutang yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan untuk pemberi kerja, namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan dicatat sebagai tagihan bruto kepada pemberi kerja. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi, ditambah laba yang diakui, dikurangi jumlah kerugian yang diakui dan termin.

Tagihan bruto kepada pemberi kerja diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode presentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara progress fisik pekerjaan (laporan prestasi proyek) yang belum diterbitkan faktur karena perbedaan antara tanggal berita acara prestasi fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan.

n. Gross Invoice to Project Owners

Receivables that arise from construction contract work performed for the employer, but the work is still in execution recorded as gross invoice to the employer. Gross invoice are presented at the difference between the cost incurred, plus the recognized profits, less the amount of recognized losses and terminations.

Gross invoice to the employer are recognized as income in accordance with the method of completion percentage stated in the progress report of the physical job (project achievement report) that the invoice has not been issued due to the difference between the date of the physical accomplishment report and the billing submission at the date of the statement of financial position.

o. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi bersih merupakan estimasi harga jual dari persediaan dikurangi seluruh biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk penjualan.

Persediaan Bahan untuk Konstruksi

Bahan yang dibeli dicatat sebagai persediaan bahan untuk konstruksi, setiap pengambilan bahan (Bon Pemakaian Bahan) dicatat sebagai biaya bahan pada periode yang bersangkutan dengan menggunakan metode harga rata-rata bergerak. Setiap akhir periode dilakukan *stock opname* persediaan dan diadakan penyesuaian bila terjadi selisih antara nilai buku dan fisik.

o. Inventories

Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost is determined using the weighted average method. Net realizable value represents the estimated selling price for inventories less all estimated costs of completion and costs necessary to make the sale.

Material Inventory for Construction

Purchased materials are recorded as inventory of materials for construction, each withdrawal (Note of Material used) recorded as material cost in the period concerned using the moving average price method. Every end of the period stock inventory is performed and adjustments are made when there is a difference between book and physical value.

p. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka terdiri dari biaya pemasaran, biaya tidak langsung, biaya sewa, biaya provisi dan biaya asuransi. Untuk biaya pemasaran dan biaya tidak langsung akan dibebankan secara proporsional dengan pendapatan yang diakui selama periode pelaksanaan proyek. Biaya sewa, provisi dan premi asuransi diamortiasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

p. Prepaid Expense

Prepaid expenses consist of marketing costs, indirect costs, rental fees, provision fees and insurance fees. For marketing costs and indirect costs will be charged proportionally with income recognized during the project implementation period. Rental fees, provition and insurance premiums are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

q. Investasi Jangka Pendek

Deposito berjangka yang jatuh tempo 3 (tiga) bulan namun dijaminkan dan deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan disajikan sebagai investasi jangka pendek dan dinyatakan sebagai nilai perolehan.

Portofolio reksadana diklasifikasikan sebagai investasi jangka pendek-sekuritas yang diperjualbelikan berdasarkan PSAK No.50-Instrumen Keuangan, Penyajian, Laba atau Rugi yang sudah terealisasi atau belum terealisasi (sesuai perubahan NAB) diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

q. Short Term Investment

Time deposits with maturities of 3 (three) months but pledged and deposits with maturities of more than 3 (three) months are presented as short-term investments and stated as acquisition value.

Mutual fund portfolios are classified as short-term investments- securities traded under PSAK No. 50-Financial Instruments, Presentations, Realized or Unrealized Profit or Loss (in compliance with NAB) are recognized in the income statement of the current year.

r. Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

Kepemilikan Langsung

Aset tetap diakui sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah yang tidak disusutkan. Setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah. Efektif tanggal 1 Januari 2016 Perusahaan menyangkut kebijakan akuntansi aset tetap tanah dan bangunan yaitu metode cost menjadi metode revaluasi. Semua aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*), dengan tarif sebagai berikut:

r. Fixed Asset and Accumulated Depreciation

Direct Ownership

Fixed assets are recognized at cost less accumulated depreciation, except for land that is not depreciated. Any portion of fixed assets that have significant cost to the total cost of all assets should be depreciated separately. Any portion of a fixed asset that has a significant cost to the total cost of all assets should be depreciated separately. Effective January 1, 2016 The Company concerns the accounting policy of fixed assets land and buildings that is the cost method to be a revaluation method. All fixed assets are depreciated using the straight line method, at the following rates:

Bangunan	:	20 tahun/*years*	:	*Building*
Alat ringan	:	3 tahun/*years*	:	*Light weight equipment*
Scaffolding	:	5 tahun/*years*	:	*Scaffolding*
Keet & standard	:	3 tahun/*years*	:	*Keet & Standard*
Peralatan Kantor	:	3 tahun/*years*	:	*Office equipment*
Kendaraan	:	5 tahun/*years*	:	*Vehicle*
Bekisting	:	8 tahun/*years*	:	*Bekisting*
Peralatan Berat	:	8 tahun/*years*	:	*Heavy equipment*
PCH *Formwork*		8 tahun/*years*		*PCH formwork*

Biaya-biaya setelah perolehan awal termasuk di dalam jumlah tercatat aset dan diakui secara terpisah, jika memungkinkan, hanya jika terdapat kemungkinan bahwa biaya yang dikapitalisasi tersebut akan memberikan manfaat ekonomis bagi Perusahaan dan dapat diukur secara andal. Jumlah tercatat dari komponen yang diganti tidak diakui. Seluruh biaya pemeliharaan dan perbaikan lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

The costs after initial acquisition are included in the carrying amount of the asset and recognized separately, if possible, only when there is a possibility that the capitalized costs will provide an economic benefit to the Company and can be measured reliably. The carrying amount of the replaced component is not recognized. All other maintenance and repair costs are recognized

Apabila aset tetap ditarik dari penggunaannya atau dijual, maka nilai tercatat akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan dan kerugian yang

When fixed assets are withdrawn from their use or been sold, then the accumulated depreciation carrying amount are eliminated from the financial statements, and the resulting gains or losses are

dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

recognized in the statement of comprehensive income.

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali. Nilai tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan dari nilai mana yang lebih tinggi antara harga jual bersih atau nilai pakai.

When the carrying amount of assets are greater than its recoverable amount, the carrying amount is reduced to it's recoverable amount, which is determined by which value is higher between net selling price and value in use.

Biaya konstruksi bangunan dan prasarana serta pemasangan mesin dan peralatan diakumulasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya-biaya tersebut dikapitalisasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan secara substansial telah selesai. Penyusutan mulai dibebankan pada saat aset tersebut digunakan.
Biaya bunga dan biaya pinjaman lain seperti diskonto, baik yang secara langsung ataupun tidak langsung, digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tertentu, dikapitalisasi sampai dengan proses pembangunan secara substansial telah selesai.

The building construction cost and infrastructure and installation of machinery and equipment is accumulated as construction in progress. These costs are capitalized into fixed asset accounts when the construction or installation process has been substantially completed. Depreciation is charged from the time the asset is used.
Interest cost and other borrowing costs such as discounts, either directly or indirectly, are used to finance the construction of certain assets, are capitalized until the construction process has been substantially completed.

Untuk pinjaman yang langsung dapat diatribusikan dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi pendapatan yang diperoleh dari investasi sementara yang berasal dari pinjaman tersebut.

For loans that are directly attributable to a particular asset, the capitalized amount is the amount of borrowing costs that incurred during the period, less the income derived from the temporary investment originating from the loan.

Untuk pinjaman yang tidak langsung dapat diatribusikan dengan suatu aset tertentu, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap pengeluaran yang terjadi untuk aset tersebut. Tingkat kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang dari biaya pinjaman terhadap jumlah pinjaman dalam periode tertentu, tidak termasuk jumlah pinjaman-pinjaman yang secara khusus digunakan untuk mendanai proses konstruksi suatu aset tertentu.

For loans that are not directly attributable to a particular asset, the amount of capitalized borrowing costs is determined by multiplying the capitalization rate of expenditures incurred for the asset. The capitalization rate is the weighted average of the borrowing costs of the loan amount in a given period, excluding the amount of the loans specifically used to finance the construction process of a particular asset.

s. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

s. Impairment of Non-Financial Assets

Pada setiap akhir periode pelaporan, Konsolidasi menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkani atas suatu aset individual, Konsolidasi mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

At the end of each reporting period, the Consolidation reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). When it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Consolidation estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

Jika jumlah terpulihkan dari aset nonkeuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi. [untuk yang menggunakan metode revaluasi, perlu memasukkan: jumlah revaluasian, di mana kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai penurunan revaluasi.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss. [for: unless the relevant asset is carried at revaluation amount, in which the impairment loss is treated as revaluation decrease.

Apabila penurunan nilai selanjutnya dipulihkan , jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat yang tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang bersangkutan dicatat pada jumlah revaluasian, dalam hal ini pembalikan kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai kenaikan nilai revaluasi

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash-generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash-generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a revaluation

t. Uang Muka Pemberi Pekerjaan dan Konsumen

Uang muka pemberi pekerjaan (jasa konstruksi) merupakan uang muka yang diterima dari pemberi kerja atas pekerjaan konstruksi saat kontrak kerja ditandatangani dan secara proporsional akan diperhitungkan dengan pembayaran termin yang didasarkan atas kemajuan fisik yang telah dicapai.

t. Advances of the Project Owner and Consumer

Advances of project owners (construction services) represent advances received from the project owner on construction works when the employment contract is signed and proportionally will be calculated by the payment of terminology based on the physical progress that achieved.

u. Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk semua karyawan tetapnya sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perusahaan sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini.

u. Post Employments Benefit

The Company established defined post-employment benefit covering all the local permanent employees as required under Labor Law No. 13/2003 (the "Labor Law"). No funding has been made to its defined benefit plan.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan penilaian aktuaria yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan.

The cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period.

Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, perubahan dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera sebagai pos terpisah pada penghasilan komprehensif lain di ekuitas dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian).
- Beban atau pendapatan bunga neto.
- Pengukuran kembali

Perusahaan menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Perusahaan. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomik yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan ke program.

Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling (if applicable) and the return on plan assets (excluding interest), is reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurement recognized in other comprehensive income is reflected immediately as separate item under other comprehensive income in equity and will not be reclassified to profit or loss. Past service cost is recognized in profit or loss in the period of a plan amendment. Net interest is calculated by applying the discount rate at the beginning of the period to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorised as follows:

- *Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements).*
- *Net interest expense or income.*
- *Remeasurement.*

The Company presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

The retirement benefit obligation recognized in the statement of financial position represents the actual deficit or surplus in the Company's defined benefit plans. Any surplus resulting from this calculation is limited to the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plans or reductions in future contributions to the plans.

v. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan atas jasa persewaan diakui pada saat kontrak ditandatangani dan pekerjaan borongan *Bekisting* berdasarkan presentase penyelesaian pekerjaan. Presentase penyelesaian pekerjaan borongan *Bekisting* ditetapkan berdasarkan kemajuan fisik proyek yang dituangkan dalam laporan prestasi proyek (LPP) yang ditandatangani kedua belah pihak. Terhadap pendapatan usaha konstruksi yang telah diterbitkan fakturnya diakui sebagai piutang usaha, sedangkan yang belum diterbitkan fakturnya diakui sebagai tagihan bruto pemberi kerja.

Bunga pinjaman yang digunakan untuk pembiayaan investasi pembelian aset dibebankan pada tahun yang berjalan.

v. Recognition of Revenue and Cost

Appreciation of rental services is recognized at the time the contract is signed and the wholesale work of Bekisting is based on the completion percentage of the work. The percentage of completion of the wholesale work is determined based on the project's physical progress as outlined in the project achievement report (LPP) signed by both parties. Against construction business earnings that it's invoice has published are recognized as trade receivables, while unpaid invoices are recognized as gross billing of the employer.

Loan interest which used to purchase investment in asset purchases are charged to the current year.

Beban diakui sesuai dengan manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (a*ccrual method*).

Expenses are recognized in accordance with the benefit derived in the relevant year (accrual method).

w. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dan oleh karenanya, laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Konsolidasian

w. Earning per Share

Basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Company by the weighted average number of shares outstanding as adjusted for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

The Company has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of December 31, 2017 and 2016, and accordingly, no diluted earnings per share are calculated and presented in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

x. Perpajakan

Penghasilan sewa yang diperoleh Perusahaan dikarenakan PPh 23 dan jasa borongan *bekisting* yang diperoleh Perusahaan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan. Pajak tersebut diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Pajak penghasilan kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal posisi keuangan.

Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan *balance sheet liability method*, untuk semua perbedaan termporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk masing-masing entitas.

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 tahun 2009 yang diundangkan pada tanggal 4 Juni 2009 yang merupakan Perubahan (Revisi) atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Republik Indonesia No. 51 tahun 2008 yang telah diundangkan tanggal 23 Juli 2008 tentang Pajak atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi sebagai Pengganti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 140 Tahun 2000, Perusahaan sebagai pelaksana konstruksi sesuai pasal 10B Peraturan Pemerintah No. 40

x. Taxation

Rental income that earned by the Company is subject to PPh 23 and wholesale services of Bekisting that obtained by the Company is subject to PPh article 4 paragraph 2 of Law no. 36 of 2008 regarding income tax.

Income tax expense consists of current income tax and deferred income tax. The tax is recognized in the statements of comprehensive income. Current income tax is calculated using tax rate that applicable at the date of the financial position.

Deferred income tax is recognized using the balance sheet liability method, for all temporary differences between the tax bases of assets and liabilities with carrying values for each entity.

Related to the enactment of Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 40 of 2009 which was enacted on June 4, 2009 which is a revision of Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 51 of 2008 which has been enacted dated July 23, 2008 concern about Taxes on Income from Construction Services Business as a Substitute of Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 140 of 2000, the Company as the executive of construction under section 10B of Government Regulation No. 40 of 2009 is subject to a tariff

tahun 2009 dikenakan tarif 3% final untuk kontrak yang diperoleh mulai 1 Agustus 2008.

3% final for contracts obtained starting August 1, 2008.

y. Informasi Segmen

Informasi segmen disajikan menurut pengelompokkan (segmen) jenis usaha sebagai bentuk pelaporan segmen primer dan segmen sekunder dikelompokkan berdasarkan unit pengendalian.

Segmen usaha adalah komponen yang dapat dibedakan (*distinguishable components*) dan menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda menurut pembagian industri atau kelompok produk atau jasa sejenis yang berbeda, terutama untuk para pelanggan di luar entitas Perusahaan.

Segmen unit pengendalian adalah komponen Perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada lingkungan unit pengendalian (sifat lingkungan pengaturan), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada lingkungan unit pengendalian (sifat lingkungan pengaturan) yang lainnya.

y. Segment Information

Segment information is presented based on segmentation of business type as a form of reporting of primary and secondary segment Group by control unit.

A business segment is a distinguishable components and produces a different product or service according to the division of a different industry or consolidation of products or services, especially for customers outside the Company's entity.

The control unit segment is a distinguishable component of the Company that produces a products or services within the control unit environment (the nature of the setting environment), which is have a risks and benefits that are different with those of the control unit environment (the nature of the setting environment).

z. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi terhadap jumlah yang dilaporkan. Oleh karena tidak adanya kepastian dalam membuat estimasi, maka terdapat kemungkinan hasil aktual di masa yang akan datang berbeda dengan jumlah yang diestimasi tersebut.

z. Use of Estimate

The preparation of financial statements in accordance with financial accounting standards requires management to make estimations and assumptions against reported amounts. Because of the lack of certainty in making estimates, there is likely to be actual results in the future different from those estimates.

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar. Hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Estimasi dan asumsi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di bawah ini.

Estimasi umur manfaat aset tetap

Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan faktor faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan.

4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS

Estimates and judgments used in preparing the consolidated financial statements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable. Actual results may differ from these estimates. The estimates and assumptions that have a significant effect on the carrying amounts of assets and liabilities are disclosed below.

Estimated useful lives of fixed assets

The Group reviews periodically the estimated useful lives of fixed assets based on factors such as technical specification and future technological developments.

Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas.

Future results of operations could be materially affected by changes in these estimates brought about by changes in the factors mentioned.

Penurunan nilai aset non-keuangan

Impairment of non-financial assets

Penelaahan properti pertambangan dan aset jangka panjang lain-lain untuk penurunan nilai dilakukan apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat aset melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset atau unit penghasil kas ditentukan berdasarkan yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan nilai pakai, dihitung berdasarkan asumsi dan estimasi manajemen.

Other long-term assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount of an asset or a cash generating unit is determined based on the higher of its fair value less costs to sell and its value in use, calculated on the basis of the management's assumptions and estimates

Grup melakukan pengujian setiap tahun atas penurunan nilai goodwill, sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dinyatakan dalam. Jumlah terpulihkan unit penghasil kas telah ditentukan dengan perhitungan nilai pakai. Perhitungan ini memerlukan penggunaan estimasi.

The Company annually whether goodwill has suffered any impairment, in accordance with the accounting policy stated in. The recoverable amounts of CGUs have been determined based on VIU calculations. These calculations require the use of estimates

Penentuan nilai wajar dan nilai pakai memerlukan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi atas harga batubara, jumlah estimasi cadangan batubara, marjin laba kotor, tingkat diskonto atau tingkat pertumbuhan dalam proyeksi arus kas, dapat mempengaruhi perhitungan nilai pakai. Estimasi dan asumsi ini terpapar risiko dan ketidakpastian; sehingga ada kemungkinan perubahan situasi dapat mengubah proyeksi ini, yang dapat mempengaruhi nilai aset yang dapat dipulihkan kembali. Dalam keadaan seperti itu, sebagian atau seluruh nilai tercatat aset mungkin akan mengalami penurunan nilai lebih lanjut atau terjadi pengurangan rugi penurunan nilai yang dampaknya akan dicatat dalam laba rugi.

The determination of fair value and value in use requires management to make estimates and assumptions about the coal price, the amount of estimated coal reserves, gross profit margin, the discount rates or the growth rate assumptions in the cash flow projections, could materially affect the value-in-use calculations. These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty; hence there is a possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may have an impact on the recoverable amount of the assets. In such circumstances, some or all of the carrying value of the assets may be further impaired, or the impairment charge reduced, with the impact recorded in profit or loss.

Provisi atas penurunan nilai aset keuangan

Provision for impairment of financial assets

Manajemen menentukan provisi atas penurunan nilai aset keuangan dengan menggunakan penilaian individual. Penilaian individual didasarkan pada data historis, antara lain penghapusan piutang, kualitas hubungan dengan debitur, dan hubungan pihak berelasi.

Management determines the provision for impairment of financial assets by using individual assessments. Individual assessments are based on historical data, such as the write-off of receivables, the quality of the relationship with the debtor, and the related party relationship.

Atas aset keuangan yang telah jatuh tempo, manajemen mempertimbangkan berbagai faktor termasuk, namun tidak terbatas pada, hubungan dengan pelanggan, sejarah penghapusan piutang dan penjadwalan kembali piutang, dan keadaan keuangan pelanggan, sebelum menentukan nilai provisi.

For financial assets that are past due, management would consider various factors, including but not limited to, the relationship with the customer, history of write-off and payment reschedule, the financial well being of the customer, prior to concluding on the amount of provision required.

Pajak penghasilan

Pertimbangan dan asumsi diperlukan dalam menentukan pengurangan beban tertentu ketika mengestimasi penyisihan pajak penghasilan untuk setiap Perusahaan dalam Grup. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan dimana penentuan pajak akhir menjadi tidak pasti selama kegiatan usaha normal. Dimana perhitungan pajak akhir dari hal-hal tersebut berbeda dengan jumlah yang sebelumnya dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada provisi pajak penghasilan kini dan tangguhan dalam tahun dimana ketetapan tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari kerugian pajak yang dapat dikompensasikan, penyisihan modal, dan perbedaan temporer diakui hanya ketika hal-hal tersebut kemungkinan besar dapat dipulihkan, yang tergantung pada pembentukan laba kena pajak yang mencukupi di masa depan. Asumsi pembentukan laba kena pajak masa depan tergantung pada estimasi manajemen untuk arus kas masa depan. Hal ini tergantung pada estimasi produksi, jumlah penjualan barang atau jasa,belanja modal, dividen dan transaksi manajemen modal lainnya di masa depan.

Income taxes

Judgements and assumptions are required in determining the deductibility of certain expenses during the estimation of the provision for income taxes for each company within the Group. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will impact on the current and deferred income tax provisions in the period in which such determination is made.

Deferred tax assets, including those arising from unrecouped tax losses, capital allowances and temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. Assumptions about the generation of future taxable profits depend on management's estimates of future cash flows. These depend on estimates of future production, sales volumes or sales of service, capital expenditure, dividends and other capital management transactions

Pengakuan pendapatan dan beban kontrak konstruksi

Kebijakan pengakuan pendapatan dan beban konstruksi Grup mensyaratkan penggunaan estimasi yang dapat mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan dan beban pokok pendapatan. Grup mengakui pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi berdasarkan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan (metode persentase penyelesaian).

Grup melaksanakan proyek yang lamanya lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai kontrak konstruksi. Kebijakan akuntansi Grup untuk proyek membutuhkan pendapatan dan biaya yang akan dialokasikan pada periode akuntansi dan pengakuan berikutnya pada akhir periode atas aset atau liabilitas kontrak untuk proyek yang masih dalam proses. Penerapan kebijakan ini mengharuskan manajemen untuk menerapkan pertimbangan dalam memperkirakan total pendapatan dan total biaya yang diharapkan pada setiap proyek. Estimasi tersebut direvisi ketika proyek berlangsung untuk mencerminkan status proyek dan informasi terbaru yang tersedia untuk manajemen, perubahan estimasi tersebut diterapkan secara prospektif. Manajemen proyek melakukan tinjauan rutin untuk memastikan perkiraan terbaru yang sesuai. Perubahan atas estimasi akan dicatat prospektif.

Revenue and expense recognition of construction contract

The policy of revenue and expense recognition of construction contract of the Group requires use of estimates which may impact the reported amount of revenues and cost of revenues. The Group recognises revenues and expenses related to construction contracts based on the completion stage of contract activities at end of reporting period (percentage of completion method).

The Group undertakes projects that frequently span more than one accounting period and are accounted for as construction contracts. The Group's accounting policies for these projects require revenue and costs to be allocated to individual accounting periods and the consequent recognition at period end of contract assets or liabilities for projects is still in progress. The application of these policies requires management to apply judgement in estimating the total revenue and total costs expected on each project. Such estimates are revised as a project progresses to reflect the current status of the project and the latest information available to management. Project management teams perform regular reviews to ensure the latest estimates are appropriate, the changes in estimation is applied prospectively. Change to estimates is accounted for prospectively. While the Group believes that their

Walaupun Grup berkeyakinan bahwa estimasi yang dibuat adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada tahap penyelesaian aktual dapat mempengaruhi secara material pendapatan dan beban pokok pendapatan dari konstruksi.

estimates are reasonable and appropriate,significant differences to the actual completion stage may materially affect the revenues of construction contracts.

5. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Pada tahun 2017, Perusahaan menerapkan perhitungan imbalan pasca kerja sesuai dengan PSAK 24 (revisi 2013) "Imbalan Kerja" dan penerapan PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan" atas pengakuan selisih lebih nilai revaluasi aset tetap yang dilakukan hanya untuk kepentingan perpajakan.

Penerapan tersebut dilakukan secara retrospektif dan angka-angka komparasi tahun sebelumnya telah disajikan kembali, termasuk laporan posisi keuangan kedua tanggal 1 Januari 2015/31 Desember 2014, sebagai berikut:

5. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS

In 2017, the Company implemented the calculation of post employment benefit in accordance with PSAK 24 (revised 2013) "Employee Benefits" and the application of PSAK 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors" over the recognition of the excess of revalued amounts of fixed asset which are conducted only for tax purposes.

Theimplementation has been applied retrospectively and the prior years comparative figures have been restated, including the second of statement of financial position as of January 1, 2015/December 31, 2014, as follow:

	2016			
	Sebelum penyesuaian/ *Before Adjustment*	**Penyesuaian/ *Adjustment***	**Setelah penyesuaian/ *After adjustment***	
Laporan Posisi Keuangan				***Statements of FinancialPosition***
Aset Tidak Lancar:				***Non Current Assets:***
Aset tetap – bersih	643.369.609.646	(43.966.078.028)	599.403.531.618	*Fixed assets – net*
Liabilitas:				***Liabilities:***
Liabilitas imbalan pasca Kerja	-	1.513.533.602	1.513.533.602	*Employee benefit Liabilities*
Ekuitas:				***Equity:***
Selisih lebih nilai revaluasi aset tetap – bersih	44.651.797.375	(44.651.797.375)	-	*Revaluation increment in value of Property, Plant and Equipment - net*
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya	61.031.415.384	(1.201.589.736)	59.829.825.648	*Unappropriated retained earning*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain				***Income statement and other comprehensive income:***
Harga pokok pendapatan	278.033.535.786	2.019.640.141	276.013.895.645	*Cost of revenue*
Beban usaha	12.604.988.913	1.333.920.793	13.938.909.706	*Operating expenses*
Beban imbalan pasca Kerja	-	304.927.931	304.927.931	*Post-employee benefit expense*
Penghasilan komprehensif Lain	-	7.589.800	7.589.800	*Other comprehensive income*

(Lanjutan/*Continued*)

	2015			
	Sebelum penyesuaian/ *Before Adjustment*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Setelah penyesuaian/ *After adjustment*	
Laporan Posisi Keuangan				***Statements of Financial Position***
Liabilitas:				***Liabilities:***
Liabilitas imbalan pasca kerja	-	1.201.589.736	1.201.589.736	*Post-employee benefit liabilities*
Ekuitas:				***Equity:***
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya	35.593.064.059	(905.915.349)	34.687.148.710	*Unappropriated retained earning*
Laporan Laba Rugi dan PenghasilanKomprehensif Lain				***Income statement and other comprehensive income:***
Beban imbalan pasca Kerja	-	289.734.053	289.734.053	*Post- employee benefit expense*
Penghasilan komprehensif Lain	-	5.940.334	5.940.334	*Other comprehensive income*

6. KAS DAN SETARA KAS / *6. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	31 Desember/ *December 31,* 2017	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
Kas	8.789.525	-	-	***Cash***
Bank				***Bank***
Pihak Berelasi				***Related Parties***
PT Bank Rakyat Indonesia(Persero)Tbk	1.457.296.413	1.210.903.072	1.106.815.051	*PT Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5.882.210.035	-		*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	123.409.787.147	-		*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	62.875.362.115	51.352.192.417	5.674.428.464	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Jumlah - Bank Berelasi	**193.633.445.235**	**52.563.095.489**	**6.781.243.515**	***Total - Bank Related Parties***
Pihak Ketiga				***Third Parties***
PT Bank Syariah Mandiri, Tbk	66.854.196.037	10.366.967.242	2.428.249.453	*PT Bank Syariah Mandiri, Tbk*
PT Indonesia Exim Bank	41.381.947	-	-	*PT Indonesia EximBank*
PT Bank CIMB niaga, Tbk	36.225.586	32.324.576	27.690.299	*PT Bank CIMB niaga, Tbk*
PT United Overseas Bank, Tbk	44.104.998.025	147.893.572.596	598.176.403	*PT United Overseas Bank, Tbk*
PT Bank CentralAsia,Tbk	71.009.167.239	-	-	*PT Bank Central Asia,Tbk*
PT Danamon Tbk	1.679.530.354	-	-	*PT Danamon Tbk*
PT DBS Tbk	189.532	-	-	*PT DBS Tbk*
Jumlah - Bank Pihak Ketiga	**183.725.688.720**	**158.292.864.414**	**3.054.116.155**	***Total - Thrid Parties***
Jumlah Kas dan Bank	**377.359.133.995**	**158.292.864.414**	**9.835.359.670**	***Total Cash and Bank***
Deposito Berjangka				***Time Deposits***
PT Bank Syariah Mandiri, Tbk	105.000.000.000	-	-	*PT Bank Syariah Mandiri, Tbk*
PT Bank CIMB niaga, Tbk	100.000.000	100.000.000	100.000.000	*PT Bank CIMB niaga, Tbk*
PT Bank Jabar Banten, Tbk	150.000.000.000	-	-	*PT Bank Jabar Banten, Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	500.000.000.000	-	-	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
Jumlah Deposito	**755.100.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000**	***Total Deposits***
Kas setara kas	**1.132.459.133.995**	**210.955.959.903**	**9.935.359.670**	***Cash and cashequivalent***
Jangka waktu deposito berjangka	1 bulan/*month*	1 bulan/*month*		*Time deposits period*
Tingkat bunga deposito berjangka-tahun	6,5% - 7,5%	6,5% - 7,5%		*Annual interest rate of time-deposits*

(Lanjutan/*Continued*)

7. PIUTANG USAHA / *7. TRADE RECEIVABLE*

Terdiri dari: / *Consist of:*

	31 Desember/ *December 31,* 2017	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
Pihak Ketiga	473.621.120.412	18.672.947.184	21.172.323.568	*Third Parties*
Pihak Berelasi	128.592.118.421	82.147.743.025	38.764.954.771	*Related Parties*
Jumlah Piutang Usaha – Bersih	**602.213.238.833**	**100.820.690.209**	**59.937.278.339**	***Total Trade Receivable - Net***

Berdasarkan segmen usaha adalah sebagai berikut / *Based on business segment as follows:*

	31 Desember/ *December 31,* 2017	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
Pihak Ketiga				***Third Parties***
Jasa Konstruksi-sipil	430.014.746.000	18.672.947.184	21.172.323.568	*Construction Service-civil*
Persewaan	61.101.831.756	-	-	*Rental*
Batching Plant-ready mix	1.881.049.500	-	-	*Batching Plant-ready mix*
Sub Jumlah	**492.997.627.256**	**18.672.947.184**	**21.172.323.568**	***Sub Total***
Dikurangi:				*Less:*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(19.376.506.845)	-	-	*Allowances for Impairment Losses*
Piutang Usaha – Bersih	**473.621.120.411**	**18.672.947.184**	**21.172.323.568**	***Trade Receivable – Net***

	31 Desember/ *December 31,* 2017	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
Pihak Berelasi				***Related Parties***
Jasa Konstruksi-sipil	79.503.309.192	56.121.261.671	34.093.992.034	*Construction Service-civil*
Persewaan	24.978.562.257	19.975.421.690	4.309.506.813	*Rental*
Batching Plant-ready mix	26.534.490.403	9.646.763.558	1.505.033.521	*Batching Plant-ready mix*
Sub Jumlah	**131.016.361.852**	**85.743.446.919**	**39.908.532.468**	***Sub Total***
Dikurangi:				*Less:*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(2.424.243.431)	(3.095.703.893)	(1.143.577.697)	*Allowancesfor Impairment Losses*
Sub Jumlah	**128.592.118.421**	**82.647.743.025**	**38.764.954.771**	***Sub Total***
Piutang Usaha – Bersih	**602.213.238.833**	**100.820.690.210**	**59.937.278.339**	***Trade Receivable – Net***

Berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut / *Based on aging as follows:*

	31 Desember/ *December 31,* 2017	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
> 1 bulan – 12 bulan				*>1 month – 12 months*
Belum jatuh tempo	358.917.617.089	32.266.269.063	21.536.328.996	*Not due*
Sudah jatuh tempo	214.565.740.661	48.399.403.594	26.850.867.419	*Due*
> 12 bulan – 15 bulan				*>12 months – 15 months*
Sudah jatuh tempo	17.879.758.530	4.529.661.172	4.400.688.111	*.Due*
> 15 bulan – 18 bulan				*>15 months – 18 months*
Sudah jatuh tempo	2.315.129.598	1.593.421.425	1.862.228.937	*Due*
> 18 bulan – 21 bulan				*>18 months – 21 months*
Sudah jatuh tempo	5.607.026.976	1.720.157.120	1.877.961.713	*Due*
> 21 bulan – 24 bulan				*>21 months – 24 months*
Sudah jatuh tempo	1.845.713.533	1.760.758.346	1.491.204.336	*Due*

(Lanjutan/*Continued*)

> 24 bulan – 27 bulan Sudah jatuh tempo	5.743.167.862	2.878.864.596	1.188.000.651	*>24 months – 27 months Due*
> 27 bulan – 30 bulan Sudah jatuh tempo	1.005.279.993	2.328.014.184	418.892.505	*>27 months – 30 months Due*
> 30 bulan – 33 bulan Sudah jatuh tempo	1.755.530.806	2.017.860.886	261.025.457	*>30 months – 33 months Due*
> 33 bulan – 36 bulan Sudah jatuh tempo	14.378.970.060	6.421.983.717	1.193.657.911	*>33 months – 36 months Due*
	624.026.089.108	**103.916.394.103**	**61.080.856.036**	
Penurunan nilai wajar piutang	(21.800.750.275)	(3.095.703.893)	(1.143.577.697)	*Impairment of Receivable*
Piutang Usaha – Bersih	**602.213.238.833**	**100.820.690.210**	**59.937.278.339**	***Trade Receivable – Net***

Berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut: *Based on customers are as follows:*

	31 Desember/ *December 31,* 2017	**31 Desember/ *December 31,* 2016**	**31 Desember/ *December 31,* 2015**	
Pihak Ketiga				***Third Parties***
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	89.168.514.292	-	-	*PT Waskita Karya (Persero) Tbk*
PT Putra Energi Nusantara	68.272.605.825	-	-	*PT Putra Energi Nusantara*
PT Bangun Karya Pratama Lestari	56.771.284.186	-	-	*PT Bangun Karya Pratama Lestari*
PT Lematang Coal Lestari	44.826.469.720	-	-	*PT Lematang Coal Lestari*
PT Servo Lintas Raya	27.886.800.427	-	-	*PT Servo Lintas Raya*
PT Kukuh Mandiri Lestari	27.574.269.283	-	-	*PT Kukuh Mandiri Lestari*
PT Wika Gedung	23.062.245.311	-	-	*PT Wika Gedung*
PT Hutama Karya	20.382.950.000	-	-	*PT Hutama Karya*
PT Waskita Beton Precast, Tbk	20.312.645.161	-	-	*PT Waskita Beton Precast, Tbk*
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk	20.272.012.500	-	-	*PT Wijaya Karya (Persero), Tbk*
CRBC-WIKA-PP JO SWARNADWIPA	13.056.880.272	-	-	*CRBC-WIKA-PP JO SWARNADWIPA*
DERMAGA JAYA	11.759.152.037	-	-	*DERMAGA JAYA*
PT Sriwijaya Bara Logistic	10.183.422.765	-	-	*PT Sriwijaya Bara Logistic*
PT Gebe Sentral Nickel	8.585.190.848	-	-	*PT Gebe Sentral Nickel*
PT Sinoma Engeneering Indonesia	7.132.092.739	-	-	*PT Sinoma Engeneering Indonesia*
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	6.518.866.808	-	-	*PT Adhi Karya (Persero) Tbk*
PT Total Bangun Persada Tbk	3.494.454.384	4.321.401.671	9.834.166.198	*PT Total Bangun Persada Tbk*
PP – ASHFRI Konsorsium	3.018.972.985	-	-	*PP – ASHFRI Konsorsium*
PT Vania Karunia Teguh	2.568.168.053	-	-	*PT Vania Karunia Teguh*
PP - BK – KSO	2.533.194.975	-	-	*PP - BK – KSO*
PT Softex Indonesia	2.488.808.600	-	-	*PT Softex Indonesia*
KSO PP-Penta	2.459.787.880	-	-	*KSO PP-Penta*
PT PP – Bmp – Blj	1.973.109.475	1.973.109.475	1.973.109.475	*PT PP – Bmp – Blj*
KSO Adhi – Wika	1.943.970.407	1.131.240.000	-	*KSO Adhi – Wika*
PP - KNS Hyundai E&C	1.881.049.500	1.319.123.346	1.319.123.346	*PP - KNS Hyundai E&C*
POSCO E & CIndonesia	1.790.153.953	-	-	*POSCO E & Cindonesia*
PT Nusa Raya Cipta	1.542.056.359	-	-	*PT Nusa Raya Cipta*
PT PP – Wika	1.191.395.246	9.603.869.974	7.775.287.510	*PT PP – Wika*
PT Conbloc Infratecno	1.121.363.888	-	-	*PT Conbloc Infratecno*
PT PP – Hutama Konsorsium	1.087.394.000	151.060.000	-	*PT PP – Hutama Konsorsium*
PTPP – Waskita	180.712.342	-	54.512.606	*PT PP – Waskita*
PT PP – Dd.Grb	-	3.616.435.539	3.562.869.860	*PT PP – Dd.Grb*
Lain-lain (dibawah Rp.1 Miliar)	7.957.633.037	962.761.386	952.761.386	*Lain-lain (dibawah Rp.1 Miliar)*
Sub Jumlah	**492.997.627.258**	**23.079.001.391**	**25.471.830.381**	***Sub Total***

(Lanjutan/*Continued*)

Pihak Berelasi				***Related Parties***
PT PP (Persero) Tbk	122.684.128.226	67.306.594.591	34.093.992.034	*PT PP (Persero) Tbk*
PT PP Properti Tbk	163.914.500	8.684.349.001	-	*PT PP Properti Tbk*
PT PP Energi	133.100.000	-	-	*PTPP Energi*
PT PP Urban	8.035.219.124	4.697.144.249	1.505.033.621	*PT PP Urban*
Sub Jumlah - Pihak Berelasi	**131.016.361.850**	**80.688.087.841**	**35.599.025.655**	***Sub Total- Related Parties***
Jumlah	**624.013.989.108**	**103.916.394.102**	**61.070.856.036**	***Total***
Penurunan nilai wajar Piutang	(21.800.750.275)	(3.095.703.893)	(1.143.577.697)	*Impairment of receiavbles*
Piutang Usaha – Bersih	**602.213.238.833**	**100.820.690.209**	**59.937.278.339**	***Trade Receivable – Net***

Mutasi provisi atas penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

Movements in the provisions for the impairment of trade receivables are as follows:

	2017	2016	2015	
Saldo awal	3.095.703.893	1.143.577.697	1.843.851.313	*Beginning balance*
Penambahan dari akuisisi	14.548.686.878	-	-	*Increase from acquisition*
Penambahanprovisi	4.156.359.504	1.952.126.196	-	*Increase in provision*
Pembalikan provisi	-	-	(700.273.616)	*Reversal in provisions*
Jumlah	**21.800.750.275**	**3.095.703.893**	**1.143.577.697**	***Total***

Berdasarkan hasil penelaahan atas piutang masing-masing pelanggan pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa nilai provisi atas penurunan nilai telah memadai untuk menutup kerugian atas piutang usaha tidak tertagih.

Based on the review of the status of the individual customers at the end of the year, the management believes that the provision for the impairment of trade and non-trade receivables is adequate to cover losses from uncollectible tradeand non-trade receivables.

8. PIUTANG RETENSI

8. RETENTION RECEIVABLES

Piutang retensi proyek merupakan pendapatan Perusahaan yang ditahan oleh pemberi kerja sebagai jaminan dalam masa pemeliharaan, dengan rincian sebagai berikut:

Project retention receivables represents the Company earnings which are retained by the customers as guarantee during the maintenance period, with details as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2017	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
Pihak Ketiga	9.482.718.641	6.018.696.009	3.884.423.508	*Third Parties*
Pihak Berelasi	13.361.796.928	4.750.557.675	1.315.538.076	*Related Parties*
Jumlah	**22.844.515.569**	**10.769.253.684**	**5.199.961.584**	***Total***

Rinciannya Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

The following Third Parties is the breakdown:

No.	Kontraktor utama/ *Main Contractor*	2017	2016	2015
1.	PT Total Bangun Persada	3.323.414.511	1.464.278.031	1.464.278.031
2.	PT PP (Persero) Tbk	-	1.118.042.963	341.329.424
3.	PT Nusa Raya CiPTa	2.716.382.491	1.052.022.330	291.094.579
4.	PT Djasa Uber Sakti	1.006.618.204	1.006.618.204	956.192.111
5.	PT Bina Buana Semesta	107.738.000	-	-
6.	PT Wijaya Karya (Persero)Tbk	152.686.915	-	-
7.	KSO PP Gunung TaborPerkasa	474.035.773	-	-
8.	KSO PP Ashfri	1.701.842.747	-	-
9.	Lain-lain	-	1.377.734.481	831.529.363
	Sub Jumlah/*SubTotal*	**9.482.718.641**	**6.018.696.009**	**3.884.423.508**

(Lanjutan/*Continued*)

Rinciannya Pihak Berelasi adalah sebagai berikut: *The following Related Parties is the breakdown:*

No.	Proyek/*Project*	2017	2016	2015
	Pihak Berelasi/ *Related Party*			
1.	PT PP (Persero),Tbk.			-
	Tol Pandaan – Malang	3.558.731.676	-	-
	Aeon Mall Sentul City	2.982.298.267	-	-
	Tol Trans Sumatra	1.949.637.878	-	-
	Tol Manado-Bitung	1.342.167.537	-	-
	Alfa HQ	1.148.589.520	-	-
	KSO PP Ashfri	-	4.750.557.675	-
	Lain-lain dibawah Rp 1 Milyar/*Others less then Rp 1 Billion*	2.316.733.059	-	1.315.538.076
2.	PT PP Urban	63.638.992	-	-
	Sub Jumlah/ *Sub Total* – Pihak Berelasi/ *Related Party*	**13.361.796.928**	**4.750.557.675**	**1.315.538.076**
	Sub Jumlah/ *Sub Total*	**22.844.515.569**	**10.769.253.684**	**5.199.961.584**

9. TAGIHAN BRUTO PEMBERI KERJA

9. GROSS RECEIVABLES FROM PROJECT OWNERS

Rincian sebagai berikut: *Consist of:*

	31 Desember/ *December 31,* 2017	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
Pihak Ketiga				***Third Parties***
Proyek JO	31.473.062.494	-	-	*Proyek JO*
PT Wika Gedung	5.767.070.778	-	501.985.462	*PT Wika Gedung*
PT Total BangunPersada	5.554.841.075	999.008.062	5.783.369.424	*PT Total BangunPersada*
PT Nusa Raya Cipta	2.085.811.761	2.348.557.335	9.974.872.482	*PT Nusa Raya Cipta*
PT Bina Buana Semesta	482.458.058	1.231.062.613	-	*PT Bina Buana Semesta*
Sub jumlah	**45.363.244.176**	**4.578.628.011**	**16.260.227.368**	***Sub total***
Pihak Berelasi				***Related Parties***
PT PP (Persero) Tbk.	453.633.232.225	90.361.902.132	3.169.777.960	*PT PP (Persero) Tbk.*
PT PP URBAN	3.381.488.174	-	-	*PT PP URBAN*
PT PP PROPERTI, Tbk	7.980.863.729	-	-	*PT PP PROPERTI, Tbk*
Sub jumlah	**464.995.584.127**	**90.361.902.132**	**3.169.777.960**	***Sub total***
Dikurangi:				*Less:*
Penurunan Nilai Tagihan Bruto Pemberi Kerja	-	-	-	*Impairment of Gross Receivables from Project Owners*
Jumlah	**510.358.828.303**	**94.940.530.143**	**19.430.005.328**	***Total***

(Lanjutan/*Continued*)

10. PIUTANG LAIN-LAIN / *10. OTHERRECEIVABLES*

	31 Desember/ *December 31,* 2017	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
Pihak Ketiga				***Third Parties***
PT Sarana Abadi JayaRaya	29.067.500.000	-	-	*PT Sarana Abadi JayaRaya*
PT Chaizi	8.950.000.000	-	-	*PT Chaizi*
LMA-CTA JO	4.986.822.586	-	-	*LMA-CTA JO*
PT Yutai	4.850.000.000	-	-	*PT Yutai*
PT Sumindo Perkasa Maju	4.030.000.000	-	-	*PT Sumindo Perkasa Maju*
PT Citos Energi Lima	2.000.000.000	-	-	*PT Citos Energi Lima*
PT Triyada Grahapertama	1.700.000.000	-	-	*PT Triyada Grahapertama*
Conbloc Infratecno	1.500.000.000	-	-	*Conbloc Infratecno*
PT Halim Djaya Djayaprawira	27.003.357	-	-	*PT Halim Djaya Djayaprawira*
Sub Jumlah Pihak Ketiga	**57.111.325.943**	-	-	***Sub Total Third Parties***
Pihak Berelasi				***Related Parties***
Piutang Karyawan	60.366.796	60.366.794	-	*Receivables Employee*
Jumlah	**57.171.692.739**	**60.366.794**	**-**	***Total***

11. PERSEDIAAN / *11. INVENTORIES*

Merupakan persediaan bahan untuk pembuatan bekisting kolom, bekisting dinding dan bahan batching plant serta suku cadang, sebagai berikut:

Represent inventory of raw material for building of bekisting wall and colomn, raw material for batching plant and sparepart, as follow:

	31 Desember/ *December 31,* 2017	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
Suku cadang	1.281.948.215	358.483.789	458.926.859	*Spare part*
Bahan baku konstruksi	50.158.937.082	744.543.254	953.155.785	*Construction raw material*
Solar dan oli	4.518.680.150	1.185.754.072	1.517.988.842	*Oil and gasoline*
Lain-lain	2.554.514.444	514.064.495	600.135.123	*Others*
Jumlah	**58.514.079.891**	**2.802.845.610**	**3.530.206.609**	***Total***

Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi persediaan, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak diperlukan penyisihan atas penurunan nilai persediaan.

Based on the review of the condition of the inventories, the Company's management believes that no provision for impairment of inventories is necessary.

12. UANG MUKA / *12. ADVANCE*

Rincian sebagai berikut:

Consist of:

	31 Desember/ *December 31,* 2017	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
Proyek Coal Hauling Sriwijaya Palembang	40.723.986.527	-	-	*Proyek Coal Hauling Sriwijaya Palembang*
Proyek Manado Bitung	16.414.272.271	-	-	*Project Manado Bitung*
Proyek Jalan Tol Solo-Ngawi Kertosono	8.594.137.413	-	-	*Project Jalan Tol Solo-Ngawi Kertosono*
Proyek Tol Solo Ngawi	7.965.241.320	-	-	*Proyek Tol Solo Ngawi*
Proyek Jalan Tol Sumedang	4.508.817.116	-	-	*Project Jalan Tol Sumedang*
Jalan Tol Pandaan Malang	3.315.295.506	-	-	*Jalan Tol Pandaan Malang*

(Lanjutan/*Continued*)

Proyek Jalan Tol Kualanamu-Tebing Tinggi	2.698.250.000	-	-	*Project Jalan Tol Kualanamu-Tebing Tinggi*
Proyek Jalan Tol Bakaheuni Lampung	1.560.120.000	-	-	*Proyek Jalan Tol Bakaheuni Lampung*
Aeon Mixed Used	1.158.000.000	-	-	*Aeon Mixed Used*
Proyek Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar	1.136.000.000	-	-	*Project Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar*
Way Sekampung	1.592.277.941	-	-	*Way Sekampung*
Proyek Tol Pemalang-Batang	1.369.000.000	-	-	*Project Tol Pemalang-Batang*
Proyek Jalan Tol Kayu Agung	1.236.975.000	-	-	*Project Jalan Tol Kayu Agung*
Pollux Batam	965.250.000	-	-	*Pollux Batam*
Proyek Pembangkit Listrik Cirebon 2	862.500.000	-	-	*Project Pembangkit Listrik Cirebon 2*
Proyek Pembangunan Jalan Muara Enim	756.925.000	-	-	*Project Pembangunan Jalan Muara Enim*
Proyek Pondok Indah Residence	-	-	265.033.260	*Project Pondok Indah Residence*
Proyek The Tower	-	3.395.495.060	-	*Project The Tower*
Jumlah	**94.857.048.094**	**3.395.495.060**	**265.033.260**	***Total***

Uang muka proyek merupakan pembayaran dimuka kepada supplier atas pembelian material untuk proyek pekerjaan sipil yang akan diperhitungkan dengan tagihan atas saldo hutang supplier tersebut.

Project advances are advance payments to suppliers for the purchase of materials for civil works projects that will be accounted for by the invoice for the outstanding balance of the supplier's debt.

13. PERPAJAKAN / *13. TAXATION*

a. Pajak Dibayar Dimuka / *a. Prepaid Taxes*

	31 Desember/ *December 31,* 2017	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
Pajak Pertambahan Nilai	137.981.385.064	40.154.651.567	10.951.711.912	*Value Added*
PPh Pasal 4 (2)	19.102.672.106	-	-	*Income Tax Article 4*
PPh 22	70.543.108	-	-	*Income Tax Article 22*
PPh 23	-	-	1.869.511.493	*Income Tax Article 23*
Jumlah	**157.154.600.278**	**40.154.651.567**	**12.821.223.405**	***Total***

b. Utang Pajak / *b. Taxes Payable*

	31 Desember/ *December 31,* 2017	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
Hutang Cadangan PPh Final	14.720.404.268	-	1.238.953.282	*PPh Final Reserve Debt*
PPh Pasal 4 (2)	-	66.741.398	181.982.306	*Income Tax Article 4 (2)*
PPh 23	474.337.423	35.447.500	1.049.599.203	*Income Tax Article 23*
PPh 25	132.284.871	200.595.000	224.022.000	*Income Tax Article 25*
PPh 29	3.487.948.865	169.045.030	120.899.843	*Income Tax Article 29*
PPh 21	342.231.968	109.255.800	136.143.482	*Income Tax Article 21*
PPh Pasal 16D	40.454.546	-	-	*Income Tax Article 16D*
Tanah dan Bangunan	52.851.443	8.636.364	-	*Land and Building*
Jumlah	**19.250.513.384**	**589.721.092**	**2.951.600.116**	***Total***

(Lanjutan/*Continued*)

c. Pajak Penghasilan

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan konsolidasian dengan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan konsolidasian dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

c. Income Tax

Current Tax

The reconciliation between consolidated income tax expense and the theoretical tax amount on the consolidated profit before income tax is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2017	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
Laba sebelum pajak Penghasilan konsolidasian	301.340.012.063	52.934.190.288	32.740.102.965	*Profit before income tax – Consolidated*
Laba sebelum pajak Penghasilan entitas anak	(141.721.380.686)	-	-	*Profit before income tax - Subsidiary*
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	**159.618.631.377**	**52.934.190.288**	**32.740.102.965**	***Profit BeforeTax***
Koreksi fiskal				***Fiscal correction***
Perbedaan tetap:				***Permanent difference:***
Biaya sumbangan sosial	105.100.000	224.902.905	158.581.667	*Social donation expense*
Beban cadangan pesangon	509.830.671	746.524.146	544.370.025	*Severance reserve Expenses*
Beban pemasaran	226.000.000	-	-	
Beban langsung yang dikenakan pajak final	543.156.447.595	120.666.787.695	67.821.362.927	*Directly subjected to final tax Expenses*
Pengembangan usaha	867.114.356	375.664.450	108.663.167	*Businessdevelopment*
Pemeliharaan aktiva Tetap	322.000	156.033.400	206.645.000	*Fixed assets Maintenance*
STP Pajak	3.158.660.000	-	-	*Tax SPT*
Pengampunan pajak	939.413.863	-	-	*Tax Amnesty*
Pendapatan jasa giro dan bunga deposito	(5.001.956.641)	(1.135.510.993)	(161.127.440)	*Bank and deposit interest income*
Pendapatan dikenakan pajak Final	(700.869.066.516)	(159.538.498.381)	(88.303.430.497)	*Income subjecttofinal Tax*
Perbedaan waktu:				***Time difference:***
Penyusutan fiskal	30.090487.503	8.220.043.333	1.809.820.896	*Fiscal depreciation*
Laba (rugi) setelah koreksi fiskal	**32.800.984.208**	**22.650.136.843**	**14.924.988.710**	***Profit (loss) after fiscal Correction***
Beban Pajak kini				***Income tax expenses - Current***
Induk	8.200.246.052	5.662.534.211	3.731.247.178	*The Company*
Entitas anak	4.688.476.217	-	-	*Subsiadiary*
Total beban pajak	**12.888.722.269**	**5.662.534.211**	**3.731.247.178**	***Total income tax Expenses***
Pajak dibayar dimuka				*Prepaid Taxes*
PPh pasal 25	2.970.942.300	2.989.831.300	2.316.435,000	*Income Tax Article 25*
PPh pasal 23	5.216.840.586	1.687.235.601	1.293.912.335	*Income Tax Article 23*
PPh pasal 22	1.212.990.518	816.422.280	-	*Income Tax Article 22*
Jumlah	**9.400.773.404**	**5.493.489.181**	**3.610.347.335**	***Total***
Hutang PPh Badan	**3.487.948.865**	**169.045.030**	**120.899.843**	***Corporate Income tax Payable***

Perhitungan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 merupakan perhitungan sementara yang akan dihitung kembali pada akhir tahun.

Taxable income for the year ended at December 31, 2017 is a temporary calculation, and will be recalculatedat the end of the year.

Penghasilan kena pajak untuk tahun 2016, dan 2015 sesuai dengan SPT untuk tahun yang terkait yang disampaikan kepada otoritas perpajakan.

Taxable income for years 2016, and 2015 become in accordance with SPT that submited to the tax authoritiy.

Pajak Tangguhan

Deferred Tax

Perusahaan dan entitas anak tidak memperhitungkan manfaat (beban) pajak tangguhan karena tidak material.

The Company and subsidiary does not take into account deferred tax benefit (expense) because it is immaterial.

Pajak Final

Final Tax

	31 Desember/ *December 31,* 2017	**31 Desember/ *December 31,* 2016**	**31 Desember/ *December 31,* 2015**	
Beban Pajak Final				*Income tax expenses – Final*
Induk	21.026.071.995	5.908.833.273	1.033.755.034	*The Company*
Entitas anak	22.874.751.403	-	-	*Subsiadiary*
Jumlah beban pajak final	**43.900.823.398**	**5.908.833.273**	**1.033.755.034**	***Total final tax expenses***

d. Administrasi

- Perusahaan melakukan revaluasi aset tetap untuk perpajakan berdasarkan surat keputusan Dirjen Pajak No. KEP-479/WPJ.20/2016 tanggal 29 Desember 2016 dan No. KEP-41/WPJ.20/2016 tanggal 31 Januari 2017 dengan total beban pajak sebesar Rp.1.333.920.793 telah dicatat sebagai beban operasi.
- Pada tahun 2016, Perusahaan menerima surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) atas pajak pertambahan nilai (PPN) untuk masa pajak Desember 2014 sebesar Rp.8.563.047.696.
- Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2016 dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER/18/PJ/2016 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan dalam rangka Pengampunan Pajak. Perusahaan melaksanakan pengampunan pajak ini.

  Pada tahun 2016, Perusahaan ikut berpartisipasi dalam program pengampunan pajak.

  Aset pengampunan pajak yang dideklarasikan adalah kas. Jumlah aset pengampunan pajak yang berasal dari dalam

d. Administration

- *The Company revalued its fixed assets for taxation purposes based on the decision letter of the Directorate General of Taxation No. KEP-479/WPJ.20/2016 dated December 29, 2016 and No. KEP-41/WPJ.20/2016 dated 31 January 2017 with total tax expense of Rp.1,333,920,793 which have been recorded as operating expenses.*
- *In 2016, the Company obtained tax overpayment letter (SKPLB) on value added tax (VAT) for December 2014 amounted to Rp.8,563,047,696.*
- *In connection with the implementation of Regulation of the Minister of Finance No. 118/PMK.03/2016 concerning the Implementation of Law No. 11 of 2016 on Tax Amnesty as amended by Regulation of the Minister of Finance No. 141/PMK.03/2016 and Regulation of Directorate General of Tax No. PER/18/PJ/2016 on Redemption Payment of Excess Refund in the framework of Tax Amnesty. The Company participated the tax amnesty.*

  In year 2016, The Company participate in tax amnesty program.

  The asset of tax amnesty which is cash. Total asset which is come from domestic is amounting to Rp.50,000,000. The redemtion

negeri adalah sebesar Rp.50.000.000. Jumlah uang tebusan yang dibayarkan dalam program pengampunan pajak adalah sebesar Rp.2.500.000.

which is paid in program of tax amnesty is amounting to Rp.2,500,000.

Perusahaan sudah membedakan pajak dibayar dimuka Pajak Pertambahan Nilai yang masih ada sebesar Rp.939.413.863 untuk tahun fiskal sampai dengan 2015 terkait dengan pengampunan pajak.

The Company already distinguishes the prepaid tax on existing Value Added Tax amounting to Rp.939,413,863 for the fiscal year to 2015 related to Tax Amnesty.

Perusahaan telah menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) tanggal 7 April 2017.

The Company has received Tax Amnesty Certificate (SKPP) dated April 7, 2017.

- Perusahaan sedang tidak dalam pemeriksaan pajak per 31 Desember 2017.

- *The Company is not under the tax audit as of December 31, 2017.*

14. BIAYA DIBAYAR MUKA

14. PREPAID EXPENSE

Merupakan beban asuransi dibayar dimuka, sebagai berikut:

Represent prepaid of Insurance expenses, as follows :

	31 Desember/ *December 31,* 2017	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
Pengobatan	4.305.278.096	704.753.064	391.823.514	*Medical*
Kendaraan	3.367.838.173	105.893.135	393.206.337	*Vehicle*
Alat berat	17.621.691.739	1.337.756.832	2.422.199.364	*Heavy Equipment*
PCH	-	-	635.226.524	*PCH*
Jiwa	-	-	225.248.545	*Life*
Scafolding	-	-	317.933.589	*Scaffolding*
Alat dan Bekisting	252.462.152	-	971.234.496	*Formwork and Equipment*
Bangunan dan Gedung	8.975.267	937.725.576	-	*Building*
Lainnya	-	-	873.004.960	*Others*
Jumlah	**25.556.247.428**	**3.086.128.606**	**6.229.877.328**	***Total***

Aset tetap berupa alat berat, PCH, *Scaffolding, bekisting*, dan kendaraan diasuransikan pada PT Biwandana Mitra Jasa, sedangkan untuk asuransi DPLK dan Kesehatan diasuransikan pada PT Asuransi Jiwasraya. Beban asuransi tersebut dibebankan sesuai masa berlakunya.

Fixed assets includes heavy equipment, PCH, Scaffolding, formwork, and vehicles are insured to PT Biwandana Mitra Jasa, while Pension and Health Insurance are insured to PT Asuransi Jiwasraya. The insurance expenses are charged on validity period.

(Lanjutan/*Continued*)

15. ASET TETAP / *15. FIXED ASSETS*

	1 Januari 2017/ *January 1, 2017*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi dan Revaluasi/ *Reclassification and Revaluation*	Penambahan Akuisisi/ *Additions Acquisitions*	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	
	31 December 31, 2017						
Harga perolehan:							***Cost***
Pemilikan langsung							***Direct Ownership***
Tanah	55.550.097.140	160.000.000	-	113.902.860	153.943.020.000	209.767.020.000	*Land*
Bangunan	1.225.266.303	3.569.371.368	-	2.674.945.729	22.893.956.317	30.363.539.717	*Building*
Alat Ringan	7.781.946.701	1.339.350.000	-	-	-	9.121.296.701	*Non Heavy Equipment*
Fasilitas Proyek	13.261.828.172	-	1.793.238.990	-	1.758.738.438	13.227.327.622	*Project Facility*
Keet & Standard	3.190.407.569	-	-	-	-	3.190.407.569	*Keet &Standard*
Scaffolding	24.290.877.627	-	-	-	-	24.290.877.627	*Scaffolding*
Kendaraan	1.672.720.000	-	1.288.325.000	8.331.356.485	20.386.424.715	29.102.176.200	*Vehicles*
Batching Plant	74.061.192.000	94.432.000.000	-	-	-	168.493.192.000	*Batching Plant*
Alat Berat TC	142.574.931.529	34.918.000.000	-	-	-	177.492.931.529	*Tower Crane*
Alat Berat Earth Moving	328.593.377.180	640.887.949.500	-	-	994.805.957.235	1.964.287.283.915	*Earth Moving Equipment*
Bekisting	17.400.263.659	16.052.175.910	-	-	-	33.452.439.569	*Formwork*
PCH	89.488.567.371	85.247.911.196	-	-	-	174.736.478.568	*PCH*
	759.091.475.251	**876.446.757.974**	**3.081.563.990**	**11.120.205.074**	**1.193.788.096.705**	**2.837.524.971.018**	
Aset sewa Pembiayaan							***Leased assets***
Kendaraan	37.019.909.683	31.730.175.000	8.798.356.485	-	5.952.638.038	66.623.166.236	*Vehicles*
Alat Berat TC	26.279.938.688	-	-	-	-	26.279.938.688	*Tower Crane*
Alat Berat Earth Moving	10.817.305.313	-	-	-	100.542.493.998	111.359.799.311	*Earth Moving Equipment*
PCH	10.267.500.000	-	-	-	-	10.267.500.000	*PCH*
	84.384.653.686	**31.730.175.000**	**8.798.356.485**	**-**	**106.495.132.036**	**214.530.404.235**	
Jumlah harga perolehan	**843.476.128.937**	**908.176.932.974**	**11.879.920.475**	**11.120.205.074**	**1.300.283.228.742**	**3.052.055.375.253**	***Total cost***
Akumulasi Penyusutan:							***Accumulated Depreciation:***
Pemilikan langsung							***Direct ownership***
Bangunan	281.002.983	101.080.417	-	-	2.085.933.633	2.468.017.033	*Building*
Alat Ringan	7.468.751.009	277.979.722	-	-	-	7.746.730.732	*Non Heavy Equipment*
Fasilitas Proyek	10.950.686.595	33.967.126	196.736.712	-	579.178.220	11.367.095.229	*Project Facility*
Keet & Standard	3.190.407.569	-	-	-	-	3.190.407.569	*Keet & Standard*
Scaffolding	21.035.996.194	2.500.453.950	-	-	-	23.536.450.144	*Scaffolding*
Kendaraan	1.255.893.854	485.218.252	1.203.614.421	7.935.039.625	17.501.997.525	25.974.534.835	*Vehicles*
Batching Plant	5.075.985.333	9.582.857.333	-	-	-	14.658.842.667	*Batching Plant*
Alat Berat TC	45.491.965.373	16.214.588.257	-	-	-	61.706.553.630	*Tower Crane*
Alat Berat Earth Moving	43.520.728.093	46.335.893.944	-	-	413.332.839.007	503.189.461.043	*Earth Moving Equipment*
Bekisting	10.923.485.500	1.816.632.886	-	-	-	12.740.118.387	*Formwork*
PCH	56.668.477.351	8.454.569.297	-	-	-	65.123.046.648	*PCH*
	205.863.379.854	**85.803.241.185**	**1.400.351.133**	**7.935.039.625**	**433.499.948.384**	**731.701.257.916**	
Aset sewa pembiayaan							***Leased assets***
Kendaraan	13.754.497.030	8.718.676.473	8.090.706.291	-	361.071.184	14.743.538.396	*Vehicles*
Alat Berat TC	14.331.067.656	2.387.175.711	-	-		16.718.243.366	*Tower Crane*
Alat Berat Earth Moving	5.376.924.308	1.038.072.500		-	69.739.769.456	76.154.766.264	*Earth Moving Equipment*
PCH	4.746.728.472	1.669.666.042	-	-	-	6.416.394.513	*PCH*
	38.209.217.465	**13.813.590.725**	**8.090.706.291**	**-**	**70.100.840.640**	**114.032.942.539**	
Jumlah akumulasi penyusutan	**244.072.597.319**	**98.898.031.910**	**9.491.057.426**	**7.935.039.625**	**503.600.789.024**	**845.734.200.455**	***Total accumulated depreciation***
Nilai buku bersih	**599.403.531.618**					**2.206.321.174.798**	***Net book value***

(Lanjutan/*Continued*)

	31 Desember / *December 31,* 2016					
	1 Januari/ *January 1,* 2016	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**31 Desember/ *December 31,* 2016**	
Harga perolehan:						***Cost:***
Pemilikan langsung						***Direct ownership***
Tanah	-	55.550.097.140	-	-	55.550.097.140	*Land*
Bangunan	750.681.303	474.585.000	-	-	1.225.266.303	*Building*
Alat Ringan	7.459.311.701	322.635.000	-	-	7.781.946.701	*Non Heavy Equipment*
Keet & Standard	3.190.407.569	-	-	-	3.190.407.569	*Keet &Standard*
Scaffolding	24.290.877.627	-	-	-	24.290.877.627	*Scaffolding*
Fasilitas Proyek	13.261.828.172	-	-	-	13.261.828.172	*Project Facility*
Kendaraan	1.787.720.000	174.000.000	289.000.000	-	1.672.720.000	*Vehicles*
Batching Plant	19.236.108.000	54.825.084.000	-	-	74.061.192.000	*Batching Plant*
Alat Berat TC	110.829.631.529	31.745.300.000	-	-	142.574.931.529	*Tower CraneEquipment*
Alat Berat Earth Moving	84.156.405.180	236.593.980.000	-	7.842.992.000	328.593.377.180	*Earth Moving Equipment*
Bekisting	17.400.263.659	-	-	-	17.400.263.659	*Formwork*
PCH	89.488.567.371	-	-	-	89.488.567.371	*PCH*
	371.851.802.111	**379.685.681.140**	**289.000.000**	**7.842.992.000**	**759.091.475.251**	
Aset sewaPembiayaan						***Leased assets***
Kendaraan	25.729.897.139	17.009.400.000	5.719.387.454	-	37.019.909.683	*Vehicles*
Alat Berat TC	26.279.938.688	-	-	-	26.279.938.688	*Tower CraneEquipment*
Alat Berat Earth Moving	18.660.297.313	-	7.842.992.000	-	10.817.305.313	*Earth Moving Equipment*
PCH	10.267.500.000	-	-	-	10.267.500.000	*PCH*
	80.937.633.140	**17.009.400.000**	**13.562.379.454**	**-**	**84.384.653.686**	
Jumlah harga perolehan	**452.789.435.251**	**396.695.081.140**	**13.851.379.454**	**7.842.992.000**	**843.476.128.937**	***Total cost***
Akumulasi Penyusutan:						***Accumulated Depreciation:***
Pemilikanlangsung						***Direct ownership***
Bangunan	219.739.668	61.263.315	-	-	281.002.983	*Building*
Alat Ringan	7.013.449.962	455.301.047	-	-	7.468.751.009	*Non Heavy Equipment*
Keet & Standard	3.159.314.628	31.092.941	-	-	3.190.407.569	*Keet &Standard*
Scaffolding	18.503.118.994	2.532.877.200	-	-	21.035.996.194	*Scaffolding*
Pasilitas Proyek	9.969.371.984	981.314.611	-	-	10.950.686.595	*Project Facility*
Kendaraan	1.365.773.854	179.120.000	289.000.000	-	1.255.893.854	*Vehicles*
Batching Plant	474.875.000	4.601.110.333	-	-	5.075.985.333	*Batching Plant*
Alat Berat TC	34.522.030.713	10.969.934.660	-	-	45.491.965.373	*Tower Crane Equipment*
Alat Berat Earth Moving	26.087.508.105	15.560.871.238	-	1.872.348.750	43.520.728.093	*Earth Moving Equipment*
Bekisting	9.127.920.489	1.795.565.011	-	-	10.923.485.500	*Formwork*
PCH	47.952.448.715	8.716.028.636	-	-	56.668.477.351	*PCH*
	158.395.552.112	**45.884.478.992**	**289.000.000**	**1.872.348.750**	**205.863.379.854**	
Aset sewa pembiayaan						***Leased assets***
Kendaraan	11.964.900.869	5.743.787.644	3.954.191.484	-	13.754.497.030	*Vehicles*
Alat Berat TC	11.943.891.945	2.387.175.711	-	-	14.331.067.656	*Tower Crane*
Alat Berat Earth Moving	6.211.200.558	1.038.072.500	1.872.348.750	-	5.376.924.308	*Earth Moving Equipment*
PCH	3.077.062.430	1.669.666.042	-	-	4.746.728.471	*PCH*
	33.197.055.802	**10.838.701.897**	**5.826.540.234**	**-**	**38.209.217.465**	
Jumlah akumulasi penyusutan	**191.592.607.914**	**56.723.180.889**	**6.115.540.234**	**1.872.348.750**	**244.072.597.319**	***Totalaccumulated depreciation***
Nilai buku bersih	**261.196.827.337**				**599.403.531.618**	***Net book value***

(Lanjutan/*Continued*)

	31 Desember/ *December 31,* 2015					
	1 Januari 2015/ *January 1, 2015*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**31 Desember 2015/ *December 31, 2015***	
Harga perolehan:						***Cost:***
Pemilikan langsung						***Direct ownership***
Bangunan	750.681.303	-	-	-	750.681.303	*Building*
Alat Ringan	17.216.706.701	-	9.757.395.000	-	7.459.311.701	*Non Heavy Equipment*
Keet & Standard	3.190.407.569	-	-	-	3.190.407.569	*Keet &Standard*
Scaffolding	24.290.877.627	-	-	-	24.290.877.627	*Scaffolding*
Pasilitas Proyek	13.261.828.172	-	-	-	13.261.828.172	*Project Facility*
Kendaraan	1.972.720.000	-	185.000.000	-	1.787.720.000	*Vehicles*
Batching Plant	-	19.236.108.000	-	-	19.236.108.000	*Batching Plant*
Alat Berat TC	90.439.915.559	20.389.715.970	-	-	110.829.631.529	*Tower Crane*
Alat Berat Earth Moving	81.756.405.180	2.735.000.000	335.000.000	-	84.156.405.180	*Earth Moving Equipment*
Bekisting	15.500.496.199	1.899.767.460	-	-	17.400.263.659	*Formwork*
PCH	71.531.389.496	17.957.177.875	-	-	89.488.567.371	*PCH*
	319.911.427.806	**62.217.769.305**	**10.277.395.000**	**-**	**371.851.802.111**	
Aset sewa pembiayaan						***Leased assets***
Kendaraan	21.588.797.139	6.967.400.000	2.826.300.000	-	25.729.897.139	*Vehicles*
Alat Berat TC	21.591.400.859	4.688.537.829	-	-	26.279.938.688	*Tower Crane*
Alat Berat Earth Moving	18.625.142.000	35.155.313	-	-	18.660.297.313	*Earth Moving Equipment*
PCH	10.267.500.000	-	-	-	10.267.500.000	*PCH*
	72.072.839.998	11.691.093.142	2.826.300.000	-	80.937.633.140	
Jumlah harga perolehan	**391.984.267.804**	**73.908.862.447**	**13.103.695.000**	**-**	**452.789.435.251**	***Total cost***
Akumulasi Penyusutan:						***Accumulated Depreciation***
Pemilikan langsung						***Directownership***
Bangunan	182.205.599	37.534.069	-	-	219.739.668	*Building*
Alat Ringan	6.266.265.566	747.184.396	-	-	7.013.449.962	*Non Heavy Equipment*
Keet & Standard	3.055.724.198	103.590.430	-	-	3.159.314.628	*Keet & Standard*
Scaffolding	15.970.241.795	2.532.877.200	-	-	18.503.118.994	*Scaffolding*
Pasilitas Proyek	8.578.756.317	1.390.615.667	-	-	9.969.371.984	*Project Facility*
Kendaraan	1.380.353.854	170.420.000	185.000.000	-	1.365.773.854	*Vehicles*
Batching Plant	-	474.875.000	-	-	474.875.000	*Batching Plant*
Alat Berat TC	23.992.328.143	10.529.702.570	-	-	34.522.030.713	*Tower Crane*
Alat Berat Earth Moving	17.931.525.473	8.155.982.632	-	-	26.087.508.105	*Earth Moving Equipment*
Bekisting	7.569.535.979	1.558.384.509	-	-	9.127.920.489	*Formwork*
PCH	40.316.055.160	7.636.393.555	-	-	47.952.448.715	*PCH*
	125.242.992.084	**33.337.560.028**	**185.000.000**	**-**	**158.395.552.112**	
Aset sewa pembiayaan						***Leased assets***
Kendaraan	10.412.010.950	4.310.744.086	2.757.854.167	-	11.964.900.869	*Vehicles*
Alat Berat TC	9.556.716.234	2.387.175.711	-	-	11.943.891.945	*Tower Crane*
Alat Berat Earth Moving	4.192.754.058	2.018.446.500	-	-	6.211.200.558	*Earth Moving Equipment*
PCH	1.407.396.389	1.669.666.041	-	-	3.077.062.430	*PCH*
	25.568.877.631	**10.386.032.338**	**2.757.854.167**	**-**	**33.197.055.802**	
Jumlah akumulasi penyusutan	**150.811.869.715**	**43.723.592.366**	**2.942.854.167**	**-**	**191.592.607.914**	***Totalaccumulated Depreciation***
Nilai buku bersih	**241.172.398.089**				**261.196.827.337**	***Net book value***

Dalam penambahan aset tetap 31 Desember 2017, termasuk aset tetap entitas anak LMA yang diakuisisi, terdiri dari biaya perolehan sebesar Rp.1.300.283.228.742 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp.503.600.789.024.

Additions of property and equipment in December 31, 2017 included the property and equipment of the acquired subsidiary, LMA with acquisition cost of Rp.1,300,283,228,742 and accumulated depreciation of Rp.503,600,789,024.

Alat berat, Scaffolding dan PCH dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman bank dari Bank Syariah Mandiri.

Heavy equipment, Scaffolding and PCH are pledged as collaterals for bank loans from Bank Syariah Mandiri.

Aset tetap selain tanah telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, bencana alam dan risiko lainnya kepada PT Biwandana Mitra Jasa dengan nilai pertanggungan sebesar Rp.2.087.939.533.644 pada 31 Desember 2017. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko yang dipertanggungkan.

Fixed assets excluding land were insured with PT Biwandana Mitra Jasa against fire, disaster and other possible risks with total coverage of Rp.2,087,939,533,644 on December 31, 2017. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Pada tahun 2017, penambahan aset tetap termasuk selisih revaluasi tanah dan bangunan masing-masing sebesar Rp 150.879.861 dan Rp 3.382.160.409. Pada tanggal 31 Desember 2017, tanah dan bangunan memiliki nilai revaluasian masing-masing sebesar Rp.209.767.020.000 dan Rp.20.329.140.000.

In 2017, additions to property, plant and equipment include the revaluation increment in value of land and buildings amounting to Rp 150,879,861 and Rp 3,382,160,409, respectively. As of December 31, 2017, the land and buldings has a total revalued mount of Rp.209,767,020,000 and Rp.20,329,140,000 respectively.

Penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation was allocated to the following:

	2017	2016	2015	
Harga pokokpendapatan	193.797.038.915	56.661.917.575	43.686.058.294	*Cost of revenue*
Beban usaha	1.291.595.703	61.263.314	37.534.062	*Operatingexpenses*
Jumlah	**195.088.634.618**	**56.723.180.889**	**43.723.592.366**	***Total***

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2017.

Based on management's review, no incidents or changes in circumstances indicate a permanent decline in the value of property and equipment as of December 31, 2017.

Pengurangan selama tahun 2017 dan 2016 merupakan penjualan aset tetap. Pada tahun 2017 merupakan penjualan aset tetap yang dimiliki PT Lancarjaya Mandiri Abadi, entitas anak. Adapun perincian penjualan aset tetap adalah sebagai berikut :

Deduction in 2017 and 2016 represent sales of property, plant and equipment. In 2017 the sale of property, plant and equipment owned by PT Lancarjaya Mandiri Abadi, subsidiary. The details of sale of property, plant and equipment are as follows :

	2017	2016	
Harga jual	7.795.673.215	2.710.000.000	*Selling price*
Nilai tercatat	2.194.643.887	1.765.195.970	*Net book value*
Keuntungan atas penjualan	**4.940.629.328**	**944.804.030**	***Gain on sale***

16. UTANG USAHA

16. ACCOUNTS PAYABLE

Merupakan utang usaha per 31 Desember 2017 dan 2016, terdiri dari:

Represent account payable as of December 31, 2017 and 2016, consist of:

	31 Desember/ *December 31,* 2017	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
Pemasok	941.466.516.244	164.435.682.873	33.081.030.721	*Supplier*
Mandor	8.861.309.613	3.608.000.000	268.855.283	*Foreman*
Jumlah	**950.327.825.857**	**168.043.682.873**	**33.349.886.004**	***Total***

(Lanjutan/*Continued*)

Rinciannya adalah sebagai berikut: *The following is the breakdown:*

	31 Desember/ *December 31,* 2017	**31 Desember/ *December 31,* 2016**	**31 Desember/ *December 31,* 2015**	
PT Citra Tunggal Jaya	195.425.237.109	36.209.303.000	1.430.000.000	*PT Citra Tunggal Jaya*
PT Tass Engineering	147.905.671.960	-	-	*PT Tass Engineering*
Dayaguna Motor	76.080.000.000	-	-	*Dayaguna Motor*
PT Motive Mulia	33.863.535.882	-	-	*PT Motive Mulia*
PT Gaya Makmur Tractors	33.701.752.140	-		*PT Gaya Makmur Tractors*
PT Trakindo Utama	31.582.665.330	18.737.917.521	11.206.677.525	*PT Trakindo Utama*
PT Holcim Beton	30.619.295.066	-	-	*PT Holcim Beton*
PT Sarana Rekondisi Indonesia	21.842.200.000	18.737.917.521	-	*PT Sarana Rekondisi Indonesia*
PT Columbia Chrome	21.503.723.120	-	-	*PT Columbia Chrome*
PT Detede	20.825.000.000	-	-	*PT Detede*
PT Batch Automation Indonesia	19.108.305.010	181.500.000	1.235.366.000	*PT Batch Automation Indonesia*
PT Supra Jaya Dua Ribu Satu	10.373.567.500	-	-	*PT Supra Jaya Dua Ribu Satu*
Bangun Karya Persada Nusantara	10.202.682.284	-	-	*Bangun Karya Persada Nusantara*
PT Hanil Jaya Steel	9.800.547.266	-	-	*PT Hanil Jaya Steel*
PT Arimbi Jaya Agung	9.625.000.000	-	-	*PT Arimbi Jaya Agung*
PT Tassindo Utama	8.910.000.000	-	-	*PT Tassindo Utama*
PT Varia Usaha Beton	8.681.606.250	-	-	*PT Varia Usaha Beton*
PT Pancaran Makmur Sejahtera	7.709.173.350	-	-	*PT Pancaran Makmur Sejahtera*
PT Panca Traktor Indonesia	7.500.000.000	-	-	*PT Panca Traktor Indonesia*
PT Surya Intan Sentana Jaya	7.327.280.000	-	-	*PT Surya Intan Sentana Jaya*
PT Anugrah Berkat Tehnik	7.040.000.000	25.670.700.000	-	*PT Anugrah Berkat Tehnik*
PT Multicrane Perkasa	6.614.080.331	9.590.522.920	-	*PT Multicrane Perkasa*
PT Daya Kobelco CMI	6.087.213.320	-	-	*PT Daya Kobelco CMI*
CV Surya Karya Prima	5.482.270.112	-	-	*CV Surya Karya Prima*
PT Equipindo Perkasa	4.816.482.000	-	-	*PT Equipindo Perkasa*
PT Teleindo Prakarsa	4.110.331.500	-	-	*PT Teleindo Prakarsa*
PT Dredko Utama	3.784.000.000	-	-	*PT Dredko Utama*
Haohan Cement	3.773.485.000	-	-	*Haohan Cement*
PT Gema Prima Mandiri	3.663.836.902	-	-	*PT Gema Prima Mandiri*
PT Indomobil Prima Energi	3.557.428.600	-	-	*PT Indomobil Prima Energi*
Panca Traktor Indonesia	3.440.761.382	-	-	*Panca Traktor Indonesia*
PT Bajamandiri	3.365.025.667	-	-	*PT Bajamandiri*
Audri Lutfia Jaya	3.326.799.402	-	-	*Audri Lutfia Jaya*
PT Papan Mandiri Cemerlang	3.263.038.350	-	-	*PT Papan Mandiri Cemerlang*
CV Talilo	3.127.269.420	274.054.000	874.318.500	*CV Talilo*
PT Intiniaga Sukses Abadi	3.115.505.250	270.111.500	-	*PT. Intiniaga Sukses Abadi*
PT Intraco Penta Wahana	3.102.270.600	-	164.999.282	*PT Intraco Penta Wahana*
PT Lampung Manunggal	-	2.072.160.208	-	*PT Lampung Manunggal*
PT Jui Shin Indonesia	-	558.601.243	-	*PT Jui Shin Indonesia*
PD Surya Prima	-	198.804.162	3.182.921.762	*PD Surya Prima*
CV Berlian Quarrindo	-	788.040.000	-	*CV Berlian Quarrindo*
CV Nusantara	-	4.969.441.483	3.013.613.250	*CV Nusantara*
CV Mitra Partindo	-	1.500.563.758	1.237.893.400	*CV Mitra Partindo*
PT Abdi Saputra Tanaya	-	1.323.300.000	-	*PT Abdi Saputra Tanaya*
Lain-lain (dibawah Rp.3Miliar)	157.209.476.141	43.352.745.557	10.735.241.002	*Other (less then Rp.3 Billions)*
Sub Jumlah	**941.466.516.244**	**164.435.682.873**	**33.081.030.721**	***Sub Total***

(Lanjutan/*Continued*)

Mandor				***Foreman***
Bachtiar	1.000.160.000	-	-	*Bachtiar*
Effendy Ibrahim	-	177.198.020	-	*Effendy Ibrahim*
Agus Lesmono	3.227.182.439	-	-	*Agus Lesmono*
Lain-lain (dibawah Rp.1 Miliar)	4.633.967.174	3.430.801.980	268.855.283	*Others (less than Rp.1 Billions)*
Sub Jumlah	**8.861.309.613**	**3.608.000.000**	**268.855.283**	***Sub Total***
Jumlah	**950.327.825.857**	**168.043.682.873**	**33.349.886.004**	***Total***

Analisis umur utang usaha yang telah jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The aging analysis of past due trade payables is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2017	**31 Desember/ *December 31,* 2016**	**31 Desember/ *December 31,* 2015**	
> 1 Bulan - 3 Bulan	771.826.393.336	136.371.202.597	25.495.697.026	*>1 Month – 3 Months*
> 3 Bulan - 6 Bulan	110.167.982.180	19.547.704.427	4.847.468.947	*>3 Months - 6 Months*
> 6 Bulan - 12 Bulan	68.333.450.341	12.124.775.850	3.006.720.029	*>6 Months - 12 Months*
> 12 Bulan	-	-	-	*>12 Months*
Jumlah	**950.327.825.857**	**168.043.682.873**	**33.349.886.004**	***Total***

Utang pemasok merupakan utang kepada pemasok atas pengadaan bahan bangunan sehubungan dengan pelaksanaan proyek.

Supplier payable represents payables to suppliers of materialprocurement related to project activities.

Utang kepada mandor merupakan utang upah mandor sehubungan dengan pelaksanaan proyek.

Payables to foreman represent payable of foremen wages in related with project activities.

17. UTANG LAIN-LAIN

17. OTHER LIABILITIES

	31 Desember/ *December 31,* 2017	**31 Desember/ *December 31,* 2016**	**31 Desember/ *December 31,* 2015**	
Pihak Ketiga				***Third Parties***
Asuransi	10.014.069.374	600.199.721	1.083.786.834	*Insurance*
Pihak Berelasi				***Related Parties***
PT PP (Persero) Tbk	141.209.145	5.446.305.092	2.620.911.080	*PT PP (Persero) Tbk.*
PT PP Urban	165.641.960	124.941.960	-	*PT PP Urban*
Koperasi KaryawanPT PP	44.301.290	17.525.062	9.209.650	*Koperasi KaryawanPT PP*
YKKPP	331.128.742	1.089.479	-	*YKKPP*
PT Lancarjaya Energi	540.947.880	-	-	*PT Lancarjaya Energi*
Koperasi Saham	4.820.149.206	-	-	*Shares of Cooperatives*
	6.043.378.223	**5.589.861.593**	**2.630.120.730**	
Jumlah	**16.057.447.597**	**6.190.061.314**	**3.713.907.564**	***Total***

(Lanjutan/*Continued*)

18. UANG MUKA PEMBERI KERJA / *18. ADVANCES FROM PROJECT OWNERS*

	31 Desember/ *December 31,* 2017	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
Pihak Ketiga				*Third Parties*
PP ASHFRI Konsorsium	34.659.832.519	-	-	*PP ASHFRI Konsorsium*
PT Waskita Karya (Persero)	31.659.832.519	-	-	*PT Waskita Karya (Persero)*
PP – Bahagia Bangunnusa	12.082.348.100	-	-	*PP – Bahagia Bangunnusa*
PT Wika Gedung	3.679.577.470	-	-	*PT Wika Gedung*
PT Total BangunPersada	556.401.148	671.883.367	1.398.915.768	*PT Total BangunPersada*
PT Praja Vita Mulia	334.800.000	-	-	*PT Praja Vita Mulia*
KSO PP-Gunung Tabor PerkasaKonsorsium	151.793.968	-	-	*KSO PP-Gunung Tabor PerkasaKonsorsium*
PT Djaya Uber Sakti	-	-	131.197.500	*PT Djaya Uber Sakti*
PT Nusa Raya Cipta	-	149.962.200	3.449.862.485	*PT Nusa Raya Cipta*
PT Bina Buana Semesta	-	608.527.176	-	*PT Bina Buana Semesta*
Sub Jumlah	**83.147.253.205**	**1.430.372.743**	**4.979.975.753**	***Sub Total***
Pihak Berelasi				*Related Parties*
PT PP (Persero) Tbk	34.434.880.452	45.789.216.572	-	*PT PP (Persero) Tbk*
Jumlah	**117.582.133.657**	**47.219.589.315**	**4.979.975.753**	***Total***

Uang muka pemberi kerja merupakan uang muka yang diterima dari pemberi kerja yang secara proporsional akan dikompensasikan dengan tagihan yang didasarkan atas kemajuan fisik yang telah dicapai.

Advances from project owners represents advances received from customers and will be proportionately compensanted to billings in accordance with physical progress of the projects.

19. LIABILITAS SEWA PEMBIAYAAN / *19. FINANCE LEASE LIABILITIES*

	31 Desember/ *December 31,* 2017	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
Perusahaan:				***The Company:***
PT Takari	56.415.454.655	-	-	*PT Takari*
PT Mandiri Tunas Finance	12.070.869.035	8.221.295.273	2.014.213.746	*PT Mandiri Tunas Finance*
PT Mitsubishi	34.649.333.209	-	-	*PT Mitsubishi*
PT Astra Credit Company	7.775.203.070	4.526.529.319	53.570.425	*PT Astra Credit Company*
PT IBJ Verena Finance	19.716.881.918	-	47.436.015	*PT IBJ Verena Finance*
PT ORIX Indonesia Finance	2.598.791.438	12.454.636.577	14.241.218.678	*PT ORIX Indonesia Finance*
PT Toyota Astra Finance	46.968.645	631.003.908	1.411.355.549	*PT Toyota Astra Finance*
PT Dana Unico Finance	-	17.269.461.118	17.258.602.740	*PT Dana Unico Finance*
PT Chandra Sakti Utama Leasing	-	1.401.436.127	4.874.786.514	*PT Chandra Sakti Utama Leasing*
PT Bank Panin	-	28.611.713	351.975.010	*PT Bank Panin*
PT Otto Multiartha	-	8.342.552	70.483.281	*PT Otto Multiartha*

(Lanjutan/*Continued*)

Entitas Anak:				***Subsidiary:***
PT Danamon Tbk	58.666.666.667	-	-	*PT Danamon Tbk*
PT Mandiri Tunas Finance	35.531.105.924	-	-	*PT Mandiri Tunas Finance*
PT Mitsubishi UFJ	9.902.650.520	-	-	*PT Mitsubishi*
PT Astra Credit Company	28.509.384.376	-	-	*PT Astra Credit Company*
PT IBJ Verena Finance	-	-	-	*PT IBJ Verena Finance*
PT SMF Leasing Indonesia	18.374.113.379	-	-	*PT SMF Leasing Indonesia*
PT Bumiputera BOT Finance	18.212.548.253	-	-	*PT Bumiputera BOT Finance*
PT ORIX Indonesia Finance	6.913.328.186	-	-	*PT ORIX Indonesia Finance*
PT Komatsu Finance	6.964.218.595	-	-	*PT Komatsu Finance*
PT Caterpillar Finance Indonesia	5.051.293.270	-	-	*PT Caterpillar Finance Indonesia*
PT BCA Finance	2.535.115.307	-	-	*PT BCA Finance*
Jumlah	**323.933.926.447**	**44.541.316.587**	**40.323.641.958**	***Total***
Dikurangi: bagian jangka Pendek	(50.007.083.747)	(9.245.086.950)	(14.492.096.002)	*Less: current portion*
Jumlah	**273.926.842.700**	**35.296.229.637**	**25.831.545.956**	***Total***

	31 Desember/ *December 31,* 2017	**31 Desember/ *December 31,* 2016**	**31 Desember/ *December 31,* 2015**	
Kurang dari 1 Tahun	50.007.083.747	9.245.086.950	14.492.096.002	*Less than 1 year*
Lebih dari 1 tahun dan Kurang dari 5 tahun	273.926.842.700	35.296.229.637	25.831.545.956	*More than 1 year and Less than 5 years*

	Pembayaran minimum sewa/ *Minimum lease payments*		**Nilai kini pembayaran minimum sewa/ *Present value of minimum lease payment***		
	2017	**2016**	**2017**	**2016**	
	Rp	**Rp**	**Rp**	**Rp**	
Rincian liabilitas sewa					***By Due Date***
Berdasarkan jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun	53.211.855.664	11.499.288.992	50.007.083.747	9.245.086.950	*Not later than one year*
Lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun	338.041.788.841	43.902.404.285	273.926.842.700	35.296.229.637	*Later than one year and not later than five years*
Lebih dari lima tahun	-	-	-	-	*Later than five years*
	391.253.644.505	55.401.693.277	323.933.926.447	44.541.316.587	
Dikurangi: biaya keuangan masa depan	(67.319.718.058)	(10.860.376.690)	-	-	*Less: future finance charges*
Nilai kini pembayaran minimum sewa	323.933.926.447	44.541.316.587	323.933.926.447	44.541.316.587	*Present value of minimum lease payments*
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			50.007.083.747	9.245.086.950	*Current maturity*
Liabilitas Sewa Jangka Panjang – Bersih			273.926.842.700	35.296.229.637	*Long term Lease Liabilities –Net*

Perusahaan

Perusahaan menandatangani perjanjian pembiayaan untuk kendaraan dengan beberapa Perusahaan pembiayaan dengan tingkat suku bunga tetap.

Kendaraan, alat berat dan tower crane tersebut dipakai sebagai jaminan untuk liabilitas sewa pembiayaan yang bersangkutan. Perusahaan tidak memiliki batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini.

Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT Takari di tahun 2017 dengan No. Kontrak PPK000000059-001, untuk pengadaan 20 unit Hino Dump Truck JD

The Company

The Company has entered into financing agreements for vehicles with certain financing companies with fixed interest rate.

These vehicles, heavy equipments and tower crane are pledged as collateral for the underlying finance lease liabilities. The Company have no covenants under these loan facility agreements.

The Company received financing from PT Takari in 2017 with No. Contract PPK000000059-001, for the procurement of 20 units of Hino Dump Truck JD 260

260 dengan jangka waktu 47 bulan yang dimulai dari 30 Maret 2017 sampai 28 Februari 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp.21.338.400.000, suku bunga 9,75%.

with maturity of 47 months starting from March 30, 2017 to February 28, 2021 with a contract value of Rp.21,338,400,000, interest rate 9.75%.

Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT Takari di tahun 2017 dengan No. Kontrak PPRE000000089-001, untuk pengadaan 38 unit Truck Hino 260 JM dan Tass Mixer Truck 7 CBM dengan jangka waktu 48 bulan yang dimulai dari 17 November 2017 sampai 17 November 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 43.472.000.000, suku bunga 9,30%.

The Company received financing from PT Takari in 2017 with No. Contract PPRE000000089-001, for the procurement of 38 units of Hino Truck 260 JM and Tass Mixer Truck 7 CBM with a period of 48 months starting from November 17, 2017 to November 17, 2021 with a contract value of Rp.43,472,000,000, the interest rate is 9.30%.

Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT IBJ Verena di tahun 2017 dengan No. Kontrak 00054-010, untuk pengadaan 5 unit Kobelco Excavator, 3 unit Bomag Vibro, 3 unit Bomag dengan jangka waktu 47 bulan yang dimulai dari 28 Maret 2017 sampai 28 Februari 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 28.764.990.000, suku bunga 10,2%*(Flat)*.

The Company received financing from PT IBJ Verena in 2017 with No. Contract 00054-010, for the procurement of 5 units Kobelco Excavator, 3 units Bomag Vibro, 3 units Bomag with maturity of 47 months starting from March 28, 2017 to February 28, 2020 with a contract value of Rp.28,764,990,000, interest rate 10,2% (Flat).

Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT IBJ Verena di tahun 2017 dengan No. Kontrak 00054-011, untuk pengadaan 5 unit Kobelco Excavator, 1 unit Crawler Crane H, 1 unit Crawler Crane dengan jangka waktu 47 bulan yang dimulai dari 15 April 2017 sampai 15 Maret 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 11.235.000.000, suku bunga 6%*(Flat).*

The Company received financing from PT IBJ Verena in 2017 with No. Contract 00054-011, for the procurement of 5 units Kobelco Excavator, 1 unit Crawler Crane H, 1 unit Crawler Crane with maturity of 47 months starting from 15 April 2017 to 15 March 2021 with contract value of Rp.11,235,000,000, interest rate 6% (Flat).

Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT Toyota Astra Finance, untuk pengadaan 9 unit Toyota Avanza dan 6 unit Toyota Inova dengan jangka waktu 36 bulan dari 13 April 2015 sampai 27 November 2018, dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.325.985.112, suku 12,5%.

The company received financing from PT Toyota Astra Finance, for the procurement of 9 units of Toyota Avanza and 6 units of Toyota Inova with 36 months from 13 April 2015 until 27 November 2018, with contract value of Rp.1,325,985,112, rate 12.5%.

Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT Astra Credit Company, untuk pengadaan 6 unit Toyota Camry dengan jangka waktu 48 bulan dari 31 Januari 2017 sampai 31 Januari 2021, suku bunga 9,34% - 11% dengan nilai kontrak sebesar Rp.14.423.487.508.

The company received financing from PT Astra Credit Company, for the procurement of 6 units of Toyota Camry with a period of 48 months from January 31, 2017 to January 31, 2021, interest rates 9,34%-11%, with a contract value of Rp.14.423.487.508.

Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT Otto Multiartha, untuk pengadaan 1 unit Opel Captiva dengan jangka waktu 36 bulan, suku bunga 10,35%, sudah dilunasi pada tahun 2017.

The Company obtained financing facility from PT Otto Multiartha, for procurement of 1 units Opel Captiva, 36 months terms, interest rate 10,35%, all such debt has been settled on 2017.

Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT Panin Bank Finance, untuk pengadaan 4 unit Mitsubishi Pajero Exceed dengan jangka waktu 36 bulan, suku bunga 15,5%.

The Company obtained financing facility from PT Panin Bank Finance, for procurement of 4 units Mitsubishi Pajero Exceed, 36 months terms, interset rate 15,5%.

Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT Mitsubishi Tunas Finance, untuk pengadaan 1 unit Toyota Avanza, 5 unit Mitsubishi Pajero, 12 unit Toyota Innova, 4 unit Motor Kawasaki KLX, 1 unit Motor Honda CB150R, 2 Unit Honda CRV, 1 unit

The Company obtained financing facility from PT Mitsubishi Tunas Finance, for procurement of 1 unit Toyota Avanza, 5 units Mitsubishi Pajero, 12 units Toyota Avanza, 4 units Kawasaki KLX, 1 unit Honda CB150R, 2 units Honda CRV, 1 unit Nissan

Nisan Xtrail dengan jangka waktu 36 bulan, suku bunga 9,3% dengan nilai kontrak sebesar Rp.20.557.331.395.

Xtrail, 36 months terms, interest rate 9,3% with a contract value of Rp.20,557,331,395.

Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT CSUL, untuk pengadaan 6 unit Kobelco Excavator dengan jangka waktu 36 bulan, suku bunga 10,5% dengan nilai kontrak sebesar Rp.10.598.428.000, sudah dilunasi pada tahun 2017.

The Company obtained financing facility from PT CSUL, for procurement 6 units Kobelco Excavator, 36 months term, interest rate 10,5% with a contract value of Rp.10,598,428,000 ,all such debt has been settled on 2017.

Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT Dana Unico Finance, untuk pengadaan Dump truck, excavator dan buldozer dengan jumlah fasilitas pinjaman sebesar Rp.42.191.524.474 dengan jangka waktu 24 bulan dari 2 Oktober 2016 sampai dengan 2 Oktober 2018, suku bunga 16%.

The Company obtained financing from PT Dana Unico Finance, for the procurement of Dump trucks, excavators and bulldozers with a total loan facility of Rp.42,191,524,474 for a period of 24 months from October 2, 2016 to October 2, 2018, interest rate of 16%.

Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT Bank Mandiri Tunas Finances, untuk pengadaan 15 unit toyota innova, 2 unit mitsubishi pick up, dan 1 unit Isuzu PU FD, dengan jumlah fasilitas pinjaman sebesar Rp.20.557.331.395. dengan jangka waktu 48 bulan dari 3 Februari 2017 sampai 3 Januari 2021, suku bunga efektif 12,11%.

The Company obtained financing from PT Bank Mandiri Tunas Finances, for the procurement of 15 units of toyota innova, 2 units of Mitsubishi pickup and 1 unit of Isuzu PU FD, with total loan facility amounting to Rp 20,557,331,395. with a period of 48 months from February 3, 2017 to January 3, 2021, effective interest rate of 12.11%.

Perusahaan mendapat pembiayaan dari PT Mitsubishi UFJ Lease dan Finance Indonesia di tahun 2017 dengan No. Kontrak PPK17101246, untuk pengadaan 1 Unit Motor Grader SDLG, 4 Unit Carterpillar Motor, 1 Unit Batching Plan, 2 Unit Silon Semen, 2 Unit Mixer, 3 Unit Vubrating Roller, 5 Unit Sumitomo Crawler excavator, 1 Unit Hyundai Excavator,1 Unit Golden star stone crushing plant, 1 unit cum genset silent 65 KVA, 36.136 Unit Bekisting Horizontal dengan jangka waktu 48 bulan yang dimulai dari 31 Maret 2017 sampai 31 November 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp.33.557.700.000, suku bunga 10%.

The Company received financing from PT Mitsubishi UFJLease and Finance Indonesia in 2017 with No. Contract PPK17101246, for procurement of 1 Unit Motor Grader SDLG, 4 Unit Carterpillar Motor, 1 Unit Batching Plan, 2 Unit Silon Cement, 2 Unit Mixer, 3 Unit Vubrating Roller, 5 Unit Sumitomo Crawler Excavator, 1 Unit Hyundai Excavator, 1 Unit Golden star stone crushing plant, 1 unit of 65 KVA silent cum genset, 36,136 Horizontal Formwork Unit with 48 month period starting from March 31, 2017 to November 31, 2021 with contract value of Rp.33,557,700,000, interest rate of 10%.

Entitas anak

Entitas anak mendapat pembiayaan dari PT Komatsu Finance di tahun 2017 dengan No. Kontrak M04016101, untuk pengadaan 2 unit D68, 2 unit Grader, 2 unit D68E – SS, dengan jangka waktu 23 bulan yang dimulai dari 24 Januari 2017 sampai 24 Desember 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp.12.047.310.000 suku bunga 10%.

Subsidiary

Subsidiary received financing from PT Komatsu Finance in 2017 with No. Contract M04016101, for the procurement of 2 units of D68, 2 units of Graders, 2 units of D68E - SS, with a period of 23 months starting from January 24, 2017 to December 24, 2018 with a contract value of Rp.12.047.310.000 interest rate of 10%.

Entitas anak mendapat pembiayaan dari PT Caterpillar Finance Indonesia di tahun 2016 dengan No. Kontrak 2529-0-16-0007, untuk pengadaan 2 unit Caterpillar Rotary Mixer 500B dengan jangka waktu 35 bulan yang dimulai dari 29 Februari 2016 sampai 29 Janurai 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp.11.442.816.000 suku bunga 14%.

Subsidiary received financing from PT Caterpillar Finance Indonesia in 2016 with No. Contract 2529-0-16-0007, for the procurement of 2 units of Caterpillar Rotary Mixer 500B with 35 month period starting from 29 February 2016 until 29 Janurai 2019 with contract value of Rp.11.442.816.000 interest rate 14%.

Entitas anak mendapat pembiayaan dari PT ORIX Indonesia Finance, untuk pengadaan Dump Truck, Crane dan Ekskavator dengan jumlah fasilitas

Subsidiaries receive financing from PT ORIX Indonesia Finance, for the procurement of Dump Trucks, Cranes and Excavators with a total loan

pinjaman sebesar Rp.14.616.360.000, jangka waktu 36 bulan, suku bunga 6,24%.

facility of Rp.14,616,360,000, 36 month period, interest rate of 6.24%.

Entitas anak mendapat pembiayaan dari PT BCA Finance, untuk pengadaan 6 unit toyota innova dengan jumlah fasilitas pinjaman sebesar Rp.6.976.720.000 dengan jangka waktu 24 bulan, sukubunga efektif 8,67%.

Subsidiary obtained financing facility from PT BCA Finance, for procurement 6 unit Toyota camry with total facility amounted Rp.6,976,720,000, 24 term months, effective interest rate 8,67%.

Entitas anak mendapat pembiayaan dari PT SMF Leasing Indonesia, untuk pengadaan 30 unit Kobelco SK200 dengan jumlah fasilitas pinjaman sebesar Rp.30.294.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, suku bunga efektif 14%.

Subsidiary obtained financing facility fromPT SMF Leasing Indonesia, for procurement 30 unit Kobelco SK200 with total facility amounted Rp.30,294,000,000, 36 months term, effective interest rate 14%.

Entitas anak mendapat pembiayaan dari PT Bank Danamon Tbk, untuk pengadaan 100 unit Hino FM dengan jumlah fasilitas pinjaman sebesar Rp.113.503.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, suku bunga efektif 10,5% - 13,5%.

Subsidiary obtained financing facility from PT Bank Danamon Tbk, for procurement 100 unit Hino FMwith total facility amounted Rp.113,503,000,000, 36 months term, effective interest rate 10,5% - 13,5%.

Entitas anak mendapat pembiayaan dari PT Bumiputera, untuk pengadaan 8 unit excavator SK 480 dengan jumlah fasilitas pinjaman sebesar Rp.26.928.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, suku bunga efektif 9,9%.

Subsidiary obtained financing facility from PT Bumiputera, for procurement 8 unit excavator SK 480 with total facility amounted Rp.26,928,000,000, 36 term months, effective interest rate 9,9%.

20. UTANG BANK / *20. BANK LOANS*

UTANG BANK JANGKA PENDEK / *SHORT-TERM BANK LOANS*

	31 Desember/ *December 31,* 2017	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
Perusahaan:				***The Company:***
PT United Overseas Bank, Tbk	150.000.000.000	150.000.000.000	-	*PT United Overseas Bank, Tbk*
PT Bank Syariah Mandiri (KMK), Tbk	50.000.000.000	50.000.000.000	-	*PT Bank Syariah Mandiri (KMK), Tbk*
Jumlah	**200.000.000.000**	**200.000.000.000**	**-**	***Total***

UTANG BANK JANGKA PANJANG / *LONG-TERM BANK LOANS*

	31 Desember/ *December 31,* 2017	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
PT Bank Syariah Mandiri Tbk	642.115.459.727	377.359.155.290	187.658.160.354	*PT Bank Syariah Mandiri Tbk*
PT Bank Syariah Mandiri (KMK), Tbk	150.000.000.000	-	-	*PT Bank Syariah Mandiri (KMK),Tbk*
PT United Overseas Bank LimitedTbk	65.155.452.586	-	-	*PT United Overseas Bank LimitedTbk*
PT Indonesia Exim Bank	51.610.000.000	-	1.600.000.010	*PT Indonesia Exim Bank*
PT DBS Tbk	87.083.333.311	-	-	*PT DBS Tbk*
PT Bank Central AsiaTbk	55.000.000.000	-	-	*PT Bank Central AsiaTbk*
PT Bank BRI (Persero) Tbk	-	-	1.672.200.000	*PT Bank BRI (Persero)Tbk*
Sub Jumlah	**1.050.964.245.624**	**377.359.155.290**	**190.930.360.364**	***Sub Total***
Dikurangi:				***Less:***
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	55.000.000.000	127.566.715.966	55.506.470.639	*Current maturity*
Jumlah	**995.964.245.624**	**249.792.439.324**	**135.423.889.725**	***Total***

Perusahaan

PT Bank Syariah Mandiri

Perusahaan dan Bank Syariah Mandiri menandatangani akad-akad pembiayaan berupa Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan berdasarkan prinsip Murabahah dengan total limit pembiayaan sebesar Rp.535.000.000.000 dengan margin ditentukan secara dengan 10,25% yang dibayar secara angsuran selama 48 bulan. Pinjaman ini dijamin dengan kendaraan, tower crane, *scaffolding*, *formworks* dan piutang usaha yang akan jatuh tempo antara November 2019 hingga Desember 2020. Perusahaan juga menandatangani Akad Pembiayaan Dana Berputar dengan Akad Musyarakah dengan limit pembiayaan sebesar Rp.50.000.000.000.

The Company

PT Bank Syariah Mandiri

The Company and Bank Syariah Mandiri signed a financing agreement in the form of Akad Commitment to Limit of Financing Facility based on Murabahah principle with total financing limit of Rp.535,000,000,000 with margin equivalent rate of 10.25% paid in installments for 48 months. The loan is secured by vehicle, tower crane, scaffolding, formworks and accounts receivable which will mature between November 2019 and December 2020. The Company to sign a Financing Loan Agreement with a Musyarakah Contract with a financing limit of Rp.50,000,000,000.

PT Indonesia Exim Bank

Pada tanggal 16 Agustus 2017 Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman KMK dari PT Indonesia Exim Bank dengan jumlah maksimum sebesar Rp.52.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 9% yang akan jatuh tempo pada tanggal 16 Agustus 2018. Fasilitas ini dijaminkan dengan piutang usaha milik Perusahaan sebesar Rp.60.000.000.000.

PT Indonesia Exim Bank

On August 16, 2017, the Company obtained a loan facility KMK with a maximum amount of Rp.52,000,000,000 with interest rate 9% and will mature on August 16, 2018. This loan is collateralized with trade accounts receivable, amounting to Rp.60,000,000,000.

Perjanjian pinjaman juga mencakup persyaratan tertentu antara lain: membatasi hak Grup untuk mengubah anggaran dasar dan susunan direksi dan komisaris, melakukan penggabungan usaha, memberikan pinjaman kepada pihak afiliasi

The loan agreements relating to the above facilities contain centain covenants which among others: restrict the Group to amend its article of association, change the compasition of the board of commissioners and directors, marger, provide loans to affiliates

United Overseas Bank Limited

Pinjaman pada United Overseas Bank Limitedmerupakan pinjaman KMK, dengan Fasilitas Multi Option trade untuk mendukung kebutuhan modal kerja debitur dan untuk menjamin proses penawaran (*bidding)*, pembayaran uang muka (*advence payment*), pelaksanaan (*performance*) dan pemeliharaan (*maintenance*), kontrak debitur Sesuai dengan akta Nomor C-27.HT.03.02-Th.2001 tanggal 19 Oktober 2016 Perihal perjanjian kredit modal kerja dengan persyaratan sebagai berikut : Plafon pinjaman Rp.150.000.000.000.

United Overseas Bank Limited

Loans at United Overseas Bank Limited are KMK loans, with Multi Option Trade Facility to support the debtor's working capital needs and to secure the bidding process, advance payment, performance and maintenance, debtor contracts Deed No. C-27.HT.03.02-Th.2001 dated October 19, 2016 Subject to the working capital credit agreement under the following conditions: Loan ceiling of Rp.150,000,000,000.

Masa berlaku perjanjian adalah terhitung dari 19 Oktober 2016 sampai dengan 19 Oktober 2017 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar JIBOR +3,25% per tahun

The validity of the agreement is effective from October 19, 2016 to October 19, 2017 with interest rate at JIBOR +3,25% per annum.

Perjanjian dijamin sesuai Perjanjian Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 38, Perjanjian Gadai Deposito No. 39 dan Perjanjian Gadai Rekening No. 41 tanggal

The agreement is guaranteed in accordance Fiduciary Guarantee on Receivable Agreement No. 38, Pledge Deposit Agreement No. 39 and Pledge

19 Oktober 2016 dibuat dihadapan Veronica Nataadmadja, SH, Notaris di Jakarta.

Accounts Agreement No. 41 dated October 19, 2016 made before Veronica Nataadmadja, SH, Notary in Jakarta.

Pada tanggal 7 September 2017, Perusahaan mendapat persetujuan dari United Overseas Bank LimitedIndonesia untuk rencana penambahan saham dengan melakukan penawaran umum saham perdana sehingga PT PP (Persero) Tbk sebagai pemegang saham mayoritas akan terdilusi menjadi tidak kurang dari sebesar 60%.

On September 7, 2017, the Company obtained approval from United Overseas Bank LimitedIndonesia for its planto conduct the additional stock by an initial public offering and PT PP (Persero) Tbk as majority shareholder will be diluted to benot less than 60%.

Entitas Anak

Subsidiary

Bank DBS Indonesia

Bank DBS Indonesia

Perusahaan dan Bank DBS Indonesia menandatangani akad-akad pembiayaan berupa Akad Jaminan Fidusia (Alat-alat Berat) Perbankan dengan No. 129 tanggal 23 Januari 2017 dengan total limit pembiayaan sebesar Rp.150.000.000.000 dengan margin ditentukan secara dengan 10,5% yang dibayar secara angsuran selama 36 bulan. Pinjaman ini dijaminkanuntuk pengadaan 50 unit Dump Truck denganjatuh tempo antara Maret 2019 hingga Maret 2022.

The Company and Bank DBS Indonesia signed a financing contract in the form of a Fiduciary Guarantee Agreement (Heavy Equipment) Banking with no. 129 dated January 23, 2017 with a total financing limit of Rp.150,000,000,000 with a margin set at 10.5% payable in installments over 36 months. The loan is secured for the procurement of 50 units of Dump Trucks with maturities between March 2019 and March 2022.

Bank Central Asia

Bank Central Asia

Kredit lokal dengan maksimum pinjaman sebesar Rp.10.000.000.000 dan dengan jangka waktu sampai tanggal 24 Maret 2017 (3 bulan) dengan tingkat bunga 10,5% per tahun.

Local credit with a maximum loan of Rp.10,000,000,000 and with a term up to March 24, 2017 (3 months) with an interest rate of 10,5% per annum.

Omnibus 1 (Time loan Revolving dan Bank Garansi) dengan maksimum pinjaman sebesar Rp.90.000.000.000 dan dengan jangka waktu sampai tanggai 24 Maret 2017 (3 bulan) dengan tingkat bungal 11,75% per tahun.

Omnibus 1 (Time loan Revolving and Bank Guarantee) with maximum loan of Rp.90,000,000,000 and with a term until March 24, 2017 (3 months) with a bungalow rate of 11.75% per annum.

Omnibus 2 (time loan Revolving by Project dan Bank Garansi) dengan maksimum pinjaman sebesar Rp100.000.000.000 dan dengan jangka waktu sampai tanggal 24 Maret 2017 (3 bulan) dengan tingkat bunga 11,75% per tahun.

Omnibus 2 (time loan of Revolving by Project and Bank Guarantee) with maximum loan of Rp.100,000,000,000 and with period until March 24, 2017 (3 months) with interest rate of 11,75% per annum.

Sehubungan dengan pinjaman-pinjaman tersebut di atas, Perusahaan diwajibkan antara lain mempertahankan rasio keuangan dan memenuhi batasan-batasan tertentu yang berhubungan dengan terjadinya utang, penjualan aset tetap investasi, reorganisasi dan hal-hal lainnya yang tercantum dalam perjanjian.

In relation to the above credit facilities, the Company is required, among others, to maintain certain financial ratios and fulfill certain covenants concerning incurrence of indebtedness, sale of property, plant and equipment, investments reorganization and other matters as stated in the agreements.

21. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

21. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION

Penilaian beban manfaat karyawan dan aset imbalan pasca kerja Tahun 2017 dan 2016, sesuai dengan PSAK No.24 (Revisi 2013) dilakukan oleh PT Bestama Aktuaria, aktuaris independen dengan

The assessment of employees' benefits expenses and post-employment benefits assets 2017 and 2016, in accordance with PSAK No.24 (Revised 2013), is performed by PT Bestama Aktuaria, an

laporan No. 140/AKT-PSAK/EP/11/2017 tanggal 8 Januari 2018.Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

independent actuary with report No. 140 / AKT-PSAK / EP / 11/2017 dated January 8, 2018. The followings are the actuary assumptions which are used:

	2017	2016	2015	
Tingkat diskonto per Tahun	6,9%	8,3%	9,1%	*Discount rate per Annum*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	8,3%	8,3%	9%	*Salary increment rate per Annum*
Tingkat pensiun normal	55 tahun/years	55 tahun/years	55 tahun/years	*Normal retirement rate*
	Indonesia MortalityTable 3	Indonesia MortalityTable 3	Indonesia MortalityTable 3	*Mortality rate*

Rekonsiliasi Beban imbalan pasca kerja yang diakui di laba rugi komprehensif adalah sebagai berikut:

Reconciliation of Amounts recognized in comprehensive income in respect of the defined benefit plan are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2017	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
Biaya jasa:				*Service cost:*
Biaya jasa kini	1.614.333.753	312.125.193	207.295.756	*Current service cost*
Beban bunga neto	398.868.574	100.933.538	82.438.297	*Net interest expense*
Komponen dari biaya imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi	2.013.202.327	413.058.731	289.734.053	*Components of defined benefit costs recognised in profit or loss*
Pengukuran kembali liabilitasimbalan pasti - neto:				*Remeasurement onthe net defined benefit liability:*
Beban aktuarial periode berjalan	516.554.962	7.015.935	5.940.334	*Actuarial loss during the Period*
Komponen beban imbalan pasti yangdiakui dalam penghasilan komprehensif lain	516.554.962	7.015.935	5.940.334	*Components ofdefined benefit costsrecognised in other comprehensive income*
Jumlah	**2.529.757.289**	**420.074.666**	**295.674.387**	***Total***

Dari biaya tahun berjalan, Rp.2.529.757.289, Rp.420.074.666 dan Rp.295.674.387 masing-masing termasuk dalam beban umum dan administrasi tahun 2017, 2016 dan 2015.

Of the current year costs, Rp. 2,529,757,289, Rp.420,074,666 and Rp.295,674,387 respectively are included in general and administrative expenses in 2017, 2016 and 2015.

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Movements in the present value of the defined benefit obligation were as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2017	31 Desember/ *December 31,* 2016	31 Desember/ *December 31,* 2015	
Kewajiban imbalan pasti – awal	1.513.533.602	1.201.589.736	905.915.349	*Opening defined benefits Obligation*
Penyesuaian atas Pembelian entitas anak	3.646.712.811			
Biaya jasa kini	1.614.333.753	312.125.193	207.295.756	*Current service cost*
Beban bunga	398.868.574	100.933.538	82.438.297	*linterest expense*
Pengukuran kembali (keuntungan/kerugian):				*Remeasurement (gains)/losses:*
Beban aktuarial periode berjalan	446.330.639	7.015.935	5.940.334	*Actuarial loss during the Period*
Pembayaran manfaat	(295.776.864)	(108.130.800)	-	*Benefits paid*
Kewajiban imbalan pasti – akhir	**7.324.002.515**	**1.513.533.602**	**1.201.589.736**	***Closing defined Benefits Obligation***

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 1%, kewajiban imbalan pasti akan berkurang menjadi sebesar Rp.2.142.966.212 (meningkat menjadi sebesar Rp.2.378.462.413).

If the discount rate increases (decreases) by 1%, post-employment benefits obligation will be decrease to Rp.2,142,966,212 (increase to Rp.2,378,462,413).

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the postemployment benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Kenaikan tingkat diskonto berpengaruh menurunkan Kewajiban Kini dan Biaya Jasa Kini, begitu juga sebaliknya. Kenaikan gaji rata-rata berbanding lurus dengan kenaikan Kewajiban Kini dan Biaya Jasa Kini, begitu juga sebaliknya. Tidak ada perbedaan dan perubahan metode yang dilakukan dalam menghitung analisis sensitivitas terhadap periode-periode sebelumnya. Metode yang digunakan adalah metode PUC dengan mengasumsikan kenaikan dan penurunan tingkat diskonto dan gaji rata-rata sebesar 1%.

The increase in the discount rate has an effect on reducing Current Liabilities and Current Service Costs, and vice versa. The average salary increase is directly proportional to the increase in Current Liabilities and Current Service Costs, and vice versa. No differences and method changes were made in calculating sensitivity analysis over previous periods. The method used is the PUC method by assuming an increase and decrease in the average discount rate and salary by 1%.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the post-employment benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the post-employment benefits obligation recognized in the consolidated statement of financial position.

Keterbatasan metode ini adalah kami tidak meghitung kombinasi dari kenaikan ataupun penurunan tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji rata-rata. Hasil yang didapat hanya berdampak terhadap kenaikan salah satu asumsi tanpa memperhatikan kenaikan atau pun penurunan asumsi lainnya.

The limitation of this method is that we do not calculate the combination of the increase or decrease in the discount rate and the average rate of increase in salary. The results only affect the increase of one assumption regardless of the increase or decrease in other assumptions.

22. MODAL SAHAM

22. SHARE CAPITAL

Berdasarkan Keputusan Sirkular Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akta No. 11 tanggal 17 Juli 2017 dari Notaris Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H., yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0014790.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 19 Juli

Based on Shareholder Circular Decision as set forth in the Deed. 11 dated July 17, 2017 of Notary Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H., which has obtained approval from the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, in accordance with Decision Letter no. AHU-0014790.AH.01.02.TAHUN 2017 dated July 19,

2017. Para pemegang saham antara lain menyetujui peningkatan Modal Dasar semula Rp.440.000.000.000 terbagi atas 440.000 saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000, menjadi Rp.2.400.000.000.000 terbagi atas 2.400.000 saham. Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perusahaan semula Rp.110.760.000.000 terbagi atas 110.760 saham menjadi Rp.787.305.000.000 terbagi atas 787.305 saham.

2017. The shareholders approved, among other things, the increase in the original Authorized Capital of Rp.440,000,000,000 divided into 440,000 shares with a nominal value of Rp 1,000,000, to Rp.2,400,000,000. 000 divided into 2,400,000 shares. The Issued and Paid-in Capital of the Company was originally Rp.110,760,000,000 divided into 110,760 shares to Rp.787,305,000,000 divided into 787,305 shares.

Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor dilakukan dalam bentuk setoran tunai sebesar Rp.599.880.000.000 dan Rp.120.000.000 masing-masing oleh PT PP dan YKKPP dan melalui kapitalisasi saldo laba dan utang dividen sebesar Rp.76.530.000.000 dan Rp.15.000.000 masing-masing oleh PT PP dan YKKPP.

Increase of Subscribed and Paid-up Capital were made in the form of cash deposits amounting to Rp.599,880,000,000 and Rp.120,000,000, respectively by PT PP and YKKPP and through capitalization of retained earnings and dividends payable of Rp.76,530,000,000 and Rp.15,000,000, respectively by PT PP and YKKPP.

Tujuan peningkatan modal saham untuk memperkuat struktur pemodalan Perusahaan.

The purpose of the increase of share capital to strengthen the Company's capital structure.

Berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 27 tertanggal 14 Agustus 2017, para pemegang saham menyetujui perubahan nilai nominal per saham atas saham Perusahaan dari nilai nominal per saham sebesar Rp.1.000.000 menjadi nilai nominal per saham sebesar Rp.100 dan mengeluarkan saham dalam simpanan sebanyak 4.239.330.000 lembar saham baru yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Perdana Saham Perusahaan (*Initial Public Offering*) dengan nilai nominal Rp.100. Perubahan Anggaran Dasar disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0016606.AH.01.02.TAHUN 2017 tertanggal 14 Agustus 2017.

Based on the Notarial Deed of Fathiah Helmi, S.H., No. 27 dated 14 August 2017, the shareholders approved the change in the par value per share of the Company's shares from par value per share amounting to Rp.1,000,000 to par value per share of Rp.100 and issued shares in deposits totaling 4,239,330,000 new shares which will be offered to the public through Initial Public Offering with nominal value of Rp.100. The amendment of the Articles of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter no. AHU-0016606.AH.01.02.TAHUN 2017 dated August 14, 2017.

Anggaran Dasar telah diubah terakhir berdasarkan Keputusan Sirkular Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akta No. 11 tanggal 1Februari 2018 dari Notaris Fathiah Helmi S.H.,yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0015341.AH.01.11 TAHUN 2018 tanggal 2 Februari 2018. Para pemegang saham antara lain menyetujui peningkatan Modal Dasar ditempatkan dan disetor sebesar 10.224.271.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1.022.427.100.000.

The Articles of Association have been amended the latest by virtue of Circular Shareholder Decision as set forth in the Deed. 11 dated February 1, 2018 of Notary Fathiah Helmi S.H., which has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, in accordance with Decision Letter no. AHU-0015341.AH.01.11 TAHUN 2018dated February 2, 2018. The shareholders approved, among others, an increase in the issued and paid-up capital of 10,224,271,000 shares with a nominal value of Rp.1,022,427,100,000.

(Lanjutan/*Continued*)

Komposisi pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's shareholders as at December 31, 2017, 2016, and 2015 follows:

	2017			
Pemegang Saham	**Total saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of shares issued and fully paid***	**Persentase Kepemilikan/ *Percentage of ownership***	**Jumlah/ *Amount***	***Shareholders***
PT PP (Persero) Tbk.	7.871.480.000	76,99%	787.148.000.000	*PT PP (Persero) Tbk.*
Yayasan Kersejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan	1.570.000	0,01%	157.000.000	*Yayasan Kersejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan*
Masyarakat	2.351.221.000	23,00%	235.122.100.000	*Public*
Jumlah	**10.224.271.000**	**100%**	**1.022.427.100.000**	***Total***

	2016			
Pemegang Saham	**Total saham ditempatkan dan disetor penuh/*Number of shares issued and fully paid***	**Persentase Kepemilikan/ *Percentage of ownership***	**Jumlah/ *Amount***	***Shareholders***
PT PP (Persero) Tbk.	110.738	99,98%	110.738.000.000	*PT PP (Persero) Tbk.*
Yayasan Kersejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan	22	0,02%	22.000.000	*Yayasan Kersejahteraan KaryawanPembangunan Perumahan*
Jumlah	**110.760**	**100%**	**110.760.000.000**	***Total***

	2015			
Pemegang Saham	**Total saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of shares issued and fully paid***	**Persentase Kepemilikan/ *Percentage of ownership***	**Jumlah/ *Amount***	***Shareholders***
PT PP (Persero) Tbk.	31.995	99,98%	31.995.000.000	*PT PP (Persero) Tbk.*
Yayasan Kersejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan	5	0,02%	5.000.000	*Yayasan Kersejahteraan KaryawanPembangunan Perumahan*
Jumlah	**32.000**	**100%**	**32.000.000.000**	***Total***

23. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Akun ini merupakan selisih antara nilai nominal saham yang diterbitkan dalam rangka IPO pada bulan Juni 2016 dengan hasil yang diterima, setelah dikurangi biaya penerbitan saham sebagai berikut:

23. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

This account represents the difference between the total par value of new shares issued in connection with the IPO conducted in June 2016 and the related proceeds, after netting off the share issuance costs are as follows:

	2017	
Agio saham	775.902.930.000	*Capital paid in excess of par value from initial public offering*
Beban emisi saham	(26.342.768.461)	*Share issuance costs*
Jumlah	**749.560.161.539**	***Total***

(Lanjutan/*Continued*)

24. PENDAPATAN USAHA / *24. REVENUE*

	2017	2016	
Pekerjaan Sipil	1.412.258.373.284	196.961.109.113	*Civil Work*
Pendapatan Sewa	240.703.869.307	105.624.888.128	*Rental Income*
Batching Plant	163.350.454.383	68.649.821.240	*Batching Plant*
Jumlah	**1.816.312.696.974**	**371.235.818.481**	***Total***

Pada tahun 2017 dan 2016 penjualan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan pada Perusahaan PT PP (Persero) Tbk, sebesar Rp.186.172.051.440 dan Rp.309.978.092.279.

In 2017 and 2016 sales exceeding 10% of total sales of PT PP (Persero) Tbk, amounting to Rp.186,172,051,440 and Rp.309,978,092,279.

25. HARGA POKOK PENDAPATAN / *25. COST OF REVENUES*

	2017	2016	
Pekerjaan Sipil			***Civil Works***
Beban Bahan	615.093.365.604	43.117.522.571	*Material Load*
Beban Tidak Langsung	308.258.056.776	87.375.286.753	*Overhead Expenses*
Beban Penyusutan	108.850.127.209	18.732.327.058	*Depreciation Expense*
Beban Pengakutan	19.991.763.020	3.074.120.298	*Freight Load*
Beban Pemeliharaan	5.957.425.835	265.769.591	*Maintenance Expense*
Beban Suku cadang	5.761.924.465	2.804.964.641	*Spare Part Expense*
Beban Asuransi	1.643.807.730	1.378.300.425	*Insurance Expense*
Jumlah Pekerjaan Sipil	**1.065.556.470.639**	**156.748.291.337**	***Total Civil Works***
Persewaan Peralatan			***Equipment Rental***
			Depreciation Expense
Beban Penyusutan	75.364.054.374	33.486.836.361	
Beban Suku cadang	56.288.832.703	5.848.359.250	*Spare Part Expense*
Beban Tidak Langsung	37.316.496.920	11.261.073.151	*Overhead Expenses*
Beban Pengakutan	6.433.672.021	1.800.495.653	*Freight Load*
Beban Pemeliharaan	4.994.084.388	2.690.472.949	*Maintenance Expense*
Beban Asuransi	1.215.095.220	1.578.415.412	*Insurance Expense*
JumlahPersewaan Peralatan	**181.612.235.626**	**56.665.652.776**	***Total Equipment Rental***
Ready Mix (Batching Plant)			***Ready Mix (Batching Plant)***
Beban Bahan	100.676.027.161	26.323.016.124	*Material Load*
Beban Tidak Langsung	10.771.871.569	19.049.151.562	*Overhead Expenses*
Beban Penyusutan	9.582.857.332	4.442.754.156	*Depreciation Expense*
Beban Pengakutan	1.052.617.776	6.359.407.305	*Freight Load*
Beban Suku cadang	599.742.623	5.834.922.203	*Spare Part Expense*
Beban Asuransi	566.170.785	590.700.182	*Insurance Expense*
JumlahReady Mix (Batching Plant)	**123.249.287.247**	**62.599.951.532**	***TotalReady Mix (Batching Plant)***
Jumlah Harga Pokok Pendapatan	**1.370.417.993.512**	**276.013.895.645**	***Total Cost of Revenues***

Tidak terdapat pembelian dari satu pemasok yang melebihi 10% dari jumlah pembelian.

There were no purchases exceeding 10% of the total cost of revenue paid from a single supplier.

26. BEBAN USAHA / *26. OPERATING EXPENSE*

	2017	2016	
Biaya Pegawai	31.430.652.737	9.188.404.858	*Employment Expenses*
Biaya Pengembangan Umum	-	1.394.434.904	*Business Development Costs*
Biaya pajak atas revaluasi aset tetap	-	1.336.530.993	*Tax expenses on fixed assets revaluation*
Biaya Umum	12.802.996.472	854.463.796	*Other Expenses*
Biaya Rumah Tangga	732.671.606	895.622.617	*Household Cost*
Biaya Alat Tulis Kantor	-	210.799.426	*Cost Stationery Office*
Biaya Penyusutan Gedung	1.291.595.703	61.263.312	*Depreciation Building*
Amortisasi Asset Tidak Berwujud	10.771.716.151	-	*Amortization of Intangible Assets*
Jumlah	**57.029.632.669**	**13.938.909.707**	***Total***

27. PENDAPATAN (BEBAN) KEUANGAN / *27. FINANCE INCOME (EXPENSE)*

	2017	2016	
Bunga atas pinjaman Kredit Investasi	(21.403.599.547)	(20.351.045.381)	*Interest on investment loan*
Bunga atas liabilitas sewa pembiayaan	(52.334.587.190)	(1.580.080.672)	*Interest on the liabilityof the finance Lease*
Bunga atas pinjaman kredit modal kerja	(15.993.416.684)	(4.788.962.206)	*Interest on working capital loans*
Bunga pinjaman dana bank	-	-	*Interest of bank Loan*
Pendapatan Jasa Giro – net	5.001.956.642	1.135.033.993	*Revenue from currentaccount-net*
Pendapatan bunga deposito - net	-	477.000	*Deposito interest income–net*
Beban administrasi bank	(2.884.998.466)	(1.132.100.310)	*Bank charges*
Jumlah	**(87.614.645.245)**	**(26.716.677.576)**	***Total***

28. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN / *28. OTHER INCOME (EXPENSES)*

	2017	2016	
Pendapatan diluar usaha	10.303.513.326	1.200.734.910	*Revenue beyound business*
Beban diluar usaha	(2.764.238.234)	(51.361.911)	*Expense beyond Business*
Beban Lain-lain (Denda Pajak)	(76.332.022)	(829.392.069)	*Other expenses (tax penalties)*
Skbdn	(2.706.501.927)	-	*Skbdn*
Beban penurunan nilai wajar piutang	(4.666.854.628)	(1.952.126.196)	*Cost of Impairment offairValue of Receivable*
Jumlah	**89.586.515**	**(1.632.145.266)**	***Total***

29. AKUISISI ENTITAS ANAK

Pada bulan Juni 2017, Perusahaan mengakuisisi 51% saham PT Lancarjaya Mandiri Abadi melalui pembelian 331.500 lembar saham milik Tuan Afandi dengan biaya perolehan Rp.798.000.000.000. Perusahaan mengakui/mencatat aset dan liabilitas LMA dengan menggunakan nilai wajar aset bersih pada tanggal 30 Juni 2017.

Tujuan akuisisi ini adalah untuk memperluas cakupan bisnis Grup dalam industri konstruksi.

29. ACQUISITION OF A SUBSIDIARY

On December 2017, the Company, acquired 51% ownership of PT Lancarjaya Mandiri Abadi through the purchase of 331,500 shares from Mr. Afandi with acquisition cost of Rp.798,000,000,000. The Company recognized the assets and liabilities of LMA at fair values as of June 30, 2017.

The objective of the acquisition is to expand the Group's scope of business in the construction industry.

(Lanjutan/*Continued*)

Tabel berikut ini merangkum imbalan yang dibayar dan jumlah aset yang diperoleh dan liabilitas yang diakui pada tanggal perolehan.

The following table summarises the consideration paid and the amounts of assets acquired and liabilities recognised at acquisition date.

Harga perolehan	798.000.000.000	*Purchase consideration*
Alokasi harga perolehan		*Purchase price alocation*
- Aset lancar	623.453.178.231	*Current assets -*
- Aset tetap	764.000.668.015	*Fixed assets -*
- Aset distribusi revaluasi goodwill	122.496.945.627	*Asset distribution revaluation goodwill -*
- Aset tidak berwujud	22.104.373.598	*Intangible assets -*
- Goodwill	246.863.514.371	*Goodwill -*
- Liabilitas lancar	(454.694.566.504)	*Current liabilities -*
- Liabilitas sewa guna usaha	(131.871.808.691)	*Finance lease obligation -*
- Liabilitas imbalan kerja	(3.759.693.787)	*Employee benefit obligation -*
- Kepentingan nonpengendali	(390.592.610.860)	*Non-controlling interest -*
Nilai wajar dari aset bersih diperoleh	798.000.000.000	*Fair value of net assets acquired*

Saldo *Goodwill*sebesar Rp.391.464.833.596yang timbul dari akuisisi LMA di atas terutama dari potensi kenaikan nilai wajar dari sinergi pekerjaan konstruksi/sipil kepada pelanggan. *Goodwill* tidak diamortisasi namun diuji untuk penurunan nilai setiap tahun. Perusahaan akan melakukan penilaian *Goodwill* pada akhir tahun.

Goodwill amounted to Rp.391,464,833,596 arises from the above acquisition principally because of the potensial increase in the fair value of synergy of construction/civil work to customers. Goodwill is not amotized but will be tested for impairment annually. The Company will conduct a Goodwill assessment at the end of the year.

Harga perolehan goodwill telah dilakukan penilaian kembali oleh KJPP Yanuar Bey & Rekan dalam laporannya No.Y&R/BV/18/0202 tanggal 9 Februari 2018. Berdasarkan laporan tersebut nilai goodwill per 31 Desember 2017 yang dapat diatribusikan ke aset tetap sebesar Rp.122.496.945.627 dan telah dibebankan penyusutannya sebesar Rp.7.436.498.890.

The cost of goodwill has been revalued by KJPP Yanuar Bey & Rekan in its report No.Y & R / BV / 18/0202 dated February 9, 2018. Based on the report, goodwill as of December 31, 2017 attributable to property and equipment amounting to Rp.122,496,945,627 and has accrued depreciation amounting to Rp.7,436,498,890.

Sedangkan yang dapat diatribusikan ke aset tak berwujud, sebagai berikut:

While attributable to intangible assets, as follows:

	2017	
Aset tidak berwujud	22.104.373.598	*Intagble assets*
Amortisasi	(10.831.143.063)	*Amortization*
Jumlah	**11.273.230.535**	***Total***

Goodwill tersebut tidak diharapkan dapat dikurangkan untuk tujuan pelaporan pajak.

Goodwill is not expected to be deductible for tax purposes.

Estimasi nilai wajar ditetapkan dengan metode nilai pasar dan pendapatan.

The fair value was estimated by applying a market approach and income approach.

Tidak terdapat aset atau liabilitas kontinjensi.

There are no contingent assets or liabilities.

Aset lancar dan aset tetap telah dicadangkan dan disusutkan dengan nilai yang cukup.

Current assets and fixed assets have been allowanced and depreciated with sufficient value.

Biaya terkait akuisisi sebesar Rp.2.237.467.577 tercatat pada biaya usaha pada akun biaya pengembangan usaha.

Cost related to acquisition amounting to Rp.2,237,467,577 was recorded as business development cost in operating axpenses.

(Lanjutan/*Continued*)

30. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS INVESTASI DAN PENDANAAN NON KAS

30. SUPPLEMENTAL DISCLOSURES ON NON CASH INVESTING AND FINANCING ACTIVITIES

	2017	2016	
Peningkatan modal ditempatkan dan disetor	67.000.000.000	78.760.000.000	*Additional paid-in capital*
Penambahan aset tetap melalui utang		17.009.400.000	*Increase in plant, property and equipment thorugh incurrence of liabilities*

31. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

31. RELATED PARTY TRANSACTIONS

Grup melakukan transaksi usaha dan lainnya dengan pihak berelasi. Transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The Group has engaged in trade and other transactions with related parties. Significant transactions and balances with related parties are as follows:

a. Sifat hubungan dan transaksi

a. Nature of Relationship and transaction

Pihak – pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat dari hubungan/ *Nature of relation*	Sifat dari transaksi/ *Nature of transaction*
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	Pemegang saham pengendali langsung Perseroan, pemberi kerja/ *Direct controlling shareholder of the Company, project owner*	Pembayaran dividen, pinjaman, / *Dividend payment and loan* pendapatan usaha/ *revenue* Piutang Usaha / *Accounts receivable* Piutang Retensi / *Retension receivable* Tagihan Bruto / *Gross contractual* *Uang Muka Pemberi Kerja / Advances From Project Owners*
PT Pembangunan Perumahan Properti	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Piutang Usaha / *Accounts receivable* Tagihan Bruto Pemberi Kerja / *Gross Receivables From Project Owners* *Pendapatan Usaha / Revenue*
PT Pembangunan Perumahan Urban	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*	Piutang Usaha / *Accounts receivable* Piutang Retensi / *Retension receivable* Tagihan Bruto Pemberi Kerja / *Gross Receivables From Project Owners* *Utang Lain-Lain / Other Short Term Liabilites*
Dewan Komisaris dan Direksi/ *Board of Commisisoners and Directors*	Personil manajemen kunci/ *Key management personnel*	Kompensasi dan remunerasi/ *Compensation and remuneration*

b. Saldo

b. Balances

	2017 Jumlah/ Amount	2017 %	2016 Jumlah/ Amount	2016 %	
Aset:					***Asets:***
Piutang usaha	252.958.816.440	4,94%	82.147.743.025	7,40%	*Trade receivable*
Piutang retensi	13.361.796.928	0,26%	4.750.557.675	0,43%	*Retensionreceivable*
Tagihan bruto kepada pemberi kerja	464.995.584.127	9,08%	90.361.902.132	8,14%	*Gross receivable from project owner*
Piutang Lain-lain	57.171.692.739	1,12%	60.366.794	0,01%	*Other Receivable*
Liabilitas:					***Liabiities:***
Utang lain-lain	6.043.378.223	0,23%	5.589.861.593	0,65%	*Other payable*
Uang mukapemberi Kerja - Berelasi	34.434.880.452	4,38%	45.789.216.572	5,36%	*Unearned revenue - Relate*
Remunerasi	5.114.120.087	11,14%	2.214.588.644	17,57%	***Remuneration***
Pendapatan Usaha	321.594.785.651	72,92%	130.541.659.232	35,16%	***Revenue***

(Lanjutan/*Continued*)

Perusahaan mempunyai komitmen untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi, diantaranya adalah sebagai berikut :

The Company has commitments to carry out the following construction work :

Nama Proyek / *Name of Project*	Nilai Kontrak / *Value of Contract*	Pemberi Kerja / *Owner Project*	Tenggat Waktu / *Period* Mulai / *Start*	Selesai / *End*
Proyek Bekisting Amartha View Semarang	8.307.962.400	PTPP Urban	24-Dec-16	22-Jul-17
Proyek Bekisting Verde 2 Condominium	30.393.550.000	PT Total Bangun Persada Tbk	17-Nov-16	30-Apr-18
Proyek Bekisting Aeon Used Mix Sentul	78.749.778.775	PTPP Persero, Tbk	27-Feb-17	27-Feb-18
Proyek Batching Plant Tol Trans	199.225.174.736	PTPP Persero, Tbk	8-Mar-16	18-Dec-17
Proyek Batching Plant GKL (Tower Emerald)	2.379.925.000	PTPP Persero, Tbk	23-Jun-16	23-Mar-17
Proyek Batching Plant GKL (Tower Barclay)	2.352.221.000	PTPP Persero, Tbk	2-May-16	23-Mar-17
Proyek Batching Plant Mktt 5	47.940.350.000	PTPP Persero, Tbk	6-Dec-16	31-May-17
Proyek Tol Trans Sumatera	360.164.898.000	PTHK - Tol Trans Sumatera	8-Mar-16	29-Oct-17
Proyek Tol Pandaan - Malang	615.165.371.807	PT PP - JASA MARGA	16-Nov-16	31-Oct-18
Proyek Tol Manado - Bitung	730.863.912.975	PTJasa marga Manado Bitung	28-Dec-16	27-Dec-18
Proyek Bendung Way Sekampung	551.754.100.000	PT PU (Pekerjaan Umum)	1-Dec-16	6-Sep-20
Proyek Pengendalian Lahar Sinabung	126.629.029.921	PT PU (Pekerjaan Umum)	27-Mar-17	22-Nov-19
Proyek Bendung Leuwi Keris	456.037.590.896	PT PU (Pekerjaan Umum)	27-Mar-17	1-Mar-21
Proyek Banjir Kanal Jakarta – Sunter (Jedi)	72.824.791.300	PTPP Persero, Tbk	16-Jul-17	25-May-18
Proyek Terminal Lrt Koridor 1	36.348.993.517	PTPP Persero, Tbk	17-Jul-17	18-Nov-17
Proyek Danau Tempe	34.700.000.000	PTPP Persero, Tbk	Agust-17	Jan-19
Proyek Soetta Terminal 3 Sec 2	205.000.000.000	Angkasa Pura II Persero	28-Nov-17	11-Jan19
Proyek Pollux Batam	56.000.000.000	PTPP Properti, Tbk	14-Nov-17	31-Okt-18
Jumlah	**3.614.837.650.327**			

33. LABA DASAR PER SAHAM

Laba dasar per saham dihitung dengan membagi laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah saham rata-rata tertimbang biasa yang beredar sepanjang tahun.

33. BASIC EARNINGS PER SHARE

Basic earning per share is calculated by dividing the profit attributable to the owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

	2017	2016	
Laba bersih kepada pemilik entitasinduk	188.300.612.372	41.362.822.803	*Net profit attributable to owners of the parent*
Jumlah rata-rata saham biasa yang beredar	4.576.393.614	356.682.740	*The average number of ordinary shares outstanding*
Laba dasar per saham	**41**	**116**	***Basic earning per share***

Pada tanggal 31 Desember 2017, dan 2016, tidak ada efek yang berpotensi menjadi saham biasa. Oleh karena itu, laba per saham dilusian sama dengan laba per saham dasar.

As at December 31, 2017, and 2016 , there were no existing instruments which could result in the issue of further ordinary shares. Therefore, diluted earning per share is equivalent to basic earning per share.

(Lanjutan/*Continued*)

34. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas Grup rentan terhadap berbagai risiko keuangan: risiko pasar (termasuk risiko tingkat bunga dan risiko harga), risiko kredit, dan risiko likuiditas.

Program manajemen risiko Grup secara keseluruhan dipusatkan pada pasar keuangan yang tidak dapat diprediksi dan Grup berusaha untuk memperkecil efek yang berpotensi merugikan kinerja keuangan Grup.

Manajemen risiko dijalankan oleh Direksi Grup. Direksi melakukan identifikasi, evaluasi, dan lindung nilai terhadap risiko-risiko keuangan, apabila dianggap perlu. Direksi bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Grup secara keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko nilai mata uang, risiko suku bunga, risiko kredit, penggunaan instrumen keuangan derivatif dan instrumen keuangan non-derivatif, dan investasi atas kelebihan likuiditas.

a) Faktor-faktor risiko keuangan

1) Risiko pasar

Grup rentan terhadap risikotingkat bunga yang berasal dari dampak perubahan tingkat bunga yang dimiliki oleh aset dan liabilitas tertentu yang mengandung komponen tingkat bunga.

Kebijakan manajemen risiko Grup dimaksudkan untuk mengurangi dampak keuangan dari fluktuasi tingkat bunga serta meminimalisir potensi kerugian yang dapat berdampak pada risiko keuangan Grup.

Risiko tingkat suku bunga

Risiko arus kas tingkat bunga adalah risiko akibat perubahan tingkat bunga pasar yang mempengaruhi arus kas yang terkait dengan instrumen keuangan dengan tingkat bunga variabel.

Risiko tingkat suku bunga Grup timbul dari pinjaman. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat bunga mengambang mengekspos Grup terhadap risiko suku bunga arus kas. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat suku bunga tetap mengekspos Grup terhadap risiko nilai wajar suku bunga. Risiko tingkat suku bunga dari kas, piutang non-usaha, piutang retensi, jumlah kontraktual tagihan bruto pemberi kerja, dan proyek dalam pelaksanaan tidak signifikan.

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Group's activities are exposed to a variety of financial risks: market risk (including, interest rate risk, and price risk), credit risk and liquidity risk.

The Group's overall risk management programme focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimise potential adverse effects on the Group's financial performance.

Risk management is carried out by the Group's Board of Directors. The Board of Directors identifies, evaluates and hedges financial risks, where considered appropriate. The Board of Directors has the responsibility to determine the basic principles of the Group's risk management as well as principles covering specific areas, such as currency risk, interest rate risk, credit risk, the use of derivative financial instruments and nonderivative financial instruments and the investment of excess liquidity

a) Financial risk factors

1) Market risk

The Group is exposed to interest rate risk through the impact of rate changes on interest bearing assets and liabilities.

The Group's risk management policies are designed to mitigate the financial impact of fluctuations in interest rates and to minimise potential adverse effects on the Group's financial risk.

Interest rate risk

Cash flow interest rate risk is the risk that changes in market interest rates will impact cash flows arising from variable rate financial instruments.

The Group's interest rate risk primarily arises from its borrowings. Borrowings issued at floating rates expose the Group to cash flow interest rate risk. Borrowings issued at fixed rates expose the Group to fair value interest rate risk. The interest rate risk from cash, non-trade receivables, retention receivables, gross contractual amount due from customers and project under construction is not significant.

(Lanjutan/*Continued*)

Profil pinjaman Grup adalah sebagai berikut:

The Group's borrowings profile is as follows:

	31 Desember / *December 31, 2017*		31 Desember / *December 31, 2016*		
	Rata-rata tertimbang tingkat suku bunga/ *Weighted average interest rate*	Saldo/*Balance* Dalam juta *(In Millions)*	Rata-rata tertimbang tingkat suku bunga/ *Weighted average interest rate*	Saldo/*Balance*	
Pinjaman bank jangka pendek	10,25%	259.397	10,5%	327.567	*Short-term bank loans*
Pinjaman bank jangka panjang	10,%	1.105	10%	249.792	*Long-term bank loans*
Liabilitas sewa pembiayaan	12,5%	265.267	12%	44.541	*Finance lease liabilities*
Eksposure neto atas risiko arus kas tingkat suku bunga		**525.769**		**621.900**	*Net exposure to cash flow interest rate risk*

Pada tanggal 31 Desember 2017, jika tingkat bunga atas pinjaman dengan suku bunga mengambang lebih tinggi/rendah 100 basis poin dan variabel lain dianggap tetap, laba setelah pajak untuk tahun berjalan akan lebih rendah/tinggi sebesar Rp.525.769 Juta (2016: Rp.622 Juta).

As at December 31, 2017, if interest rates on floating rate borrowings had been 100 basis points higher/lower with all other variables held constant, profit after tax for the year would have been lower/higher by Rp.525,769 million (2016: Rp.622 million).

2) Risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Grup.

Risiko kredit Grup terutama melekat pada rekening bank, deposito berjangka, piutang usaha dan lain-lain. Grup menempatkan saldo bank dan deposito berjangka pada institusi keuangan yang layak serta terpercaya.

Grup memiliki kebijakan untuk memperoleh pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dengan meminimalkan kerugian yang terjadi karena eksposur risiko kredit. Karena itu, Grup memiliki kebijakan untuk memastikan transaksi dilakukan dengan pelanggan yang memiliki sejarah dan reputasi kredit yang baik. Manajemen melakukan pengawasan secara terus menerus untuk mengurangi eksposur risiko kredit.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Grup terhadap risiko kredit.

2) Market risk

Credit risk refers to the risk that a counterparty will default on its contractual obligation resulting in a loss to the Group.

The credit risk of the Group is primarily attributed to its cash in banks, time deposits, trade and other receivables. The Group places their bank balances and time deposits to the credit worthy financial institutions.

The Group has established policies to obtain sustainable revenue growth by minimizing losses due to credit risk exposure. Accordingly, the Group have established a policy to ensure that transactions are made with customers who has good credit reputation. Management conducts ongoing supervision to reduce credit risk exposure at reporting date.

The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for losses represents the Group's exposure to credit risk.

(Lanjutan/*Continued*)

3) Risiko likuiditas

Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan antara lain dengan memantau profil jatuh tempo pinjaman dan sumber pendanaan, menjaga kecukupan kas, serta memastikan tersedianya pendanaan dari sejumlah fasilitas kredit yang mengikat, dan kesiapan untuk menjaga posisi pasar. Grup mempertahankan kemampuannya untuk melakukan pembiayaan atas pinjaman yang dimiliki dengan cara mencari berbagai sumber fasilitas pembiayaan yang mengikat dari pemberi pinjaman yang handal serta terus memonitor perkiraan posisi kas dan utang bruto yang dimiliki Grup dalam jangka pendek berdasarkan perkiraan arus kas. Selain itu, dilakukan proyeksi arus kas jangka panjang untuk membantu Grup dalam merencanakan kebutuhan pendanaan dalam jangka panjang.

Grup memonitor pergerakan perkiraan kebutuhan likuiditas untuk memastikan tersedianya kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional serta untuk senantiasa memelihara kelonggaran likuiditas Grup terhadap fasilitas pinjaman yang belum digunakan, sehingga Grup tidak melampaui batas pinjaman atau batasan-batasan untuk setiap fasilitas pinjaman yang diperoleh.

Tabel di bawah ini menganalisis liabilitas keuangan non-derivatif Grup yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal pelaporan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel merupakan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

3) Liquidity risk

Purdent liquidity risk management includes managing the profile of borrowing maturities and funding sources, maintaining sufficient cash, and ensuring the availability of funding from an adequate amount of committed credit facilities and the ability to close out market positions. The Group's ability to fund its borrowing requirements is managed by maintaining diversified funding sources with adequate committed funding lines from high quality lenders and by monitoring rolling short-term forecasts of the Group's cash and gross debt on the basis of expected cash flows. In addition, long-term cash flows are projected to assist with the Group's longterm debt financing plans.

The Group monitors rolling forecasts of the liquidity requirements to ensure it has sufficient cash to meet operational needs while maintaining sufficient headroom on its unused committed borrowing facilities at all times so that the Group does not breach borrowing limits or covenants on any of its borrowing facilities.

The table below analyses the Group's non-derivative financial liabilities into relevant maturity grouping based on the remaining period at the reporting date to the contractual maturity dates. The amounts disclosed in the table are the contract undiscounted cash flows.

	31 Desember /*December 31,* 2017 (dalam juta/*in million Rupiah)*					
	Kurang dari 1 tahun/ *Less than 1 year*	**1-3 tahun/ *1-3 years***	**3-5 tahun/ *3-5 years***	**Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years***	***Jumlah/ Total***	
Pinjaman bank jangka pendek	362.718	-	-	-	362.718	*Short-term bank loans*
Pinjaman bank jangka panjang	49.118	361.484	-	-	410.602	*Long-term bank loans*
Liabilitas sewa pembiayaan	160.353	236.615	-	-	396.968	*Financial lease liabilities*
Jumlah liabilitas keuangan	**572.189**	**598.099**	**-**	**-**	**1.170.288**	***Total financial liabilities***

(Lanjutan/*Continued*)

	31 Desember/*December 31,* 2016 (dalam juta/*in million Rupiah)*					
	Kurang dari 1 tahun/ *Less than 1 year*	1-3 tahun/ *1-3 years*	3-5 tahun/ *3-5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	*Jumlah/ Total*	
Pinjaman bank jangka pendek	127.567	-	-	-	127.567	*Short-term bank loans*
Pinjaman bank jangka panjang	249.792	35.296	-	-	285.088	*Long-term bank loans*
Liabilitas sewa pembiayaan	9.245	249.792	-	-	256.037	*Financial lease liabilities*
Jumlah liabilitas keuangan	**386.604**	**285.088**	**-**	**-**	**671.692**	***Total financial liabilities***

b) Manajemen permodalan

Tujuan Grup dalam mengelola permodalan adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Grup guna memberikan imbal hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya serta menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Grup secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola struktur permodalan untuk memastikan struktur modal dan hasil pengembalian ke pemegang saham yang optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan efisiensi modal Grup, profitabilitas masa sekarang dan yang akan datang, proyeksi arus kas operasi, proyeksi pengeluaran barang modal dan proyeksi peluang investasi yang strategis. Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Grup menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi utang.

Grup memonitor permodalan berdasarkan rasio *gearing* konsolidasian dan rasio laba yang disesuaikan terhadap bunga konsolidasian. Rasio *gearing* dihitung dengan membagi utang bersih dengan jumlah modal. Utang bersih dihitung dari jumlah pinjaman (termasuk pinjaman jangka pendek dan jangka panjang yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian) dikurangi kas dan setara kas. Jumlah modal dihitung dari "ekuitas" seperti yang ada pada laporan posisi keuangan konsolidasian ditambah utang.

b) Capital management

The Group's objectives in managing capital are to maintain the Group's ability to continue going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

The Group actively and regularly reviews and manages its capital structure to ensure optimal capital structure and shareholder returns, taking into consideration the future capital requirements and capital efficiency of the Group, prevailing and projected profitability, projected operating cash flows, projected capital expenditures and projected strategic investment opportunities. In order to maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the amount of dividends paid to shareholders, issue new shares or sell assets to reduce debt.

The Group monitors capital on the basis of the Group's consolidated gearing ratio and consolidated interest cover. The gearing ratio is calculated as net debt divided by total capital. Net debt is calculated as total borrowings (including current and non-current borrowings as shown in the consolidated statement of financial position) less cash and cash equivalents. Total capital is calculated as "equity" as shown in the consolidated statement of financial position plus net debt.

(Lanjutan/*Continued*)

Rasio pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

The ratios as at December 31, 2017 and December 31, 2016 are as follows:

	2017	2016	
*) Dalam juta			*) In million
Jumlah pinjaman	1.170.289	621.900	*Total borrowings*
Dikurangi:			*Less:*
Kas dan setara kas	(263.700)	(210.956)	*Cash and cashequivalents*
Defisit - bersih	906.589	410.944	*Deficit – net*
Jumlah ekuitas	(895.649)	(255.911)	*Total equity*
Jumlah modal	**10.940**	**155.033**	***Total capital***

c) Nilai wajar instrumen keuangan

Untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar pada tanggal pelaporan, pengukuran nilai wajarnya diungkapkan dengan tingkatan hirarki pengukuran nilai wajar sebagai berikut:

1) Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (”harga yang tersedia dari pasar yang aktif”) (Tingkat 1).
2) Input selain harga kuotasian dalam pasar aktif yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (”transaksi pasar yang dapat diobservasi”) (Tingkat 2).
3) Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (”transaksi pasar yang tidak dapat diobservasi”) (Tingkat 3).

c) Fair values of financial instruments

For financial instruments that are measured at fair value at the reporting date, the corresponding fair value measurements are disclosed by level of the following fair value measurement hierarchy:

1) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (”quoted price in active markets”) (Level 1).
2) Inputs other than quoted prices in active markets that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly (”observable current market transactions”) (Level 2).
3) Inputs for the asset and liability that are not based on observable market data (”non-observable current market transactions”) (Level 3).

Aset dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan nilai wajarnya adalah sebagai berikut:

Financial assets and liabilities which are recorded based on fair value are as follows:

	2017				
	Tingkat/ *Level* 1	**Tingkat/ *Level* 2**	**Tingkat/ *Level* 3**	**Jumlah/ *Total***	
Aset keuangan	-	-	-	-	*Financial Asset*
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang	598.098	-	-	598.098	*Long term financial Liabilities*
Jumlah	**598.098**	**-**	**-**	**598.098**	***Total***

	2016				
	Tingkat/ *Level* 1	**Tingkat/ *Level* 2**	**Tingkat/ *Level* 3**	**Jumlah/ *Total***	
Aset keuangan	-	-	-	-	*Financial Asset*
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang	285.088	-	-	285.088	*Long term financial Liabilities*
Jumlah	**285.088**	**-**	**-**	**285.088**	***Total***

Jumlah tercatat aset dan liabilitas keuangan lainnya kurang lebih sama dengan nilai wajarnya.

The carrying amount of other financial assets and liabilities approximates their fair value.

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan dalam pasar aktif (misalnya efek yang tersedia untuk dijual) ditentukan berdasarkan harga pasar yang dikutip pada tanggal pelaporan. Suatu pasar dianggap aktif apabila informasi mengenai harga kuotasi dapat dengan mudah dan secara berkala tersedia dari suatu bursa, pedagang efek, atau broker, kelompok penilai harga pasar industri tertentu, regulator dan harga-harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan reguler pada tingkat yang wajar. Harga pasar yang dikutip untuk aset keuangan yang dimiliki Grup adalah harga penawaran sekarang. Instrumen-instrumen tersebut termasuk dalam Tingkat 1. Instrumen yang termasuk dalam Tingkat 1 umumnya meliputi investasi ekuitas pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") yang diklasifikasikan sebagai surat berharga yang dimiliki untuk diperdagangkan atau tersedia untuk dijual.

The fair value of financial instruments traded in active markets (such as available-for-sale securities) is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, or broker, industry group pricing service, regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. The quoted market price used for financial assets held by the Group is the current bid price. These instruments are included in Level 1. Instruments included in Level 1 comprise primarily Indonesia Stock Exchange ("IDX") equity investments classified as held-for-trading securities or available-forsale

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan pada pasar aktif (misalnya *derivatif over-the-counter*) ditentukan dengan teknik penilaian.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market (for example, over-the-counter derivatives) is determined by using valuation techniques.

Teknik-teknik penilaian tersebut memaksimumkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi apabila tersedia dan sedapat mungkin meminimalisir penggunaan estimasi yang bersifat spesifik dari entitas. Jika seluruh input yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan dapat diobservasi, instrumen tersebut termasuk dalam Tingkat 2.

These valuation techniques maximise the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on entity's specific estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi, instrumen ini termasuk dalam Tingkat 3.

If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in Level 3

35. SEGMEN OPERASI

Manajemen memonitor hasil operasi segmen bisnis untuk tujuan pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dinilai berdasarkan laba atau rugi operasi yang diukur dengan cara yang konsisten dengan laba atau rugi usaha dalam laporan keuangan konsolidasian.

35. OPERATING SEGMENT

Management monitors the operating results of its business segments for the purpose of decision making about resource allocation and performance assessment. Segment performance is evaluated based on operating profit or loss and is measured consistently with the operating profit or loss in the consolidated financial statements.

(Lanjutan/*Continued*)

a. Aktivitas

Bisnis utama Grup dibagi menjadi lima, yaitu pekerjaan sipil, sewa alat berat, *bekisting*, *batching plant*, dan sewa.

Informasi segmen yang diberikan kepada pengambil keputusan operasional utama untuk setiap segmen dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, dan 2015.

a. Activities

The Group's main business is divided into civil work, heavy equipment rental, bekisting, batching plant, and rental.

The segment information provided to the chief operating decision-maker for the reportable segments as at and for seven month ended December 31, 2017 and for the year ended 31 December 2016, and 2015.

31 Desember 2017 / December 31, 2017

Uraian	Segmen Usaha (Segmen Operasi)			Jumlah
	Sewa Alat (*Rent Equipment*)	Batching Plant *(Ready Mixed*)	Sipil (*Civil work*)	
Pihak Ketiga	110.646.685.064	1.710.045.000	764.751.347.711	877.108.077.775
Pihak Berelasi	130.057.184.242	161.640.409.383	647.507.025.830	939.204.619.455
Jumlah	240.703.869.306	163.350.454.383	1.412.258.373.541	1.816.312.697.230

31 Desember 2016 / December 31, 2016

Uraian	Segmen Usaha (Segmen Operasi)			Jumlah
	Sewa Alat (*Rent Equipment*)	Batching Plant *(Ready Mixed*)	Sipil (*Civil work*)	
Pihak Ketiga	26.406.222.032	17.162.455.310	49.240.277.278	92.808.954.620
Pihak Berelasi	79.218.666.096	51.487.365.930	147.720.831.835	278.426.863.861
Jumlah	105.624.888.128	68.649.821.240	196.961.109.113	371.235.818.481

31 Desember 2017 / December 31, 2017

Uraian	Transaksi Berelasi - Penjualan			Jumlah
	Sewa Alat (*Rent Equipment*)	Batching Plant *(Ready Mixed*)	Sipil (*Civil work*)	
PT PP (Persero) Tbk	128.439.796.242	157.659.326.383	643.165.713.734	
PT PP Properti Tbk	450.000.000	3.981.083.000	-	
PT PP Urban	1.167.388.000	-	4.341.311.839	
Jumlah	130.057.184.242	161.640.409.383	647.507.025.573	939.204.619.199

(Lanjutan/*Continued*)

31 Desember 2016 / December 31, 2016

Uraian	Transaksi Berelasi - Penjualan			Jumlah
	Sewa Alat *(Rent Equipment)*	Batching Plant *(Ready Mixed)*	Sipil *(Civil work)*	
PT PP (Persero) Tb	74.895.596.843	51.487.365.930	147.670.621.235	
PT PP Properti Tbk	463.500.000	-	-	
PT PP Urban	3.859.569.253	-	50.210.600	
Jumlah	79.218.666.096	51.487.365.930	147.720.831.835	278.426.863.861

b. Segmen geografis

Perusahaan berdomisili dan beroperasi diseluruh wilayah Indonesia dan tidak ada pendapatan yang diperoleh dari pelanggan eksternal luar negeri

Berikut adalah segmen operasi berdasarkan pasar geografis:

b. Geographical segments

The Company is domisiled and operates throughout the territory of Indonesia and no revenue is obtained from external customers abroad.

The following are operating segment based on geographichal market:

Uraian	2017				
	Jabodetabek	Pulau Jawa/Java Island diluar/excluded Jabodetabek	Diluar Pulau Jawa/ *Outside of Java Island*	Jumlah/ *Total*	*Description*
Pendapatan usaha	215.959.579.670	437.912.991.240	1.162.440.126.063	1.816.312.696.973	*Revenue*
Beban Pokok Penjualan	162.942.699.429	330.407.778.236	877.067.515.848	1.370.417.993.513	*Cost of Goods Sold*
	53.016.880.241	107.505.213.004	285.372.610.215	445.894.703.460	
Beban usaha tidak dapat dialokasikan				-	*Unallocated operating expense*
Laba kotor				445.894.703.460	*Gross profit*
Beban Usaha				(57.029.632.669)	*Operating expenses*
Laba usaha				388.865.070.791	*Operating profit*
Pendapatan (Beban) Lain-lain				(2.206.544.690)	*Other income (charges)*
Laba sebelum pajak penghasilan				301.340.012.063	*Profit before income tax*
Beban Pajak				(56.789.545.667)	*Income tax expenses*
Laba bersih tahun berjalan				244.550.466.396	*Net profit*
Panghasilan Komprehensif lain				(503.598.693)	*Other Comprehensive Income*
Jumlah penghasilan komprehensif				**244.046.867.703**	***Comprehensive income***

(Lanjutan/*Continued*)

	2016				
Uraian	Jabodetabek	Pulau Jawa/Java Island diluar/excluded Jabodetabek	Diluar Pulau Jawa/ *Outside of Java Island*	Jumlah/ *Total*	*Description*
Pendapatan usaha	164.328.030.969	88.207.936.847	118.699.850.665	371.235.818.481	*Revenue*
Beban Pokok Penjualan	121.737.995.235	65.376.776.093	88.899.124.316	276.013.895.644	*Cost of Goods Sold*
	42.590.035.734	22.831.160.754	29.800.726.349	95.221.922.837	
Beban usaha tidak dapat dialokasikan				-	*Unallocated operating expense*
Laba kotor				95.221.922.837	*Gross profit*
Beban Usaha				(13.938.909.707)	*Operating expenses*
Laba usaha				81.283.013.130	*Operating profit*
Pendapatan (Beban) Lain-lain				(28.348.822.842)	*Other income (charges)*
Laba sebelum pajak penghasilan				52.934.190.288	*Profit before income tax*
Beban Pajak				(11.571.367.484)	*Income tax expenses*
Laba bersih tahun berjalan				41.362.822.804	*Net profit*
Panghasilan Komprehensif lain				(7.015.935)	*Other Comprehensive Income*
Jumlah penghasilan komprehensif				**41.355.806.869**	***Comprehensive income***

36. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direktur Perusahaan untuk diterbitkan pada tanggal 9 Februari 2018.

36. COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of thefinancial statements are the responsibility of management and have been approved by the Director of the Company for issued on February 9, 2018.

*****

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI)
INDUK SAJA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI)
PARENT COMPANY
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2017, 2016 AND 2015
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2017	31 Desember/ *December 31,* 2016 *)	31 Desember/ *December 31,* 2015 *)	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	1.044.673.992.502	210.955.959.903	9.935.359.670	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha, bersih				*Trade receivable, net*
Pihak ketiga	27.668.179.620	18.672.947.184	21.172.323.568	*Third parties*
Pihak berelasi	79.796.993.408	82.147.743.025	38.764.954.771	*Related parties*
Piutang retensi				*Retention receivables*
Pihak ketiga	9.482.718.641	6.018.696.009	3.884.423.508	*Third parties*
Pihak berelasi	13.361.796.928	4.750.557.675	1.315.538.076	*Related parties*
Tagihan bruto pemberi kerja				*Gross receivables from project owners:*
Pihak ketiga	45.363.244.176	4.578.628.011	16.260.227.368	*Third parties*
Pihak berelasi	464.995.584.127	90.361.902.132	3.169.777.960	*Related parties*
Piutang Lain-lain - pihak berelasi	60.366.796	60.366.796	-	*Other Receivables - Related parties*
Persediaan	52.741.292.904	2.802.845.610	3.530.206.609	*Inventories*
Uang muka	42.335.800.647	3.395.495.060	265.033.260	*Advances*
Pajak dibayar dimuka	132.250.320.343	40.154.651.567	12.821.223.405	*Prepaid taxes*
Biaya dibayar dimuka	22.688.833.914	3.086.128.606	6.229.877.328	*Prepaid expenses*
Jumlah Aset Lancar	**1.935.419.124.006**	**466.985.921.578**	**117.348.945.523**	***Total Current Assets***
ASET TIDAK LANCAR				***NON CURRENT ASSETS***
Investasi pada entitas anak	798.000.000.000	-	-	*Investments in a subsidiary company*
Aset tetap, bersih	1.409.638.735.081	599.403.531.618	261.196.827.337	*Fixed assets, net*
Jumlah Aset Tidak Lancar	**2.207.638.735.081**	**599.403.531.618**	**261.196.827.337**	***Total Non Current Assets***
JUMLAH ASET	**4.143.057.859.087**	**1.066.389.453.196**	**378.545.772.860**	***TOTAL ASSETS***

*) Disajikan kembali (lihat Catatan No.5)

**) As restated (see Note 5)*

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI)
INDUK SAJA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2017, 2016 DAN 2015
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI)
PARENT COMPANY
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2017, 2016 AND 2015
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2017	31 Desember/ *December 31,* 2016 *)	31 Desember/ *December 31,* 2015 *)	
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha				*Trade payables*
Pihak ketiga	806.651.046.551	168.043.682.873	33.349.886.004	*Third parties*
Uang muka pemberi kerja				*Advances from project owners*
Pihak ketiga	85.922.301.139	1.430.372.743	4.979.975.753	*Third parties*
Pihak berelasi	-	45.789.216.572	-	*Related parties*
Utang lain - lain				*Other liabilities*
Pihak ketiga	174.557.590	600.199.723	1.083.786.834	*Third parties*
Pihak berelasi	6.043.378.223	5.589.861.593	2.630.120.730	*Related parties*
Utang pajak	18.320.483.500	589.721.092	2.951.600.116	*Taxes payable*
Utang bank jangka pendek	200.000.000.000	200.000.000.000	-	*Bank loans*
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				*Current maturity of long-term liabilities*
Utang bank	-	127.566.715.966	55.506.470.639	*Bank loans*
Sewa pembiayaan	28.509.384.376	9.245.086.950	14.492.096.002	*Finance lease liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**1.145.621.151.379**	**558.854.857.512**	**114.993.936.078**	***Total Current Liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Jaminan proyek	-	8.986.760.605	6.438.502.237	*Project guarantee*
Liabilitas imbalan kerja	2.255.673.036	1.513.533.602	1.201.589.736	*Employee benefits obligation*
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				*Long-term liabilities - net of current maturity*
Utang bank	908.880.912.313	249.792.439.324	135.423.889.725	*Bank loans*
Sewa pembiayaan	133.273.501.969	35.296.229.637	25.831.545.956	*Finance lease liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**1.044.410.087.318**	**295.588.963.168**	**168.895.527.654**	***Total Non-current Liabilities***
JUMLAH LIABILITAS	**2.190.031.238.697**	**854.443.820.680**	**283.889.463.732**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp.100 per saham pada 31 Desember 2017 dan Rp.1.000.000 per saham pada 31 Desember 2016 dan 2015				*Capital stock - Rp.100 par value per share at December 31,2017 and Rp.1,000,000 per share at December 31, 2016 and 2015*
Modal dasar - 24.000.000.000 saham pada 31 Desember 2017 dan 440.000 saham pada 31 Desember 2016 dan 2015				*Authorized - 24,000,000,000 shares at December 31, 2017 and 440,000 shares at December 31, 2016 and 2015*
Modal ditempatkan dan disetor - 10.224.271.000 saham pada 31 Desember 2017, 110.760 saham pada 31 Desember 2016 dan 32.000. saham pada 31 Desember 2015.	1.022.427.100.000	110.760.000.000	32.000.000.000	*Subscribed and paid-up - 10.224.271.000 shares at December 31, 2017, 110,760 shares at December 31, 2016 and 32,000 shares at December 31, 2015*
Tambahan modal disetor	749.560.161.538	-	-	*Additional paid-in capital*
Penghasilan komprehensif lain	(509.830.671)	(12.956.269)	(5.940.334)	*Other comprehensive income*
Selisih lebih nilai revaluasi aset tetap	2.788.848.589	-	-	*Surplus of fixed assets revaluation*
Sado laba:				*Retained earnings:*
Ditentukan penggunaannya	-	-	-	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	178.760.340.934	101.198.588.785	62.662.249.462	*Unappropriated*
Jumlah Ekuitas	**1.953.026.620.390**	**211.945.632.516**	**94.656.309.128**	***Total Equity***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**4.143.057.859.087**	**1.066.389.453.196**	**378.545.772.860**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

*) Disajikan kembali (lihat Catatan No.5)

**) As restated (see Note 5)*

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI)
INDUK SAJA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI)
PARENT COMPANY
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2017 AND 2016
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2017	2016 *)	
PENDAPATAN BERSIH	1.031.653.417.383	371.235.818.481	***NET REVENUE***
HARGA POKOK PENDAPATAN	(765.994.532.727)	(276.013.895.645)	***COST OF REVENUE***
LABA KOTOR	**265.658.884.656**	**95.221.922.836**	***GROSS PROFIT***
Beban Usaha	**(24.176.270.430)**	**(13.938.909.707)**	***Operating Expenses***
Pendapatan (Beban) Keuangan	**(68.328.003.874)**	**(26.714.544.377)**	***Finance Income (Expenses)***
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	**4.731.662.978**	**(1.632.145.266)**	***Other Income (Expenses)***
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**177.886.273.330**	**52.936.323.486**	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			***INCOME TAX (EXPENSE)***
Pajak kini	(8.200.246.052)	(5.908.833.273)	*Current Tax*
Pajak final	(21.026.071.995)	(5.662.534.211)	*Final Tax*
Jumlah (Beban) Pajak Penghasilan	**(29.226.318.047)**	**(5.662.534.211)**	***Total Income Tax (Expenses)***
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	**148.659.955.283**	**47.273.789.275**	***NET PROFIT CURRENT YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba (Rugi)			***Item that will not be reclassified subsuquently to profit or loss***
Selisih lebih nilai revaluasi aset tetap	2.788.848.589	-	*Surplus of fixed assets revaluation*
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(489.284.602)	(7.015.935)	*Remeasurement of defined benefit obligation*
	2.299.563.987	(7.015.935)	
Pos yang Akan Direklasifikasi Ke Laba (Rugi)	-	-	***Item that will be reclassified subsequently to profit or loss***
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**150.959.519.270**	**47.266.773.340**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***

*) Disajikan kembali (lihat Catatan No.5)

**) As restated (see Note 5)*

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI)
INDUK SAJA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI)
PARENT COMPANY
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2017 AND 2016
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

					Saldo laba / *Retained earning*			
	Modal ditempatkan dan disetor / *Issued and paid-up*	**Tambahan modal disetor / *Paid-in capital***	**Penghasilan komprehensif lain / *Other comprehensive income***	**Selisih lebih nilai revaluasi aset tetap / *Surplus of fixed assets r evaluation***	**Ditentukan pengunaannya/ *Appropriated***	**Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated***	**Jumlah ekuitas / *Total equity***	
Saldo per 1 Januari 2015	**32.000.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37.308.059.790**	**69.308.059.790**	***Balance as of January 1, 2015***
Dividen tahun 2014	-	-	-	-	-	(2.620.911.080)	(2.620.911.080)	*Dividend 2014*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	(5.940.334)	-		-	(5.940.334)	*Remeasurement of employee benefit liability*
Laba tahun berjalan	-	-	-	-		27.975.100.752	27.975.100.752	*Profit for the year*
Saldo per 31 Desember 2015	**32.000.000.000**	**-**	**(5.940.334)**	**-**	**-**	**62.662.249.462**	**94.656.309.128**	***Balance as of December 31, 2015***
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	41.362.822.803	41.362.822.803	*Profit for the year*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	(7.015.935)	-	-	-	(7.015.935)	*Remeasurement of employee benefit liability*
Dividen tahun 2015	-	-	-	-	-	(2.826.483.480)	(2.826.483.480)	*Dividend 2015*
Setoran modal dengan penyerahan aset tetap	78.760.000.000	-	-	-	-	-	78.760.000.000	*Paid-in capital from fixed assets*
Saldo per 31 Desember 2016	**110.760.000.000**	**-**	**(12.956.269)**	**-**	**-**	**101.198.588.785**	**211.945.632.516**	***Balance as of December 31, 2016***
Dividen tahun 2016	-	-	-	-	-	(4.098.203.134)	(4.098.203.134)	*Dividend 2016*
Setoran modal dari laba ditahan	67.000.000.000	-	-	-	-	(67.000.000.000)	-	*paid-in capital from retained earning*
Tambahan modal disetor	609.545.000.000	-	-	-	-	-	609.545.000.000	*Additional paid-in capital*
Penawaran umum perdana penerbitan saham	235.122.100.000	749.560.161.538	-	-	-	-	984.682.261.538	*Initial public offering Issuance of shares*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	-	-	(496.874.402)	-	-	-	(496.874.402)	*Remeasurement of employee benefit liability*
Selisih lebih nilai revaluasi aset tetap	-	-	-	2.788.848.589	-	-	2.788.848.589	*Surplus of fixed assets revaluation*
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	148.659.955.283	148.659.955.283	*Profit for the year*
Saldo 31 Desember 2017	**1.022.427.100.000**	**749.560.161.538**	**(509.830.671)**	**2.788.848.589**	**-**	**178.760.340.934**	**1.953.026.620.390**	***Balance as of December 31, 2017***

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Dahulu PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI)
INDUK SAJA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PRESISI Tbk
(Formerly PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERALATAN KONSTRUKSI)
PARENT COMPANY
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2017 AND 2016
(Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2017	2016	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***Cash Flows From Operating Activities***
Penerimaan kas dari pelanggan	636.060.391.243	325.103.385.026	*Cash Receipts from Customers*
Pembayaran kas kepada :			*Payments to :*
Pemasok dan subkontraktor	(137.807.813.121)	(118.595.399.922)	*Supplier and Subcontractors*
Karyawan dan Pihak Ketiga Lainnya	(23.434.130.996)	(54.189.857.527)	*Employees and third party*
Kas yang dihasilkan Operasi	**474.818.447.126**	**152.318.127.577**	*Cash generated from operation*
Pembayaran pajak-pajak	(103.591.224.415)	(14.850.472.798)	*Taxes payment*
Penerimaan pajak (restitusi)	-	8.663.349.366	*Taxes received (restitution)*
Pembayaran bunga	(63.438.645.796)	(35.892.997.146)	*Payments of interest expense*
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**307.788.576.915**	**110.238.006.999**	***Net Cash provided by Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Akuisisi entitas anak	(798.000.000.000)	-	*Acquisition of a subsidiary*
Perolehan aset tetap	(900.557.246.527)	(274.737.143.906)	*Acquisition of fixed assets*
Penerimaan penjualan aset tetap	-	2.710.000.000	*Proceed from sale of fixed asset*
Kas Bersih (digunakan untuk) Aktivitas Investasi	**(1.698.557.246.527)**	**(272.027.143.906)**	***Net Cash Used by Investing Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***Cash Flows From Financing Activities***
Penerimaan setoran modal	600.000.000.000	-	*Paid-up capital*
Setoran modal dari penawaran umum perdana saham	235.122.100.000	-	*Addition of share capital from initial public offering*
Agio saham dari penawaran umum perdana saham	775.902.930.000	-	*Paid-in capital in excess of par value from initial public offering*
Beban emisi saham	(26.342.768.461)	-	*Share issuance costs*
Penerimaan utang bank	654.690.816.133	488.493.560.000	*Receipt of bank loans*
Pembayaran utang bank	(103.904.761.687)	(85.677.409.174)	*Payment of bank loans*
Penerimaan utang non bank	89.018.386.226	-	*Receipt of non bank loans*
Pembayaran utang non bank	-	(40.006.413.686)	*Payment of non bank loans*
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	**2.224.486.702.211**	**362.809.737.140**	***Net Cash Provided by Financing Activities***
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	833.718.032.599	201.020.600.233	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	210.955.959.903	9.935.359.670	***CASH AND CASH EQUIVALENTS - BEGINNING***
SALDO KAS DAN SETARA KAS - AKHIR	**1.044.673.992.502**	**210.955.959.903**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS ENDING***

*) Disajikan kembali (lihat Catatan No.5)

**) As restated (see Note 5)*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to consolidated financial statements are an integral part of the consolidated financial statements

Chapter-8

BAB-8

Referensi Silang Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan

Cross References To The Financial Services
Authority Regulation

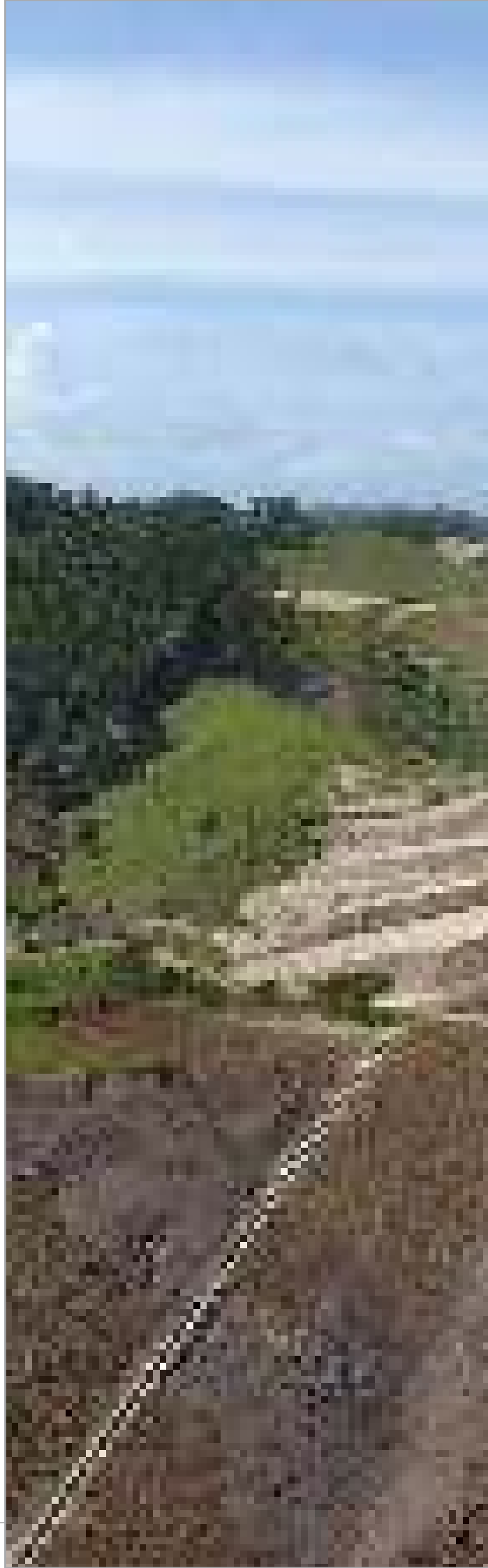

Chapter-8

REFERENSI SILANG PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Cross References To The Financial Services Authority

Referensi SEOJK

Nomor 30-SEOJK.04-2016: Laporan Tahunan Perusahaan Publik

Referensi SEOJK

Nomor 30-SEOJK.04-2016: Laporan Tahunan Perusahaan Publik

Keterangan	Halaman Page	Description
I. Ketentuan Umum		**I. General Provision**
1. Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.	√	1. Annual Report of a listed company is one of the most important sources as the base for investors or shareholders in making investment decision, and is a means of monitoring issuers or public company.
2. Seiring dengan perkembangan Pasar Modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.	√	2. Along with the development of Capital Market and the growing needs of investors or shareholders regarding information disclosure, the Board of Directors and the Board of Commissioners are required to improve the quality of information disclosure through annual report.
3. Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.	√	3. Annual Report should be prepared in an orderly manner and should be informative to provide conveniences for the investors or shareholders in getting the information they need.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan.	√	4. This Circular Letter of the Financial Service Agency serves a guidelines for Issuers or Public Companies that should be applied in preparing their Annual Report.
II. Bentuk Laporan Tahunan		**II. Format of Annual Report**
1. Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.	√	1. Annual Report should be presented in the printed format and in electronic document copy.
2. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik.	√	2. The printed version of the Annual Report should be printed on light-colored paper of fine quality, in A4 size, bound and can be reproduced in good quality.
3. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam format pdf.	√	3. The Annual Report presented in electronic document format is the Annual Report converted into pdf format.
III. ISI LAPORAN TAHUNAN		**III. Content Of Annual Report**
1. Ketentuan Umum		1. General Provision
a. Laporan Tahunan paling sedikit memuat informasi mengenai:		a. Annual Report should contain at least the following information:
1) ikhtisar data keuangan penting;	18	1) summary of key financial information;
2) informasi saham (jika ada);	20	2) stock information (if any);
3) laporan Direksi;	30	3) the Board of Directors report;
4) laporan Dewan Komisaris;	24	4) the Board of Commissioners report;
5) profil Emiten atau Perusahaan Publik;	48-82	5) profile of Issuer or Public Company;
6) analisis dan pembahasan manajemen;	88-118	6) management discussion and analysis;
7) tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	122-179	7) corporate governance applied by the Issuer or Public Company;
8) tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;	182-183	8) corporate social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company;
9) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan	190-282	9) audited annual report; and
10) surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan;	302-303	10) statement that the Board of Directors and the Board of Commissioners are fully responsible for the Annual Report;
b. Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami;	√	b. Annual Report may present the information in form of images, charts, tables, and diagrams are presented by mentioning the title and/or clear description, that is easy to read and be understood;

Keterangan	Halaman Page	Description
2. Uraian Isi Laporan Tahunan		2. Description of Content of Annual Report
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar Data Keuangan Penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:	26-29	a. Summary of Key Financial Information Summary of Key Financial Information contains financial information presented in comparison with previous 3 (three) fiscal years or since commencement of business if the Issuers or the Public Company commencing the business less than 3 (three) years, at least contain:
1) pendapatan/penjualan;	√	1) income/sales;
2) laba bruto;	√	2) gross profit;
3) laba (rugi);	√	3) profit (loss);
4) jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	√	4) total profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non-controlling interest;
5) total laba (rugi) komprehensif;	√	5) total comprehensive profit (loss);
6) jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	√	6) total comprehensive profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non controlling interest;
7) laba (rugi) per saham;	√	7) earning (loss) per share;
8) jumlah aset;	√	8) total assets;
9) jumlah liabilitas;	√	9) total liabilities;
10) jumlah ekuitas;	√	10) total equities;
11) rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;	√	11) profit (loss) to total assets ratio;
12) rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;	√	12) profit (loss) to equities ratio;
13) rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/ penjualan;	√	13) profit (loss) to income ratio;
14) rasio lancar;	√	14) current ratio;
15) rasio liabilitas terhadap ekuitas;	√	15) liabilities to equities ratio;
16) rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan	√	16) liabilities to total assets ratio; and
17) informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya;	√	17) other information and financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and type of industry;
b. Informasi Saham	30-33	b. Stock Information
Informasi Saham (jika ada) paling sedikit memuat:		Stock Information (if any) at least contains:
1) saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan (jika ada) yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	√	1) shares issued for each three-month period in the last 2 (two) fiscal years (if any), at least covering:
a) jumlah saham yang beredar;	√	a) number of outstanding shares;
b) kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	√	b) market capitalization based on the price at the Stock Exchange where the shares listed on;
c) harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan	√	c) highest share price, lowest share price, closing share price at the Stock Exchange where the shares listed on; and
d) volume perdagangan pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	√	d) share volume at the Stock Exchange where the shares listed on;
Informasi pada huruf a) diungkap oleh Emiten yang merupakan Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat maupun tidak tercatat di Bursa Efek;		Information in point a) should be disclosed by the Issuer, the public company whose shares is listed or not listed in the Stock Exchange;
Informasi pada huruf b), c), dan huruf d) hanya diungkapkan jika Emiten merupakan Perusahaan Terbuka dan sahamnya tercatat di Bursa Efek;		Information in point b), point c), and point d) only be disclosed if the Issuer is a public company whose shares is listed in the Stock Exchange;

Keterangan	Halaman Page	Description
2) dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	N.A.	2) in the event of corporate actions, including stock split, reverse stock, dividend, bonus share, and change in par value of shares, then the share price referred to in point 1), should be added with explanation on:
a) tanggal pelaksanaan aksi korporasi;		a) date of corporate action;
b) rasio pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham;		b) stock split ratio, reverse stock, dividend, bonus shares, and change in par value of shares;
c) jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; dan		c) number of outstanding shares prior to and after corporate action; and
d) harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;		d) share price prior to and after corporate action;
3) dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*), dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) dalam tahun buku, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) tersebut; dan	N.A.	3) in the event that the company's shares were suspended and/or delisted from trading during the year under review, then the Issuers or Public Company should provide explanation on the reason for the suspension and/or delisting; and
4) dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) sebagaimana dimaksud pada angka 3) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*) tersebut;	N.A.	4) in the event that the suspension and/or delisting as referred to in point 3) was still in effect until the date of the Annual Report, then the Issuer or the Public Company should also explain the corporate actions taken by the company in resolving the suspension and/or delisting;
c. Laporan Direksi	30-45	c. The Board of Directors Report
Laporan Direksi paling sedikit memuat:		The Board of Directors Report should at least contain the following items:
1) uraian singkat mengenai kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit meliputi:	√	1) the performance of the Issuer or Public Company, at least covering:
a) strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	√	a) strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company;
b) perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan	√	b) comparison between achievement of results and targets; and
c) kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik;	√	c) challenges faced by the Issuer or Public Company;
2) gambaran tentang prospek usaha;	√	2) description on business prospects;
3) penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; dan	√	3) implementation of good corporate governance by Issuer or Public Company; and
4) perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada);	√	4) changes in the composition of the Board of Directors and the reason behind (if any);
d. Laporan Dewan Komisaris	24-29	d. The Board of Commissioners Report
Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat:		The Board of Commissioners Report should at least contain the following items:
1) penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik;	√	1) assessment on the performance of the Board of Directors in managing the Issuer or the Public Company;
2) pengawasan terhadap implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;	√	2) supervision on the implementation of the strategy of the Issuer or Public Company;
3) pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi;	√	3) view on the business prospects of the Issuer or Public Company as established by the Board of Directors;

Keterangan	Halaman Page	Description
4) pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	√	4) view on the implementation of the corporate governance by the Issuer or Public Company;
5) perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada); dan	√	5) changes in the composition of the Board of Commissioners and the reason behind (if any); and
6) frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi;	√	6) the frequency and procedure of providing advice to members of the Board of Directors;
e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik	48-82	e. Profile of the Issuer or Public Company
Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat:		Profile of the Issuer or Public Company should cover at least:
1) nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;	48	1) name of Issuer or Public Company, including change of name, reason of change, and the effective date of the change of name during the year under review;
2) akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	48	2) access to Issuer or Public Company, including branch office or representative office, where public can have access of information of the Issuer or Public Company, which include:
a) alamat;	√	a) address;
b) nomor telepon;	√	b) telephone number;
c) nomor faksimile;	√	c) facsimile number;
d) alamat surat elektronik; dan	√	d) e-mail address; and
e) alamat Situs *Web*;	√	e) website address;
3) riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	66	3) brief history of the Issuer or Public Company;
4) visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik;	49	4) vision and mission of the Issuer or Public Company;
5) kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan;	68-72	5) line of business according to the latest Articles of Association, and types of products and/or services produced;
6) struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, disertai dengan nama dan jabatan;	50	6) structure of organization of the Issuer or Public Company in chart form, at least 1 (one) level below the Board of Directors, with the names and titles;
7) profil Direksi, paling sedikit memuat:	55-59	7) the Board of Directors profiles include:
a) nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;	√	a) name and short description of duties and functions;
b) foto terbaru;	√	b) latest photograph;
c) usia;	√	c) age;
d) kewarganegaraan;	√	d) citizenship;
e) riwayat pendidikan;	√	e) education;
f) riwayat jabatan, meliputi informasi:	√	f) history position, covering information on:
(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	√	(1) legal basis for appointment as member of the Board of Directors to the said Issuer or Public Company;
(2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	√	(2) dual position, as member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or member of committee, and other position (if any); and
(3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√	(3) working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;

Keterangan	Halaman Page	Description
g) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota Direksi dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada); dan	√	g) competency enhancement education and/or training program for member of the Board of Directors during the year under review (if any); and
h) hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi;	√	h) disclosure of affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and major shareholders (if any) including name of the affiliated party;
8) profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	52-54	8) the Board of Commissioners profiles, at least include:
a) nama;	√	a) name;
b) foto terbaru;	√	b) latest photograph;
c) usia;	√	c) age;
d) kewarganegaraan;	√	d) citizenship;
e) riwayat pendidikan;	√	e) education;
f) riwayat jabatan, meliputi informasi:	√	f) history position, covering information on:
(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	√	(1) legal basis for the appointment as member of the Board of Commissioners who is not Independent Commissioner at the said Issuer or Public Company;
(2) dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	√	(2) legal bases for the first appointment as member of the Board of Commissioners who also Independent Commissioner at the said Issuer or Public Company;
(3) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	√	(3) dual position; as member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of committee and other position (if any); and
(4) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√	(4) working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
g) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota Dewan Komisaris dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada);	√	g) competency enhancement education and/or training program for member of the Board of Commissioner during the year under review (if any);
h) hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi; dan	√	h) affiliation with other members of the Board of Commissioners, and major shareholders (if any) including name of the affiliated party; and
i) pernyataan independensi Komisaris Independen dalam hal Komisaris Independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode (jika ada);	√	i) statement of independence of Independent Commissioner in the event that the Independent Commissioner has been appointed more than 2 (two) periods (if any);
9) dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya;	N.A.	9) in the event that there were changes in the composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors occurring between the period after year-end until the date the Annual Report submitted, then the last and the previous composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors shall be stated in the Annual Report;
10) jumlah karyawan dan deskripsi sebaran tingkat pendidikan dan usia karyawan dalam tahun buku;	82-85	10) number of employees and description of distribution of education level and age of the employee in the year under review;
11) nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada akhir tahun buku, yang terdiri dari:	60-64	11) names of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, including:

Keterangan	Halaman Page	Description
a) pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;	√	a) shareholders having 5% (five percent) or more shares of Issuer or Public Company;
b) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik; dan	√	b) Commissioners and Directors who own shares of the Issuers or Public Company; and
c) kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik;	√	c) groups of public shareholders, or groups of shareholders, each with less than 5% (five percent) ownership shares of the Issuers or Public Company;
12) jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:	60	12) number of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, based on:
a) kepemilikan institusi lokal;	√	a) ownership of local institutions;
b) kepemilikan institusi asing;	√	b) ownership of foreign institutions;
c) kepemilikan individu lokal; dan	√	c) ownership of local individual; and
d) kepemilikan individu asing;	√	d) ownership of foreign individual;
13) informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	61-63	13) information on major shareholders and controlling shareholders the Issuers of Public Company, directly or indirectly, and also individual shareholder, presented in the form of scheme or diagram;
14) nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi Emiten atau Perusahaan Publik tersebut (jika ada); Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut;	64-65	14) name of subsidiaries, associated companies, joint venture controlled by Issuers or Public Company, with entity, percentage of stock ownership, line of business, total assets and operating status of the Issuers of Public Company (if any); For subsidiaries, include the addresses of the said subsidiaries;
15) kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan (jika ada);	12-14	15) chronology of share listing, number of shares, par value, and bid price from the beginning of listing up to the end of the financial year, and name of Stock Exchange where the Issuers of Public Company shares are listed;
16) kronologi pencatatan Efek lainnya selain Efek sebagaimana dimaksud pada angka 15), yang paling sedikit memuat nama Efek, tahun penerbitan, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat Efek (jika ada);	N.A.	16) chronology of securities listing in addition to the said security in point 15), which at least should contain the name of the Securities, year of issuance, date of maturity, bid price, and rating of the securities (if any);
17) nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal;	304	17) name and address of capital market supporting institutions and/or professionals;
18) dalam hal terdapat profesi penunjang pasar modal yang memberikan jasa secara berkala kepada Emiten atau Perusahaan Publik, diungkapkan informasi mengenai jasa yang diberikan, komisi (fee), dan periode penugasan; dan	304	18) in the event that the capital market supporting professionals provide services on a regular basis to the Issuer or the Public Company, then information on the services provided, fee and period of assignment should be disclosed; and
19) penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima Emiten atau Perusahaan Publik baik yang berskala nasional maupun internasional dalam tahun buku terakhir (jika ada), yang memuat:	81	19) awards and/or certification of national and international scales bestowed on the Issuer or Public Company during the last fiscal year (if any), covering:
a) nama penghargaan dan/atau sertifikasi;	√	a) name of award and/or certification;
b) badan atau lembaga yang memberikan; dan	√	b) organization/institution that gives the awards; and
c) masa berlaku penghargaan dan/atau sertifikasi (kalau ada);	√	c) award/certificate validity period (if any);

Keterangan	Halaman Page	Description
f. Analisis dan Pembahasan Manajemen Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:	88-104	f. Management Discussion and Analysis Management Analysis and Discussion Annual should contain discussion and analysis on financial statements and other material information emphasizing material changes that occurred during the year under review, at least including:
1) tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	88-89	1) operational review per business segment, according to the type of industry of the Issuer or Public Company including:
a) produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;	√	a) production, including process, capacity, and growth;
b) pendapatan/penjualan; dan	√	b) income/sales; and
c) profitabilitas;	√	c) profitability;
2) kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:	90-101	2) comprehensive financial performance analysis which includes a comparison between the financial performance of the last 2 (two) fiscal years, and explanation on the causes and effects of such changes, among others concerning:
a) aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;	√	a. current assets, non-current assets, and total assets;
b) liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;	√	b) short term liabilities, long term liabilities, total liabilities;
c) ekuitas;	√	c) equities;
d) pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan	√	d) sales/operating revenues, expenses and profit (loss), other comprehensive revenues, and total comprehensive profit (loss); and
e) arus kas;	√	e) cash flows;
3) kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	102	3) the capacity to pay debts by including the computation of relevant ratios;
4) tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	103	4) accounts receivable collectability of the Issuer or Public Company, including the computation of the relevant ratios;
5) struktur modal (*capital structure*) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure*) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud;	104	5) capital structure and management policies concerning capital structure, including the basis for determining the said policy;
6) bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit meliputi:	105	6) discussion on material ties for the investment of capital goods, including the explanation on at least:
a) tujuan dari ikatan tersebut;	√	a) the purpose of such ties;
b) sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut;	√	b) source of funds expected to fulfill the said ties;
c) mata uang yang menjadi denominasi; dan	√	c) currency of denomination; and
d) langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;	√	d) steps taken by the Issuer of Public Company to protect the position of a related foreign currency against risks;
7) bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	105	7) discussion on investment of capital goods which was realized in the last fiscal year, at least include:
a) jenis investasi barang modal;	√	a) type of investment of capital goods;
b) tujuan investasi barang modal; dan	√	b) objective of the investment of capital goods; and
c) nilai investasi barang modal yang dikeluarkan;	√	c) value of the investment of capital goods;
8) informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada);	√	8) material Information and facts that occurring after the date of the accountant's report (if any);

Keterangan	Halaman Page	Description
9) prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;	106	9) information on the prospects of the Issuer or the Company in connection with industry,economy in general, accompanied with supporting quantitative data if there is a reliable data source;
10) perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:	108	10) comparison between target/projection at beginning of year and result (realization), concerning:
a) pendapatan/penjualan;	√	a) income/sales;
b) laba (rugi);	√	b) profit (loss);
c) struktur modal (capital structure); atau	√	c) capital structure; or
d) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	√	d) others that deemed necessary for the Issuer or Public Company;
11) target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:	109	11) target/projection at most for the next one year of the Issuer or Public Company, concerning:
a) pendapatan/penjualan;	√	a) income/sales;
b) laba (rugi);	√	b) profit (loss);
c) struktur modal (*capital structure*);	√	c) capital structure; or
d) kebijakan dividen; atau	√	d) dividend policy;
e) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	√	e) or others that deemed necessary for the Issuer or Public Company;
12) aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	110	12) marketing aspects of the company's products and/or services the Issuer or Public Company, among others marketing strategy and market share;
13) uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada), paling sedikit:	112	13) description regarding the dividend policy during the last 2 (two) fiscal years, at least:
a) kebijakan dividen;	√	a) dividend policy;
b) tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas;	N.A	b) the date of the payment of cash dividend and/or date of distribution of non-cash dividend;
c) jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan	N.A	c) amount of cash per share (cash and/or non cash); and
d) jumlah dividen per tahun yang dibayar;	N.A	d) amount of dividend per year paid;
14) realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dengan ketentuan:	112	14) use of proceeds from Public Offerings, under the condition of:
a) dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan	√	a) during the year under review, on which the Issuer has the obligation to report the realization of the use of proceeds, then the realization of the cumulative use of proceeds until the year end should be disclosed; and
b) dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut;	N.A.	b) in the event that there were changes in the use of proceeds as stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority on the Report of the Utilization of Proceeds from Public Offering, then Issuer should explain the said changes;
15) informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi Afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, antara lain memuat:	113-116	15) material information (if any), among others concerning investment, expansion, divestment, acquisition, debt/capital restructuring, transactions with related parties and transactions with conflict of interest that occurred during the year under review, among others include:
a) tanggal, nilai, dan objek transaksi;	√	a) transaction date, value, and object;
b) nama pihak yang melakukan transaksi;	√	b) name of transacting parties;
c) sifat hubungan Afiliasi (jika ada);	√	c) nature of related parties (if any);

Keterangan	Halaman Page	Description
d) penjelasan mengenai kewajaran transaksi; dan	√	d) description of the fairness of the transaction; and
e) pemenuhan ketentuan terkait;	√	e) compliance with related rules and regulations;
16) perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	117	16) changes in regulation which have a significant effect on the Issuer or Public Company and impacts on the company (if any); and
17) perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada);	117	17) changes in the accounting policy, rationale and impact on the financial statement (if any);
g. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik	122-179	g. Corporate Governance of the Issuer or Public Company
Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:		Corporate Governance of the Issuer or Public Company contains at least:
1) Direksi, mencakup antara lain:		1) the Board of Directors, covering:
a) tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;	144	a) the tasks and responsibilities of each member of the Board of Directors;
b) pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Direksi;	145	b) statement that the Board of Directors has already have board manual or charter;
c) prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi, serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;	145	c) procedure, legal basis, structure, and amount of remuneration of each member of the Board of Directors, relation between remuneration and performance of the Issuer or Public Company;
d) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut;	146	d) the policies and the frequency of the meeting of the Board of Directors, including the joint meeting with Board of Commissioners, and attendance of member of the Board of Directors in the said meeting;
e) informasi mengenai keputusan RUPS 1 (satu) tahun sebelumnya, meliputi:	N.A.	e) information on the resolution from the AGM of the previous 1 (one) year, covering:
(1) keputusan RUPS yang direalisasikan pada tahun buku; dan		(1) AGM resolutions that were realized during the fiscal year; and
(2) alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan;		(2) explanation for the unrealized resolution;
f) informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku, meliputi:	130	f) information regarding the AGM resolution in the year under review, including:
(1) keputusan RUPS yang direalisasikan pada tahun buku; dan	√	(1) AGM resolutions that were realized during the fiscal year; and
(2) alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan; dan	√	(2) explanation for the unrealized resolution;
g) penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi;	N.A.	g) assessment on the performance of the committee under the Board of Directors;
2) Dewan Komisaris, mencakup antara lain:	131-142	2) the Board of Commissioners, among others include:
a) tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;	136-138	a) duties and responsibilities of the Board of Commissioners;
b) pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Dewan Komisaris;	139	b) statement that the Board of Commissioner has already have the board manual or charter;
c) prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris;	139	c) procedure, legal basis, structure, and amount of remuneration for each member of Board of Commissioners;
d) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut;	140	d) policies and frequency of meeting of the Board of Commissioners, including meeting with the Board of Directors, and attendance of each member of the Board of Commissioners in the said meetings;

Keterangan	Halaman Page	Description
e) kebijakan Emiten atau Perusahaan Publik tentang penilaian terhadap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pelaksanaannya, paling sedikit meliputi:	154	e) policies of the Issuer or Public Company regarding the assessment on the performance of the Board of Directors and Board of Commissioners and the implementation, at least covering:
(1) prosedur pelaksanaan penilaian kinerja;		(1) procedure for the implementation of performance assessment;
(2) kriteria yang digunakan; dan		(2) criteria for assessment; and
(3) pihak yang melakukan penilaian;		(3) assessor;
f) penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris; dan	N.A.	f) assessment on the performance of the committees under the Board of Commissioners; and
g) dalam hal Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, dimuat informasi paling sedikit mengenai:	152	g) in the event that the Board of Commissioners does not establish the Nomination and Remuneration Committee, than should contain at least:
(1) alasan tidak dibentuknya komite; dan	N.A.	(1) reason not to establish the committee; and
(2) prosedur nominasi dan remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku;	√	(2) procedure of nomination and remuneration performed in the year under review;
3) Dewan Pengawas Syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat:	N.A.	3) Sharia Supervisory Board, for Issuer or Public Company that conduct business based on sharia law, as stipulated in the articles of association, at least containing:
a) nama;	N.A.	a) name;
b) tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; dan	N.A.	b) duty and responsibility of Sharia Supervisory Board; and
c) frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;	N.A.	c) frequency and procedure in providing advice and suggestion, as well as the compliance of Sharia Principles by the Issuer or Public Company in the Capital Market;
4) Komite Audit, mencakup antara lain:	148-151	4) Audit Committee, among others covering:
a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	√	a) name and position in the committee;
b) usia;	√	b) age;
c) kewarganegaraan;	√	c) citizenship;
d) riwayat pendidikan;	√	d) education background;
e) riwayat jabatan, meliputi informasi:		e) history of position; including:
(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	√	(1) legal basis for the appointment as member of the committee;
(2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	√	(2) dual position, as member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of committee, and other position (if any); and
(3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√	(3) working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
f) periode dan masa jabatan anggota Komite Audit;	√	f) period and terms of office of the member of Audit Committee;
g) pernyataan independensi Komite Audit;	√	g) statement of independence of the Audit Committee;
h) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut;	√	h) policies and implementation of the frequency of meeting of the Audit Committee and attendance of member of Audit Committee;

Keterangan	Halaman Page	Description
i) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	√	i) education and/or training during the year under review (if any); and
j) pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (*charter*) Komite Audit;	√	j) the activities of the Audit Committee in the year under review, in accordance with the Audit Committee Charter;
5) komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris, seperti Komite Nominasi dan Remunerasi, mencakup antara lain:	152-155	5) other committee of the Issuer or the Public Company formed to support the function and duty of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, such as Nomination and Remuneration Committee, containing:
a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	√	a) name and position in the Committee;
b) usia;	√	b) age;
c) kewarganegaraan;	√	c) citizenship;
d) riwayat pendidikan;	√	d) education background;
e) riwayat jabatan, meliputi informasi:		e) history of position, including:
(1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	√	(1) legal basis for the appointment as member of the committee;
(2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	√	(2) dual position, as member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of committee, and other position (if any); and
(3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√	(3) working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
f) periode dan masa jabatan anggota komite;	√	f) period and terms of office of the member of Audit Committee;
g) uraian tugas dan tanggung jawab;	√	g) description of duty and responsibility;
h) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) komite;	√	h) statement that the Committee has already have the Charter;
i) pernyataan independensi komite;		i) statement of independence of the Committee;
j) kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut;	√	j) policies and frequency of meeting of the committee, and attendance of each member of the committee in the said meetings;
k) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	√	k) education and/or training during the year under review (if any); and
l) uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku;	√	l) brief description on the activities of the committee;
6) Sekretaris Perusahaan, mencakup antara lain:	156	6) Corporate Secretary, including:
a) nama;	√	a) name;
b) domisili;	√	b) domicile;
c) riwayat jabatan, meliputi informasi:		c) history of position, including:
(1) dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan; dan	√	(1) legal basis for the appointment as Corporate Secretary; and
(2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√	(2) working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
d) riwayat pendidikan;	√	d) education background;
e) pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku; dan	√	e) education and/or training during the year under review; and
f) uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun buku;	√	f) brief description on the implementation of duties of the Corporate Secretary in the year under review;

Keterangan	Halaman Page	Description
7) Unit Audit Internal, mencakup antara lain:	160-161	7) Internal Audit Unit, among others including:
a) nama kepala Unit Audit Internal;	√	a) name of Head of Internal Audit Unit;
b) riwayat jabatan, meliputi informasi:		b) history of position, including:
(1) dasar hukum penunjukan sebagai kepala Unit Audit Internal; dan	√	(1) legal basis for the appointment as Head of Internal Audit Unit; and
(2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√	(2) working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
c) kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);	√	c) qualification or certification as internal auditor (if any);
d) pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku;	√	d) education and/or training during the year under review;
e) struktur dan kedudukan Unit Audit Internal;	√	e) structure and position of Internal Audit Unit;
f) uraian tugas dan tanggung jawab;	√	f) description of duties and responsibilities;
g) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) Unit Audit Internal; dan	√	g) statement that the Internal Audit Unit has already have Internal Audit Unit charter; and
h) uraian singkat pelaksanaan tugas Unit Audit Internal pada tahun buku;	√	h) brief description on the implementation of duty of Internal Audit Unit during the year under review;
8) uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	163	8) description on internal control system adopted by the Issuer or Public Company, at least covering:
a) pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; dan	√	a) financial and operational control, and compliance to the other prevailing rules; and
b) tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal;	√	b) review on the effectiveness of internal control systems;
9) sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	164-168	9) risk management system implemented by the company, at least includes:
a) gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	√	a) general description about the company's risk management system the Issuer or Public Company;
b) jenis risiko dan cara pengelolaannya; dan	√	b) types of risk and the management; and
c) tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	√	c) review the effectiveness of the risk management system applied by the Issuer or Public Company;
10) perkara penting yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), antara lain meliputi:	N.A.	10) important cases faced by the Issuer or Public Company, subsidiaries, current members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, among others include:
a) pokok perkara/gugatan;		a) substance of the case/claim;
b) status penyelesaian perkara/gugatan; dan		b) status of settlement of case/claim; and
c) pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;		c) potential impacts on the condition of the Issuer or Public Company;
11) informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada);	169	11) information about administrative sanctions imposed to Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, by the Capital Market Authority and other authorities during the last fiscal year (if any);
12) informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi:	170-173	12) information about codes of conduct of the Issuer or Public Company, includes:
a) pokok-pokok kode etik;	√	a) key points of the code of conduct;
b) bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan	√	b) socialization of the code of conduct and enforcement; and

Keterangan	Halaman Page	Description
c) pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	√	c) statement that the code of conduct is applicable for the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees of the Issuer of Public Company;
13) informasi mengenai budaya perusahaan (*corporate culture*) atau nilai-nilai perusahaan (jika ada);	174	13) information about corporate culture (if any) of the Issuer or Public Company;
14) uraian mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain mengenai:	175	14) description of employee or management stock ownership program of the Issuer or Public Company, among others contains:
a) jumlah saham dan/atau opsi;		a) number of share and/or option;
b) jangka waktu pelaksanaan;		b) period;
c) persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan		c) requirement for eligible employee and/or management; and
d) harga pelaksanaan;		d) exercised price;
15) uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain meliputi:	176-177	15) description of whistleblowing system at the Issuer or Public Company (if any), among others include:
a) cara penyampaian laporan pelanggaran;	√	a) mechanism for violation reporting;
b) perlindungan bagi pelapor;	√	b) protection for the whistleblower;
c) penanganan pengaduan;		c) handling of violation reports;
d) pihak yang mengelola pengaduan; dan	√	d) unit responsible for handling of violation report; and
e) hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit meliputi:	√	e) results from violation report handling, at least includes:
(1) jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan	√	(1) number of complaints received and processed during the fiscal year; and
(2) tindak lanjut pengaduan;	√	(2) follow up of complaints;
16) penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:	128-129	16) implementation of the Guidelines of Corporate Governance for Public Companies for Issuer issuing Equity-based Securities or Public Company, including:
a) pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau	√	a) statement regarding recommendation that have been implemented; and/or
b) penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada);	√	b) description of recommendation that have not been implemented, along with the reason and alternatives of implementation (if any);
h. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik	182-183	h. Social and Environmental Responsibility of the Issuer or Public Company
1) Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek:	√	1) Information on social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company that covers policies, types of programs, and cost, among others related to:
a) lingkungan hidup, antara lain:	√	a) environment, among others:
(1) penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang;	√	(1) the use of environmentally friendly and recyclable materials and energy;
(2) sistem pengolahan limbah Emiten atau Perusahaan Publik;	√	(2) the waste treatment systems of the Issuer or Public Company;
(3) mekanisme pengaduan masalah lingkungan; dan	√	(3) mechanism for filling complaint on environmental issues; and
(4) sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki;	√	(4) environmental certifications;
b) praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, antara lain:	√	b) employment practices, occupational health and safety, among others:

Keterangan	Halaman Page	Description
(1) kesetaraan gender dan kesempatan kerja;	√	(1) gender equality and equal work opportunity;
(2) sarana dan keselamatan kerja;	√	(2) work and safety facilities;
(3) tingkat perpindahan (turnover) karyawan;	√	(3) employee turnover;
(4) tingkat kecelakaan kerja;	√	(4) work incident rate;
(5) pendidikan dan/atau pelatihan;	√	(5) education and/or training;
(6) remunerasi; dan	√	(6) remuneration; and
(7) mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan;	√	(7) mechanism for filling complaint on employment issues;
c) pengembangan sosial dan kemasyarakatan, antara lain:	√	c) social and community development, among others:
(1) penggunaan tenaga kerja lokal;	√	(1) the use of local work force;
(2) pemberdayaan masyarakat sekitar Emiten atau Perusahaan Publik antara lain melalui penggunaan bahan baku yang dihasilkan oleh masyarakat atau pemberian edukasi;	√	(2) empowerment of local communities among others through the use of raw material produced by the community or by providing education;
(3) perbaikan sarana dan prasarana sosial;	√	(3) improvement of public social facilities and infrastructure;
(4) bentuk donasi lainnya; dan	√	(4) other form of donation; and
(5) komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di Emiten atau Perusahaan Publik, serta pelatihan mengenai anti korupsi (jika ada);	√	(5) dissemination of the policies and procedures of anti-corruption at the Issuers or Public Company, and training on anti-corruption (if any);
d) tanggung jawab barang dan/atau jasa, antara lain:	√	d) products and/or services responsibilities, among others:
(1) kesehatan dan keselamatan konsumen;	√	(1) consumers' health and safety;
(2) informasi barang dan/atau jasa; dan	√	(2) products and/or services information; and
(3) sarana, jumlah, dan penanggulangan atas pengaduan konsumen.	√	(3) facilities, number, and resolution of consumer complaint.
2) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyajikan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) pada laporan tersendiri seperti laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau laporan keberlanjutan (*sustainability report*), Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan untuk mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Laporan Tahunan; dan	N.A.	2) In the event that the Issuer or the Public Company imparts information on social and environmental responsibility as referred to in point 1) in separate report such corporate social and environmental responsibility report, or sustainability report, then the Issuers or the Public Company is excluded from disclosing information on social and environmental responsibility in Annual Report; and
3) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan;	N.A.	3) The said report in point 2) should be submitted to the Financial Service Authority along with the Annual Report;
i. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit	190-282	i. Audited Annual Financial Statement
Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntan. Laporan keuangan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan berkala Perusahaan Efek dalam hal Emiten merupakan Perusahaan Efek; dan	√	Financial Statements included in Annual Report should be prepared in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia and audited by an Accountant. The said financial statement should be included with statement of responsibility for financial report as stipulated in the legislations in the Capital Markets sector governing the responsibility of the Board of Directors on the financial report or the legislations in the Capital Markets sector governing the periodic reports of securities company in the event the Issuer is a Securities Company; and

Keterangan	Halaman Page	Description
j. Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan	302-303	j. Letter of Statement of the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the Responsibility for Annual Reporting
Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	√	Letter of statement of the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the responsibility for Annual Reporting should be prepared according to the format of letter of statement of member of Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the responsibility for Annual Reporting as attached in the Attachment, which is an integral part of this Circulation Letter of the Financial Services Authority.

SURAT PERNYATAAN
ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN TAHUNAN 2017 PT PP PRESISI TBK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT PP Presisi Tbk tahun 2017 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 1 Maret 2018

Dewan Komisaris | Board of Commissioner

Ir. Muhammad Toha Fauzi, MT

Komisaris Utama
President Commissioner

Ir. Nawang Sri Retno Kartiko, M. EngM

Komisaris
Commissioner

Ir. Ketut Darmawan

Komisaris Independen
Independent Commissioner

STATEMENTS OF RESPONSIBILITY ON 2017 ANNUAL REPORT OF PT PP PRESISI TBK BY MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

We, the undersigned, hereby declare that all information in the 2017 Annual Report of PT PP Presisi Tbk has been presented in their entirety, and that we assume full responsibility for the trustworthiness of the contents of this Annual Report.

Please be acknowledged accordingly.

Jakarta, 1 March 2018

Direksi | Board of Director

Ir. Iswanto Amperawan,

Direktur Utama
President Director

Benny Pidakso, SE, MM

Direktur
Director

Ir. Hasmin Ade Putra, MT

Direktur
Director

Ir. Arief Subyandono

Direktur Independen
Independent Director

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
INSTITUTIONS AND CAPITAL MARKET SUPPORTING PROFESSIONALS

AKUNTAN PUBLIK | PUBLIC ACCOUNTANT

KAP Hertanto, Grace, Karunawan

Palma Tower, 18th Floor Lot F&G
Jl. RA Kartini II-S Kav. 06
TB Simatupang
Jakarta 12310
Telp: 021 75930431-33
Fax: 021 75930434

KONSULTAN HUKUM | LEGAL CONSULTANT

Tumbuan And Partners

Jl. Gandaria Tengah III No.8
Kebayoran Baru
Jakarta 12130
Telp. +6221 722 7736, 722 7737, 720 8172, 720 2516
Fax. +6221 724 4579, 725 7403

NOTARIS | NOTARY

Fathiah Helmi, SH.

Gedung Graha Irama Lt. 6C
Jl. HR Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1-2
Jakarta Selatan
Telp.: 021 52907304
Fax.: 021 5261136

BIRO ADMINISTRASI EFEK | SECURITIES ADMINISTRATION BEREAU

PT Datindo Entrycom

Wisma Sudirman - Puri Datindo
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34
Jakarta
Telp: (021) 5709009
Fax: (021) 5709026